

341.03
RAT
v es



**KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA
DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA
PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN
PUTUSAN ARBITRASE**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

LULUK RATNANINGTYAS

NIM : B4A 099100

Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Pembimbing :

PROF. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

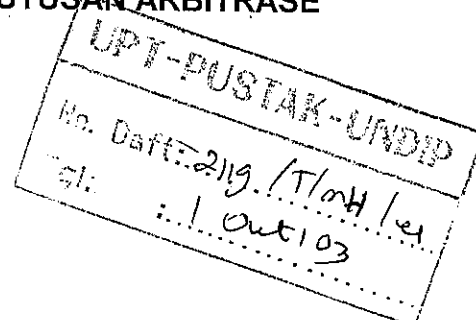
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002

UPT-PUSTAK-UNDIP

**KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN
ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE**



Disusun oleh :

LULUK RATNANINGTYAS
NIM : B4A099100

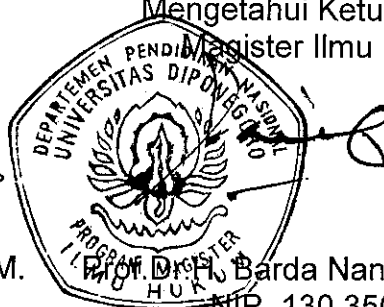
Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Januari 2003

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.
NIP. 130 608 480

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. H. Barda Nanawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Setelah mengalami beberapa kendala dalam penyusunan tesis ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : "Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara-perkara Yang Di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase Serta Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase".

Dalam memenuhi kehendak menuliskan hal-hal yang ingin disampaikan ke dalam tesis ini, harus diakui bahwa penulis bukanlah termasuk orang yang mudah menuliskan gagasan dan pikirannya sesuai kaidah penulisan ilmiah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini selesai karena bantuan dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini adalah tepat apabila penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M. yang dengan segala ketulusan hati bersedia membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan selama ini, sehingga sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Muladi, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang telah mendorong usaha-usaha peningkatan SDM di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

4. Bapak Prof. DR. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M., Wakil Sekretaris Kabinet, yang telah merintis kerjasama dalam rangka peningkatan SDM di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
5. Bapak Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. (waktu itu menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong penyelesaian program pendidikan Pasca Sarjana.
6. Para Pejabat dan Staf di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah bersedia memberikan data-data dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah arbitrase.
7. Suami tercinta, Suwandi Hidayat, S.E., dan anakku tersayang, Atika Ludya Rahmawati.
8. Semua sahabat dan rekan yang selama ini memberikan semangat.
9. Para Dosen dan Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Karyawan dan Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan yang memerlukan.

Semarang, September 2002

Penulis

Ringkasan

Penelitian ini mengkaji masalah kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase.

Bertitik tolak dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase, selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional serta untuk mengetahui konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, dan penelitian untuk menemukan hukum in concreto.

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang mengutamakan data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Sering para pihak yang sebelumnya telah menerima adanya klausula arbitrase, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara itu ke pengadilan. Demikian juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, bahkan mengajukan banding ke pengadilan, padahal putusan arbitrase menurut undang-undang bersifat final dan mengikat. Adapun upaya lain yang juga sering dilakukan adalah dengan cara

meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan. Terhadap masalah tersebut, pengadilan sering kali mempunyai kecenderungan dengan menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase meskipun undang-undang melarangnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada ketidakkonsistenan dari sikap pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan kompetensinya jika menemukan klausula pilihan yurisdiksi arbitrase, kadangkala langsung menyatakan dirinya tidak berwenang, tetapi kadang pula menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Hal ini disebabkan karena Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur bentuk klausula arbitrase yang bersifat umum saja dan tidak memberikan jawaban yuridiksi yang jelas terhadap klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas. Dalam Undang-undang Arbitrase ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Untuk itu disarankan adanya penyempurnaan dan penambahan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, khususnya mengenai bentuk-bentuk klausula arbitrase, kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, dan pembatalan putusan arbitrase internasional.

Abstract

This research analyses the court competency in Indonesia in reviewing and putting on trial lawsuits therein the arbitration agreement exist including to implement arbitration decision.

Based on problem formulation, therefore the research aim is to find out court competency implementation in Indonesia in reviewing and putting on trial lawsuits therein the arbitration agreement exist and then to find out court competency in Indonesia in respect of arbitration decision implementation, not only national arbitration decision, but also international arbitration and to find out the consistency of law and regulation application on court competency in Indonesia in reviewing and putting on trial arbitration lawsuits.

This legal research is a normative legal research covers positive law inventarization research to find law in concerto. This research emphasizes to the library study that put ahead of secondary data from regulations and court decision. The research result was analyzed by using normative-qualitative analyze method.

This research result shows that the settlement of dispute through arbitration still provoke some problems. In fact, the party accepted arbitration clause, in case the conflict arises, a party file said lawsuit to the court. In the implementation of arbitration decision, the lost party doesn't want to implement arbitration decision, even to appeal to the higher court. Whereas arbitration decision shall be binding and final. There is another endeavor to be done by the lost party such as by asking said arbitration cancellation to the court. The trial often judge itself has an authority to examine and to put on trial said arbitration lawsuit although forbidden by laws.

Base on the above explanation, we can make a conclusion there is trial inconsistency in Indonesia in implement its competence if find the clause of arbitration jurisdiction choise, sometime directly judge itself does not have any

authority sometimes judge have authority to review and to put on trial the arbitration lawsuit. This matter caused by Article 3 and 11 of the Law No. 30 Year 1999 only arrange general arbitration clause and does not give the answer of clear jurisdiction to the specify and limited arbitration clause. This Arbitration Act does not arrange clearly on the cancellation implementation of international arbitration decision. Therefore it is suggested to perfect and to add Law No. 30 Year 1999 especially about arbitration clause forms, court competence in reviewing and putting on trial arbitration lawsuit and the cancellation of international arbitration decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Sistematika Penulisan Tesis	27
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE	 30
A. Arbitrase Dan Ketentuan Yang Mengatur Masalah Kompetensi Pengadilan	 30
1. Pengertian Arbitrase	30

2. Sejarah Arbitrase di Indonesia	33
3. Jenis dan Macam Arbitrase	37
4. Alasan-alasan Para Pihak Memilih Arbitrase	45
5. Kompetensi Pengadilan Dalam Menangani Perkara Arbitrase Menurut UU No. 30/1999	55
B. Kompetensi Pengadilan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase	63
1. Klausula Arbitrase/Perjanjian Arbitrase	63
2. Cara Menyusun Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase yang Komprehensif	75
3. Beberapa Model Perumusan Klausula Arbitrase	93
4. Ketentuan Kompetensi Absolut Berkaitan Dengan Klausula Arbitrase	96
C. Kompetensi Pengadilan Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Putusan Arbitrase	105
1. Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	105
a. Pengertian Putusan Arbitrase Nasional	105
b. Ketentuan Undang-undang Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	107
c. Yang Berwenang Melakukan Eksekusi	109
d. Pendeponiran Putusan Arbitrase	111
d.1. Pengertian Deponir	111
d.2. Batas Tenggang Waktu Deponir	113
d.3. Yang Wajib Mendeponir	113
d.4. Pendeponiran di Kepaniteraan Pengadilan	114
d.5. Panitera Membuat Akta Deponir	115
d.6. Dokumen Yang Dideponir	116

d.7. Biaya Deponir Dibebankan Kepada Para Pihak	117
d.8. Pemberitahuan Deponir Kepada Para Pihak	118
e. Permohonan Untuk Mendapatkan Exequatur	119
e.1. Pengertian Exequatur	119
e.2. Pemberian Exequatur Bersifat Formal	122
e.3. Segi Materiil Yang Boleh Dinilai	151
e.4. Tata Cara Permintaan Exequatur	157
e.5. Pengabulan atau Penolakan Exequatur Tidak Dapat Dibanding atau Dikasasi	164
e.6. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase ..	165
2. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	166
a. Rules Mengenai Tata Cara Exequatur	166
b. Pengertian Putusan Arbitrase Asing	168
b.1. Putusan Dijatuhkan di Luar Wilayah Indonesia	169
b.2. Para Pihak Boleh Perorangan atau Badan Hukum	171
b.3. Putusan Boleh Diambil oleh Arbitrase Ad Hoc atau Institusional	171
c. Pendeponiran Putusan Arbitrase Internasional	172
d. Asas Exequatur Putusan Arbitrase Internasional	175
e. Tata Cara Pemberian Exequatur	186
e.1. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990	186
e.2. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999	194
f. Proses Pengambilan Keputusan Sebagai Alasan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ..	199

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE	202
A. Hasil Penelitian	202
1. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara-perkara yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase	202
2. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase	234
3. Konsistensitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Arbitrase	258
B. Pembahasan	279
1. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara-perkara yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase	279
2. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase	300
3. Konsistensitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Arbitrase	331
BAB IV. P E N U T U P	349
A. Kesimpulan	349
B. Saran	354
DAFTAR PUSTAKA	356
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Sikap Para Pihak Terhadap Perkara yang Mengandung Klausula Arbitrase yang Diajukan ke Pengadilan 203
2. Tabel 2. Pendaftaran Putusan Arbitrase BANI Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1991 s/d Agustus 2002 237
3. Tabel 3. Pendaftaran Putusan Arbitrase Asing / Internasional Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1991 s/d Agustus 2002 240
4. Tabel 4. Sikap Pengadilan Dalam Menangani Beberapa Perkara Yang Dalam Perjanjiannya Memuat Klausula Arbitrase 259

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad, 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad, 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227).¹⁾

Kita sama-sama mengetahui bahwa perkembangan dunia usaha nasional maupun internasional masih menunjukkan intensitasnya sekalipun di beberapa

¹⁾ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 164.

belahan bumi sedang dilanda berbagai krisis, utamanya krisis moneter.²⁾ Saat ini Indonesia sedang memainkan peranan penting dalam pentas era globalisasi dunia, berbagai kerjasama ekonomi telah memasuki lingkup internasional.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam bidang bisnis, penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi di dalam kehidupan masyarakat.³⁾

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya maka pada tanggal 12

²⁾ Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai *Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Sengketa*, tanggal 24 Maret 1999, halaman 2.

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-undang Penyelesaian Sengketa*, Seminar Sehari Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, Jakarta, September, 1999, halaman 1—2.

Agustus 1999 disahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hanya yang harus digarisbawahi, bahwa dalam hal ini pengertian alternatif bukan dimaksudkan untuk menggantikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tetapi dimaksudkan sebagai metode penyelesaian sengketa pilihan atau tambahan disamping pengadilan.⁴⁾

Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting jika kita memandang ke depan pada era perdagangan bebas AFTA tahun 2003 yang akan datang. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak⁵⁾ di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan alternatif penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.⁶⁾ Hal ini dapat dilihat dalam kontrak perdagangan, para pihak sering memasukkan klausula arbitrase yang mengatur tata cara penyelesaian persengketaan yang mungkin atau sedang terjadi sehubungan dengan kontrak perdagangan tersebut. Dunia maju selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia.⁷⁾ Bahkan pada saat ini sebagian besar pelaku bisnis di Indonesia sudah terbiasa mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase hampir dalam setiap kontrak bisnis mereka.⁸⁾

Arbitrase adalah intitusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa alasan mengapa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan adalah sebagai berikut :

-
- ⁴⁾ B. Mardjono Reksodiputro, *Legal Institution and Alternative Dispute Resolution*, Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000 yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dan Universitas Diponegoro, Semarang, 12—13 Agustus 1996, halaman 7.
 - ⁵⁾ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration in the US: Comentary and Materials*, Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Acara Arbitrase Internasional, halaman 1.
 - ⁶⁾ M. Husyein Umar, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia*, Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Padjadjaran, Bandung, 2—3 Desember, 1996, halaman 7.
 - ⁷⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, halaman 5.
 - ⁸⁾ Felik O. Soebagio dan Fatimah Jatim, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 82.

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.⁹⁾

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.¹⁰⁾

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena ongkos pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.¹¹⁾ Terlebih lagi untuk negara-negara yang sistem hukum dan praktek peradilanannya masih payah dan tidak berkembang, maka tidak mengherankan jika arbitrase menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat.¹²⁾

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan dari negara mereka.¹³⁾

Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat

⁹⁾ Johan P. Raissi, "Arbitrating in Thailand", *Hastings International & Comparative Law Review*, Vol 16 (1992) halaman 101—102, dalam Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Paramita, Jakarta, halaman 1.

¹⁰⁾ William F. Fox, JR, *International Commercial Agreement*, Den Haag, Kluwer Law International, 1992, halaman 238, dalam Erman Rajagukguk, *ibid* halaman 1.

¹¹⁾ Heather R. Evans, "The Non Arbitrability of Subject Matter Defence to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts", *International Law and Politics*, vol. 21 (1989), halaman 330, dalam Erman Rajagukguk, *ibid*, halaman 1.

¹²⁾ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 121.

¹³⁾ Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practise of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 1986, halaman 20, dalam Erman Rajagukguk, *ibid*, halaman 2.

melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁴⁾

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa, sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.¹⁵⁾ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui sidang yang terbuka, dapat disiarkan oleh mass media, yang mungkin bisa melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa :

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

¹⁴⁾ M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome : Thoughts on The "Essence" of International Arbitration", *Leiden Journal of International Law*, vol. 6, No. 2, August 1993, halaman 243, dalam Erman Rajagukguk, *ibid*, halaman 2.

¹⁵⁾ Stephen R. Bond, "How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)", *ICSID Review Foreign Investment Law Journal*, 1992, halaman 155, Michael Collins Q.C., "Privacy and Confidentiality in Arbitration Proceedings", *Texas International Law Journal*, vol. 30, 1995, halaman 126, dalam Erman Rajagukguk, *ibid*, halaman 3.

Selain memiliki kelebihan-kelebihan, arbitrase juga memiliki kelemahan sebagai cara penyelesaian sengketa, antara lain kualitasnya sangat tergantung pada kualitas para arbiternya ¹⁶⁾, dan tidak ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Akan tetapi kerahasiaan ini juga tidak dapat dipertahankan apabila putusan itu dilawan oleh pihak yang dikalahkan. Perlawanan dilakukan di pengadilan tempat dimintakannya pelaksanaan putusan. ¹⁷⁾

Dalam praktek walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, kerahasiaan yang diharapkan oleh para pihak tidak akan terwujud.

Di satu pihak memang penyelesaian arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, di lain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan.

Jadi sejauhmana klausula arbitrase atau akta kompromi itu mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak? Apabila salah satu pihak tidak berubah pendirian, maka sejauh itu pula kesepakatan itu mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak. Apabila salah satu pihak berubah pendirian dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (Pengadilan Negeri), maka kekuatan mengikat menjadi lenyap, kompetensi arbitrase menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

¹⁶⁾ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatimah Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum Dan Arbitrase Dagang Di Indonesia*, dalam *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 21.

¹⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Tanggapan Terhadap Rencana Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Rancangan Undang-Undang Dan Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kerjasama Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, Jakarta, September, 1999, halaman 3).

Dengan kata lain, klausula arbitrase yang disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian mereka itu tidak berlaku mutlak.¹⁸⁾

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan etika baik. Penyelesaian alternatif harus didasarkan pada prinsip solusi menang-menang (*win-win solution*), bukan menang-kalah (*win-lose*). Tidak adanya sikap tersebut dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam arbitrase misalnya, sering pula terjadi bahwa para pihak yang sebelumnya telah sepakat menerima adanya klausula arbitrase di dalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara itu ke pengadilan. Pengadilan sendiri seringkali tidak konsisten dalam menyikapi pilihan yurisdiksi arbitrase tersebut. Kadang-kadang pengadilan memutuskan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, tetapi kadang pula menolaknya.

Demikian juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, dan hal ini tentu saja membuat frustrasi bagi pihak yang menang. Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut pasti harus melibatkan pengadilan. Keterlibatan pengadilan tidak dapat dihindari, mengingat pemaksaan atas putusan arbitrase baik nasional maupun internasional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat selesai dalam waktu cepat, justru akan menjadi semakin berlarut-larut.

Bahkan sekarang ada kecenderungan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa setelah dinyatakan kalah oleh arbitrase, pihak yang dikalahkan seringkali mengajukan banding ke pengadilan, padahal kita ketahui bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan binding (*final dan mengikat*) para pihak. Bahkan dalam

¹⁸⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 408.

undang-undang sendiripun dinyatakan bahwa putusan arbitrase selain tidak dapat diajukan banding, juga tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

Bukan itu saja, upaya lain yang sering pula dilakukan oleh pihak yang dikalahkan karena merasa tidak puas dengan putusan arbitrase adalah dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan, dan pengadilan ada kecenderungan dalam beberapa kasus putusan arbitrase internasional, pengadilan menyatakan dirinya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pengadilan mempunyai peranan yang besar dalam mengembangkan arbitrase¹⁹⁾, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase ikut dipengaruhi pula oleh peran pengadilan, sebab pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada etikap baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.²⁰⁾ Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, semestinyalah kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan akhirnya membawa sengketanya ke

¹⁹⁾ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, halaman 4.

²⁰⁾ Erman Rajagukguk, *Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbitrase*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999—2000, halaman 11).

pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa akan berlarut-larut.

Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak bergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut, atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Sebab lain dari belum berkembangnya arbitrase di Indonesia adalah sikap pengadilan Indonesia baik terhadap arbitrase nasional maupun terhadap arbitrase internasional, meskipun telah ada yurisprudensi bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa dan mengadili sengketa yang mengandung klausula arbitrase, ternyata masih banyak pula pengadilan yang tidak memahami yurisprudensi itu dan tetap merasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada klausula arbitrase. Sikap pengadilan yang demikian bukan saja tidak mengembangkan arbitrase melainkan juga mempunyai implikasi menghambat terjadinya transaksi bisnis internasional ²¹⁾, karena tidak adanya kepastian hukum. Dengan adanya pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat lemah tersebut, hal ini secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi citra Indonesia di dunia internasional, terutama di mata para investor asing.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase?

²¹⁾ .Peter Mahmud Marzuki, op. cit, halaman 4.

2. Bagaimana pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, baik terhadap putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional?
3. Bagaimanakah konsistensitas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional.
3. Untuk mengetahui konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum

ekonomi terutama yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan dalam hubungannya dengan perkara-perkara yang memuat klausula arbitrase.

2. Praktis

- a. Menjadi bahan dan dasar penelitian hukum ekonomi lebih lanjut.
- b. Menjadi masukan untuk bahan pertimbangan bagi pelaku usaha di dalam proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin akan terjadi atau yang sudah terjadi.
- c. Dapat membantu pelaku usaha dan aparat hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase, terutama yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan, sehingga penyelesaian perkara tidak sampai berlarut-larut.

E. Metode Penelitian

(a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang mengatur masalah kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek yaitu dalam putusan-putusan pengadilan di bidang arbitrase. Jadi dalam penelitian yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui hukum *in concreto* diterapkan yang bertumpu pada data sekunder.

(b) Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase di Indonesia merupakan penelitian hukum normatif, yang meliputi :

- (1) Penelitian inventarisasi hukum positif
- (2) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- (3) Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.²²⁾

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada bidang arbitrase mengenai kompetensi pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan melaksanakan putusan arbitrase. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisa masalah yang telah diidentifikasi.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

1. Bahan hukum primer²³⁾ yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - (c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²²⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, halaman 14.

²³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, halaman 52.

- (e) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.
 - (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing oleh Mahkamah Agung RI.
 - (g) Konvensi New York 1958.
 - (h) Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah arbitrase, misalnya , RV, HIR dan lain-lain.
 - (i) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer ²⁴⁾ yang antara lain berupa :
- (a) Tulisan dalam bentuk buku atau pendapat pakar hukum di bidang arbitrase dalam kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase serta pelaksanaan dari putusan arbitrase.
 - (b) Makalah-makalah seminar tentang kompetensi pengadilan dalam kaitannya dengan arbitrase.
 - (c) Naskah tulisan di media masa, arsip dan data-data lain yang dipublikasikan.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:
- (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴⁾ Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 12.

(b) Ensiklopedia Indonesia

(c) Berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan arbitrase.²⁵⁾

Sebelum dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan diketemukannya hukum *in concreto*, maka kegiatan pendahuluan yang dilakukan adalah menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif berupa penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Sebab tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya mengandung kaidah hukum, ada pasal-pasal merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.²⁶⁾

Sedangkan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* adalah merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan,²⁷⁾ hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan pengadilan maupun dalam yurisprudensi.

(c) Metode Pengumpulan Data

(1) Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁸⁾

Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *loc cit*, halaman 52.

²⁶⁾ Roni Hanitya Sumitro, *op.cit*, halaman 15.

²⁷⁾ *Ibid*, halaman 22.

²⁸⁾ *Ibid* halaman 9.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase khususnya yang menyangkut masalah kompetensi pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan melaksanakan putusan arbitrase maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah arbitrase, termasuk juga putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan arbitrase.

Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian, bahan arsip, naskah tulisan di media masa dan makalah-makalah seminar. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier, seperti: kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya.

(2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri yang menangani perkara arbitrase, seperti pejabat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah, yaitu wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan, ²⁹⁾ sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

(d) Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang

²⁹⁾ Ibid. halaman 60—61.

ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas maka dilakukan pula analisis terhadap putusan-putusan pengadilan di bidang arbitrase.

F. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari konsep dasar masalah kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase, secara teori penegakan hukum dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu :

a. Faktor peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kompetensi pengadilan dalam menangani perkara arbitrase telah diatur secara jelas dan lengkap atau masih ada cacatnya.

b. Faktor non hukum

Putusan arbitrase bersifat final dan binding, tetapi dalam praktek banyak perkara arbitrase yang oleh para pihak diajukan banding maupun kasasi ke pengadilan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan oleh undang-undang.

Untuk memperkuat landasan teori tersebut, kiranya perlu diberikan beberapa teori dasar yang berkaitan dengan masalah arbitrase, khususnya mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase, adalah sebagai berikut :

1) Kompetensi Pengadilan

Hukum acara perdata mengenal 2 macam kewenangan, yaitu :

- a. wewenang mutlak
- b. wewenang relatif.³⁰⁾

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, misalnya Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili masalah perceraian bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk mengadili masalah sewa menyewa, hutang piutang, warisan dan lain-lain. Jadi wewenang mutlak menjawab pertanyaan, badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini.

Sedangkan wewenang relatif adalah menyangkut mengenai Pengadilan Negeri yang mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Jadi wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.

Mengenai kewenangan pengadilan dalam sengketa arbitrase merupakan hal baru yang menjadi ciri dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Arbitrase tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) juga dikatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

³⁰⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Bandung, Masdar Maju, 1989, halaman 8.

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Pengecualian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :³¹⁾

1. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 ayat 1)
2. Dalam suatu arbitrase ad hoc, apabila tidak ada kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuknya dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 ayat 2).
3. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul permohonan tentang pengangkatan arbiter tunggal, akan tetapi para pihak tidak berhasil menentukannya, maka atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat 3).
4. Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga (Pasal 15 ayat 4).

³¹⁾ Bernadette Waluyo, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999, halaman 37—38.

5. Gugatan hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 23 ayat 1).
6. Apabila gugatan hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan putusannya mengikat kedua belah pihak (Pasal 25 ayat 1).
7. Dalam hal para pihak tidak melakukan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 60 ayat 1).
8. Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 63).
9. Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan, menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 64 ayat 4).
10. Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 64 ayat 4).
11. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan tertulis kepada Pengadilan Negeri melalui panitera dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71).

Menurut Sudargo Gautama ³²⁾, ketegasan dalam Undang-undang arbitrase mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ini merupakan suatu kemajuan. Dengan adanya ketegasan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Arbitrase tersebut yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi hukum bilamana dalam suatu perjanjian tercantum suatu klausula arbitrase yang menunjuk penyelesaian sengketa antar pihak kepada suatu penyelesaian arbitrase yang putusannya final dan mengikat". Dengan demikian bisa dikatakan bahwa apabila terdapat suatu sengketa dan para pihak membawanya kepada Pengadilan Negeri biasa sehari-hari, maka Pengadilan Negeri harus secara jabatannya menyatakan suatu eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan. Pengadilan atas inisiatif sendiri pun karena jabatannya dapat menyatakan tidak berwenang, walaupun para pihak tidak mengajukan suatu tangkisan bahwa Pengadilan Negeri biasa tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Arbitrase merupakan alternatif dari pengadilan, akan tetapi bantuan pengadilan agar institusi arbitrase bisa efektif amat menentukan. Hal ini diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional sejak lama, yaitu mulai dari Protocol Geneva 1923 sampai dengan Konvensi New York 1958. Selanjutnya pengadilan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Bukan lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut untuk memenuhinya. Konvensi New York 1958 mencantumkan peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

³²⁾ Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999, 2000*, halaman 15.

Jadi pada dasarnya pengadilan memang berperanan besar dalam mengembangkan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Begitu juga pengadilan berperan besar menentukan proses arbitrase itu berhasil atau tidak, sehubungan dengan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase. Pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Pengadilan juga berperan bila proses dan putusan arbitrase tidak berdasarkan bukti-bukti, melanggar kesepakatan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ³³⁾. Dengan peranan besar yang ada pada pengadilan tersebut diharapkan arbitrase bisa berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan itu sendiri.

2. Perjanjian Arbitrase dan Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian dagang adalah merupakan suatu hubungan hukum yang diadakan oleh dua orang atau lebih atas dasar salah satu pihak berhak atas pemenuhan suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Hubungan hukum timbal balik tersebut dibuat secara tertulis. Seandainya di dalam perjanjian ini terdapat pihak yang berbeda kewarganegaraannya, perjanjian tersebut dapat dikategorikan perjanjian dagang internasional.

Di dalam pembuatan perjanjian dagang tersebut, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diterapkan, antara lain :

- a. prinsip konsensual, ³⁴⁾
- b. prinsip kebebasan berkontrak, dan
- c. prinsip pacta sunt servanda.

³³⁾ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Op. cit, halaman 14.

³⁴⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 yang lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi : "...*segala persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,*"³⁵⁾ dan pihak-pihak yang telah mengikat perjanjian itu tidak dapat membatalkan ataupun mengakhiri secara sepihak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak ataupun berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata). Ini berarti, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas telah diperjanjikan, tetapi juga terikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari perjanjian diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan etikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Melaksanakan perjanjian dengan etikad baik memberi kepastian hukum bahwa isi perjanjian yang telah disepakati akan terpenuhi. Ini berarti pula bahwa pihak kreditur juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian, meskipun etikad baik itu tidak tegas-tegas diperjanjikan. Namun, menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menambah isi perjanjian yang disepakati bersama adalah dimungkinkan. Kondisi seperti diuraikan di atas, kiranya juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Wery bahwa etikad baik dapat menambah isi perjanjian.

Melaksanakan perjanjian dengan etikad baik berarti pihak-pihak bersepakat untuk melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepatutan dan kesusilaan. Melaksanakan yang lebih mendalam lagi dari pengertian tersebut ialah bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian akan mengindahkan/ memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan yang

³⁵⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

lazim terjadi di dalam melaksanakan perjanjian/kontrak dagang, yaitu terletak pada cara melaksanakannya.

Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan asas kebebasan untuk membuat perjanjian, maka para pihak yang akan mengadakan perjanjian bebas untuk menentukan ataupun mempergunakan peraturan perundangan/hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Dalam praktek pembuatan perjanjian umumnya para pihak menghendaki perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini bagi pihak-pihak yang membuatnya merupakan undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian itu dan tidak dibenarkan untuk membatalkan/mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.³⁶⁾

Jadi dalam melaksanakan asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak ini tetap ada batasnya. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan bagi sahnya perjanjian 4 (empat) kondisi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.³⁷⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa harus secara tertulis, para pihak harus jelas menetapkan apakah penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada majelis arbitrase yang

³⁶⁾ Noegroho Amien Soetiarto, *Arbitrase Dagang Internasional dan Praktiknya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 69—71.

³⁷⁾ ibid

akan dibentuk setelah sengketa timbul (*ad hoc arbitration*) atau menyerahkan kepada suatu Badan Arbitrase yang telah ada (*Institusional Arbitration*).

Jika para pihak sepakat dengan *ad hoc arbitration*, klausula harus menentukan dengan tegas jumlah arbiter dan dengan cara bagaimana mereka ditunjuk atau diangkat. Suatu klausula arbitrase juga harus menentukan dengan jelas mengenai kapan dan berapa lama jangka waktu penunjukan arbiter tersebut. Selain itu jika kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, di Indonesia para pihak biasanya meminta Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk arbiter ketiga yang sekaligus akan menjadi Ketua Majelis Arbitrase.

Konvensi New York 1958 juga mengakui kehendak dari para pihak dalam arti kebebasan para pihak untuk memilih sendiri yurisdiksi atau forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang mungkin akan atau telah timbul antara para pihak.

Arbitrase sebagai metoda penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase, baik yang berbentuk *pactum de compromitendo* (klausula arbitrase) maupun *acta compromis* (akta kompromi).

Dalam klausula arbitrase dapat memuat jenis arbitrase (*arbitrase ad hoc* atau *arbitrase institusional*), prosedur dan peraturan pemeriksaan sengketa, pengangkatan arbiter, jumlah arbiter, batas waktu pemeriksaan sengketa, tempat pengucapan putusan arbitrase, sifat putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan etika baik. Namun kebebasan pembuatan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang dan kepatutan. Kebebasan para pihak untuk memilih sendiri yurisdiksi atau forum arbitrase sebagai cara

penyelesaian sengketa yang mungkin akan atau telah timbul antara mereka ini merupakan asas yang esensial dalam arbitrase. Perjanjian bahwa para pihak telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan mengesampingkan forum peradilan umum harus dalam bentuk tertulis. Hal ini perlu untuk mengingatkan dan memberikan kepastian hukum ³⁸⁾ bagi para pihak tentang pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah mereka sepakati.

Hal ini diatur dalam Pasal II (1) Konvensi New York 1958 yang menentukan sebagai berikut : "Setiap negara peserta pada konvensi ini akan mengakui perjanjian tertulis dimana para pihak telah setuju untuk menyerahkan kepada arbitrase semua atau setiap perbedaan paham yang timbul atau yang mungkin timbul antara mereka mengenai suatu hubungan hukum, baik yang berdasarkan kontrak maupun yang tidak, mengenai suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan arbitrase."

Dalam kontrak dagang luar negeri antara pihak asing dengan warganegara Indonesia, pihak asing sering berusaha untuk melepaskan diri dari yurisdiksi Indonesia karena merasa tidak mengenal forum setempat

yang berlainan adanya dengan sistem yurisdiksi negaranya sendiri. Selanjutnya karena ada keragu-raguan bahwa forum setempat akan bersikap subyektif dalam memeriksa perkara yang melibatkan unsur asing.

Mudah dimengerti bahwa negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal berdasarkan liberalisme menerima adanya kebebasan individu untuk menentukan sendiri yurisdiksi mana yang dikehendaki untuk perjanjian mereka. Kebebasan yang dilimpahkan kepada perseorangan sebagai individu untuk menentukan sendiri yurisdiksi yang ia pilih dan karenanya menjadi berlaku bagi kontrak yang ia buat, adalah

³⁸⁾ Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 20.

sesuai dengan paham liberalisme yang hendak mengakui hak-hak perseorangan ini sebanyak mungkin dan mengedepankannya sebagai cita-cita bahwa negara sesedikit turut campur dalam kehidupan ekonomi dan kebebasan perseorangan.³⁹⁾

Ternyata Konvensi New York 1958 dalam Pasal II (2) telah memperluas asas kebebasan berkontrak yang dapat berupa :

- (1) klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau
- (2) perjanjian arbitrase yang ditandatangani para pihak dengan menambah bahwa asas kebebasan berkontrak juga dapat terkandung dalam
- (3) surat menyurat atau saling mengirimkan telegram.

Hal ini adalah sesuai dengan tujuan dari Konvensi New York 1958 yaitu terutama untuk memperluas pengakuan dan pelaksanaan perjanjian arbitrase di bidang perdagangan internasional.

3. Peluang Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Selanjutnya arbitrase hanya bisa mempunyai peluang keberhasilan jika :⁴⁰⁾

1. Ada keinginan yang sama dari semua pihak untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat.
2. Ada keinginan yang sama untuk menyelesaikan sengketa secara terhormat dan tertutup.
3. Ada kesediaan menerima pertimbangan kewajaran, kepatutan dan kebijaksanaan sebagai pelengkap dari dasar hukum.
4. Ada kesediaan untuk menerima keputusan yang mengikat.

³⁹⁾ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Kelima, Alumni Bandung, 1992, halaman 3.

⁴⁰⁾ Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, 1996, halaman 16—17.

Untuk itu menurut Hamid Shahab, agar peluang tersebut di atas dapat berhasil maka :

1. Harus ada pernyataan kesediaan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima sarana arbitrase.
2. Harus ada kejelasan dan kesepakatan status masalah yang dipersengketakan.
3. Harus ada kesepakatan dasar-dasar bekerjanya arbitrase, apakah atas dasar hukum saja atau atas dasar asas obyektifitas atau asas kebiasaan, kewajaran dan kepatutan atau ada tambahan dasar-dasar lain yang disepakati.
4. Harus ada kesepakatan peraturan prosedur pembentukan dan prosedur kerja Badan Arbitrase.

Selanjutnya peran arbiter juga sangat menentukan, peluang mereka atas keberhasilan banyak tergantung pada :

1. Tingkat integritas dan wibawa yang dimiliki.
2. Tingkat penguasaan materi persoalan.
3. Tingkat kemampuan memilah-milah materi persoalan yang ruwet menjadi rangkaian masalah-masalah yang masing-masing memiliki sifat-sifatnya yang spesifik.
4. Tingkat pengertian batasan-batasan fungsi yang diembannya dan tahu cara-cara/prosedur yang harus dilaluinya.
5. Ada atau tidak adanya conflict of interest.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab. Untuk mempermudah pemahaman terhadap tesis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum isi tesis, yaitu : latar belakang penulisan tesis, perumusan masalah yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase serta dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, juga dibahas mengenai tujuan penulisan tesis, kontribusi penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran yang memberikan arahan pada penyusunan tesis serta sistematika penulisan tesis.
- BAB II** Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka terhadap substansi dari kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase, yang meliputi pengertian, sejarah, jenis serta macam arbitrase. Disamping itu juga diuraikan mengenai alasan-alasan para pihak memilih arbitrase, kompetensi pengadilan menurut Rv dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, serta diuraikan pula tentang perjanjian arbitrase/ klausula arbitrase, cara menyusun klausula arbitrase yang komprehensif, beberapa model perumusan klausula arbitrase, dan kompetensi pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrase di Indonesia.
- BAB III** Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dari hasil penelitian, yang meliputi kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase, kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, dan konsistensitas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

BAB IV Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasannya atas materi tesis sesuai dengan permasalahan yang telah dituangkan di dalam BAB I, juga saran bagi perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan masalah kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE

A. Arbitrase dan Ketentuan yang Mengatur Masalah Kompetensi Pengadilan

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu model atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah mendapatkan pengakuan secara yuridis sejak tahun 1847 ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengundang Rv Buku III Bab I pasal 615 sampai dengan pasal 651.

Perkataan arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata "arbitrare" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. R. Subekti memberikan pengertian arbitrase ini sebagai berikut :

"Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut."⁴¹⁾

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury,

"arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang diputus oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang

⁴¹⁾ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1981, halaman 1.

netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat." ⁴²⁾

Selanjutnya menurut Andrew I. Sriro,

"arbitration is defined as a method for the resolution of a civil dispute which, based upon a written agreement between the parties involved in the dispute, is adjudicated outside of the court system." ⁴³⁾

Adapun menurut Rv,

"arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta etika baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (-hakim) yang mereka tunjuk dan diangkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim (-hakim) tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Hakim-hakim tersebut dikenal dengan nama wasit."

Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrase tidak lain merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan yang mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitrase ini. Dalam hal ini para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, yang berarti pula adanya kewenangan dari para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan,

"arbitration (arbitrase, perwasitan) adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang

⁴²⁾ Joni Emirzon, *Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman 96.

⁴³⁾ Andrew I. Sriro, *Sriro's Reference On Indonesian Arbitration Law*, Sriro's Legal Education Series, Jakarta, 2000, halaman 3.

bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat."⁴⁴⁾

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa,

"arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected person in some dispute matter, instead of carrying it to estabes tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the dilay, the expense and taxation of ordinary litigation."⁴⁵⁾

Sedangkan menurut Huala Adolf,

"arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat."⁴⁶⁾ Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak."

Adapun menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

"arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, ada 3 (tiga) hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis

⁴⁴⁾ Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Edisi Pertama, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997, halaman 8.

⁴⁵⁾ Priyatna Abdurrasyid, *Mengenal BANI dan Badan-badan Arbitrase Internasional Serta Penyelesaian Sengketa Transaksi Secara Elektronik*, Seminar E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa, di Hotel Mulia, Senayan Jakarta, 3 Oktober 2000, halaman 2.

⁴⁶⁾ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 205.

3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbitrator) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

2. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis sebenarnya sudah lama dikenal dalam praktek perdagangan maupun penanaman modal di Indonesia. Di Indonesia sendiri, arbitrase sebenarnya juga mempunyai sejarah yang panjang.

Ketentuan mengenai arbitrase selain diatur dalam Rv, kita dapati juga adanya beberapa ketentuan lain yang juga mengatur tentang arbitrase, yaitu sebagaimana diatur dalam HIR, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Hukum Adat, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.⁴⁷⁾

a. Ketentuan Arbitrase dalam Rv

Dahulunya ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat di dalam KUHPerdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang terdapat dalam S. 1847—52 juncto S. 1849—63. Rv ini sebenarnya merupakan KUHP yang berlaku untuk golongan Eropa. Sedangkan KUHP

⁴⁷⁾ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 27—31.

yang berlaku bagi golongan Bumi Putera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBG (untuk luar Jawa dan Madura).

Akan tetapi berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG maka ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumi Putera. Pasal-pasal dari Rv yang mengatur tentang arbitrase adalah mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang meliputi lima bagian sebagai berikut :

- (1) Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.
- (2) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase.
- (3) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase.
- (4) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase.
- (5) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

Namun demikian, dengan berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, maka keseluruhan ketentuan arbitrase dalam Rv dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Selengkapnya Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Pada saat undang-undang ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtglement Buitengewesten*, Staatblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku"

b. Ketentuan Arbitrase dalam HIR

Sebenarnya KUHAP yang berlaku untuk golongan bumiputera baik HIR maupun RBG, tidak mengatur tentang arbitrase. Hanya saja lewat Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dalam Rv dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumiputera.

Selengkapnya Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menyatakan bahwa bilamana orang Bumiputera dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa.

Dengan adanya pasal tersebut, maka sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi golongan bumiputera untuk dapat menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara prosedural, sementara secara material dasar hukum berlakunya pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, vide Pasal 81 seperti sebelumnya telah disebutkan.

c. Ketentuan Arbitrase dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang arbitrase. Bahkan dalam Pasal 10

dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

- (a) Peradilan Umum
- (b) Peradilan Agama
- (c) Peradilan Militer
- (d) Peradilan Tata Usaha Negara

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Dari pasal-pasal seperti tersebut di atas, seolah-olah undang-undang tidak memberi tempat untuk sistem penyelesaian melalui arbitrase ini. Akan tetapi kesan tersebut adalah tidak benar sama sekali. Hal ini disebabkan dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan.

d. Ketentuan Arbitrase dalam Undang-undang Mahkamah Agung

Eksistensi dari lembaga arbitrase diakui juga oleh Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950. Pengaturan kepada institusi arbitrase ini, dengan mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai lembaga banding bagi suatu putusan arbitrase, terdapat dalam Pasal 15 juncto Pasal 108 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tersebut.

Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Mahkamah Agung yang baru yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tidak berlaku lagi. Dengan demikian tidak terdapat lagi ketentuan yang mengatur arbitrase tersebut.

e. Ketentuan Arbitrase dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat juga dikenal adanya badan-badan pemutus adat yang dalam bekerjanya menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Badan-badan pemutus secara adat ini juga menggunakan prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa alternatif yang modern. Contoh dari badan pemutus adat misalnya yang ada dalam masyarakat Aceh atau Kerapatan Adat Negeri di Minangkabau.

f. Ketentuan Arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat, dan sekaligus telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian di bidang perdagangan nasional maupun internasional.

3. Jenis dan Macam Arbitrase

Dari jenisnya, di Indonesia dikenal adanya dua macam lembaga arbitrase, yaitu:

1. Arbitrase institusional
2. Arbitrase Ad Hoc.⁴⁸⁾

Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

⁴⁸⁾ Joni Emirzon, op.cit, halaman 102.

Arbitrase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut "permanent arbitral body", sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958.⁴⁹⁾ Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁵⁰⁾

Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan.

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah diputus. Sebaliknya, arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaanya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Dalam pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan.⁵¹⁾ Jadi arbitrase institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbiter, yaitu :

- a. **Arbitrase institusional yang bersifat nasional**, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya :
 - *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ;

⁴⁹⁾ ibid.

⁵⁰⁾ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 151.

⁵¹⁾ Suyud Margono, op.cit, halaman 124—125.

- *Nederlands Arbitrage Institut* ;
- *The Japan Commercial Arbitration Association* ;
- *The American Arbitration Association* ;
- *The British Institute of Arbitrators*.

b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaannya dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya

- *The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC)* di Paris ;
- *The International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*;
- *Uncitral Arbitration Rules (UAR)*

c. Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC).⁵²⁾

Keberadaan dari arbitrase institusional ini juga diakui dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 seperti terlihat dalam Pasal 34. Dalam ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

⁵²⁾ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 53—54.

Sedangkan yang dimaksud dengan arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.⁵³⁾

Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. Karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cakap/kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting.

Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional.⁵⁴⁾

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya.

Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausul *pactum de compromittendo* atau akta kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan

⁵³⁾ op.cit, halaman 53.

⁵⁴⁾ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatimah Jatim, op.cit, halaman 25—26.

menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan.

Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Karena arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase, dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.⁵⁵⁾ Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter antara lain :

- a. cakap melakukan tindakan hukum ;
- b. berumur paling rendah 35 tahun ;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa ;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase ; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang pekerjaan paling sedikit selama 15 tahun.

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc harus memenuhi persyaratan penunjukan dan pengangkatan arbiter seperti di atas. Yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah dimana para pihak atau pengadilan menunjuk arbiter-arbiter yang memiliki persyaratan tersebut, di lembaga arbitrase institusional atau lembaga penyedia jasa arbiter lainnya. Hal ini yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Selanjutnya dengan melihat berbagai kriteria, maka terdapat berbagai macam arbitrase, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

⁵⁵⁾ Suyud Margono, op.cit, halaman 123.

a. Klasifikasi Arbitrase Menurut Kekuatan Keputusannya

Arbitrase dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu "binding" dan "non binding". Binding Arbitration pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir.

Sedangkan Non Binding Arbitration yang sering disebut juga *Advisory Arbitration* ini mirip dengan prosedur '*Fact Finding*'. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan, sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.

b. Klasifikasi Arbitrase Menurut Ruang Lingkup Tugas

Dalam hal ini arbitrase dapat dibagi menjadi "Interest Arbitration" dan "Rights Arbitration". Terhadap Interest Arbitration, bukannya hak yang dipersengketakan yang mesti diputus, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dari kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.

c. Klasifikasi Arbitrase Menurut Inisiatif Untuk Berarbitrase

Umumnya beracara dengan memakai arbitrase dipilih atas inisiatif para pihak yang bersengketa melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa yang biasa disebut "Voluntary Arbitration".

Namun demikian, dalam bidang-bidang tertentu semacam arbitrase malahan diwajibkan oleh undang-undang (Compulsory Arbitration). Terkadang ini disebut juga quasi pengadilan, seperti P4D dan P4P dalam bidang perburuhan.

Dalam bidang gugatan lingkungan, menurut penjelasan resmi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, tim arbitrase terdiri dari pihak penggugat, tergugat dan penasehat, dan juga dapat

diangkat tenaga ahli menjadi anggota. Dapat dilihat bahwa tim arbitration tersebut bersifat "compulsory". Hanya saja, karena peraturan pelaksana seperti yang dimaksud oleh Pasal 20 belum ada, maka seharusnya ketentuan tersebut mesti ditafsirkan sebagai "voluntary". Akan tetapi, di pengadilan masih terdapat split pendapat, di satu pihak (kebanyakannya) pengadilan menerima gugatan sungguhpun belum diadili oleh tim arbitrase, seperti kasus Walhi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan warga Cibeureum di Pengadilan Negeri Bandung dan sebagainya. Namun di pihak lain, ada juga pengadilan yang enggan menerima gugatan sebelum diputus oleh badan arbitrase, kasus seperti PT. LLU di Pengadilan Negeri Medan.

d. Klasifikasi Arbitrase Menurut Tempat Persetujuan Arbitrase

Apabila oleh para pihak dibuat suatu persetujuan tersendiri yang khusus untuk itu, oleh Rv disebut "akta compromis" (Pasal 615). Namun yang lebih sering dan sudah menjadi common practice terutama dalam kontrak-kontrak arbitrase ini akan tercipta bingkai-bingkai di mana sebuah harapan digantungkan, yang umumnya merupakan harapan dari mereka yang selama ini melakukan kritik terhadap badan-badan pengadilan yang konvensional. Badan-badan pengadilan tersebut di Indonesia lebih banyak memutuskan dengan bernalar naif ketimbang resonable. Oleh karena itu dibentuklah arbitrase secara insidental dan khusus untuk menangani perkara yang bersangkutan. Ini ada yang ditunjuk oleh para pihak bersengketa dan ada yang ditunjuk oleh hakim. Setelah keputusan diberikan, maka tugas mereka selesai, dan mereka bubar. Akan tetapi ada pula arbitrase yang sudah bersifat permanen yang disebut juga arbitrase institusional.

e. Klasifikasi Arbitrase Menurut Jenis Obyek Sengketa

Jika dilihat jenis obyek yang dipersengketakan dan arbitrase diminta untuk menengahnya, maka suatu arbitrase dapat dibagi ke dalam :

(i) Arbitrase Kualitas (*Quality Arbitration*)

Yang dimaksud dengan "Arbitrase Kualitas" adalah suatu arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli memilah-milah fakta tersebut serta menginteprestasikan dan menganalisisnya.

(ii) Arbitrase Teknis (*Technical Arbitration*)

Yang dimaksud dengan "Arbitrase Teknis" adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak.

(iii) Arbitrase Campuran (*Mixed Arbitration*)

Sedangkan yang dimaksud dengan "Arbitrase Campuran" adalah suatu campuran antara arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan dengan hukum.

f. Arbitrase Khusus

Banyak arbitrase khusus diperlukan baik secara internasional, regional ataupun yang bersifat nasional. Yang bersifat nasional, arbitrase khusus yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

(i) Arbitrase khusus Muammalat, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa terhadap bank yang berdasarkan kepada Syariat Islam. Badan arbitrase ini di Indonesia sudah terbentuk.

(ii) Arbitrase khusus di bidang perdagangan (*Commercial Arbitration*).

(iii) Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan (*Collective Bargaining Arbitration*).

(iv) Arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.

Sementara itu di beberapa negara asing, telah ada beberapa jenis arbitrase khusus antara lain sebagai berikut :

(i) *Commodity Trade Arbitration*

- (ii) *Maritime Arbitration*
- (iii) *Construction Industry Arbitration*
- (iv) *Rent Review & Property Valuation Arbitration*
- (v) *Agricultural Property Arbitration*
- (vi) *Arbitration In Consumer Disputes*
- (vii) *Small Claims Arbitration In the Country Court District*
- (viii) *Internasional Commercial Arbitration*⁵⁶⁾

4. Alasan-alasan Para Pihak Memilih Arbitrase

Ada macam-macam alasan mengapa para pihak memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Alasan - alasan ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

Pertama, para pihak memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih baik dari arbitrase. Kritik yang dilontarkan kepada lembaga pengadilan adalah bahwa proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap tidak efektif dan efisien.⁵⁷⁾ Kritik umum yang dilontarkan kepada pengadilan ini yang terpenting diantaranya, adalah :

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. Proses pengadilan pada umumnya menuntut waktu yang cukup lama. Pihak yang kuat kebenarannya dapat sangat dirugikan oleh waktu proses yang berkepanjangan.⁵⁸⁾ Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.⁵⁹⁾

⁵⁶⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 61—65.

⁵⁷⁾ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 151.

⁵⁸⁾ Hamid Shahab, op.cit, halaman 20—21.

⁵⁹⁾ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Bandung, 1990, halaman 18.

2. Biaya perkara mahal, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.⁶⁰⁾ Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat karena merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga kepastian hukum mengenai pokok sengketa cepat diperoleh pihak-pihak.⁶¹⁾ Memang sejak semula arbitrase sudah membatasi acara pemeriksaan hanya sampai pada satu tingkat saja. Dengan membatasi tingkat pemeriksaan tersebut berarti jumlah biaya juga dapat dikurangi termasuk menghindari beracara terlalu formal seperti lazim di Pengadilan. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.⁶²⁾
3. Peradilan pada umumnya tidak responsif, karena peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum. Sering pengadilan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah diantara para pihak yang bersengketa tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan. Selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi justru sebaliknya yang timbul adalah dendam dan kebencian.⁶³⁾ Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁴⁾
5. Kemampuan para hakim bersifat jeneralis. Pada masa belakangan ini, terutama pada era IPTEK, muncul pendapat umum melihat sosok hakim hanya

⁶⁰⁾ Erman Rajagukguk, *op.cit*, halaman 1.

⁶¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, halaman 411.

⁶²⁾ Priyatna Abdurasyid, *op.cit*, halaman 4.

⁶³⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, Bandung, 1997, halaman 156—158.

⁶⁴⁾ Erman Rajagukguk, *op.cit*, halaman 2.

manusia jeneralis. Pada sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi telah membawa berbagai permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian berdasar keahlian yang profesional. Sedangkan para hakim sebagai manusia jeneralis, paling mampu memiliki pengetahuan yang bersifat luar saja. Oleh karena itu, mana mungkin diharapkan penyelesaian yang baik dan obyektif dari para hakim. Kita ambil contoh sengketa konstruksi pembangunan gedung. Sejauh mana pengetahuan dan kemampuan hakim memahami permasalahan yang secara mendasar dan obyektif? Bukankan lebih tepat penanganan sengketanya diserahkan kepada seorang insinyur profesional? Oleh karena para hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sekali yang timbul dari permasalahan high-tech, sering putusan yang dijatuhkan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.⁶⁵⁾

Menghindari publisitas merupakan hal yang tidak bisa dilakukan bila beracara di pengadilan, akan tetapi arbitrase memungkinkannya. Dengan sifatnya yang tertutup para pihak yang bersengketa merasa lebih aman, karena sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini penting bagi para pihak untuk menghindari publikasi yang merugikan, seperti kehilangan reputasi dapat menjadi pemicu bagi transaksi-transaksi lainnya yang terungkapnya rahasia-rahasia bisnis dan lain-lain.⁶⁶⁾

Dapat dimengerti bahwa sering sangat merugikan bagi suatu perusahaan, bila masyarakat banyak mengetahui bahwa ia mempunyai utang yang belum dibayar hingga ia dituntut di muka pengadilan karena utangnya itu.

Kalau sidang pengadilan, menurut ketentuan undang-undang harus diadakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, begitu pula putusannya dibacakan dalam

⁶⁵⁾ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 158—159.

⁶⁶⁾ H.M. Tahir Azhary, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 162.

sidang terbuka. Sebagaimana diketahui, berlainan dengan putusan badan pengadilan, putusan arbitrase juga tidak pernah dipublikasikan dalam majalah.⁶⁷⁾ Publikasi dari putusan arbitrase dengan nama para pihak tidak diperbolehkan, kecuali dengan persetujuan para pihak yang akan tetapi sering tidak akan diberikan. Di negeri Belanda dalam hal publikasi tanpa nama masih dapat menunjukkan para pihak, putusan arbitrase demikian tidak akan dipublikasi. Keadaan berbeda dengan di Inggris, sesungguhnya tidak ada gunanya untuk mempublikasikan putusan arbitrase, sepanjang putusan tersebut tidak disertai pertimbangan.⁶⁸⁾

Kedua, para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena dalam dunia perdagangan banyak timbul sengketa mengenai hal-hal yang hanya dapat diputus oleh seorang yang ahli atau kompeten. Pengadilan dalam hal demikian sangat tergantung kepada pembuktian oleh keterangan saksi ahli. Resiko atas kemungkinan kesalahan persepsi di sini relatif lebih besar.⁶⁹⁾

Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan. Mereka dapat mengangkat/menunjuk seorang arbiter atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan dalam praktek persoalan yang dipersengketakan. Hal mana tidak dapat dijamin pada sistem badan peradilan umum.

⁶⁷⁾ R. Subekti, *op.cit*, halaman 6.

⁶⁸⁾ Tineka Louise Tuegeh Longdong, *op.cit*, halaman 37—38.

⁶⁹⁾ Hamid Shahab, *op.cit*, halaman 20.

Ciri penting lainnya dari arbitrase yang membedakannya dengan pemeriksaan melalui pengadilan adalah kepekaan/kearifan (sensibilitas) dari arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya. Kendatipun para hakim dan arbiter menerapkan ketentuan hukum, untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa yang dihadapinya, maka dalam hal-hal yang relevan, arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Sebaliknya, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bersifat publik, seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditanganinya, pertimbangan hakim seringkali mengutamakan kepentingan umum, sedangkan kepentingan privat/pribadi merupakan pertimbangan kedua. Arbiter pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai ini secara sebaliknya. Bagi para pihak yang bersengketa, hal ini berarti bahwa dibandingkan dengan hakim, arbiter lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai bersifat privat daripada bersifat publik/umum.⁷⁰⁾

Terhadap arbitrase tidak berlaku prinsip keharusan adanya perwakilan dalam proses itu sendiri, namun para arbiter itu sendiri yang bertindak dalam proses tersebut. Kepada para arbiter dapat diberikan perintah untuk memutuskan atau memberikan keputusan sebagai orang-orang yang baik menurut keadilan; dengan demikian mereka tidak terikat untuk memberi keputusan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁷¹⁾

Orang-orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak menjadi arbiter adalah ahli (pakar) dan berpengalaman dalam hal yang menjadi pokok sengketa. Dengan

⁷⁰⁾ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatimah Jatim, op.cit, halaman 20—21.

⁷¹⁾ Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, halaman 78.

demikian, putusan arbitrase diharapkan obyektif dan diterima oleh kedua belah pihak.⁷²⁾

Putusan arbiter atau majelis arbiter lebih dipercaya akan menghasilkan putusan yang lebih adil karena majelis arbiter dipilih oleh para pihak. Putusan majelis hakim pada pengadilan tidak mudah diprediksi, karena ada kemungkinan putusan pengadilan bertentangan dengan rasa keadilan.⁷³⁾

Ketiga, para pihak memilih arbitrase, karena para pengusaha luar negeri condong berusaha melepaskan diri dari berlakunya hukum asing yang sering belum mereka kenal. Ini disebabkan karena pengusaha luar negeri kurang paham akan hukum di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya. Oleh karena itu mereka menganjurkan agar selalu berusaha untuk mencantumkan klausula arbitrase luar negeri terutama dalam kontrak dagang dengan pengusaha dari negara-negara berkembang.⁷⁴⁾ Sebagai contoh dapat dikemukakan contoh-contoh dari kontrak antara Pertamina dengan perusahaan luar negeri, yang umumnya mencantumkan klausula arbitrase menurut kaidah-kaidah dari International Chamber of Commerce.⁷⁵⁾

Arbitrase dalam hal ini menawarkan beberapa keuntungan, sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa. Apabila para pihak

⁷²⁾ Abdulkadir Muhammad, op.cit, halaman 411.

⁷³⁾ H.M. Tahir Azhary, op.cit, halaman 162.

⁷⁴⁾ Tineka Louise Tuegeh Longdong, op.cit, halaman 39.

⁷⁵⁾ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni Bandung, 1986, halaman 194—195.

yang menyerahkan perkaranya kepada arbitrase berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, misalnya dari negara yang berbeda, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang lain. Daripada saling mempertimbangkan sistem dan yurisdiksi hukum mana yang akan memutuskan, para pihak memilih untuk lebih baik menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral.⁷⁶⁾

Dewan arbitrase yang mana yang akan berwenang dalam hal timbul sengketa telah ditentukan oleh para pihak sebelumnya. Hal ini akan memberikan kepastian bagi para pihak. Dewan arbitrase yang telah dipilih bersama tidak akan menimbulkan kecurigaan dan perasaan was-was, seperti apabila berhadapan dengan suatu pengadilan nasional.

Pengadilan akan menggunakan hukum nasionalnya yang telah dipersiapkan oleh hukum di negaranya, sedangkan dalam arbitrase walaupun para pihak seringkali menyerahkan majelis arbitrase untuk menerapkan hukum substantif dari yurisdiksi tertentu terhadap suatu sengketa, misalnya hukum Swiss atau hukum Indonesia, mereka kadangkala juga memberi kebebasan kepada majelis arbitrase untuk menetapkan sendiri hukum substantif dari yurisdiksi hukum tertentu. Dalam hal ini, para pihak memberikan wewenang kepada majelis arbitrase untuk bertindak atas dasar kaidah-kaidah umum yang adil atau berdasarkan norma-norma dalam praktek bisnis. Untuk hal ini, para pihak biasanya menetapkan persyaratan khusus yang mengatur bentuk kewenangan memutuskan yang diberikan oleh para pihak kepada majelis arbitrase. Para pihak dapat melakukan hal tersebut dengan menyatakan bahwa majelis arbitrase akan bertindak sebagai *amicable compositeur*, atau memiliki kekuasaan untuk memutuskan *ex aequo et bono*, atau majelis tersebut akan menerapkan *lex mercatoria*.

⁷⁶⁾ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, *op.cit*, halaman 19—20.

Kewenangan bertindak sebagai *amicable compositeur* memungkinkan majelis arbitrase menyelesaikan sengketa tanpa merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi didasarkan kepada kaidah-kaidah yang adil. Kewenangan memutuskan berdasarkan *ex aequo et bono* memungkinkan majelis arbitrase memutuskan atas dasar kejujuran dan etikad baik. Kewenangan memutuskan berdasarkan *lex mercatoria* mengizinkan majelis memutuskan perkara dengan merujuk pada kaidah-kaidah umum perdagangan Internasional.⁷⁷⁾ Para arbiter diharapkan untuk tidak terlalu memperhatikan hukum yang berlaku, akan tetapi lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan luar negeri, terutama prinsip etikad baik dan *fairness*.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak harus selalu diselesaikan menurut proses hukum (tertentu) saja, tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi diantara para pihak. Hal ini dimungkinkan manakala para arbitator menemui kesulitan untuk memastikan apa yang menjadi sebab atau sebab-sebab timbulnya suatu sengketa dan pihak mana yang bertanggung jawab karenanya. Keadaan ini timbul karena persidangan arbitrase biasanya diminta dan diadakan setelah beberapa waktu lamanya setelah klaim diajukan oleh para pihak. Karena ada jenjang waktu yang cukup lama ini, para arbitrator kadangkala menemui kesulitan dalam merekonstruksi fakta-fakta yang relevan dalam keadaan yang aslinya.⁷⁸⁾

Keempat, para pihak memilih arbitrase karena keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi), sehingga putusan yang akan diberikan dapat diterima dan secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan agar hubungan baik tetap dapat berjalan lancar antara mereka dalam masa yang akan datang.

⁷⁷⁾ *ibid*, halaman 28.

⁷⁸⁾ Huala Adolf, *op.cit*, halaman 16.

Disamping itu keputusan arbitrase dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Kelebihan lainnya adalah keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.⁷⁹⁾

Putusan arbiter atau majelis arbiter lebih dipercaya akan menghasilkan putusan yang lebih adil karena majelis arbiter dipilih oleh para pihak. Sedangkan putusan majelis hakim pada pengadilan tidak mudah diprediksi, karena ada kemungkinan putusan pengadilan bertentangan dengan rasa keadilan.⁸⁰⁾

Kelima, para pihak memilih arbitrase karena sengketa yang mereka hadapi adalah sedemikian tidak mungkin tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan. Khususnya dalam hal di mana dari arbiter diminta untuk menginterprestasikan, menyempurnakan, menyesuaikan atau mengubah satu kontrak karena telah timbul perubahan. Namun syaratnya, para pihak sebelumnya telah memberikan para arbiter wewenang untuk memberikan perubahan (*bindend advls*) ini. Sebab pada waktu menandatangani kontrak terdapat beberapa hal pokok yang tidak diketahui oleh para pihak. Sebagai contoh kontrak untuk membuat jalan sering perlu dimodifikasi kemudian karena situasi tanah dan sebagainya. Bisa juga terjadi secara sengaja diadakan kekosongan dalam kontrak, karena pada waktu kontrak ditandatangani para pihak belum mempunyai informasi yang tepat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan arbitrase dalam kontrak dari Lloyd's mengenai penyelamatan kapal. Perusahaan yang bergerak di bidang maritime salvage ini menempatkan di beberapa tempat yang penting alat-alat dan kelompok orang-orang untuk menyelamatkan kapal yang menjadi korban dari bahaya laut. Bagaimana penyelamat-penyelamat ini harus dibayar tidak dapat ditentukan pada waktu bantuan dan penyelamatan diperlukan. Oleh karena itu dalam kontrak demikian ditentukan bahwa pembayaran akan ditentukan melalui arbitrase oleh

⁷⁹⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 12.

⁸⁰⁾ H.M. Tahir Azhary, *op.cit*, halaman 163.

Lloyd's pada waktu semua faktor-faktor yang berhubungan dengan penyelamatan tersebut telah diketahui.

Kebiasaan untuk memilih arbitrase untuk menyesuaikan kontrak dengan keadaan yang tidak dapat disangka sebelumnya akan muncul pada waktu kontrak tersebut ditandatangani kini banyak dilaksanakan, terutama dalam kontrak yang akan berlangsung untuk waktu yang lama.⁸¹⁾

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa keuntungan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik, yaitu dalam arti :

1. penyelesaian sengketa lebih cepat, ringan biaya dan tanpa publisitas,
2. arbiter yang kompeten yang memiliki pengetahuan yang khusus,
3. menghindarkan berlakunya sistem hukum asing,
4. pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela,
5. putusan yang adil yang dapat dilakukan kesepakatan untuk perubahan, penyesuaian atau perlengkapan isi kontrak.

Selanjutnya apa yang telah diuraikan di atas, ternyata di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain dirumuskan bahwa pada umumnya Lembaga Arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan itu antara lain :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak,
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif,
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil,
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

⁸¹⁾ Tineka Louise Tuegeh Longdong, op.cit, halaman 39.

- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan binding (terakhir dan mengikat).⁸²⁾

5. Kompetensi Pengadilan Dalam Menangani Perkara Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

Secara tegas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melarang keterlibatan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Posisi pengadilan umum yang demikian sangat membantu efektifnya fungsi, peran dan eksisnya Lembaga Arbitrase sesuai harapan publik, baik publik domestik maupun mondial. Terutama para pelaku bisnis yang mengalami beda pendapat yang berbuah konflik dagang. Eksisnya independensi Lembaga Arbitrase sangat tergantung pada sikap jujur, etikad baik para pihak yang bersengketa dan sikap Pengadilan Umum (dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) yang tidak tergoda dengan konspirasi salah satu pihak yang bersengketa untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Ini adalah kuncinya, sehingga sejumlah keunggulan Lembaga Arbitrase yang dikenal selama ini dapat menjadi kenyataan hukum, antara lain kebebasan, keahlian (expert), cepat dan hemat, tertutup dan rahasia serta keputusannya yang final dan binding (terakhir dan mengikat).

Menurut Philips J. Mc. Counanghay dikatakan bahwa, ada beberapa hal yang ingin dihindari oleh para investor asing dalam menyelesaikan sengketa

⁸²⁾ Dailami Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase di Indonesia, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 113—114.

mereka dengan perusahaan lokal. Salah satunya adalah pengadilan lokal yang dianggap terlalu lama, mahal dan keputusannya sering menguntungkan perusahaan-perusahaan lokal, karena menurut Philip J. Mc. Counanghay, Undang-undang Arbitrase yang baik adalah yang paling sedikit dan paling ketat membatasi peranan pengadilan dalam masalah arbitrase.

Bahkan menurut Abdul Rahman Saleh dikatakan bahwa, "walaupun arbitrase merupakan alternatif yang menarik dibandingkan dengan peradilan, namun daya tariknya sangat bergantung pada Lex Arbitri", dalam yurisdiksi yang bersangkutan.⁸³⁾ Lex Arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. Lex Arbitri ini menentukan apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase, apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provisional/sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya.

Lex Arbitri juga menetapkan aturan-aturan dalam hal terjadi kekosongan (gap filling). Dengan demikian bilamana aturan-aturan arbitrase yang diterapkan pada arbitrase tidak dapat mencakup semua persoalan atau kemungkinan yang timbul dalam arbitrase, majelis arbitrase dapat menggunakan lex arbitri untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dalam arbitrase yang menjadi daya tariknya adalah lex arbitri ini. Apabila ada suatu undang-undang arbitrase memberikan kewenangan pada pengadilan untuk mengawasi, campur tangan, meneliti, dan memberikan keputusan sebaliknya dan bukan mempermudah, arbitrase akan kehilangan manfaatnya, karena adanya proses adjudikasi pengadilan yang berlebihan.⁸⁴⁾

⁸³⁾ H. Dailami Firdaus, op.cit, halaman 115—117.

⁸⁴⁾ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, op.cit, halaman 51—52.

Hal ini bukan berarti pada semua aspek pelaksanaan perjanjian arbitrase, peran pengadilan terlikuidasi sama sekali. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengaturnya dan peran Pengadilan Umum (terutama Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung) menjadi sangat strategis.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mencantumkan peranan Pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Pasal 11 (1) menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Bantuan Pengadilan untuk mengembangkan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada prinsipnya meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a. pada saat proses arbitrase,
- b. pada waktu pelaksanaan putusan arbitrase, dan
- c. dalam hal pembatalan putusan arbitrase.

a. Pada Saat Proses Arbitrase

Bantuan Pengadilan untuk mengembangkan arbitrase dapat dicermati mulai dari Pasal 13. Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Untuk arbitrase ad-hoc, ditentukan bahwa dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk itu pemohon arbitrase wajib secara tertulis, dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase, nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Akan tetapi bila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat 3). Lebih lanjut ayat 4 pasal ini mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Dalam pembentukan majelis arbitrase, adakalanya 2 arbiter yang telah ada gagal menunjuk arbiter ketiga sebagaimana telah disepakati. Menghadapi masalah ini, Pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Ayat (5) pasal 15 ini mengatakan, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Dalam beberapa hal, adakalanya arbiter yang ditunjuk telah bersedia, tetapi kemudian ingin menarik diri menjadi arbiter. Pasal 19 (3) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud, maka yang bersangkutan dapat membebaskan dari tugas sebagai arbiter. Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat 4).

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan (Pasal 22 ayat 1).

Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya (Pasal 22 ayat 2). Kemudian Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan (Pasal 25 ayat 1). Selanjutnya bila Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan (Pasal 25 ayat 2). Sedangkan jika Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya (Pasal 25 ayat 3).

b. Pada Waktu Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran (Pasal 59 ayat 2). Selanjutnya arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 59 ayat 3). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (Pasal 59 ayat 4).

Adakalanya pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak bersedia melaksanakannya. Dalam hal ini menurut Pasal 61, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan arbitrase dimaksud. Perintah tersebut berdasarkan permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan didaftarkan (Pasal 62 ayat 1). Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat 2). Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 62 ayat 3). Menurut Pasal 62 ayat 4, Ketua Pengadilan

Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Pasal 63 menentukan bahwa perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Selanjutnya Pasal 64 menyatakan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya bantuan Pengadilan terhadap arbitrase dapat dilihat juga dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Pasal 65 menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut Pasal 66 (d) menyebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, menurut Pasal 66 (c) hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) mengatakan bahwa permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (d) yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68 ayat 1). Sebaliknya terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (d) yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat

diajukan kasasi (Pasal 68 ayat 2). Untuk itu Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 68 ayat 3). Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (c), tidak dapat diajukan upaya perlawanan (Pasal 68 ayat 4). Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya (Pasal 69).

c. Dalam Hal Terjadi Pembatalan Putusan Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini juga mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh Pengadilan. Pasal 70 menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut Pasal 71, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 72 ayat (1) harus diajukan kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua

Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase (Pasal 72 ayat 2). Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. Kemudian Pasal 72 ayat (4) membuka kemungkinan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat 5).⁸⁵⁾

B. Kompetensi Pengadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase / Klausula Arbitrase

1. Klausula Arbitrase / Perjanjian Arbitrase

Peran arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa sudah semakin meningkat dewasa ini. Para pihak dalam kontrak-kontrak dagang serta ahli hukumnya telah cukup banyak mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya. Dalam praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut dengan "klausula arbitrase".

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

⁸⁵⁾ Erman Rajagukguk, *op.cit*, halaman 9—13.

pihak yang bersengketa. Penyelenggaraan arbitrase haruslah berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁸⁶⁾

Menurut hukum di Indonesia, pada hakekatnya tidak ada suatu perbedaan antara apa yang dinamakan persetujuan arbitrase dan apa yang dinamakan klausula arbitrase tersebut. Keduanya merupakan akibat hukum :

1. bahwa persengketaan yang telah timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diputus oleh pengadilan;
2. bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter (wasit) atau suatu tim arbiter, sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit itu dan mentaati apa yang akan diputuskan.⁸⁷⁾

Jadi akibat dari perjanjian arbitrase adalah menghindari jalan ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan menetapkan yurisdiksinya. Perselisihan hanya dapat diselesaikan oleh para arbiter.⁸⁸⁾

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya.

⁸⁶⁾ H. Dailami Firdaus, op.cit, halaman 112.

⁸⁷⁾ R. Subekti, op.cit, halaman 10.

⁸⁸⁾ Sudargo Gautama, op.cit, halaman 135.

Sedangkan yang dimaksud dengan klausula arbitrase adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk membawa setiap sengketa yang timbul dari deal bisnis yang terbit dari transaksi tertentu ke arbitrase, baik arbitrase institusional maupun arbitrase ad hoc.⁸⁹⁾

Perjanjian arbitrase bukan merupakan perjanjian bersyarat atau "voorwaardelijke verbentenis". Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak bergantung kepada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berjanji.⁹⁰⁾

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase tidak bersifat assesoir, oleh karena pelaksanaannya sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok. Yang jelas arbitrase lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang ada di luar pengadilan.⁹¹⁾

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional dijumpai dua bentuk klausula arbitrase, yaitu :

1. Pactum de Compromittendo

Pactum de Compromittendo berarti "kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit". Bentuk klausula ini diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv yang menyatakan bahwa : " Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain

⁸⁹⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 117.

⁹⁰⁾ Suyud Margono, op.cit, halaman 115.

⁹¹⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit, halaman 47.

untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)".

Pokok yang penting, ketentuan pasal tersebut antara lain yaitu kebolehan untuk membuat persetujuan diantara para pihak yang membuat persetujuan di kemudian hari kepada arbitrase. Kesepakatan itu yang dimaksud dengan "klausula arbitrase". Hal lain yang disinggung dalam pasal tersebut adalah diperkenankan atau dibolehkan mencantumkan klausula arbitrase agar mengenai perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari diselesaikan dan diputus oleh arbitrase.

Dapat dilihat dalam klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (disputes) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikat dan menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Jadi sebelum terjadi perselisihan yang nyata, para pihak telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase. Bentuk klausula arbitrase yang seperti itu disebut *pactum de compromittendo*.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Konvensi New York 1958 klausula *pactum de compromittendo* dirumuskan dalam kalimat : "Each contracting state shall recognise an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration".

Adapun mengenai cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo*, tidak tegas diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv maupun dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan :

Pertama, mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok, dan hal ini adalah merupakan cara yang paling lazim. Klausula arbitrase

langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Jadi antara yang satu dengan yang lain tidak terpisah dokumennya.

Dalam perjanjian pokok langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan (dispute atau different) yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase.

Kedua, *pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Disamping apa yang telah dijelaskan di atas, *pactum de compromittendo* dapat dibuat tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dengan akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua dokumen, yaitu akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Apabila *pactum de Compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul. Terserah kapan mau dibuat, asalkan dilakukan sebelum terjadi perselisihan diantara para pihak. Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian pokok, bisa juga dibuat berapa lama setelah pembuatan perjanjian pokok. Patokannya asal dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.⁹²⁾

Bentuk klausula *pactum de compromittendo* ini juga diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi : " Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

⁹²⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 65—66.

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang umum berlaku. Ketentuan hukum kontrak tersebut bersumber dari buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu para pihak bebas untuk memilih apakah menentukan klausula arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri untuk itu atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok sebagaimana lazimnya dalam praktek. Namun yang jelas apakah terhadap kontrak terpisah atau dalam bentuk kontrak menyatu tersebut, kontrak arbitrase dalam sistem ilmu hukum kontrak tetap dianggap sebagai "kontrak buntutan" (*accessoir*), sehingga prinsip-prinsip hukum kontrak buntutan tersebut berlaku. Prinsip-prinsip hukum kontrak buntutan adalah sebagai berikut :

- (1) Isinya tidak boleh melampaui kontrak pokoknya.
- (2) Tidak boleh bertentangan dengan kontrak pokoknya.
- (3) Tidak ada tanpa adanya kontrak pokok.⁹³⁾

Meskipun pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (*accessoir*) tetapi ada beberapa sifatnya yang unik yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh. Misalnya, jika perjanjian pokoknya batal, kontrak arbitrase tidak ikut menjadi batal (Pasal 10 huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Karena suatu kontrak arbitrase tidak menjadi batal meskipun terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya salah satu pihak.
- b. Bangkrutnya salah satu pihak.
- c. Novasi.
- d. Insolvensi salah satu pihak.
- e. Perwarisan.
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.

⁹³⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 118.

- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

2. Akta Kompromis

Dalam Rv akta kompromis (compromise and settlement atau perdamaian yang dicapai diluar pengadilan) diatur dalam Pasal 618, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan harus dibuat di muka notaris.
- (2) Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Dari bunyi Pasal 618 RV tersebut, dapat dilihat bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi : "Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah berjalan kemudian timbul perselisihan. Sedang sebelumnya baik dalam perjanjian maupun dalam akta tersendiri tidak diadakan persetujuan arbitrase". Dalam kasus seperti ini, apabila para pihak menghendaki agar perselisihan diselesaikan melalui forum arbitrase, mereka dapat membuat perjanjian untuk itu. Perjanjian arbitrase yang seperti itu disebut akta kompromis. Jika demikian halnya, akta kompromis merupakan kebalikan dari pactum de compromittendo.

Sedang dalam Konvensi New York 1958, pengaturan akta kompromis terdapat dalam Pasal II ayat (1). Menurut istilah Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 adalah : "differences which may be arises". Pada akta kompromis,

perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati setelah terjadi perselisihan.

Kompromis (*compromise*) itu sendiri berarti "a settlement of differences". Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji. Hanya saja kalau akta kompromis dikaitkan dengan arbitrase, dia mengandung makna tersendiri, yakni perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi diantara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase.

Penerapan atau syarat-syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618 Rv, dapat dirinci sebagai berikut :

- pembuatan akta kompromis dilakukan setelah timbul sengketa.
- bentuknya harus akta tertulis, tidak boleh dengan persetujuan lisan.
- akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris.
- isi akta kompromis harus memuat :
 - a. masalah yang disengketakan,
 - b. nama dan tempat tinggal para pihak,
 - c. nama dan tempat tinggal arbiter, dan
 - d. jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.⁹⁴⁾

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, akta kompromis diatur dalam Pasal 9, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

⁹⁴⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, halaman 101—102.

- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
- a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan arbiter;
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum".

Perlu ditegaskan bahwa apabila yang dimaksudkan adalah kontrak tertulis terhadap suatu kontrak arbitrase, maka yang umum berlaku adalah penulisan-penulisan kontrak dengan cara sebagai berikut :

- (1) Kontrak tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Suatu dokumen yang mungkin hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, misalnya : purchase order, charter party dan lain-lain.
- (3) Perjanjian yang terbentuk hanya dengan tukar menukar komunikasi tertulis. Dalam hal ini penukaran komunikasi yang dimaksudkan termasuk tukar menukar informasi dengan telegram, teleks, faksimili, surat elektronik dan lain-lain.
- (4) Perjanjian tidak tertulis, tetapi ada bukti-bukti tertulis tentang keberadaan perjanjian tersebut. misalnya, perjanjian dibuat melalui telepon yang diikuti dengan konfirmasi tertulis.

- (5) Persetujuan terhadap arbitrase tidak dengan suatu perjanjian tertulis, tetapi dengan merefer ke suatu perjanjian tertulis. Misalnya, suatu Salvage Agreement yang dibuat berdasarkan the Lloyd's Open Form.
- (6) Surat perjanjian meskipun tidak dibuat secara tertulis, melainkan diucapkan secara lisan, tetapi salah satu pihak atau pihak ketiga mencatatnya dengan otoritas yang diberikan oleh kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian lisan ad hoc yang dibuat dalam proses arbitrase terhadap hal tertentu yang dicatat oleh arbiter yang bersangkutan.
- (7) Ada pertukaran informasi tertulis dalam suatu proses peradilan atau arbitrase dimana pihak lainnya tidak membantahnya atau bahkan mungkin mengakuinya. Komunikasi tertulis tersebut cukup untuk diberlakukan sebagai kontrak tertulis.⁹⁵⁾

Persetujuan arbitrase yang termuat dalam akta kompromis sedikitnya wajib mencantumkan hal-hal seperti :

- pokok masalah sengketa;
- nama dan kedudukan para pihak;
- nama dan kedudukan para arbiter yang ditunjuk;
- jumlah para arbiter yang harus dalam jumlah ganjil.

Kurangnya data-data di atas dapat mengakibatkan dibatalkannya persetujuan arbitrase.⁹⁶⁾

Perbedaan antara pactum de compromittendo dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Kalau pactum de compromittendo dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian antara keduanya tidak ada perbedaan.

⁹⁵⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 120—121.

⁹⁶⁾ M. Husseyn Umar, *Memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebuah Ikhtisar, Seminar E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Hotel Mulia, Jakarta, 3 Oktober 2000, halaman 7.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian arbitrase tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, menurut syarat-syarat arbitrase.

Segi positif dengan adanya klausula arbitrase yaitu bahwa para pihak dapat memilih proses penyelesaian sengketa mereka kelak di kemudian hari. Di dalam hal ini, mereka dapat pula merancang klausula tersebut sedemikian rupa sehingga ketentuan-ketentuan (persyaratan-persyaratan arbitrase) yang di dalamnya dapat memenuhi keinginan mereka.⁹⁷⁾ Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain.⁹⁸⁾

Selanjutnya ada beberapa fungsi penting dari perjanjian arbitrase/klausula arbitrase ini. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Unsur kesepakatan ini sangat penting, tanpa itu suatu arbitrase menjadi tidak sah. Kedua, apabila para pihak telah sepakat untuk berarbitrase, kesepakatan ini tidak bisa ditarik oleh salah satu pihak. Bahkan jika perjanjian arbitrase tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian kontrak tersebut berakhir, namun kewajiban untuk berarbitrase masih tetap berlaku. Karena kewajiban untuk berarbitrase ini sifatnya terpisah dengan kontrak.

Disamping perjanjian arbitrase menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk berarbitrase, perjanjian ini juga menjadi sumber wewenang dari peradilan arbitrase. Pada prinsipnya suatu peradilan arbitrase hanya dapat dilandaskan

⁹⁷⁾ Huala Adolf, *op.cit*, halaman 19.

⁹⁸⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, halaman 49-50.

kekuasaan demikian karena para pihak berhak untuk memberikan kekuasaan demikian.

Dapat pula disimpulkan bahwa para pihak adalah penguasa dan penentu bagaimana suatu badan arbitrase berlangsung. Misalnya, hanya para pihaklah dalam suatu perjanjian yang dapat menentukan jumlah arbitator, bagaimana cara/prosedur penunjukan arbitator, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum acara yang akan ditempuh peradilan arbitrase tersebut.

Dengan demikian akhirnya perjanjian arbitrase pulalah yang menetapkan yurisdiksi peradilan arbitrase. Hanya dengan perjanjian para pihaklah sumber yurisdiksi peradilan arbitrase bisa berakhir.⁹⁹⁾

Demikian juga dalam setiap perjanjian internasional pada umumnya diperjanjikan klausula arbitrase. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar kita tidak ketinggalan dari perdagangan internasional, negara harus mengatur dan mengakui arbitrase. Dengan demikian peranan arbitrase bagi dunia perdagangan makin meningkat.

Apa yang menyebabkan investor asing selalu mensyaratkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka? Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian arbitrase sangat sesuai dengan moto *time is money* dan prinsip mereka yaitu efisiensi dan ekonomis.
- (2) Kurang mengetahui tentang hukum negara tempat ia hendak menanamkan modalnya.
- (3) Peradilan umum terlalu lamban menyelesaikan suatu perkara (misalnya di negara kita Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) bisa memakan waktu bertahun-tahun lamanya.

⁹⁹⁾ Huala Adolf, op.cit, halaman 31—32.

- (4) Meskipun sudah ada keputusan akhir dari Mahkamah Agung, kita masih sering menemukan kendala untuk mengeksekusi keputusan tersebut.¹⁰⁰⁾

Disamping itu juga menurut Ir. Siswono Yudo Husodo, bahwa pada umumnya pihak asing dalam mengadakan hubungan usaha, dalam perjanjiannya selalu mencantumkan klausula arbitrase. Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa alasan yang antara lain :

Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain.

Kedua, adanya keraguan akan sikap obyektifitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing.

Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan negara berkembang dalam memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional dan mengenai alih teknologi.

Keempat, timbulnya dugaan atau kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan memakan waktu yang lama.¹⁰¹⁾

2. Cara Menyusun Perjanjian Arbitrase / Klausula Arbitrase Yang Komprehensif

Dalam kaitan ini perlu ditentukan bahwa dalam membuat perjanjian arbitrase, para pelaku usaha harus cermat dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses arbitrase. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perjanjian arbitrase selalu menyertai perjanjian pokoknya yang bersifat nasional maupun internasional. Untuk itu di dalam merancang dan merumuskan klausula

¹⁰⁰⁾ Lely Niwan, *Mengapa Harus Arbitrase*, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 121—122.

¹⁰¹⁾ Siswono Yudo Husodo, *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Usaha. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 137.

arbitrase harus didasari penelaahan yang komprehensif dan teliti. Dengan demikian apabila suatu hari terjadi sengketa tidak ada hambatan dalam mengoperasionalkannya.

Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian arbitrase (klausula arbitrase), sebab pada umumnya klausula arbitrase dituangkan dalam standar kontrak tertentu. Yang cukup menyulitkan adalah standar kontrak internasional. Karena itu harus terlebih dahulu dipahami bagaimana standar klausula arbitrase, misalnya UNCITRAL, ICSID, ICC, dan klausula nasional suatu negara yang dipilih sebagai yurisdiksi arbitrase. Untuk klausula arbitrase nasional Indonesia, terlebih dahulu perlu dipelajari standar yang ada di dalam BANI. Selain itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagio, dan Fatmah Jatim, klausula-klausula arbitrase mencakup :

- a. komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. ruang lingkup arbitrase;
- c. apabila arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. aturan prosedural yang berlaku;
- e. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. klausul-klausul stabilisasi dan kekebalan (imunitas), jika relevan.

Untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi tentang makna dari klausul-klausul arbitrase dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pihak harus menyusun klausul-klausul dengan cermat. Setidaknya klausul arbitrase

harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta persyaratan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase.¹⁰²⁾

Untuk dapat merumuskan suatu klausula yang baik sudah barang tentu peranan ahli hukum atau ahli arbitrase akan banyak membantu. Karena di dalam merumuskan suatu ketentuan yang terkandung di dalam klausula tersebut harus sangat hati-hati agar pihaknya atau kedua belah pihak sama-sama puas dan sama-sama tidak merasa dirugikan.

Faktor kehati-hatian ini di dalam merancang dan merumuskan suatu klausula arbitrase memang merupakan persyaratan yang sangat menentukan sifatnya. Menurut Prof. Dr. Sudargo Gautama, praktek-praktek di banyak negara, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia, justru sering dibodohi.¹⁰³⁾

Klausula arbitrase tidak hanya basis bagi arbitrase, tetapi juga amat menentukan bagi terwujudnya arbitrase. Oleh karenanya klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas kata-katanya. Dalam praktek banyak klausula arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai "nonsense clauses". Misalnya, klausula penyelesaian sengketaanya menyebutkan : "... dispute resolutions by the International Chamber of Commerce in Paris", tidak jelas, The International Chamber of Commerce menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau konsiliasi; selanjutnya apakah klausula tersebut maksudnya hanya ICC didirikan di Paris atau lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa tempat arbitrase adalah Paris?

Oleh karena itu, para pihak pada waktu membahas perjanjian perlu dengan cermat menyusun klausula arbitrase yang komprehensif. Klausula arbitrase tidak harus panjang atau rumit, tetapi kalau klausula tersebut ingin menjadi efektif ia harus jelas. Kemenduaan (ambiguity) adalah musuh paling buruk yang sudah dapat dibayangkan, yang menyebabkan klausula arbitrase menjadi tidak efektif

¹⁰²⁾ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, op.cit, halaman 25.

¹⁰³⁾ Huala Adolf, op.cit, halaman 19.

atau paling sedikit menciptakan komplikasi yang akan menghabiskan waktu dan biaya.

Dalam menyusun rancangan klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, harus dipertimbangkan pertama-tama apakah ada kontrak lain yang berhubungan dengan kontrak yang sekarang sedang dirundingkan. Suatu proyek mungkin melibatkan berbagai kontrak dan melibatkan tidak hanya dua pihak saja, tetapi beberapa pihak. Jika proyeknya gagal, mungkin akan menimbulkan berbagai klaim yang melibatkan berbagai pihak. Baik dari sudut praktis maupun syarat-syarat kontrak, sangat sulit dalam keadaan yang demikian menetapkan proses multi pihak dalam satu badan penyelesaian sengketa. Adalah lebih mudah untuk dicapai, dalam keadaan yang normal, menetapkan klausula arbitrase untuk semua kontrak.

Hal lain yang juga penting dalam membuat klausula arbitrase adalah mengenai penerusan arbiternya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Penentuan abiter meskipun ditunjuk oleh masing-masing pihak, pada hakekatnya tidak mencerminkan bahwa arbiter mewakili kepentingan para pihak. Hal ini perlu disadari bahwa arbiter semata-mata bekerja berdasarkan kemampuan

profesionalitasnya, ia tidak berpihak pada salah satu pihak meskipun ditunjuk oleh yang bersangkutan.¹⁰⁴⁾

Yang dimaksud dengan isi klausula arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Sampai sejauh mana rumusan yang dapat dicantumkan dan diperjanjikan. Apakah ada pembatasan atau tidak? Berikut ini acuan penerapan isi klausula arbitrase yang berpedoman kepada ketentuan undang-undang dan konvensi sebagai berikut :

1. Tidak melampaui isi perjanjian pokok

Pada prinsipnya, klausula arbitrase tidak boleh melampaui isi perjanjian pokok. Maksudnya, isi klausula arbitrase harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan pokok perjanjian. Klausula arbitrase tidak boleh menyimpang dari situ. Klausula arbitrase tidak boleh memuat masalah penyelesaian perselisihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi perjanjian pokok. Jika isi perjanjian berkenaan dengan transaksi jual beli tekstil, klausula arbitrase hanya boleh berisi hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian perjanjian tekstil. Tidak boleh dicantumkan masalah penyelesaian perselisihan yang menyangkut bisnis lain.

2. Isi klausula boleh secara umum

Sehubungan dengan isi klausula arbitrase, para pihak dapat merumuskan secara umum. Isi klausula arbitrase yang bersifat umum dapat dirumuskan secara ringkas. Cukup mencantumkan kalimat : "segala perselisihan yang timbul antara para pihak, sepakat diselesaikan dan diputus oleh arbitrase". Dengan kalimat yang demikian, sudah mengikat kepada mereka untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul melalui forum arbitrase. Model klausula arbitrase yang semacam itu, disebut klausula yang "tidak terperinci".

¹⁰⁴⁾ Siswono Yudo Husodo, op.cit, halaman 142—143.

Klausula ini meliputi segala jenis perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.

Akan tetapi ada bahaya yang bisa timbul dari klausula yang bersifat umum. Bahayanya terletak pada etika buruk para pihak. Apabila salah satu pihak dimotivasi oleh etika buruk, dia akan berupaya mengajukan penafsiran klausula ke arah yang lebih menguntungkan dirinya. Atau bisa saja dengan sengaja mengajukan penafsiran untuk sekedar mengulur waktu bagi anggota arbitre untuk mengadakan pemeriksaan atas pokok perselisihan. Misalnya, bisa saja pihak yang beretika buruk membantah bahwa apa yang diajukan pihak lawan belum dapat diklasifikasi sebagai perselisihan. Umpamanya kesalahan pengertian mengenai pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian, bisa saja ditolak sebagai bentuk perselisihan yang takluk kepada perjanjian arbitrase. Untuk menghindari hambatan yang mungkin timbul dari klausula yang bersifat umum, lebih tepat merumuskan perjanjian arbitrase secara terinci.

3. Klausula arbitrase secara terinci

Seperti yang sudah dijelaskan, untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan penerapan perjanjian arbitrase, sebaiknya klausula arbitrase memuat syarat-syarat yang dirumuskan secara terinci dalam bentuk :

- terinci sekali secara menyeluruh, atau
- terinci mengenai pokok-pokonya saja (terinci seperlunya)

Perjanjian arbitrase yang terinci, jauh lebih menguntungkan dan memudahkan. Apabila klausula arbitrase dirumuskan secara terinci, para pihak lebih mudah memantau dan menentukan apakah suatu keadaan atau tindakan yang dilakukan salah satu pihak, termasuk atau tidak ke dalam kerangka perjanjian arbitrase. Sekaligus pula hal itu memberi pegangan yang lebih pasti bagi anggota arbitre untuk menentukan kewenangan dan penyelesaian perselisihan.

Suatu perjanjian arbitrase disebut memuat klausula yang terinci sekali atau mendetail, apabila rumusannya mencantumkan semua aspek perjanjian. Rumusan yang mengandung semua aspek perjanjian pokok, apabila klausula merinci mulai dari masalah perselisihan yang akan timbul, tentang keabsahan perjanjian, arti perjanjian, hak-hak dan kewajiban (liability) para pihak dalam pemenuhan perjanjian. Pada satu segi memang baik dan ideal untuk mencantumkan klausula arbitrase secara terinci ditinjau dari semua aspek perjanjian pokok. Hanya saja kita harus sadar, bahwa sangat sulit menyusun suatu rumusan rekayasa tentang perselisihan yang akan timbul di kemudian hari. Lagi pula terkadang kemampuan kita terbatas untuk menyusun suatu rincian yang sangat limitatif atas semua aspek yang mungkin timbul dari suatu perjanjian. Bahkan klausula yang terlampau rinci, bisa menimbulkan bahaya bagi kelancaran pelaksanaan perjanjian pokok. Perumusan klausula arbitrase yang terlampau rinci dan luas, adakalanya menghambat kegiatan dan dinamika para pihak melaksanakan perjanjian, sehingga timbul sikap kaku dan terlampau hati-hati, karena takut terjebak kepada salah satu syarat yang disebut dalam klausula.

Menurut perkiraan, klausula arbitrase yang paling berdaya guna ialah klausula yang rincian rumusannya bersifat "moderasi". Klausula yang seperti ini, hanya merumuskan rincian pokok-pokok saja. Rincian hanya seperiunya didasarkan kaitannya dengan ruang lingkup perjanjian pokok. Hal-hal pokok yang menjadi perselisihan dalam suatu perjanjian saja yang dirinci dalam klausula.

Dari segi pendekatan hukum dan pengalaman praktek, pokok-pokok utama yang sering menjadi perselisihan dalam perjanjian dapat disebut antara lain :

- a. penapsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian. Di dalamnya bisa termasuk :
 - kontroversi pendapat (controversy),

- kesalahan pengertian (misunderstanding),
- ketidaksepakatan (disagreement).
- b. pelanggaran perjanjian (break of contract), ke dalamnya termasuk :
 - sah atau tidak perjanjian, dan
 - berlaku atau tidak perjanjian.
- c. pengakhiran perjanjian (termination of contract)
- d. klaim (claim) mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹⁰⁵⁾

Akan tetapi sekalipun berbagai konvensi telah mengatur secara khusus aturan arbitrase untuk bidang bisnis tertentu, hal itu tidak mengurangi hak para pihak untuk menyepakati tentang rincian rumusan klausula arbitrase. Jadi pada akhirnya para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mencantumkan rincian klausula yang mereka inginkan.

Selanjutnya menurut Stephen R. Bond,¹⁰⁶⁾ sedikitnya ada 9 (sembilan) unsur yang harus disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase, yaitu :

1. Para pihak harus jelas menetapkan apakah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (ad hoc arbitration) atau menyerahkan kepada Badan Arbitrase yang telah ada (institutional arbitration).

Jika para pihak sepakat dengan ad hoc arbitration, klausula harus menentukan dengan tegas jumlah arbiter dan dengan cara bagaimana mereka ditunjuk atau diangkat.

Suatu klausula arbitrase umpamanya menyebutkan : *"Tiap pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter akan menunjuk seorang arbiter lain sebagai Ketua Majelis Arbiter"*

¹⁰⁵⁾ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 69—72.

¹⁰⁶⁾ Erman Rajagukguk, op.cit, halaman 90—102.

Klausula di atas saja belum cukup karena masih harus ditentukan sejak kapan dan berapa lama jangka waktu penunjukan arbiter tersebut. Selain itu jika kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, siapa yang akan diminta untuk menunjuk arbiter ketiga?

Di Indonesia para pihak, biasanya meminta Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk arbiter ketiga yang sekaligus akan menjadi Ketua majelis arbiter. Berikut ini contoh klausula arbitrase yang lengkap :

Party shall appoint 1 (one) arbitration within 7 (seven) days after a request therefor has been issued by either one of the parties to the other and 2 (two) arbitrations so appointed shall jointly appoint the third arbitrator, Should, however, the 2 (two) arbitrations fail to appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days of the day the second arbitrator has been appointed, the Chairman of The Central Jakarta District Court shall be entitled to appoint the third arbitrator upon request of either Party.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan dalam Pasal 15 ayat 4, bahwa dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Ayat 5 pasal tersebut menyebutkan bahwa terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimaksud, tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, bahwa arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.

Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Undang-undang juga mensyaratkan, bahwa seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberikan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi

kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan (Pasal 18 ayat 1). Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menolak diri, kecuali atas persetujuan para pihak (Pasal 19 ayat 1). Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat 4). Adakalanya salah satu pihak tidak menunjuk arbiter yang akan mewakilinya, seperti sudah disepakatai semula yaitu masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter. Dalam hal ini, Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan, bahwa apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dalam praktek sebelum adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, beberapa klausula arbitrase telah memuat substansi Pasal 15 ayat (3) tersebut, untuk mencegah berlarut-larutnya proses arbitrase.

Ada yang menganggap bahwa pemilihan arbiter inilah yang paling penting dari seluruh proses arbitrase. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan arbiter :

1. Experience in and knowledge of both the subject matter of the contract and the arbitral process it self;
2. an ability to converse and read and write in the language of the arbitration, unless the parties agreeable to providing on site translation services;
3. availability over the time chosen by the parties for the arbitration;
4. neutrality of arbitrators, lack of personal connection with either of the parties.

Untuk mengatur penyelesaian sengketa menjadi efisien, arbiter perlu percaya pada keahlian dan pengalamannya dalam profesi yang ia geluti. Disamping itu, arbiter perlu pengetahuan praktek di bidang bisnis dan manajemen.

Memilih arbiter adalah salah satu langkah yang penting bagi para pihak karena kepada keahlian dan pengalaman arbiter ini bergantung juga hasil penyelesaian sengketa. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penunjukan arbiter adalah umur, pengalaman, pengetahuan dan latar belakangnya di bidang yang dipersengketakan serta latar belakang bidang hukum yang menjadi pekerjaannya.

Seandainya para pihak tidak memilih *ad hoc* arbitration tetapi institutional arbitration, yaitu menunjuk badan arbitrase yang sudah ada sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang dimaksud.

Klausula arbitrase, umpamanya yang berbunyi : *"... akan diselesaikan melalui badan arbitrase di Indonesia"* ; tidaklah cukup jelas. Di Indonesia ada lebih dari satu badan arbitrase selain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), umpamanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang mendasarkan penyelesaian sengketa kepada kaidah-kaidah hukum Islam.

Dalam perdagangan internasional para pihak tidak jarang memilih International Chambers of Commerce (ICC) Paris sebagai tempat penyelesaian sengketa.

2. Standard Klausula Arbitrase

Bila para pihak memilih institutional arbitration, maka badan arbitrase yang bersangkutan telah mempunyai standard klausula arbitrase yang mereka pakai.

Umpamanya, ICC mempunyai model klausula sebagai berikut : *"All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under*

the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules".

Klausula di atas pendek, sederhana, tetapi berisi apa yang disebut *tree essential elements to any effective arbitral clauses*. "All disputes". "... in connection with"..., "finally settled". Klausula standard ICC ditujukan kepada semua sengketa "in connection with" yang berkaitan dengan) kontrak. Banyak klausula arbitrase yang diajukan kepada ICC ditujukan pada "arising out of or related to the contract", sengketa "arising under the contract", sengketa yang "related directly and/or indirectly to the performance of the contract", dan lain sebagainya. Berbagai ungkapan tersebut bagi orang biasa tampaknya sama. Namun dari sudut analisis hukum, ada perbedaan yang tajam antara yang disebut klausula arbitrase yang dangkal dan klausula arbitrase yang luas.

3. Tempat diadakannya Arbitrase

Pentingnya tempat arbitrase tidak dapat dianggap rendah. Tempat arbitrase turut menentukan mengenai terlibatnya pengadilan nasional dalam proses arbitrase baik dalam membantu lancarnya proses arbitrase tersebut maupun intervensi pengadilan, manakala terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau pelaksanaan putusan arbitrase nantinya. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain menyatakan bahwa para pihak harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbiter yang akan menentukan.

Dalam perdagangan internasional sering terjadi, para pihak menetapkan hukum suatu negara yang akan diterapkan dalam perjanjian berbeda dengan hukum yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Dalam hal ini tempat dimana sengketa akan diselesaikan atau badan arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa ini menjadi penting.

Pemilihan tempat arbitrase dapat menentukan hasil arbitrase. Dalam klausula arbitrase ICC, antara perusahaan Finnish dan sebuah perusahaan Australia dimana London dipilih sebagai tempat arbitrase. Sengketa ini berkenaan dengan pembayaran royalty yang tidak dilaksanakan berkenaan dengan pembatalan perjanjian pada tahun 1976. Pada tahun 1982 pemegang lisensi mengajukan perselisihan ke lembaga arbitrase. Arbiter menemukan, karena tempat arbitrase adalah Inggris, maka ketentuan daluwarsa menurut English Limitation Act harus diterapkan yaitu adanya batas enam tahun.

Klausula berikut sebagai contoh disebutkan dengan jelas tempat arbitrase :

"Any dispute or claim arising from this Agreement shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the International Chamber of Commerce Rules and held in Zurich, Switzerland. This Agreement shall be enforceable and judgement upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction.

4. Pilihan Hukum

Pilihan hukum yang akan diterapkan oleh para arbiter untuk menentukan masalah yang substansi bukan unsur yang menentukan bagi sahnya perjanjian arbitrase. Namun demikian hukum mana yang berlaku dalam proses arbitrase, tentulah dapat diserahkan kepada para pihak sendiri. Tidak adanya unsur ini dalam klausula arbitrase akan menjadi faktor yang berarti dalam penambahan waktu dan biaya arbitrase. Disamping itu pilihan hukum yang dilakukan yang diputuskan oleh arbitrator sendiri (karena tidak disebut dalam perjanjian arbitrase) mungkin bisa tidak menyenangkan salah satu pihak.

Selanjutnya, bila hukum yang akan diterapkan sudah dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, pemilihan arbiter yang menguasai hukum yang dipilih tersebut lebih mudah dilakukan. Pilihan hukum tersebut dikenal juga dengan *proper law of a contract*, dimana seluruh kontrak atau unsur-unsurnya tunduk

pada hukum tersebut. Dalam perjanjian internasional proper law amat menentukan karena para pihak datang dari sistem hukum yang berbeda.

Pasal 42 ayat (1) dari ICSID Convention memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan diterapkan, hukum nasional atau hukum internasional. Pilihan hukum nasional biasanya ditujukan kepada hukum negara penerima modal. Internasionalisasi klausula ditujukan kepada norma-norma dari prinsip-prinsip umum hukum dari bangsa-bangsa beradab dan/atau yang diterapkan oleh badan internasional.

Kategori ketiga, klausula yang menentukan berlakunya hukum nasional maupun internasional, seperti berikut ini :

"Any international arbitration tribunal constituted pursuant to this Agreement shall apply the law of (I lost State) on the one hand and Public International Law and General Customary Law on the other hand, but in the event of a conflict between such two systems shall apply only Public International Law and General Customary Law".

Formulasi tersebut di atas cukup jelas untuk menghindarkan masalah penafsiran, yang kadang-kadang dihasilkan dari penyusunan rancangan yang tidak hati-hati.

5. Komposisi dari Arbiter

Unsur selanjutnya yang juga perlu mendapat perhatian penuh adalah mengenai komposisi dari majelis arbiter. Beberapa orang arbiter yang diinginkan, apakah mereka harus mempunyai kualifikasi tertentu? Arbiter tunggal bisa saja diperjanjikan oleh para pihak, tetapi hal ini amat tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap arbiter tunggal. Banyak pihak yang lebih menyukai majelis arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter. Masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter yang mewakilinya dan kedua arbiter ini kemudian yang akan mengangkat arbiter ketiga sebagai komposisi dari arbitrase.

Contoh klausula arbitrase yang menyebutkan komposisi dari arbiter :

The party desiring arbitration shall give notice to that effect to the other party and in the notice shall appoint as an arbitrator a disinterested person of recognized competence in the area of the management of international five-star luxury hotels. Within fifteen (15) days thereafter, the other party shall, by notice to the original party, appoint second, similarly qualified arbitrator. The arbitrators thus appointed shall appoint a third arbitrator similarly qualified, and the three arbitrators shall as promptly as possible determine the matter, with A and Owner each being entitled to present evidence and argument to the arbitrators; provides however, that:

- (a) If the second arbitrator not appointed, the first arbitrator shall resolve the matter; and
- (b) If the two arbitrators appointed by the parties are unable to agree on the appointment of a third arbitrator within fifteen (15) days after the appointment of the second arbitrator, they shall give the parties written notice of their failure to agree, and if the parties fail to agree on the selection of the third arbitrator within fifteen (15) days after receiving the notice from the two arbitrators, then within ten (10) days thereafter either of the parties, on notice to the other party, may apply for appointment of the third arbitrator to the Federal District Court, or any other court, having jurisdiction in the city in the city in which the Hotel is to be constructed.

6. Bahasa dalam proses arbitrase

Banyak pihak yang salah mengerti dan menduga bahwa bahasa dari kontrak otomatis menjadi bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase. Berdasarkan peraturan ICC hal itu adalah benar, dimana pasal 15 ayat (3) ICC Rules mengatakan : *"...that arbitrator shall give due regard...in particular to the language of the contract in determining the language of arbitration"*.

Penentuan bahasa ini menjadi penting mengingat penterjemahan segala hal dalam proses arbitrase, bila dilakukan dalam lebih dari satu bahasa, akan memperpanjang waktu dan menambah biaya.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak

dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Contoh klausula yang mencantumkan bahasa yang dipergunakan dalam proses arbitrase :

"All disputes arising in connection with the Agreement (including in enforceability of this arbitration provision) shall be exclusively and finally settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in the English language pursuant to the UNCITRAL rules, except as modified herein, utilizing a single arbitrator at a mutually convenient location. The arbitrator shall be appointed by the American Arbitration Association and shall be a lawyer familiar with international business transactions and the substantive laws of the United States, conversant in the English language, and not in way associated with either party".

7. Putusan akhir dan mengikat

Manfaat dari arbitrase , pada prinsipnya bebas dari campur tangan pengadilan selama proses arbitrase berlangsung, dan putusan arbitrase adalah merupakan putusan akhir yang tidak dapat disbanding ke pengadilan. Pasal 24 ICC Rules menyebutkan bahwa : " the arbitral award shall be final". Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang final dan mengikat.

Umpamanya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan : *"...para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama"*.

Selanjutnya Pasal 60 lebih tegas lagi mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Adalah penting mencantumkan kalimat *"...the decision of the arbitrators shall be final and binding upon the parties"*, karena di beberapa negara tanpa mencantumkan secara tegas dalam perjanjian, masih dimungkinkan putusan arbitrase tersebut dimintakan banding ke pengadilan.

Berikut ini contoh klausula yang menyatakan secara tegas putusan arbitrase adalah final dan binding pada waktu sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku :

"The parties expressly agree to waive Section 641 of the Rv and/or any other laws and regulations replacing or amending such law and regulation mentioned above and/or similar to it, so that accordingly there shall be no appeal to any court from the decision of the arbitrators. The parties agree not to dispute or question the validity of such award before any judicial or other authority in France, Indonesia, or elsewhere of any enforcement action taken by the party in whose favor the award was rendered. The parties shall not be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute until such matter shall have been submitted and determined as provided herein and then only for the enforcement of such arbitral award".

8. Pelaksanaan putusan arbitrase

Di Amerika Serikat, dalam klausula arbitrase hampir selalu dicantumkan kalimat : "...*Judgement may be entered upon the award in any court of competent jurisdiction*".

Klausula ini berasal dari America Arbitration Association (AAA), dan dikatakan adalah lebih baik mencantumkannya dimana salah satu pihak berasal dari Amerika Serikat atau pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mungkin dilakukan di Amerika Serikat.

Contoh klausula yang sama adalah : "*This Agreement shall be enforceable and judgement upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court of any country having jurisdiction*".

9. Biaya arbitrase

Biaya arbitrase terdiri dari 3 kategori ; biaya dari regim arbitrase, biaya dari majelis, dan biaya yang dikeluarkan para pihak. Biaya dari regim arbitrase termasuk "administrative fee of the regim's central authority", biaya sewa ruangan untuk pertemuan dan pengeluaran lainnya yang terkait. Biaya majelis termasuk fee dan pengeluaran arbiter.

Biaya para pihak termasuk fee untuk penasehat hukum dan ahli, pengeluaran persiapan kasus, pengeluaran untuk staff. Pembebanan biaya

arbitrase ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, mejelis arbiter yang akan menentukan. Kedua, kemungkinan akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Ketiga, mungkin para pihak telah sepakat sebelumnya dalam klausula arbitrase bahwa biaya ditanggung berdua dalam jumlah sama.

Peraturan dari ICSID, ICC, LCIA (London Court Arbitration), Stockholm Chamber of Commerce memberikan kepada arbiter kebijaksanaan pembebasan biaya tersebut, kecuali para pihak telah menentukannya lebih dahulu. UNCITRAL membebani biaya arbitrase kepada pihak yang kalah, kecuali mejelis arbitrase menganggap adalah masuk akal untuk membebani biaya tersebut kepada kedua belah pihak.

Klausula mengenai biaya arbitrase berikut ini cukup menarik :

"The party in whose favor the arbitral award is rendered shall be entitled to recover its costs and expences relating to the arbitration including but not lomited to the cost and expense of administration of the arbitration proceedings, travel and related expenses and reasonable attorney's fees".

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, menentukan bahwa pihak yang kalah harus menanggung biaya arbitrase. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang (ayat 2).

Unsur-unsur lain yang mungkin perlu ditambahkan dalam klausula arbitrase untuk menghemat waktu atau biaya, atau berkenaan dengan arbitrase tertentu, antara lain :

- (a) *The applicable procedural law*
- (b) *Power of the arbitrator to adapt the contract*
- (c) *Extent of discovery and cross-examination*
- (d) *Waiver of sovereign immunity*
- (e) *Accomodation for multiparty disputes*

(f) *Mandatory conciliation*

(g) *Partial awards either forbidden or required*

Beberapa unsur yang dapat dimasukkan dalam klausula arbitrase terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan unsur tersebut dapat dicantumkan sepanjang proses arbitrase didasarkan kepada hukum Indonesia. Akhirnya tidak ada satu klausula arbitrase yang lengkap yang dapat digunakan untuk semua perselisihan yang akan diselesaikan melalui arbitrase. Dalam negosiasi menyusun klausula arbitrase, selalu saja ada hal-hal yang spesifik untuk transaksi-transaksi tertentu, sehingga perlu dirundingkan klausula yang paling tepat.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari bagaimana suatu klausula arbitrase di dalam suatu perjanjian diatur akan membawa akibat atau pengaruh pada kasus-kasus arbitrase yang ada dan muncul serta harus diselesaikan. Namun di dalam praktek, juga terlihat adanya kemungkinan penyimpangan cara penyelesaian sengketa dari apa yang telah disetujui dan telah dituangkan dalam suatu klausula arbitrase.

3. Beberapa Model Perumusan Klausula Arbitrase

Berikut ini beberapa model perumusan kontrak atau klausula arbitrase, baik dari lembaga arbitrase yang ada maupun dari beberapa praktek yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

a. Model yang paling ringkas

Model paling ringkas dari klausula arbitrase dalam arti klausula tersebut sudah sah, tetapi sebaiknya tidak diikuti. Contohnya : *"Any dispute arising of this agreement shall be settled by arbitrations"*.

b. Model UNCITRAL

"Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force".

Selanjutnya para pihak dapat mempertimbangkan untuk menambah sebagai berikut :

- (a) The Appointing authority shall be... (sebutkan nama institusi atau orang)
- (b) The number of arbitrators shall be...(satu atau tiga)
- (c) The place of arbitration shall be...(kota dan negara)
- (d) The language(s) to be used in arbitral proceedings shall be (sebutkan bahasa apa). ¹⁰⁷⁾

c. Klasula arbitrase BANI berbunyi :

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. ¹⁰⁸⁾

d. Model ICC

"Any dispute arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules". ¹⁰⁹⁾

e. Model American Arbitration Association (AAA)

"Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitrations in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the AAA, and judgement upon the award

¹⁰⁷⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 123—124

¹⁰⁸⁾ Felix o. Soebagjo, Fatmah Jatim, *Arbitrase di Indonesia beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan Dalam Praktik*, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 82.

¹⁰⁹⁾ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 20.

*rendered by the Arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof".*¹¹⁰⁾

f. Model ICSD

*"The parties hereto consent to submit to the International Centre for Settlement of Investment Disputes any dispute in relation to or arising out of this Agreement for settlement by arbitrations pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other states."*¹¹¹⁾

Karena sifatnya yang berbentuk klausula model, tentunya merupakan format minimum sebagai pedoman gambaran umum, yang akan sangat berguna bagi kita. Namun demikian tidak jarang dalam praktek dilakukan berbagai modifikasi terhadap klausula arbitrase termusuk sesuai dengan keperluan transaksi yang akan diselenggarakan, terutama dalam transaksi yang bersifat internasional atau dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

Modifikasi tersebut dilakukan, khususnya dalam hal diperlukan :

1. pemilihan pakar (expert) pada panel para arbitrator, misalnya dalam permasalahan shipping, construction, sale of goods dan sebagainya atau persyaratan untuk menjamin netralitas, kewarganegaraan (bukan kewarganegaraan yang sama dengan pihak yang bersengketa) dan sebagainya;
2. untuk membatasi atau meluaskan lingkup sengketa yang dapat dicakupnya (scope of disputes subject to arbitration);
3. ketentuan-ketentuan khusus tentang pembayaran;
4. memberikan kewenangan khusus bagi para arbitrator, dan bentuk provisional remedies, specific performance, atau right to consult witness;

¹¹⁰⁾ Huala Adolf, *op.cit*, halaman 22.

¹¹¹⁾ *ibid.*, halaman 20..

5. ketentuan tentang bahasa yang dipergunakan (language of proceedind) atau tempat penyelenggaraan arbitrase (special location);
6. ketentuan-ketentuan tentang jangka waktu berlangsungnya arbitrase.¹¹²⁾

4. Ketentuan Kompetensi Absolut Berkaitan dengan Klausula Arbitrase

Dalam hukum acara, kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut di atas berhubungan dengan masalah kewenangan dari pranata peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari pranata penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.¹¹³⁾

Sebagaimana diketahui bahwa arbitrase adalah merupakan lembaga volunteer yang dipilih dan ditunjuk dengan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun meskipun yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk para pihak, putusan yang dijatuhkan bersifat final dan binding (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.

Ditinjau dari segi penunjukan arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya tidak

¹¹²⁾ Komar Kartaatmadja, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional*, Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 22-23 Januari 1991, halaman 69—70.

¹¹³⁾ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *op.cit*, halaman 43.

lain dari pada badan swasta atau "privat". Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (judicial power) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasar konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Atas kenyataan bahwa arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan sebutan populernya lazim dikatakan "juru pisah persengketaan". Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan "mengadili", tetapi lebih mirip menyelesaikan perselisihan.

Memperhatikan sifat arbiter sebagai lembaga volunteer atau extra judicial dibandingkan dengan kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai badan resmi yang diberi fungsi dan kewenangan mengadili dan memutus perkara, apakah klausula arbitrase yang disepakati para pihak dapat menyingkirkan yurisdiksi badan pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa.

Mengenai kekuatan berlakunya perjanjian/klausula arbitrase ini apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, ada 2 (dua) aliran dalam teori hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Aliran yang menyatakan bahwa klausula/perjanjian arbitrase bukan public policy (public order) atau bukan ketertiban umum. Aliran ini secara tersirat dapat dilihat dalam putusan Hoge Raad negeri Belanda, 8 Januari 1925. Di sini ditegaskan sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah openbaar orde.¹¹⁴⁾

Lebih rinci dalam putusan ini antara lain ditegaskan :

- suatu klausula arbitrase niet van openbaar orde (bukan ketertiban umum)
- oleh karena itu, sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tetap dapat diajukan ke pengadilan perdata,

¹¹⁴⁾ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 121.

- pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang disengketakan,
- apabila tidak ada diajukan eksepsi, pihak lawan dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase,
- bahkan jika eksepsi terhadap klausula arbitrase baru diajukan dalam gugat reconvensi, tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase, dan kewenangan mengadili sengketa jatuh dan tunduk kepada yurisdiksi pengadilan.¹¹⁵⁾

Aliran ini memang mengakui bahwa beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa yang terjadi kepada arbitrase. Namun peralihan kewenangan tersebut "tidak mutlak". Oleh karena itu meskipun perjanjian dibarengi dengan klausula arbitrase baik yang berbentuk *pactum de compromittendo* atau akta kompromis, Pengadilan Negeri tepat berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dari perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan tentang hal itu kepada pengadilan. Menurut aliran ini, klausula arbitrase tersebut tidak mutlak menyingkirkan pengadilan. Paling-paling hanya memberi hak "opsi" atau hak pilih bagi para pihak. Para pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan menuntutnya.

116)

¹¹⁵⁾ Suyud Margono, *op.cit*, halaman 126.

¹¹⁶⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, halaman 84.

2. Aliran yang menekankan azas "Pacta Sunt Servanda" pada kekuatan klausula/perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase/perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam tidak berlaku, dan perjanjian/klausula arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi absolut.¹¹⁷⁾

Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang mengajarkan bahwa semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap persetujuan hanya dapat gugur (ditarik kembali) atas kesepakatan bersama para pihak.

Asas pacta sunt servanda secara positif telah dituangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berintikan :

- a. setiap perjanjian mengikat kepada para pihak;
- b. kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- c. hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Bertitik tolak dari prinsip pacta sunt servanda, aliran ini berpendapat bahwa setiap perjanjian yang memuat klausula arbitrase :

- a. mengikat secara mutlak kepada para pihak ; dan
- b. kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.¹¹⁸⁾

Oleh karena klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, asas-asas yang terkandung dalam proposisi pacta sunt servanda dan Pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase. Acuan penerapannya :

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak :

¹¹⁷⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 121—122.

¹¹⁸⁾ Suyud Margono, op.cit, halaman 126.

- oleh karena itu, apabila timbul persengketaan dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa "mutlak" menjadi kewenangan badan arbitrase
- dengan demikian pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak.
- dengan gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak
- serta tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau secara "unilateral".¹¹⁹⁾

Berdasar penjabaran penerapan yang dikemukakan, aliran *pacta sunt servanda* sangat bertolak belakang dengan aliran yang menganggap klausula arbitrase bukan publik orde (*niet van openbaar orde*). Pada aliran ini, penarikan isi klausula arbitrase dapat dibenarkan secara diam-diam. Bahkan dapat ditarik secara sepihak dengan jalan mengajukan gugat sengketa ke pengadilan. Apabila salah satu pihak telah mengajukan gugat ke pengadilan, dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, dianggap klausula arbitrase telah gugur, dan kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan pengadilan.

Lain halnya dengan pendapat aliran *pacta sunt servanda*, aliran ini berpendirian bahwa sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak secara mutlak telah terikat. Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya telah mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Dengan demikian sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian

¹¹⁹⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, halaman 129.

arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian.

Dalam dunia peradilan para hakim sudah cukup lama mengakui kompetensi badan arbitrase. Mereka akan menarik diri dalam menyelesaikan sengketa apabila para pihak dengan tegas memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya.¹²⁰⁾

Mengenai kompetensi absolut ini, Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilai sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan (negeri) yang menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya oleh para pihak.¹²¹⁾ Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku untuk Indonesia sejak Kepres 1981 Nomor 34 sebagaimana tercantum dalam Pasal II ayat 3.¹²²⁾

Pasal II ayat (3) Konvensi tersebut berbunyi :

"The court of a Contracting State, When Seized of an action in a respect of which the parties have made an agreement with in the meaning of article, shall, at the request of one of the parties refer the parties to arbitration, unless is finds that said agreement is null and void in operative or incapable of being performed."

¹²⁰⁾ Huala Adolf, *Beberapa Catatan tentang Arbitrase dalam Milenium Baru, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 75.

¹²¹⁾ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 98—99.

¹²²⁾ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 16.

Berdasarkan apa yang digariskan dalam pasal tersebut, Konvensi New York 1958, telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang itu. Sekali para pihak membuat persetujuan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, sejak saat itu arbitrase telah mempunyai kompetensi absolut untuk memutus persengketaan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Itu sebabnya Pasal II ayat (3) Konvensi memberi peringatan kepada badan peradilan resmi yang terdapat pada setiap negara peserta Konvensi (Contracting State), berupa larangan bagi badan peradilan untuk mengadili perselisihan yang diminta oleh seseorang, jika ternyata mengenai perselisihan itu telah disetujui olehnya (dalam perjanjian) untuk diselesaikan oleh arbitrase. Sekiranya pengadilan menerima gugatan dari seseorang, dan ternyata orang tersebut telah mengikat diri dalam perjanjian arbitrase tentang penyelesaian perkara yang digugat, pengadilan harus menyatakan diri "tidak berwenang" mengadili. Berbarengan dengan itu pengadilan menyuruh agar perselisihan diselesaikan melalui forum arbitrase.

Kewenangan absolut arbitrase menyelesaikan perselisihan, baru dapat disingkirkan oleh pengadilan dalam hal :

1. perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak "batal demi hukum" atau null and void, atau
2. perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau inoperative incapable of being performed.¹²³⁾

Kalau ketentuan pasal II ayat (3) Konvensi ditelaah, jelas menganut aliran *pacta sunt servanda*. Menurut doktrin *pacta sunt servanda*, setiap persetujuan yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, persetujuan hanya dapat digugurkan atau ditarik kembali atas kesepakatan

¹²³⁾ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 25—26.

bersama para pihak. Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian, para pihak telah mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian melalui forum arbitrase, perjanjian itu "mutlak" mengikat kepada mereka. Bersama dengan itu, para pihak dengan sendirinya telah menyerahkan kompetensi absolut kepada badan arbitrase untuk memutus perselisihan yang timbul dari perjanjian. Selanjutnya apakah dalam praktek peradilan di Indonesia mengikuti aliran *pacta sunt servanda* seperti yang digariskan Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 tersebut?

Dalam Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan lagi, bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Ayat (2) kemudian menyebutkan, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Campur tangan pengadilan dalam hal-hal tertentu tersebut adalah diperkenankan sepanjang tindakan tersebut untuk memperlancar proses arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, atau putusan arbitrase telah diambil berdasarkan salah satu hal-hal berikut (Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999) sebagai berikut :

- a. putusan tidak sesuai dengan perjanjian,
- b. putusan dijatuhkan berdasarkan dokumen palsu,
- c. ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan,
- d. putusan diambil dari hasil tipu muslihat.¹²⁴⁾

Selanjutnya sekalipun dalam teori para pihak mungkin saja dapat memutuskan bahwa sengketa mereka dapat diselesaikan melalui arbitrase,

¹²⁴⁾ Erman Rajagukguk, *op.cit*, halaman 30.

masih menjadi pertanyaan sejauh manakah hal itu masih dimungkinkan apabila para pihak tidak memutuskan klausula arbitrase itu sebelum sengketa antara mereka timbul, tetapi baru sesudah ada sengketa para pihak baru memutuskan agar segala sengketa antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.

Menurut logika berfikir, maka apabila kesepakatan ini timbul sebelum para pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka hakim pengadilan juga terikat pada kesepakatan tersebut, dan tidak menyatakan dirinya berwenang (ontvankelijk) apabila setelah persetujuan itu para pihak masih mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Lain halnya tentu apabila keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase baru dinyatakan pada suatu saat setelah perkara mereka diajukan ke pengadilan. Dalam hal itu kesepakatan agar perkara ini diselesaikan oleh forum arbitrase sudah tertutup, karena sebelumnya mereka tidak memasukkan klausula arbitrase itu ke dalam kontrak utamanya. Gugurlah hak para pihak untuk mengajukan perkaranya ke arbitrase, sekalipun hakim pengadilan (secara keliru) telah menjatuhkan putusan.

Secara logika pula dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, agaknya hal ini gugur bagi pihak yang telah melanggar janjinya sesuai dengan klausula atau perjanjian arbitrase. Akan tetapi, hak itu tetap harus dilindungi dan diberikan kepada pihak lawan, yang secara melawan hukum telah ditarik ke forum yang tidak dikehendakinya.

C. Kompetensi Pengadilan Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase untuk diputuskan olehnya sebagai suatu pranata (hukum), arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam : ¹²⁵⁾

1. putusan arbitrase nasional.
2. putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing.

Perbedaan tersebut penting artinya pada saat kita akan membicarakan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional dengan putusan arbitrase internasional berbeda satu sama lain. Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga mengaturnya secara terpisah diantara eksekusi kedua macam arbitrase tersebut.

1. Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

a. Pengertian Putusan Arbitrase Nasional

Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase diklasifikasi sebagai putusan nasional/putusan dalam negeri/putusan domestik, lebih dahulu kita harus berorientasi kepada ketentuan Pasal 1 Konvensi New York 1958 (The 1958 New York Convention , on the the Recognition and Enforcement of

¹²⁵⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, halaman 43.

Foreign Arbitral Award). Dalam pasal ini dapat diketahui apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing ialah putusan yang diambil atau dibuat di luar negeri.

Yang menjadi patokan untuk menentukan apakah putusan digolongkan arbitrase asing, ialah faktor territory. Setiap putusan yang dibuat di luar wilayah hukum suatu negara, tergolong putusan arbitrase internasional, dengan demikian yang dimaksud putusan dengan arbitrase internasional adalah setiap putusan yang diambil (dibuat) di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹²⁶⁾ Definisi tersebut juga sejalan dengan definisi mengenai putusan arbitrase internasional menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.¹²⁷⁾

Sejalan dengan penegasan di atas, patokan untuk menentukan apakah putusan yang diambil diklasifikasi sebagai putusan arbitrase nasional berpatokan pada faktor wilayah atau territory adalah setiap putusan yang diambil di dalam wilayah Republik Indonesia tergolong putusan arbitrase nasional. Patokan ini merupakan kebalikan asas atau faktor territory putusan arbitrase internasional.

¹²⁶⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, halaman 297.

¹²⁷⁾ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Ketentuan Undang-undang Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Dalam hubungan dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase nasional, Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut :

Pasal 59 :

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60 :

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Penjelasan atas Pasal 60 :

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61 :

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62 :

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Penjelasan atas Pasal 62 ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.

Pasal 63 :

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64 :

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam RV, masalah eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 634, 637 dan 639, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 634 :

- (1) Dalam waktu empat belas hari sekedar mengenai Jawa dan Madura, dan jika mungkin dalam waktu tiga bulan sekedar mengenai tempat-tempat lainnya, terhitung mulai hari diambilnya putusan, maka asli dari putusan itu oleh salah seorang wasit atau oleh seorang jurukuasa yang khusus dikuasakan oleh para wasit atau salah seorang mereka, harus disimpan kepada kantor Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya putusan itu telah diambilnya.
- (2) Akte penyimpanan tersebut harus ditulis pada bagian bawah atau bagian samping dari asli putusan yang disimpan, dan harus ditandatangani oleh panitera dan orang yang melakukan penyimpanan tersebut.
- (3) Panitera pengadilan harus membuat akte penyimpanan tersebut; tiada biaya untuk akte itu maupun biaya-biaya lain dapat diminta dari para wasit, karena para pihak sendirilah yang menanggung biaya-biaya itu.

Pasal 635 :

Para wasit diwajibkan, selain putusan mereka, menyimpan pula asli surat pengangkatan mereka atau salinan resmi dari surat itu pada kantor panitera.

Pasal 637 :

Putusan wasit harus dijalankan dengan suatu perintah dari ketua Pengadilan Negeri yang disebutkan dalam pasal 634, yang dikeluarkan dalam bentuk seperti yang diuraikan dalam pasal 635. Perintah itu dituliskan di atas asli surat putusan wasit dan akan dibuat salinan apabila ia dikeluarkan.

Pasal 639 :

Putusan wasit yang memuat perintah pelaksanaan yang diberikan oleh Ketua dari Pengadilan Negeri yang berwenang, harus dijalankan menurut cara yang biasa berlaku bagi suatu pelaksanaan putusan pengadilan.

c. Yang berwenang Melakukan Eksekusi

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas jelas bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri,

sedangkan pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Badan arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Pada hakekatnya suatu Badan atau Mahkamah Arbitrase bukan badan kekuasaan resmi, tetapi hanya merupakan badan swasta. Disamping itu tidak memiliki perangkat juru sita yang khusus berfungsi melaksanakan perintah eksekusi, sedangkan perangkat pejabat juru sita hanya terdapat pada lingkungan Pengadilan.

Oleh karena itu, apabila para pihak tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara "sukarela" yang berwenang untuk memaksa pelaksanaan ialah Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu, diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeksekusi, berpedoman pada ketentuan kewenangan "relatif". Patokan untuk menentukan kewenangan relatif didasarkan pada tempat putusan diambil. Pengadilan yang berwenang untuk mengeksekusi ialah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana putusan diambil. Patokan penentuan kewenangan relatif dalam hal ini, sama dengan penggarisan yang berlaku terhadap eksekusi putusan Pengadilan.

Namun ketentuan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk "mendelegasikan" pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain. Misalnya, putusan arbitrase diambil di Bandung, karena para pihak atau Mahkamah Arbitrase yang ditunjuk menetapkan kota Bandung sebagai tempat kedudukan arbitrase (*place of arbitration*). Dari segi tempat pengambilan putusan, pelaksanaan eksekusi jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi ternyata semua atau sebagian barang yang hendak dieksekusi terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Jadi yang menjalankan eksekusi ialah Pengadilan Negeri Semarang, berdasar pada "pendelegasian" dari Pengadilan Negeri Bandung. Pendelegasian

eksekusi yang demikian sama dengan penggarisan dan yang dipraktekkan terhadap eksekusi putusan pengadilan.¹²⁸⁾

d. Pendeponiran Putusan Arbitrase

Tahap pertama dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase adalah "pendeponiran" putusan. Ada berbagai hal yang perlu dijelaskan mengenai tata cara deponir putusan arbitrase :

d.1. Pengertian Deponir

Mahkamah arbitrase menjatuhkan putusan maka putusan harus disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Adapun tujuan pendeponiran ialah agar putusan dapat dimintakan eksekusi, apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak Ketua Pengadilan Negeri, melainkan para pihak yang berkewajiban melaksanakan eksekusi tersebut atau dengan kata lain melaksanakan sendiri isi putusan arbitrase tersebut. Sedangkan eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajiban berdasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksanakan kewajibannya itu, maka diperlukan campur tangan Ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan.

Agar dapat dieksekusinya suatu putusan arbitrase, sebelumnya harus dilakukan suatu prosedur hukum yang disebut dengan "Akta Pendaftaran". Yang dimaksudkan dengan akta pendaftaran adalah pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir dari

¹²⁸⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, halaman 298—299.

putusan arbitrase asli atau salinan otentik yang ditandatangani bersama-sama oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan putusan arbitrase tersebut. Penandatanganan dilakukan pada saat pencatatan dan penandatanganan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.

Perlu pula ditekankan bahwa tanpa dilakukan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri pada waktunya, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jadi seandainya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan sendiri putusan tersebut secara sukarela dan berbuat kelalaian dalam melakukan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri tersebut mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah. Tindakan pengesahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri ini dalam praktek sering disebut dengan istilah "deponir".¹²⁹⁾

Arti deponir sama dengan "deposit", dalam istilah hukum Indonesia lazim disebut "menyimpan" atau "pendaftaran". Jadi bila ditinjau dari segi administrasi yustisial, tindakan deponir sama dengan "mendaftarkan" atau "meregister" putusan arbitrase di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dengan demikian mendeponir atau mendeposit putusan arbitrase, berarti "mendaftarkan" putusan agar panitera Pengadilan melaksanakan register dalam buku yang khusus dibuat untuk itu.

Akan tetapi tanpa mengurangi maknanya memenuhi tindakan administrasi yustisial, deponir sekaligus mengandung syarat formal kesempurnaan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi baru mempunyai nilai yang sah, apabila putusan arbitrase telah dideponir lebih dahulu. Dengan dilakukan tindakan deponir mengandung makna ganda,

¹²⁹⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 161—162.

pada satu segi merupakan pemenuhan administrasi yustisial, dan pada segi lain sebagai syarat formal keabsahan permohonan eksekusi. Tanpa pendeponiran putusan, permintaan eksekusi tidak dapat diterima.¹³⁰⁾

Jadi tindakan deponir putusan arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, tetapi telah bersifat konstitutif, dalam arti merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika tidak dilakukan pendeponir tersebut. Lihat Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

d.2. Batas Tenggang Waktu Deponir

Ketentuan batas jangka waktu deponir dalam Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 59, yaitu dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sedang dalam Rv ketentuan batas waktu deponir adalah 14 hari untuk lingkungan wilayah Pulau Jawa – Madura dan 90 hari (3 bulan) untuk wilayah lain (luar Jawa – Madura), hal in seperti yang diatur dalam Pasal 634 ayat (1) Rv.

d.3. Yang Wajib Mendeponir

Pendeponiran putusan arbitrase bersifat "imperatif", artinya setiap putusan "wajib" dideponir. Di samping itu, seperti yang sudah dijelaskan, pendeponiran sekaligus untuk memenuhi syarat formal permintaan eksekusi. Kewajiban mendeponir putusan dibebankan kepada arbiter atau kuasanya (Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

¹³⁰⁾ M. Yahya Harahap, op-cit, halaman 300.

Tegasnya, pendeponiran merupakan kewajiban dan tanggung jawab arbiter. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut arbiter dapat menegaskan kepada seorang kuasa yang khusus mewakili pelaksanaan deponir. Jadi kewajiban dan tanggung jawab tugas deponir bukan dibebankan kepada para pihak.

Pendeponiran adalah merupakan salah satu syarat formal permohonan eksekusi, jika sekiranya arbiter lalai melakukan sehingga pihak yang berkepentingan tidak dapat meminta permohonan eksekusi, maka kelalaian tersebut jelas menimbulkan kerugian. Kelalaian yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada para arbiter, dan sekaligus kelalaian itu merugikan kepentingan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kelalaian pendeponiran memberi hak kepada pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian berdasar alasan perbuatan melawan hukum.

Hal ini perlu menjadi peringatan bagi para anggota arbiter, mereka harus menghindari terjadinya kelalaian. Apabila terjadi, akan memikul resiko tuntutan ganti rugi kerugian secara tanggung renteng. Resiko tanggung renteng tersebut tidak dapat dilepaskan arbiter atas alasan telah ditunjuk kuasanya untuk melaksanakan tugas deponir. Jadi alasan penunjukan kuasanya tersebut tidak dapat melenyapkan sifat tanggung renteng kepada semua anggota arbiter kalau arbiter berupa majelis arbitrase.¹³¹⁾

d.4. Pendeponiran di Kepaniteraan Pengadilan

Pelaksanaan tindakan pendeponiran dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Adapun kepaniteraan Peradilan Negeri yang berwenang

¹³¹⁾ ibid, halaman 301.

menerima ialah kantor Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya putusan arbitrase dijatuhkan.

Ketentuan ini sama dengan patokan penentuan kompetensi relatif pelaksanaan eksekusi. Eksekusi menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya putusan arbitrase dijatuhkan. Memang ketentuan tentang kewenangan relatif pendeponiran dengan kewenangan relatif eksekusi harus sejalan. Antara keduanya terjalin sistem yang terintegrasi. Jika tidak, maka dapat menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan fungsi eksekusi. Malahan bisa menimbulkan saling bentrok, apabila berbeda kewenangan relatif antara pendeponiran dengan fungsi eksekusi.

Mengenai bentuk permintaan deponir tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini memberi kesimpulan bahwa untuk permintaan deponir adalah berbentuk bebas, boleh diajukan secara tertulis atau secara lisan. Permintaan deponir yang diajukan secara tertulis atau lisan dianggap sah, yang terpenting bahwa pendeponiran jangan sampai melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.¹³²⁾

d.5. Panitera Membuat Akta Deponir

Kewajiban dan fungsi panitera dalam penerimaan permintaan deponir adalah membuat akta deponir. Pembuatan akta deponir bersifat imperatif, panitera wajib membuat akta deponir. Kewajiban panitera membuat akta deponir segera timbul pada saat disampaikan permintaan, tidak boleh ditunda-tunda karena akan berakibat fatal.

Bentuk akta deponir diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta deponir. Tampaknya, bentuk akta deponir yang dikehendaki oleh undang-undang tidak dibuat secara

¹³²⁾ Ibid, halaman 302.

sendiri. Cukup merupakan "catatan" pada bagian akhir atau dipinggir putusan. Isi catatan berupa penjelasan tentang diterima putusan arbitrase untuk dideponir.

Tanpa mengurangi bentuk akta yang sederhana, untuk adanya tanda bukti pertanggungjawaban bagi arbiter yang menyampaikan panitera memberi tanda terima atas putusan yang dideponir. Meskipun undang-undang tidak menentukan, hal itu sangat penting sebagai pegangan bagi arbiter, baik mengenai adanya penerimaan putusan oleh panitera maupun mengenai kepastian tanggal penyampaian dan tanggal pendeponiran.

Selanjutnya akta deponir tersebut akan dilandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya. Tampaknya dalam undang-undang arbitrase tidak mengatur ketentuan mengenai hari atau tanggal pendeponiran dalam akta. Seolah-olah sudah cukup membubuhkan tanda tangan oleh panitera dan orang yang mendeponir, tidak diperlukan pencantuman hari atau tanggal dalam akta deponir. Pada hakekatnya akta deponir bersifat dan memiliki daya autentikasi, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri.

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hilang daya autentikasi apabila tidak memuat hari dan tanggal pembuatan. Jadi meskipun undang-undang tidak menyebut pencantuman hari atau tanggal, hal tersebut merupakan keharusan dalam pembuatan akta deponir putusan arbitrase.¹³³⁾

d.6. Dokumen yang Dideponir

Mengenai apa saja yang harus dideponir diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Bertitik tolak dari ketentuan

¹³³⁾ Ibid, halaman 302—303.

pasal dimaksud, yang harus diserahkan untuk dideponir di kepaniteraan Pengadilan Negeri terdiri dari putusan atau salinan otentik putusan arbitrase dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya.

Tujuan ikut sertanya surat penunjukan anggota arbiter dilampirkan pada pendeponiran adalah untuk menguji dan meneliti kebenaran dan keabsahan penunjukan. Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat memastikan apakah putusan benar-benar diambil oleh anggota arbiter yang telah ditunjuk serta menerima penunjukan. Sebab sekiranya ada fakta bahwa arbiter yang memutus bukan orang yang sebenarnya ditunjuk serta menerima penunjukan, putusan yang diambil mengandung cacat. Putusan dianggap tidak sah, karena putusan yang diambil dilakukan oleh arbiter yang tidak berwenang. Terhadap putusan yang seperti itu tidak dapat diberikan *exequatur* dan tidak dapat dieksekusi, bahkan menurut Pasal 70 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permintaan pembatalan putusan oleh para pihak.

d.7. Biaya Deponir Dibebankan kepada Para Pihak

Meskipun tugas deponir diwajibkan kepada anggota arbiter, akan tetapi mengenai biaya pembuatan akta deponir maupun biaya-biaya lain yang diperlukan dibebankan kepada para pihak.

Pembayaran biaya merupakan syarat formal pendeponiran. Pembayaran biaya dalam proses peradilan pada dasarnya tergolong tata tertib beracara, dengan demikian biaya pendeponiran merupakan aturan ketertiban umum. Jadi selama biaya belum dibayar, pendeponiran tidak dapat dilaksanakan panitera.

Sebaiknya pada saat arbiter atau kuasanya yang ditugaskan untuk melaksanakan pendeponiran, lebih dulu meminta biaya dari para pihak. Sedapat mungkin berusaha meminta biaya kepada para pihak sebelum

batas tenggang waktu deponir berakhir. Jika sudah berusaha, tetapi tidak dipenuhi, keterlambatan pendeponiran tidak dapat dipikulkan kepada arbiter. Tidak dideponir putusan disebabkan keengganan para pihak menyerahkan biaya yang diperlukan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan arbiter melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, para pihak atau salah satu pihak tidak dapat menuntut kerugian kepada arbiter.

d.8. Pemberitahuan Deponir kepada Para Pihak

Mengenai perlu atau tidak pendeponiran diberitahukan kepada para pihak tidak diatur dalam undang-undang dan tidak dijumpai penegasan tentang hal ini. Secara tersirat hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 UNCITRAL, dimana semua tindakan dan hal yang terjadi pada semua tingkat proses harus diberitahu kepada para pihak. Menurut M. Yahya Harahap¹³⁴⁾, pemberitahuan pendeponiran kepada para pihak, masih merupakan satu rangkaian lanjutan dari pemberitahuan putusan. Itu sebabnya arbiter wajib memberitahu tindakan pendeponiran yang dilakukan kepada para pihak.

Selain dari pada itu, pemberitahuan pendeponiran sangat penting kaitannya dengan permintaan pelaksanaan eksekusi yang didahului dengan proses permintaan *exequatur*. Apabila pihak yang berkepentingan mengetahui pendeponiran, dia dapat memperkirakan waktu yang tepat untuk mengajukan permintaan *exequatur*.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat begitu besar urgensi pemberitahuan pendeponiran kepada para pihak, terutama kepada pihak yang berkepentingan yakni pihak yang dimenangkan. Dari satu segi, jika bertitik tolak dari fungsi dan tanggung jawab pendeponiran adalah menjadi beban kewajiban arbiter, maka pemberitahuan pendeponiran

¹³⁴⁾ Ibid, halaman 304—305.

adalah kewajiban arbiter. Akan tetapi dari segi lain, ditinjau dari segi fungsi pelayanan yang diemban pengadilan, maka panitera memikul kewajiban menyampaikan pemberitahuan pendeponiran kepada para pihak. Bukankah sejak tanggal panitera menerima dan membuat akta deponir, segala sesuatu tata tertib beracara beralih ke tangan panitera. Dengan demikian cukup alasan untuk meletakkan kewajiban pemberitahuan deponir kepada para pihak menjadi kewajiban dan tanggung jawab panitera. Dalam hal ini, menugaskan juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan deponir kepada para pihak in person, di tempat kediaman mereka.

e. Permohonan Untuk Mendapatkan Exequatur

Sebagai lanjutan dari tahap deponir ialah permohonan meminta untuk mendapat exequatur terhadap putusan arbitrase. Permintaan mendapat exequatur merupakan salah satu tahap permohonan terhadap eksekusi putusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dijalankan setelah mendapat exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri, dan exequatur baru dapat diberikan setelah dilakukan lebih dahulu pendeponiran.

e.1. Pengertian Exequatur

Adapun makna dari exequatur adalah permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Arbitrase. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, lebih dahulu memberikan exequatur terhadap putusan.

Agak berbeda dengan permintaan eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, tidak diperlukan proses exequatur, tetapi langsung dapat diminta eksekusi. Sebaliknya terhadap putusan arbitrase, harus dimohon lebih dahulu permintaan "mendapat exequatur".

Urgensi dari tahap proses permintaan exequatur adalah untuk memberi kesempatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mempelajari dan meneliti putusan arbitrase. Sebelum memberi exequatur, lebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria, sebagai berikut :

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Kemudian putusan arbitrase dibubuhi perintah dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan diletapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.¹³⁵⁾

Dari hasil penelitian tersebut, Ketua Pengadilan Negeri kemudian menentukan sikap jika berpendapat putusan dapat dieksekusi, dia memberi exequatur pada putusan, yang dilanjutkan dengan tahap pengeluaran "surat penetapan" perintah eksekusi. Sebaliknya, jika dalam putusan ditemukan cacat yang sedemikian rupa serius dan fundamental, sehingga putusan tidak dapat dieksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri menolak pemberian exequatur, dimana terhadap penolakan eksekusi ini

¹³⁵⁾ Suyud Margono, *op.cit*, halaman 132.

tidak mempunyai upaya hukum apapun. Penolakan pemberian exequatur, dituangkan dalam surat penetapan, yang dilengkapi dengan alasan pertimbangan yang cukup dasarnya. Penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan jika ada alasan-alasan sebagai berikut : ¹³⁶⁾

- (a) Arbiter memutuskan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
- (b) Putusan arbiter bertentangan dengan kesusilaan.
- (c) Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
- (d) Arbiter memutus perkara tidak memenuhi keseluruhan syarat sebagai berikut :
 - (a) Mengenai perdagangan
 - (b) Mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan
 - (c) Mengenai sengketa yang menurut hukum dan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian (lihat Pasal 62 juncto Pasal 4 dan 5 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999)

Dari pengertian pemberian exequatur, dapat disimak betapa besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan dapat atau tidak dieksekusi putusan arbitrase. Jadi seolah-olah Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh menilai benar atau tidak putusan arbitrase, padahal tidak demikian. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pemberian exequatur, terutama pada era globalisasi sekarang ini maka wawasan hakim mengenai ruang lingkup permasalahan arbitrase perlu terus ditingkatkan.

¹³⁶⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 163.

e.2. Pemberian Exequatur Bersifat Formal

Di atas sudah disinggung bahwa dalam pemberian exequatur Ketua Pengadilan Negeri melakukan penelitian yang seksama terhadap putusan arbitrase, apakah putusan sudah benar dan tepat sehingga dapat diberikan exequatur, atau apakah putusan mengandung cacat yuridis sehingga tidak mungkin dieksekusi dengan jalan menolak pemberian exequatur. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemberian exequatur, Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan.

Salah satu cara yang dapat menghindari diri dari tindakan yang melampaui batas kewenangan yaitu dengan jalan mengetahui dan menyadari patokan batas kewenangan itu sendiri. Berikut ini beberapa patokan yang bisa dipakai sebagai pegangan bagi Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

e.2.a. Pemberian Exequatur Bukan Pemeriksaan Banding

Patokan pertama yang harus dipegang pada pemberian exequatur, tidak boleh dianggap dan bertintak seolah-olah penelitian pemberian exequatur merupakan pemeriksaan tingkat banding. Tidak boleh dirubah proporsi penelitian pemberian exequatur dari fungsi tindakan eksekusi ke arah fungsi kewenangan tingkat banding.

Tidak ada hak dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam pemberian exequatur untuk meneliti dan memeriksa ulang sengketa secara keseluruhan. Dia tidak berhak meminta berkas sengketa dari badan arbitrase yang menjatuhkan putusan. Dia tidak berwenang meminta berita acara pemeriksaan, juga tidak boleh meminta alat-alat bukti yang disebut dalam putusan.¹³⁷⁾

¹³⁷⁾ M. Yahya Harahap, *op cit*, halaman 306.

e.2.b. Pemberian Exequatur Bukan Fungsi Pengawasan

Fungsi dan kewenangan penelitian pemberian exequatur tidak boleh dimanipulasi menjadi tindakan fungsi pengawasan. Tidak ada hak dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri mengawasi proses pemeriksaan dan pengambilan putusan yang dilakukan Mahkamah Arbitrase. Yang berhak dan berwenang untuk mengawasi perilaku dan tindakan para anggota arbiter, sepenuhnya berada di tangan para pihak serta badan arbitrase dimana Mahkamah Arbitrase yang bersangkutan bernaung.

Sekiranya para pihak berpendapat, keputusan yang diambil mengandung cacat baik berupa pemeriksaan yang melampaui batas, putusan melampaui daripada apa yang dituntut atau ada kecurangan dan sebagainya, para pihak yang berhak menuntut pelurusannya melalui upaya perlawanan pembatalan berdasar ketentuan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, sedang dalam Rv diatur dalam Pasal 643 Rv.

Dari penjelasan itu, Ketua Pengadilan Negeri berwenang menilai kecakapan dan kredibilitas anggota arbiter. Tidak pula berwenang memberi tafsiran atas putusan, juga tidak berwenang mengoreksi atau merevisi putusan, apalagi untuk menambah isi putusan. Tugas pokok Ketua Pengadilan Negeri dalam fungsi penelitian exequatur atas putusan arbitrase hanya terbatas mengabulkan pemberian exequatur atau menolak pemberian exequatur. Yang penting diingat bahwa penelitian dilakukan dengan obyektif, dan tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang atau rules yang disepakati para pihak.

e.2.c. Kewenangan Penelitian Exequatur Bersifat Formal

Patokan yang ketiga, pada prinsipnya penelitian terhadap putusan arbitrase dalam melaksanakan fungsi pemberian exequatur adalah bersifat formal. Hal-hal yang boleh diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri hanya sepanjang yang menyangkut ketentuan-ketentuan formal, tidak dibenarkan menilai dan meneliti materi putusan, karena penelitian pemberian exequatur bukan merupakan pemeriksaan tingkat banding atau kasasi. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan penelitian exequatur bersifat formal adalah sebagai berikut :

(i) Aturan Formal yang Dapat Ditolelir Pelanggarannya

Penelitian semata-mata diarahkan pada aturan formal. Itu pun hanya diarahkan pada penilaian pelanggaran aturan formal :

- i. yang serius, dan
- ii. fundamental yang memiliki ancaman batalnya putusan apabila ketentuan formal yang bersangkutan dilanggar.

Tidak seluruh pelanggaran aturan formal mutlak bersifat "serius" atau "fundamenta".

Adakalanya suatu aturan formal hanya sekedar petunjuk tata cara. Ada pula aturan formal yang bersifat mengatur tapi tidak bersifat "imperatif", sehingga dapat dikesampingkan berdasar kebijaksanaan dan kebutuhan kelancaran pemeriksaan secara kasuistik. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan formal yang sejenis itu tidak bernilai serius dan fundamental.

Contoh berikut ini dapat menjadi patokan dalam melaksanakan penelitian terhadap putusan arbitrase :

- (1) menyatakan setiap tindakan sementara yang diperintahkan Mahkamah Arbitrase dituangkan dalam putusan sela. Ternyata hal itu tidak dituangkan dalam

putusan, tetapi secara utuh dicantumkan dengan sempurna dalam putusan akhir. Pelanggaran aturan formal yang sejenis itu, dianggap tidak serius dan tidak fundamental, karena aturan sendiri tidak bersifat imperatif, tetapi hanya aturan yang bernilai "mengatur".

- (2) Kesalahan penulisan nama yang tidak sampai mengakibatkan kekeliruan mengenai person yang bersangkutan, tidak dapat dikategori sebagai pelanggaran atas penyebutan identitas. Misalnya Rahman ditulis menjadi Rahmin, tidak sampai menimbulkan kekeliruan identitas person. Pelanggaran atau kekeliruan itu, tidak serius dan fundamental.

- (3) Banyak aturan formal yang tidak memiliki kualitas membatalkan putusan. Umpamanya, putusan dijatuhkan melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan yang diatur Pasal 620 Rv. Misalnya, batas waktu penyelesaian yang disepakati para pihak 6 bulan, ternyata mahkamah baru menjatuhkan putusan dalam tempo 8 bulan.

Sekiranya dalam putusan tidak dijelaskan keterlambatan tersebut, pelanggaran atas batas waktu dimaksud, tidak dianggap terlampaui serius dan fundamental. Tidak layak hal itu dijadikan alasan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pemberian exequatur.

- (4) Termasuk juga ke dalam kelompok aturan formal yang tidak bersifat imperatif, mengenai kelalaian pencantuman biaya penyelesaian. Sekiranya putusan lupa menetapkan beberapa jumlah biaya, kurang tepat dijadikan sebagai alasan untuk menolak pemberian exequatur. Karena masalah besarnya jumlah biaya penyelesaian selama

proses pemeriksaan arbitrase, merupakan tanggung jawab perhitungan arbitrase yang bersangkutan. Masalah itu dapat diselesaikan para pihak di hadapan badan arbitrase. Jika sekiranya pun hal itu tidak dapat diselesaikan di sana, dapat dituntut pihak yang berkepentingan melalui gugat biasa ke Pengadilan Perdata.

- (5) Begitu juga penolakan Mahkamah Arbitrase untuk menyetujui permintaan salah satu pihak mengenai pemeriksaan setempat atas barang yang disengketakan, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan formal yang serius dan fundamental. Sebab masalah diperlukan atau tidak pemeriksaan setempat, tergantung sepenuhnya pada pertimbangan Mahkamah Arbitrase. Dalam praktek peradilan pun, hal itu tidak selamanya dianggap serius dan fundamental.
- (6) Kelalaian mencantumkan tanggal putusan. Menurut hemat kita, tidak merupakan pelanggaran aturan formal yang sangat serius. Kelalaian itu, dapat diminta penegasan dari pihak Mahkamah atau Badan Arbitrase yang bersangkutan, sehingga kurang wajar untuk menjadikan sebagai dasar alasan menolak pemberian exequatur.

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 632 ayat (1) Rv atau Pasal 48 ayat (4) ICSID, tidak pantas dianggap aturan formal yang bersifat imperatif. Dalam pasal tersebut ditegaskan setiap putusan mencantumkan pendapat atau pendirian masing-masing anggota arbiter yang lazim disebut individual opinion atau dissenting opinion.

Sekiranya putusan lalai atau tidak mencantumkan individual opinion, tidak sampai membatalkan putusan, karena pencantumannya dalam putusan bersifat "fakultatif". Oleh karena itu, apabila hal itu dilanggar, tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang serius dan fundamental. Yang pokok asal putusan cukup mengemukakan dasar-dasar alasan pertimbangan. Kalau begitu kelalaian tentang hal ini, tidak berbobot untuk menolak pemberian *exequatur*.

- (7) Bagaimana kalau pemeriksaan dan putusan diucapkan terbuka untuk umum? Apakah pelanggaran atas aturan ini dapat dikategori sebagai pelanggaran aturan formal yang serius dan fundamental? Ditinjau dari satu segi mungkin sangat serius dan fundamental, karena salah satu asas pemeriksaan arbitrase dilakukan dengan "pintu tertutup". Akan tetapi asas itu pada hakekatnya bukan berlaku umum sebagai aturan yang bernilai ketertiban umum atau *public policy*. Aturan itu hanya merupakan "pengecualian" dari tata tertib umum. Menurut ketertiban umum yang hakiki, setiap proses pemeriksaan di depan persidangan harus dilakukan dengan cara "terbuka untuk umum"

Oleh karena aturan ini merupakan pengecualian dari aturan ketertiban umum, nilai normatifnya lebih cenderung sebagai petunjuk. Nilai normatifnya tidak bersifat imperatif. Hal itu misalnya dapat dirasakan dari bunyi ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan BANI yang berbunyi "*semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup*".

Rumusannya tidak begitu terasa bersifat "memaksa". Malah bersifat lunak tanpa ancaman apapun terhadap pemeriksaan dan putusan. Memang dalam Pasal 18 ayat (5) ICSID rumusan terhadap aturan ini agak bernada keras dan cenderung bersifat memaksa. Rumusannya berbunyi : *"The centre shall not publish the award without the consent of the parties"*.

Di situ terdapat kalimat *shall not publish*. Jika semata-mata bertitik tolak dari kalimat tersebut, memang cenderung bersifat imperatif. Namun demikian, pasal itu tidak mengandung ancaman apa pun. Barangkali memang demikian maksud Pasal 18 ayat (5) UNCITRAL. Aturan larangan mempublikasi pemeriksaan dan putusan arbitrase, tidak merupakan aturan yang mengandung ancaman pembatalan. Hanya aturan pedoman yang sebaiknya dipatuhi. Sekiranya dilanggar akibat hukumnya terhadap pemeriksaan dan putusan tidak sangat serius. *The award may be public only with the consent of both parties*, demikian rumusannya. Di dalamnya tidak ada ancaman pembatalan. Meskipun terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk menuntut ganti kerugian kepada anggota arbitrase atas pelanggaran, hal itu tidak mengurangi nilai keabsahan keputusan. Oleh karena itu pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak serius dan fundamental atas keabsahan putusan. Tidak layak menjadikannya sebagai dasar alasan menolak pemberian *exequatur*. Lagi pula, sekiranya pun putusannya dianggap batal sehingga harus dilakukan pemeriksaan ulang, apa manfaatnya

bagi kepentingan penyelesaian sengketa? Bagaimanapun, hal-hal yang perlu dirahasiakan sudah sempat dipublikasi. Bukankah lebih tepat menganggap pelanggaran itu sebagai kecelakaan kecil yang tidak membahayakan terhadap keabsahan putusan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan penilaian yang betul-betul teliti, apakah aturan formal yang diabaikan dalam putusan sangat serius dan fundamental. Suatu pelanggaran aturan formal yang tidak sampai berderajat merugikan dan memperkosa hak dan kepentingan salah satu pihak, tidak layak dijadikan dasar untuk menolak pemberian *exequatur*. Jangan sampai terperosok menyamaratakan, semua pelanggaran aturan formal mengandung cacat yang fatal terhadap keabsahan putusan. Diperlukan sikap dan kebijaksanaan moderasi dan toleransi apabila aturan formal yang terlanggar tidak bersifat imperatif dan tidak mengandung ancaman pembatalan. Sikap dan penilaian yang terlampau kaku dan ekstrim bisa membahayakan kelangsungan perkembangan lembaga arbitrase di Indonesia. Dampak yang lebih jauh dari sikap ini, bisa menghambat kelancaran laju pertumbuhan dunia bisnis, penanaman modal serta alih teknologi di tanah air.

(ii) Pelanggaran Aturan Formal yang Tidak Dapat Ditolelir dan Patokan yang Harus Dijadikan Pegangan Ketua Pengadilan Negeri untuk Menilai Apakah Aturan yang Dilanggar Tidak Bisa Ditolelir adalah :

- apabila pelanggaran aturan itu sangat serius dan fundamental,

- sedemikian rupa seriusnya, sehingga pelanggaran itu nyata-nyata mengakibatkan :
 - perkosaan hak dan kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau
 - pelanggaran itu telah menyebabkan terjadinya unfair-trial.
- pada dasarnya, aturan format yang bisa menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap keabsahan putusan ialah aturan yang bersifat imperatif yang dibarengi dengan ancaman pembatalan.

Misalnya :

(a) Pelanggaran atas penunjukan arbiter.

Pelanggaran terhadap aturan formal penunjukan arbiter bisa meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek itu tergantung pada rules arbitrase yang disepakati. Jika aspek arbitrase yang disepakati para pihak Rv, untuk menguji apakah ada dilanggar aturan formal penunjukan arbiter, merujuk kepada ketentuan penunjukan yang digariskan dalam Pasal 618 dan 619 Rv. Seandainya rules yang mereka sepakati UNCITRAL atau BANI, rujukan pengujian apakah ada aturan formal yang dilanggar atas penunjukan arbiter,berpedoman kepada ketentuan Pasal 6, 7, dan 8 UNCITRAL Arbitration Rules atau Pasal 5 dan 6 Peraturan Prosedur BANI.¹³⁸⁾ Begitu pula bila rules arbitrase yang disepakati oleh para pihak adalah Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999,maka untuk menguji apakah ada dilanggar aturan

¹³⁸⁾ M. Yahya Harahap, Ibid, halaman 307—311.

formal penunjukan arbiter, merujuk kepada ketentuan penunjukan yang diatur dalam Pasal 12 s/d Pasal 21.

Pelanggaran aturan yang berakibat fatal dan serius pada penunjukan anggota arbiter bisa terjadi apabila salah seorang arbiter yang duduk dalam Mahkamah Arbitrase, bukan orang yang disetujui oleh para pihak, kecuali jika penunjukan telah mereka serahkan sepenuhnya kepada badan arbitrase yang mereka sepakati.

Penunjukan arbiter dianggap pelanggaran yang serius, apabila dalam perjanjian para pihak telah sepakat arbiter yang akan berfungsi menyelesaikan sengketa terdiri dari arbiter tunggal atau sole arbitrator. Nyatanya badan arbitrase yang disepakati, memaksakan menunjuk tiga orang anggota arbiter.

Bisa juga dianggap pelanggaran yang serius atas penunjukan arbiter, salah satu pihak telah menunjuk seorang atau beberapa calon arbiter yang dikehendaki. Ternyata hal itu tidak diperhatikan dan tidak diterima badan arbitrase meskipun tidak ada keberatan dari pihak lawan. Karena badan arbitrase yang bersangkutan menunjuk orang lain diluar orang-orang yang dicalonkan. Dalam hal yang seperti ini, badan arbitrase telah melampaui batas kewenangan. Pelanggaran atas penunjukan ini dianggap serius dan fundamental. Demikian Ketua Pengadilan dapat menjadikan sebagai dasar alasan untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan.

Penunjukan arbiter, dianggap juga sebagai pelanggaran aturan formal yang fatal, apabila para pihak dalam

perjanjian telah sepakat arbiter yang akan menyelesaikan sengketa terdiri dari tiga orang. Tetapi badan arbitrase yang dilunjuk memaksakan arbiter tunggal. Berarti secara formal bentuk wujud (constitution) Mahkamah Arbitrase yang memutus, tidak sah. Semua hasil pemeriksaan dan putusan yang diambil dengan sendirinya batal demi hukum. Oleh karena itu, sangat beralasan untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan yang seperti itu.

Pelanggaran lain terhadap aturan formal penunjukan arbiter bisa berbentuk penolakan badan arbitrase terhadap orang-orang yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian para pihak telah mencantumkan nama-nama arbiter yang akan bertindak menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ternyata hal itu tidak diterima oleh badan arbitrase, dan menunjuk anggota arbiter lain diluar orang yang telah disebut dalam perjanjian. Pelanggaran atas aturan formal yang demikian sangat serius dan fundamental. Pelanggaran itu telah sengaja memperkosa kehendak bebas para pihak untuk menentukan anggota arbiter yang mereka sepakati. Pelanggaran ini sudah cukup menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase.

Demikian gambaran sekilas beberapa aspek pelanggaran aturan formal yang berderajat serius dan fundamental dalam masalah penunjukan arbiter. Sumber utama bagi Ketua Pengadilan untuk menilai ada atau tidak pelanggaran aturan formal penunjukan anggota arbiter, merujuk kepada ketentuan penunjukan arbiter yang

digariskan. Lebih lanjut, penelitian diteruskan memeriksa surat penunjukan anggota arbiter. Dengan cara penelitian tersebut, memudahkan Ketua Pengadilan dalam memberi penilaian yang obyektif.

(b) Pelanggaran atas asas audi et alteram partem

Semua rules arbitrase telah menempatkan asas audi et alteram partem dalam proses pemeriksaan. Asas ini tersirat dalam Pasal 626 Rv dan pasal seterusnya.

Begitu juga dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Prosedur BANI. Juga dalam Pasal 43, 44, 45, dan 46 ICSID, terkandung penegasan aturan formal untuk menegakkan asas pemberian kesempatan yang sama untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka pada setiap tahap proses pemeriksaan.

Malahan dalam Pasal 15 UNCITRAL asas audi et alteram partem dirumuskan secara tegas dalam kalimat yang berbunyi : *"that parties are treated with equality and that at any statge of proceeding each party is given a full opportunity of presenting his case"*.¹³⁹⁾

Dalam Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, asas audi et alteram partem diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing dan dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pengakuan asas audi et alteram partem dalam setiap tahap proses pemeriksaan tidak hanya meliputi

¹³⁹⁾ Ibid, halaman 311-312.

Dan hal itu dapat dijadikan dasar alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pemberian exequatur. Malahan apabila secara nyata dan jelas terlihat ada tata cara pemeriksaan yang bersifat "parsial" atau berat sebelah, dapat dikategori sebagai pelanggaran ketentuan tata tertib proses pemeriksaan dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran aturan formal yang sangat serius dan fundamental. Sebab tata cara pemeriksaan yang parsial, jelas-jelas merupakan perkosaan terhadap kepentingan salah satu pihak.

Umpamanya kepada pihak respondent telah diperintahkan mahkamah untuk menyampaikan dokumen pada hari dan tanggal yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UNCITRAL. Ternyata hal itu tidak dipenuhi, dan berbarengan dengan itu respondent telah menjelaskan alasan yang cukup sebagai dasar kenapa tidak bisa memenuhi pada hari itu. Umpamanya ia menjelaskan alasan bahwa dokumen yang diminta untuk diserahkan disimpan di Medan. Oleh karena itu minta ditunda penyerahan di hari lain. Mahkamah Arbitrase menolak tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Bukankah dalam peristiwa ini telah terjadi pelanggaran yang serius terhadap tata tertib proses pemeriksaan? Sekiranya hal itu ada dijumpai dalam putusan, dapat dijadikan sebagai isyarat tentang adanya pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem. Oleh karena itu dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian exequatur.

Pokoknya, apabila Ketua Pengadilan Negeri menemukan fakta adanya pelanggaran audi et alteram partem yang sangat menyolok dan serius, dapat dibenarkan sebagai dasar untuk menolak pemberian exequatur.

Tentu tidak termasuk penolakan mahkamah untuk memeriksa saksi ahli. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan untuk memeriksa keterangan ahli, dan kemudian permintaan itu ditolak. Penolakan yang seperti itu, tidak tergolong pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem. Pendengaran keterangan ahli (expert) tidak bersifat imperatif. Sifat kebolehan adalah fakultatif. Hal itu misalnya ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (4) UNCITRAL. Di situ dijelaskan : *"At the request of either party the expert ... may be heard at a hearing where the parties shall have the opportunity to be present and interrogate the expert"*. Jadi kebolehan permintaan pemeriksaan expert may be heard at a hearing. Oleh karena itu seandainya permintaan ditolak oleh Mahkamah Arbitrase, tidak dianggap sebagai pelanggaran tata tertib aturan formal.

Akan tetapi apabila permintaan dikabulkan, berlaku aturan pemeriksaan yang bersifat imperatif yakni asas audi et alteram partem "mesti" ditegakkan. Para pihak mesti diberi kesempatan yang sama untuk menghadiri pemeriksaan serta memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan.

Hal itu dapat dibaca dalam kalimat yang berbunyi: *"the parties shall have the opportunity to be present and to interrogate the expert"*. Apalagi jika para pihak atau salah

satu pihak telah memberi penegasan kepada mahkamah bahwa dia akan hadir dalam pemeriksaan expert yang akan dilakukan. Namun mahkamah menolak kehadirannya atau melarang salah satu pihak untuk mengajukan interogasi. Dalam peristiwa yang demikian telah terjadi pelanggaran aturan formal yang sangat serius dan fundamental. Karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

(c) Putusan tidak menyelesaikan rekonvensi

Hampir semua rules arbitrase memperbolehkan pihak respondent mengajukan gugat rekonvensi. Gugat yang seperti itu dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI diberi nama "tuntutan balasan". Begitu juga dalam Pasal 46 ICSID, memberi kepada pihak respondent untuk mengajukan gugat rekonvensi yang diberi istilah counter-claims. Hal sama dijumpai juga dalam Pasal 19 ayat (3) UNCITRAL, yang juga disebut counter-claims.¹⁴⁰⁾

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 masalah gugat rekonvensi diatur di dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa "Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi". Terhadap tuntutan balasan tersebut diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa".

¹⁴⁰⁾ Ibid, halaman 312—314.

Menurut tata tertib beracara, apabila ada diajukan counter-claim terhadap claim (rekonvensi terhadap konvensi), kedua gugatan harus serentak diselesaikan secara bersamaan dalam satu putusan. Apabila pada saat penelitian pemberian exequatur Ketua Pengadilan Negeri menemukan fakta dalam putusan bahwa pihak respondent ada mengajukan counter-claim (rekonvensi), tetapi tidak diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan, bahkan counter-claim tidak diamarkan dalam diktum putusan. Putusan yang diambil jelas secara nyata melanggar ketentuan aturan formal (*manifestly error*). Pelanggaran aturan formal yang terkandung dalam putusan yang mengabaikan (*omission*) penyelesaian counter claim, betul-betul sangat serius dan fundamental. Pengabaian atau pelanggaran yang demikian tidak mungkin dimaafkan dan ditolelir. Dalam peristiwa ini, putusan tidak sempurna dan tidak sah. Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri harus menolak pemberian exequatur.

Akan tetapi kalau yang diabaikan dalam putusan hanya gugat provisi yang dalam peristilahan arbitrase disebut *provisional claim*, kita anggap tidak merupakan pelanggaran aturan formal yang berkualitas serius dan fundamental. Misalnya, pihak claimant mengajukan *provisional measures*. Ternyata hal itu diabaikan Mahkamah Arbitrase dalam putusan. Tidak ada pertimbangan dan amar tentang itu. Malahan tidak ada diambil putusan sela atau interim award terhadapnya.

Kita berpendapat, pengabaian atau pelanggaran tersebut tidak sampai membatalkan keabsahan putusan. Pelanggaran yang demikian tidak begitu serius. Tidak berbobot untuk menjadi dasar penolakan pemberian exequatur.

Begitu juga mengenai pengabaian terhadap penyelesaian eksepsi, dianggap pelanggaran aturan formal yang kurang serius. Misalnya dalam putusan ada disebut-sebut eksepsi mengenai yurisdiksi (a plea about jurisdiction) dari pihak respondent. Tapi hal itu ternyata tidak dilanggapi Mahkamah Arbitrase dalam putusan, pelanggaran terhadap penyelesaian eksepsi tersebut tidak sangat serius. Oleh karena itu tidak layak dijadikan dasar untuk menolak pemberian exequatur.

(d) Pelanggaran terhadap yurisdiksi

Yang dimaksud pelanggaran terhadap yurisdiksi ialah pelanggaran terhadap kompetensi absolut Mahkamah Arbitrase yang memutus sengketa. Umpamanya, dalam perjanjian para pihak telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BANI. Ternyata, claimant mengajukan penyelesaian sengketa kepada ICC atau kepada arbitrase ad-hoc. Lantas ICC atau arbitrase ad-hoc menerima dan menyelesaikan serta memutus. Dalam kasus yang demikian, secara faktual putusan telah dijatuhkan oleh arbitrase yang tidak berwenang untuk itu. Arbitrase yang memutus telah melanggar batas-batas kewenangan yurisdiksi. Akibatnya putusan yang diambil dalam kasus itu batal demi hukum. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menemukan pelanggaran yang

seperti itu, harus menolak memberi *exequatur* terhadap putusan tersebut. Dengan demikian putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi.

- (e) Rules yang diterapkan tidak sesuai dengan yang disepakati.

Pengabaian atau pelanggaran yang tergolong serius terhadap aturan formal, apabila rules yang diterapkan Mahkamah Arbitrase dalam proses pemeriksaan berlainan dengan rules yang disepakati para pihak.

Misalnya, dalam perjanjian para pihak sepakat untuk membawa penyelesaian sengketa yang timbul kepada arbitrase, rules yang mereka pilih dan sepakati adalah UNCITRAL. Ternyata rules yang diterapkan mahkamah dalam proses pemeriksaan adalah ICC-Rules atau Peraturan Prosedur BANI.

Dalam kasus yang demikian telah terjadi pelanggaran tata tertib beracara yang sangat serius dan fundamental. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditolelir, Ketua Pengadilan harus menolak untuk memberi *exequatur* terhadap putusan.

Lain halnya, kalau penerapan rules yang tidak ditentukan para pihak hanya mengenai hal-hal tidak diatur dalam rules yang dipilih oleh para pihak. Dan penerapan dilakukan secara analogis demi untuk kepentingan proses penyelesaian sengketa. Penerapan yang demikian tidak dapat dinilai dan dikualifikasi sebagai pelanggaran yang serius. Untuk lebih jelas, mari kita ambil contoh. Dalam perjanjian, para pihak telah sepakat memilih Rv sebagai rules penyelesaian sengketa. Setelah

sengketa diputus, salah satu pihak mengajukan permintaan interpretation of award (tafsiran putusan) atau mengajukan "permintaan" additional award (penambahan putusan). Permintaan itu dikabulkan oleh Mahkamah Arbitrase. Padahal aturan formal yang seperti itu tidak diatur dalam Rv. Pengabulan atas permintaan dinyatakan mahkamah diambil secara analogis dari ketentuan Pasal 35 atau 37 UNCITRAL Arbitration Rules. Jadi dalam kasus ini secara terang-terangan dan nyata mahkamah telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan Rv. Padahal rules yang disepakati para pihak dalam perjanjian adalah Rv. Peristiwa penerapan secara analogis yang dilakukan oleh Mahkamah, kita anggap tidak merupakan pelanggaran. Malahan sebaliknya, merupakan terobosan yang terpuji demi untuk menghasilkan permasalahan penerapan rules diluar rules yang disepakati para pihak, dapat dibenarkan asal dilakukan melalui pendekatan analogis serta demi untuk kelancaran dan kesempurnaan penyelesaian sengketa.

(f) Pelanggaran dalam mengambil putusan

Banyak sekali permasalahan yang perlu diteliti Ketua Pengadilan Negeri sehubungan aturan formal dalam mengambil putusan yang dilakukan Arbitrase. Sebagian di antara aturan formai tersebut tidak terlampaui serius pelanggarannya. Seperti penulisan identitas nama para pihak yang kurang tepat, tapi tidak sampai menimbulkan keraguan. Dalam hal seperti itu, kesalahan itu masih dalam batas-batas yang dapat ditolelir. Akan tetapi ada

beberapa pelanggaran yang serius, sehingga tidak dapat dimaafkan, antara lain :

(1) Putusan diambil tidak berdasarkan suara terbanyak

Sebagaimana ditetapkan dalam berbagai rules, putusan harus diambil berdasar suara terbanyak. Ketentuan ini merupakan asas aturan formal dalam sistem pengambilan putusan, mesti dilakukan by a majority of the votes of all its members. Sistem ini merupakan asas yang digariskan dalam Pasal 48 ayat (1) ICSID. Sistem pengambilan putusan berdasar suara mayoritas, ditetapkan pula sebagai asas formal dalam Pasal 31 ayat (1) UNCITRAL yang menegaskan *decision of the arbitral tribunal shall be made by a majority of the arbitrators*. Hal yang sama dijumpai juga dalam Pasal 633 Rv.

Demikian prinsip aturan formal sistem pengambilan putusan. Pelanggaran terhadap asas ini tidak bisa ditolelir. Hanya ada pengecualian, jika dalam perjanjian para pihak sepakat putusan dapat diambil dengan sistem umpire, putusan dapat diambil sendiri oleh ketua arbiter apabila tidak tercapai suara mayoritas. Atau jika rules yang disepakati para pihak adalah UNCITRAL, dimungkinkan pengambilan putusan dengan mempergunakan sistem umpire.

Hal itu dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan : *"when there is no majority or when the arbitral tribunal so authorizes, the presiding arbitrator may decide on his own"*. Jadi meneliti apakah pengambilan putusan sudah sah menurut aturan

formal, Ketua Pengadilan harus memperhatikan apakah ada disepakati para pihak dalam perjanjian penerapan sistem umpire. Atau meneliti apakah rules yang disepakati membolehkan menerapkan sistem umpire atau rules yang disepakati, bukan UNCITRAL, pengambilan putusan mutlak berdasar suara mayoritas. Mengenai sistem pengambilan putusan termasuk sistem umpire sudah dijelaskan pada uraian yang berhubungan dengan sistem pengambilan putusan.

Seandainya putusan hanya diambil oleh ketua arbiter, padahal rules yang disepakati bukan UNCITRAL, atau perjanjian tidak ada memberi wewenang yang demikian kepada ketua arbiter, putusan secara nyata mengandung pelanggaran aturan formal (*manifestly error*). Pelanggaran yang seperti itu, sangat serius dan fundamental, karena jelas-jelas mengabaikan (*omission*) hak dan kewenangan anggota arbiter yang lain. Oleh karena itu, cukup dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pemberian *exequatur* terhadap putusan. Berbarengan dengan penolakan itu, dapat menyatakan putusan "noneksekutabel" (tidak dapat dieksekusi).

- (2) Putusan tidak ditandatangani anggota arbiter atau tidak menjelaskan dalam putusan alasan kepada salah seorang anggota arbiter tidak ikut bertandatangan.

Pada prinsipnya, putusan harus ditandatangani oleh seluruh anggota arbiter. Prinsip ini merupakan palokan aturan formal atas keabsahan putusan.

Namun seperti yang dijelaskan Pasal 32 ayat (4) UNCITRAL, putusan tetap san :

- meskipun salah seorang anggota arbiter tidak ikut menandatangani.
- hanya alasan tentang ketidakikutsertaan menandatangani, harus dijelaskan dalam putusan.

Where there are three arbitrator's and one of them fails to sign the award shall state the reason for the absense of the signature. Kebolehan dan keabsahan putusan hanya ditandatangani dua orang anggota arbiter saja, sesuai dengan asas suara terbanyak dalam pengambilan putusan. Bisa saja seorang arbiter yang berada dalam posisi minoritas pada saat pengambilan putusan, tidak mau menandatangani putusan. Hal ini dibolehkan, yang penting, ketidakikutsertaan seorang anggota arbiter menandatangani, harus dicatat alasannya dalam putusan. Jika ketentuan tersebut diabaikan berarti putusan yang dijatuhkan telah melanggar aturan formal yang sangat serius. Pelanggaran itu cukup menjadi dasar untuk menolak pemberian exequatur.

Penggarisan aturan formal penandatanganan putusan yang dijelaskan di atas bukan hanya diatur dalam UNCITRAL, tapi juga diatur dalam Pasal 48 ayat (2) ICSID yang menegaskan : "*The award of the*

Tribunal shall be made in writing and shall be signed by the members of the Tribunal who vote for it". Tampak ada perbedaan sedikit di antara ketentuan ini dengan apa yang diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UNCITRAL maupun yang diatur dalam Pasal 633 Rv ¹⁴¹⁾ dan Pasal 54 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan dipersyaratkan bahwa "dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan arbitrase yang bersangkutan". ¹⁴²⁾

Baik dalam UNCITRAL maupun dalam Rv, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, pencantuman alasan ketidakikutsertaan salah seorang arbiter menandatangani putusan, merupakan "kemestian". Jadi bersifat memaksa atau "imperatif". Sebaiknya pada ICSID kemestian untuk mencatat alasan yang demikian dalam putusan, sama sekali tidak disinggung. Ketentuannya hanya menegaskan putusan harus ditandatangani oleh anggota arbiter yang telah memberi suara setuju terhadap putusan. Berarti anggota arbiter yang tidak setuju terhadap putusan, tetapi kedudukannya sebagai minoritas, tidak perlu ikut menandatangani putusan. Kalau dia mau, boleh ikut menandatangani,

¹⁴¹⁾ Ibid, halaman 316—317.

¹⁴²⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 105.

tetapi kalau tidak mau, boleh juga tak ikut menandatangani. Ketidakikutan menandatangani, tidak memerlukan catatan dalam putusan.

Dari penjelasan yang dikemukakan, Ketua Pengadilan harus jeli meneliti masalah dengan menghubungkan hal itu dengan rules yang disepakati para pihak. Jika rules yang disepakati oleh para pihak adalah ICSID, tidak adanya catatan yang menjelaskan alasan kenapa salah seorang arbiter tidak ikut menandatangani, bukan merupakan pengabaian atau pelanggaran formal. Sebaliknya kalau rules yang disepakati UNCITRAL atau Rv, BANI, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ¹⁴³⁾, hal itu harus dicatat dalam putusan sebagai pelanggaran aturan formal yang berderajat serius dan fundamental, sehingga cukup menjadi alasan penolakan pemberian exequatur terhadap putusan yang bersangkutan.

- (3) Putusan tidak diambil di tempat kedudukan yang tidak ditetapkan

Seperti yang sudah pernah dijelaskan, salah satu aturan formal keabsahan putusan menurut Pasal 632 ayat (2) Rv, penyebutan "tempat" pengambilan putusan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 16 ayat (4) juncto Pasal 32 ayat (4) UNCITRAL. Menurut ketentuan ini, putusan

¹⁴³⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 317.

harus menyebut tempat dimana putusan diambil. Tempat dimana putusan harus diambil, mesti di tempat kedudukan arbitrase yang telah ditentukan (The award shall be made at the place of arbitration).

Dengan demikian menurut aturan formal yang tak boleh dilanggar, putusan arbitrase harus diambil di tempat kedudukan, yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dianggap serius dan fundamental. Cukup menjadi dasar untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan.

Tapi hal ini dapat dikesampingkan apabila sebelumnya ada persetujuan dari kedua belah pihak. Misalnya, tempat kedudukan arbitrase ditetapkan di Jakarta. Kemudian putusan diambil di Bandung. Namun sebelum itu, Mahkamah Arbitrase minta persetujuan dari para pihak. Ternyata mereka setuju. Dalam kasus yang seperti itu, pengabaian tersebut tidak lagi menyalahi aturan formal. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan.

(4) Putusan dibuat di luar bahasa yang ditetapkan

Permasalahan bahasa resmi proses pemeriksaan arbitrase, tidak menimbulkan masalah, sepanjang hal itu menyangkut arbitrase yang terjadi di Indonesia dan para pihak yang terlibat terdiri dari orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Pada umumnya, penentuan bahasa resmi proses arbitrase baru penting apabila menyangkut para pihak yang

berlainan kewarganegaraan. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan untuk menentukan bahasa resmi di luar bahasa Indonesia, apabila para pihak menyepakati meskipun para pihaknya terdiri dari warganegara Indonesia.¹⁴⁴⁾

Hal ini seperti diuraikan dalam Pasal 28 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan."

Dalam Pasal 17 UNCITRAL ditegaskan, Mahkamah Arbitrase harus segera menetapkan bahasa yang harus dipergunakan dalam proses pemeriksaan.

Apabila telah ditetapkan suatu bahasa tertentu, semua proses pemeriksaan termasuk pembuatan putusan harus mempergunakan bahasa tersebut.

Dengan demikian, sekiranya putusan mempergunakan bahasa lain di luar bahasa yang telah ditetapkan, tindakan demikian menyimpang dari aturan formal pemeriksaan. Tindakan itu dapat digolongkan kepada pelanggaran yang sangat serius dan fundamental. Oleh karena itu cukup dijadikan dasar untuk menolak pemberian exequatur terhadap putusan.

¹⁴⁴⁾ Ibid, halaman 314-318.

(5) Putusan yang tidak cukup dasar-dasar alasan pertimbangan

Hampir semua rules menetapkan aturan formal dan materiil, yang mengharuskan putusan arbitrase mesti menguraikan dasar-dasar alasan pertimbangan putusan. Dalam Pasal 632 Rv ditegaskan, putusan harus memuat alasan-alasan pertimbangan, hal ini juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Begitu juga penegasan Pasal 48 ayat (3) ICSID menyatakan, *"The award shall deal with every question submitted to the Tribunal and shall state the reasons upon which it is based"*. Maksud yang sama digariskan juga dalam Pasal 32 ayat (3) UNCITRAL yang berbunyi, *"The arbitral tribunal shall state the reason upon which the award is based, unless the parties have agreed that no reason are to be given"*. Dapat dilihat, semua rules yang dikemukakan menegaskan kemestian untuk menguraikan dasar-dasar pertimbangan yang cukup dalam putusan. Ketentuan ini tidak boleh diabaikan. Pengabaianannya merupakan pelanggaran yang sangat serius dan fundamental cukup menjadi dasar untuk menolak pemberian exequatur.

Hanya, UNCITRAL yang membuka kemungkinan akan kebolehan mengabaikan penguraian dasar-dasar pertimbangan yang cukup alasannya.

Menurut Pasal 32 ayat (3), meskipun penguraian itu bersifat imperatif, hal itu dapat diabaikan oleh

Mahkamah Arbitrase, apabila para pihak menyetujui putusan tidak perlu memberi uraian dasar-dasar alasan pertimbangan. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat *unless the parties have agreed that no reasons are to be given*. Persetujuan tentang itu dapat dituangkan para pihak dalam perjanjian. Bisa juga, persetujuan mereka sampaikan pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung. Kalau persetujuan dari para pihak telah ada, penguraian dasar-dasar alasan pertimbangan putusan boleh diabaikan Mahkamah Arbitrase. Pengabaian ini tidak lagi tergolong dan tidak dapat dikualifikasi, sebagai pelanggaran aturan formal serta tidak boleh dijadikan alasan penolakan pemberian *exequatur* oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(6) Putusan tidak merinci amar

Suatu hal lagi yang menjadi sasaran penelitian dalam pemberian *exequatur* ialah mengenai amar putusan. Pasal 632 ayat (1) Rv dan Pasal 54 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menegaskan putusan arbitrase harus memuat "amar". Dalam rules yang lain aturan ini kurang ditegaskan. Namun demikian kita berpendapat semua jenis putusan arbitrase tanpa mempersoalkan rules mana yang menjadi dasar penyelesaian, sama-sama menghendaki pencantuman amar putusan yang terinci. Contoh misalnya ketentuan Pasal 18 UNCITRAL. Dalam ayat (2) huruf (c) ditegaskan setiap *statement of claim* (gugat), harus

UPT-PUSTAKA

mencantumkan the relief or remedy sought (petitum gugat). Ketentuan ini memberi isyarat tentang kemestian pencantuman amar putusan secara rinci atau "limitatif".

Lagi pula dari sudut doktrin dan ketertiban umum, pencantuman amar yang limitatif, merupakan tata tertib beracara yang bersifat mutlak. Bahkan dari segi logika saja pun, tidak dapat diterima akal sehat (common sense) suatu putusan yang bercorak peradilan yang tidak memuat amar. Kalau begitu, pencantuman amar putusan merupakan keharusan, yang tidak dapat diabaikan pencantumannya. Oleh karena itu, apabila secara faktual Ketua Pengadilan Negeri menemukan dalam putusan adanya pengabaian pencantuman amar, berarti putusan telah melanggar tata tertib beracara. Pelanggaran terhadap tata tertib ini sangat serius dan fundamental, sehingga tidak mungkin ditolelir, dan mutlak harus ditolak pemberian exequatur-nya.¹⁴⁵⁾

e.3 Segi Materiil Yang Boleh Dinilai

Mengenai materi putusan tertentu, Ketua Pengadilan Negeri boleh menilainya. Jadi terhadap materi tertentu, dapat dilakukan penilaian, dalam arti apakah materi putusan yang terkandung tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Kewenangan menilai materi putusan hanya meliputi segi-segi yang sangat terbatas sekali, seperti misalnya :

- a) Materi putusan tidak termasuk yurisdiksi arbitrase

¹⁴⁵⁾ Ibid, halaman 319.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Selanjutnya Penjelasan Pasal 66 huruf (b) menyebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Jadi seandainya sengketa yang tidak menyangkut bidang perdagangan seperti diuraikan di atas kemudian diajukan untuk diselesaikan oleh arbitrase, maka arbitrase harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. Umumnya bidang hukum yang persengketaannya tidak termasuk yurisdiksi arbitrase, meliputi kasus hukum kekeluargaan yakni bidang perkawinan dan hibah wasiat, begitu pula masalah sengketa tanah arbitrase tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus.

Sekiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri diminta pemberian *exequatur* putusan arbitrase terhadap sengketa-sengketa yang bukan menjadi kewenangan arbitrase tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menilai putusan dari segi materiil. Sengketa-sengketa yang menyangkut bidang ini, mutlak menjadi yurisdiksi Pengadilan.

b) Materi putusan bertentangan dengan kepentingan umum

Sisi materi lain yang boleh dinilai Ketua Pengadilan Negeri dalam penelitian pemberian *exequatur* ialah masalah "kepentingan umum" atau *public policy*. Dia dapat menilai apakah materi putusan mengandung pertentangan dengan kepentingan umum atau tidak.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990, hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3). Putusan-putusan arbitras asing hanya dapat dieksekusi di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan "ketertiban umum". Asas yang seperti itu juga ditegaskan dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York 1958. Di situ dirumuskan : *"the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country"*.¹⁴⁶⁾

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur masalah ketertiban umum, disitu dikatakan bahwa, Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Meskipun asas yang dikemukakan ditujukan terhadap putusan arbitrase asing, asas tersebut berlaku sepenuhnya terhadap putusan arbitrase dalam negeri. Sebab asas ketertiban umum merupakan asas yang bernilai universal, penerapannya bersifat mutlak di seluruh kawasan, baik di luar negeri maupun domestik.

Hanya yang menjadi masalah adalah batasan pengertian dan ruang lingkup makna ketertiban umum. Sangat sulit memberi batasan yang pas dan persis. Meskipun asas ketertiban umum merupakan nilai universal, namun norma konkret sulit untuk dirumuskan secara merata untuk semua bangsa. Lain nilai ketertiban umum yang ditegaskan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang penilaian dan penerapan ketertiban umum pada suatu ketika, tidak semata-mata ditinjau dari segi hukum dan kepribadian suatu bangsa sering faktor politik ikut memainkan

¹⁴⁶⁾ Ibid, halaman 322-323.

peranan. Tidak usah masalah pengertian dan nilai ketertiban umum ditinjau dari segi makro, dari segi mikro saja bisa terjadi perlainan persepsi dalam kehidupan suatu bangsa, contoh, usaha jual beli minuman keras di daerah Istimewa Aceh, dianggap legal asal ada izin usaha.

Jadi, sedemikian rupa derajat kesulitan untuk menentukan patokan yang jelas dan tegas tentang makna dan wujud ketertiban umum. Hal itu pun sudah pernah disinggung. Namun daripada sama sekali tidak ada pegangan, kembali kita kemukakan batasan pengertian yang telah pernah dikemukakan pada waktu menjelaskan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Di situ dikatakan, yang dimaksud dengan ketertiban umum ialah sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban pada suatu lingkungan (negara) apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.

Benar, demikian luas dan demikian mengambang pengertian ketertiban umum. Di samping itu, nilai dan sistem kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari asas dinamika yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dan sistem. Hal itu dengan sendirinya membawa dampak terhadap pergeseran makna dan nilai kepentingan umum. Apa yang dianggap dan dirasa sebagai sesuatu hal yang bernilai ketertiban umum pada hari ini barangkali lusa dianggap sebagai nilai yang halal dan legal.

Kalau begitu, sikap yang paling tepat untuk diperankan dalam meneliti apakah materi suatu putusan arbitrase bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, harus bersikap dinamis dan aktual. Dengan demikian untuk menilai ada atau tidak terkandung pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam putusan, harus diuji

terhadap sendi-sendi asasi nilai-nilai sistem hukum dan kepentingan nasional pada saat itu. Bukan diuji terhadap sendi-sendi asasi nilai-nilai sistem hukum dan kepentingan nasional di masa yang lalu.

Contoh, dahulu ekspor besar-besaran kayu gelondongan maupun rotan sangat dianjurkan, akan tetapi sekarang dilarang, hanya hasil kayu olahan dan rotan jadi yang boleh diekspor. Sekiranya Ketua Pengadilan mempergunakan penilaian pada sendi-sendi dan nilai-nilai asasi tata hukum Indonesia dan kepentingan nasional lima atau sepuluh tahun yang lalu, ekspor kayu gelondongan dan bahan baku rotan yang diekspor masa kini, pasti tidak bertentangan dengan public policy. Akan tetapi kalau penilaiannya didasarkan pada saat sekarang, tindakan itu pasti sangat bertentangan dengan ketertiban umum bangsa Indonesia.

Yang paling gampang untuk menemukan fakta adanya pelanggaran ketertiban umum dalam suatu putusan arbitrase, apabila putusan nyata-nyata bertentangan dengan "hukum positif". Apalagi jika yang dilanggar itu hukum positif di bidang hukum publik, sangat mudah untuk menemukan dan menyatakan putusan arbitrase yang bersangkutan bertentangan dengan public policy. Lain halnya apabila yang terlanggar dalam putusan merupakan nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Agak sulit untuk mengkonkretisasi ada atau tidak pelanggaran terhadap ketertiban umum. Umpamanya hubungan dagang narkotik, secara gampang dapat ditemukan fakta tentang adanya pelanggaran ketertiban umum. Sebab di Indonesia ada hukum positif yang melarang perdagangan dan pengedaran segala jenis narkotik.

Barangkali dalam perjanjian yang menyangkut perdagangan benda-benda purbakala, bisa juga menyentuh pelanggaran

terhadap sendi-sendi asasi budaya bangsa, karena dapat merugikan aset bangsa Indonesia. Bisa menimbulkan punah benda-benda bersejarah warisan peninggalan masa lalu. Oleh karena itu, penelitian putusan arbitrase yang menyangkut perdagangan benda-benda purbakala dengan pihak luar negeri, harus benar-benar dinilai dari berbagai segi.

Akan tetapi, perlu pula diperingatkan, sedapat mungkin jangan sampai alasan asas kepentingan umum atau ketertiban umum dimanipulasi secara subyektif. Jangan sampai terjebak secara gampang menerapkannya dalam penolakan pemberian *exequatur*. Cara penerapan yang tidak obyektif, bisa menghambat pertumbuhan sehat lembaga arbitrase.

Kalau sempat putusan arbitrase mandul disebabkan jumlah frekuensi penolakan pemberian *exequatur* atas alasan putusan bertentangan dengan ketertiban umum, bisa mempengaruhi rasa percaya dan rasa hormat masyarakat, terutama pihak luar terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia. Hal yang demikian bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan kelancaran hubungan perdagangan dan perekonomian dengan dunia luar. Namun kalau jelas-jelas putusan bertentangan dengan ketertiban umum, harus berani menolak pemberian *exequatur*. Maka dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan menilai putusan arbitrase yang dianggap mengandung pelanggaran terhadap ketertiban umum, sedapat mungkin harus mampu secara efektif memanfaatkan "kebebasan relatif" yang dimiliki hakim (pengadilan) untuk "melenturkan" sendi-sendi nilai asasi ke arah yang lebih rasional, aktual, dan realistik.

e.4. Tata Cara Permintaan Exequatur

Landasan pengkajian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 637 Rv juga Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Sehubungan dengan apa yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam permintaan exequatur.

a. Tidak Dapat Diberi Exequatur yang Melampaui Tenggang Deponir

Salah satu masalah yang diatur dalam Pasal tersebut adalah pengkaitan antara pemberian exequatur dengan pendeponiran putusan. Ditegaskan, pemberian exequatur hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah dideponir. Seperti yang sudah dijelaskan pendeponiran putusan arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh arbiter maupun oleh kuasanya yang khusus mereka kuasakan untuk itu. Salah satu syarat formal deponir harus dilakukan dalam batas tenggang waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan.

Hanya terhadap putusan yang memenuhi syarat deponir dapat diberikan exequatur. Jika tenggang waktu pendeponiran melewati tenggang waktu yang ditentukan, berarti deponir tidak memenuhi syarat formal. Akibatnya pendeponiran "tidak sah". Oleh karena pendeponiran tidak sah, mengakibatkan permintaan exequatur "tidak dapat diterima". Dengan kata lain, terhadap putusan arbitrase yang tidak sah pendeponiran, mengakibatkan permintaan exequatur tidak dapat diberikan. Ketua Pengadilan harus menyatakan permintaan "tidak dapat diterima" atas alasan pendeponiran melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Memang sikap yang seperti itu terasa cenderung kepada pendirian yang terlampau formalitas. Meskipun kelalaian itu

disebabkan ulah arbiter, akibat kelalaian itu harus dipikul oleh pihak yang berkepentingan. Alasan pembebanan resiko kelalaian arbiter mendeponir kepada pihak yang berkepentingan, didasarkan kepada kenyataan. Dari sudut pendekatan kenyataan, bukankah para arbiter yang ditunjuk menyelesaikan sengketa adalah hasil kesepakatan para pihak? Oleh karena para arbiter yang berfungsi dalam arbitrase merupakan hasil pilihan yang disepakati para pihak, berarti mereka telah rela mempercayakan segala urusan penyelesaian kepada para arbiter tersebut.

Dengan demikian sekiranya *exequatur* tidak dapat diberikan disebabkan kelalaian para arbiter yang menyelesaikan pendeponiran putusan, hal itu termasuk resiko yang harus ditanggung oleh para pihak. Bukankah mereka tidak dipaksa mesti meminta penyelesaian sengketa kepada arbitrase? Tetapi mereka sendiri yang telah menentukan pilihan dengan sukarela, agar penyelesaian sengketa yang timbul diputus oleh arbitrase. Kalau begitu dari sejak semula, para pihak sudah sadar bahwa mereka akan sanggup memikul segala resiko yang timbul dari kelalaian para arbiter yang mereka tunjuk.

Tindakan apa yang dapat ditempuh para pihak, terutama pihak yang berkepentingan menghadapi kasus kelalaian arbiter mendeponir putusan, yang mengakibatkan permintaan *exequatur* tidak dapat diterima? Kita berpendapat pemecahan yang dapat ditempuh dalam kasus ini mempunyai beberapa segi dan alternatif.

- 1) Terhadap kelalaian pendeponiran, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kelalaian anggota arbiter mendeponir putusan, jelas telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum dan undang-undang kepada mereka. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan,

dalam hal ini pemohon *exequatur*, dapat mengajukan tuntutan kerugian kepada pihak anggota arbiter ke Pengadilan melalui gugat perdata biasa.

2) Segi kedua mengenai kelanjutan sengketa itu sendiri

Jika Ketua Pengadilan Negeri menyatakan *exequatur* tidak dapat diterima atas alasan pendeponiran melampaui batas tenggang waktu, pernyataan itu dengan sendirinya telah menutup riwayat putusan arbitrase. Secara fisik putusan ada, dan secara materil putusan tetap bersifat final dan binding kepada para pihak. Namun daya eksekusinya "lumpuh" disebabkan tata cara untuk itu tidak dipenuhi. Akibatnya kapan pun putusan tidak mungkin lagi dieksekusi.

Jalan keluar atau upaya apa yang dapat ditempuh pihak yang berkepentingan menghadapi jalan buntu yang seperti itu? Jalan keluarnya dapat ditempuh alternatif berikut :

- Mengadakan pendekatan damai dengan pihak lawan.
Barangkali jalan ini yang terpendek, pihak yang menang (pemohon eksekusi) mendatangi pihak lawan untuk berdamai. Secara psikologis, hal ini agak berat, sebab seolah-olah pihak lawan berada di atas angin, sehingga dapat mengajukan syarat-syarat perdamaian yang lebih menguntungkan baginya. Dia sudah tahu, eksekusi sudah mengalami jalan buntu, tentu dapat menekan yang berkepentingan.
- Alternatif lain, mengajak pihak lawan mencabut persetujuan arbitrase, dengan maksud sengketa akan diajukan melalui gugat perdata ke Pengadilan.
Sebelum sengketa selesai ditangani arbitrase, perjanjian arbitrase tetap hidup dan mengikat para pihak. Oleh karena

itu, salah satu pihak tidak dapat mengajukan sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase ke pengadilan selama perjanjian itu masih hidup. Agar upaya ke arah ini dapat ditempuh, harus lebih dulu perjanjian arbitrase dicabut. Supaya perjanjian arbitrase dapat dicabut, diperlukan kata sepakat yang bulat dan tegas dari kedua belah pihak.

Namun barangkali, alternatif ini pun sulit untuk ditempuh. Sebab pihak lawan merasa diri berada di atas angin. Oleh karena itu, mungkin enggan untuk menerima ajakan tersebut.

- Alternatif selanjutnya, terpaksa mengajukan penyelesaian sengketa semula kepada arbitrase yang bersangkutan.

Alternatif ini tampaknya mengandung hambatan yuridis. Bukankah sengketa sudah pernah diputus. Bahkan putusannya sudah bersifat "final", berarti sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu pengajuan kembali sengketa untuk diselesaikan dan diputus oleh arbitrase, telah terbentur pada tembok nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata.

Memperhatikan alternatif yang dikemukakan di atas, jalan yang paling tepat untuk diterapkan ialah alternatif kedua, yakni pengajuan gugat perdata biasa ke pengadilan. Pembeneran keabsahan upaya ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang realistis, dengan cara konstruksi hukum. Konstruksi hukum dimaksud, dengan adanya putusan dijatuhkan arbitrase terhadap sengketa, perjanjian arbitrase sudah gugur. Perjanjian pokoknya masih tetap ada. Namun perjanjian arbitrase yang gugur demi hukum terhitung sejak putusan arbitrase dijatuhkan. Tetapi oleh karena putusan

tidak dapat dieksekusi, perjanjian pokok masih tetap ada. Oleh karena perjanjian pokok masih tetap ada, sengketa yang timbul, dapat diselesaikan melalui gugat perdata biasa ke pengadilan. Jika kita tidak berani menerapkan dan menghalalkan cara ini, berarti kita sendiri telah sengaja mempertahankan aturan-aturan hukum yang tidak mampu memberi arah dan kemudahan akan upaya tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Sebenarnya ada jalan yang paling pendek. Melemparkan sikap yang telampau formalitas dengan cara tetap menerima pemberian *exequatur* terhadap putusan, meskipun pendeponiran telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan. Hanya pembenaran yang seperti ini kurang mendidik, bahkan bisa merusak sendiri tujuan penegakan kepastian hukum. Oleh karena itu, lebih tepat menerapkan alternatif pengajuan gugat ke Pengadilan. Penerapan ini dapat merangkum segala aspek penegakan hukum. Satu segi tetap mempertahankan sendi-sendi tegaknya kepastian hukum bahwa setiap permohonan yang melampaui tenggang waktu, tidak dapat dibenarkan. Pelanggaran terhadapnya, berakibat fatal. Pada segi lain, membuka jalan penyelesaian sengketa, sehingga sesuatu upaya penyelesaian yang telah mengalami jalan buntu oleh karena terbentur pada syarat batas tenggang waktu eksekusinya, dapat lagi diselesaikan melalui gugat perdata, meskipun proses penyelesaian agak berliku dan panjang.

b. Yang Berhak Mengajukan *Exequatur*

Sudah dijelaskan, *exequatur* terhadap putusan arbitrase, merupakan tahap proses yang mendahului eksekusi. Sebelum perintah eksekusi

dikeluarkan, lebih dulu diberikan exequatur terhadap putusan. Oleh karena exequatur merupakan langkah awal eksekusi, maka tata cara pengajuannya tunduk menyesuaikan diri dengan tata cara pengajuan eksekusi. Dengan demikian pedoman pengajuan exequatur merujuk kepada ketentuan Pasal 196 HIR (Pasal 207 RBG), yaitu :

1) Diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau kuasanya

Yang berhak mengajukan permohonan pemberian exequatur ialah pihak yang berkepentingan. Adakalanya pihak yang berkepentingan atas eksekusi ialah para pihak. Misalnya jika putusan sekaligus mengabulkan claim (konvensi) dan counter-claim (rekonvensi). Dalam kasus ini, masing-masing pihak mungkin sama-sama berkepentingan akan pelaksanaan eksekusi.

Pengajuan permohonan exequatur, bukan lagi menjadi tugas arbiter. Tugas kewajibannya, hanya sampai pada tindakan melakukan pendeponiran putusan.

Setelah itu dilaksanakan, selesai sudah tugasnya. Sedang mengenai tahap proses selanjutnya guna mendapat exequatur maupun perintah eksekusi, sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban para pihak in person atau seorang kuasa yang merupakan kuasa secara khusus untuk itu. Sejak selesai pendeponiran, terserah kepada para pihak untuk menempuh kelanjutannya sampai putusan dieksekusi.

Pada prinsipnya permintaan exequatur baru menjadi pilihan hukum bagi pihak yang berkepentingan, apabila pihak lawan tidak mau melaksanakan putusan secara "sukarela". Kalau begitu tidak selamanya masalah exequatur menjadi keharusan hukum dalam menyelesaikan pemenuhan isi putusan arbitrase.

Exequatur baru relevan apabila pihak lawan enggan memenuhi dan mentaati isi putusan secara sukarela.

Selama pihak yang berkepentingan tidak mengajukan permohonan meminta pemberian exequatur, Ketua Pengadilan Negeri bersifat pasif, tidak berwenang memberi exequatur terhadap putusan arbitrase tanpa ada diajukan permintaan, meskipun putusan telah dideponir. Pendeponiran bukan otomatis mewajibkan pemberian exequatur.

2) Permohonan diajukan ke pengadilan yang mendeponir

Permintaan exequatur ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat mana pendeponiran dilakukan. Berarti, yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan arbitrase ialah Ketua Pengadilan Negeri di tempat mana putusan dideponir. Kalau begitu, baik permohonan exequatur maupun permohonan eksekusi harus diajukan kepada Pengadilan yang telah menerima pendeponiran putusan.

3) Bentuk pemberian exequatur

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menggariskan bentuk pemberian exequatur, bentuknya cukup sederhana :

- i. berupa catatan,
- ii. catatan ditulis di atas asli putusan.
- iii. isi catatan perintah eksekusi (putusan dapat dieksekusi), dan
- iv. apabila nanti perintah itu dikeluarkan :
 - dibuat salinannya,
 - salinan dituangkan dalam surat penetapan perintah eksekusi.

Demikian gambaran singkat mengenai bentuk pemberian exequatur, apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai putusan dapat dijalankan eksekusinya. Tentang pembuatan salinan yang dimaksud dalam pasal tersebut, mengandung pengertian bentuk "surat penetapan" perintah eksekusi. Jadi apabila Ketua Pengadilan Negeri telah memberi exequatur terhadap putusan, akan diikuti dengan tindak lanjut berupa pelaksanaan eksekusi. Apabila hal itu akan dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan "surat penetapan" eksekusi. Surat penetapan berisi perintah, sesuai perintah yang dibuat dalam catatan pemberian exequatur.

e.5 Pengabulan atau Penolakan Exequatur Tidak Dapat Dibanding atau Dikasasi

Dari segi pendekatan hukum acara, tindakan exequatur adalah murni tindakan "eksekusi". Kalau begitu baik pengabulan pemberian maupun penolakan exequatur atau pernyataan exequatur tidak dapat diterima, semata-mata murni merupakan tindakan eksekusi. Tindakan pemberian atau penolakan exequatur, bukan tergolong pemeriksaan sengketa.

Oleh karena pengabulan, penolakan atau pernyataan exequatur tidak dapat diterima, termasuk ruang lingkup eksekusi, tidak ada lagi yang disengketakan. Sengketa sudah selesai diputus sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang di-exequatur. Demikian asas yang dipatok dalam doktrin dan praktek.

Lagi pula seperti yang sudah berulang kali dikemukakan, putusan arbitrase bersifat "final". Pada prinsipnya, putusan tidak dapat diganggu gugat lagi. Jika demikian halnya, apa pun yang menjadi ketetapan pemberian exequatur, tidak dapat dibanding atau dikasasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Pasal itu menegaskan, eksekusi

dijalankan atas "perintah" dan di bawah "pimpinan" Ketua Pengadilan Negeri. Pejabat yang ada di peradilan tingkat banding atau kasasi, pada prinsipnya tidak dapat mencampuri.

Selanjutnya pihak lawan mengajukan banding atau kasasi terhadap pengabulan *exequatur*, hal itu tidak dibenarkan hukum. Oleh karena itu, permintaan banding atau kasasi tidak boleh dijadikan dasar alasan menunda eksekusi. Sebab mungkin saja pihak lawan mengajukan banding atau kasasi untuk tujuan mengulur waktu. Sering terjadi dalam praktek, pengajuan upaya hukum, meskipun tahu hal itu tidak dibenarkan hukum. Tindakan itu dilakukan semata-mata dengan iktikad buruk, untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri jangan sampai ikut terjerumus membenarkan sesuatu yang tidak dihalalkan hukum dengan jalan menunda pelaksanaan eksekusi.¹⁴⁷⁾

e.6 Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase

Mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional, digariskan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedang dalam Rv, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 639 Rv. Pasal ini pun telah diambil oleh Peraturan Prosedur BANI sebagai pedoman untuk melaksanakan putusan arbitrase yang dijatuhkan BANI. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 19 yang berbunyi : "*Putusan dijalankan menurut ketentuan Pasal 637 dan 639 Rv*".

Menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase yang telah mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri, eksekusinya dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi eksekusinya dilaksanakan menurut tata cara eksekusi yang

¹⁴⁷⁾ Ibid, halaman 323—329.

biasa berlaku terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Secara keseluruhan aturan dan tata cara eksekusi putusan pengadilan berlaku sepenuhnya terhadap putusan arbitrase. Dengan demikian semua pasal-pasal yang diatur dalam Pasal 195 – 200 HIR berlaku terhadap putusan arbitrase.¹⁴⁸⁾

2. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Tempat di mana putusan arbitrase dijatuhkan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase yang dijatuhkan tersebut. Setiap putusan arbiter yang dijatuhkan di luar suatu negara, dimana putusan arbiter tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan, dikenal dengan istilah arbitrase internasional atau arbitrase asing.¹⁴⁹⁾

Ditinjau dari segi tata cara, eksekusi putusan arbitrase nasional dengan putusan arbitrase internasional terdapat perbedaan. Perbedaan tata cara yang paling pokok terutama dalam masalah pemberian exequatur. Selain daripada itu, khusus mengenai eksekusi putusan arbitrase internasional terdapat beberapa asas yang berlaku terhadap eksekusi putusan arbitrase nasional dan sebagian lagi terdapat perbedaan.

a. Rules Mengenai Tata Cara Exequatur

Rules yang mengatur tata cara pemberian exequatur putusan arbitrase luar negeri terdapat dalam The 1958 New York Convention atau Konvensi New York 1958 yakni On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma No. 1 Tahun 1990).

¹⁴⁸⁾ Ibid, halaman 333.

¹⁴⁹⁾ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op.cit, halaman 143.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yaitu Konvensi New York 1958 yang diundangkan dalam Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1981. Keputusan Presiden tersebut, yang meskipun telah disahkan untuk diberlakukan di Indonesia di tahun 1981, namun pelaksanaannya baru efektif di tahun 1990 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tanggal 1 Maret 1990.¹⁵⁰⁾

Konvensi New York 1958 ini bertujuan untuk menyapakan hambatan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di suatu negara. Dengan konvensi ini diharapkan dalam lalu lintas hubungan internasional, semua negara dapat mengakui (*recognition*) dan mengeksekusi (*enforcement*) setiap putusan arbitrase asing.

Apa yang dicita-citakan oleh konvensi ini ternyata telah dihormati oleh negara Indonesia yaitu dengan mengesahkan konvensi tersebut melalui Kepres No. 34 Tahun 1981. Jadi secara yuridis Konvensi New York 1958 merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia di bidang arbitrase. Oleh karena itu, secara yuridis formal, Pengadilan Indonesia harus mengakui putusan arbitrase asing.

Akan tetapi meskipun Konvensi New York 1958 telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 34 Tahun 1981, ternyata eksekusi putusan arbitrase asing tetap mengalami hambatan. Menurut Mahkamah Agung karena hukum acara yang mengatur tata cara eksekusi putusan arbitrase asing belum ada, sehingga permohonan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 1990 mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 1990. Dengan lahirnya Perma tersebut

¹⁵⁰⁾ Gunawan Widjaja, *op cit*, halaman 143—153.

maka bertambah lagi sumber hukum tata cara *exequatur* putusan arbitrase internasional dan sekaligus terisi kevakuman hukum.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non*, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata. Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.¹⁵¹⁾ Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam Undang undang Arbitrase ini diatur secara jelas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Pasal 65 s/d 69).

b. Pengertian Putusan Arbitrase Asing

Sumber rujukan yang dapat memberi kejelasan tentang pengertian putusan arbitrase Internasional bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990, dan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan uraian sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing menurut Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 ialah "putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersengketa".

¹⁵¹⁾ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing menurut Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990 adalah : "putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia".
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengenal istilah putusan arbitrase asing melainkan Putusan Arbitrase Internasional yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) yang didefinisikan sebagai : "putusan yang dijatuhkan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang memuat ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian putusan arbitrase internasional adalah :

b.1. Putusan Dijatuhkan Di Luar Wilayah Indonesia

Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan yang dimaksud dengan putusan arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Definisi yang diberikan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990. Disini yang menjadi ciri putusan arbitrase internasional didasarkan pada faktor "wilayah" atau "territory". Setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar teritorial Republik Indonesia, dikualifikasi sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

Ditinjau dari segi pengertian hukum internasional, yang disebut wilayah hukum suatu negara ialah teritorial negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan tempat terletaknya perwakilan diplomat yang ada di berbagai negara sahabat. Teritorial yang disebutlah yang dimaksud dengan wilayah hukum Republik Indonesia. Apabila putusan arbitrase dijatuhkan di kawasan lingkungan tempat diplomatik Indonesia

di luar negeri, putusan tersebut tidak termasuk putusan arbitrase asing. Putusan itu termasuk putusan arbitrase domestik (dalam negeri).

Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada "faktor teritorial", tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga negara Indonesia, jika putusan dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing. Dalam hal ini, faktor teritorial mengungguli faktor kewarganegaraan atau faktor tata hukum. Kesamaan kewarganegaraan maupun kesamaan tata hukum yang berlaku terhadap para pihak, tunduk sepenuhnya kepada faktor teritorial. Dengan demikian, sangat mudah mengenal putusan arbitrase yang didasarkan pada faktor teritorial. Asal putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, tergolong dan disebut "putusan arbitrase asing".

Apa yang digariskan pada Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990 sama cirinya dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal inipun, faktor utama menentukan ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor territory. Ditegaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing ialah arbitral awards made in the territorial of a state other then the state yakni setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain, tergolong putusan arbitrase asing.

Hanya saja dalam Konvensi New York 1958, faktor teritorial langsung dikaitkan dengan permintaan pengakuan dan eksekusi (recognition and enforcement). Artinya, untuk menegaskan apakah suatu putusan termasuk putusan arbitrase asing, tidak terlepas dari faktor teritorial dengan permintaan pengakuan dan eksekusi.

Kalau begitu, tanpa mengurangi faktor teritorial sebagai faktor yang "menentukan" (determinant) apakah suatu putusan termasuk putusan arbitrase asing atau tidak, Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 masih menggantungkan syarat kepada faktor, berupa *the recognition and enforcement of such awards are sought*. Kepada faktor teritorial digantungkan syarat adanya permintaan pengakuan dan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan. Syarat permintaan pengakuan dan eksekusi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dengan faktor teritorial. Faktor teritorial baru efektif menentukan adanya putusan arbitrase asing, apabila pengakuan dan eksekusi dimintakan kepada negara lain di luar negara di mana diputus. Sekiranya suatu putusan arbitrase dijatuhkan di suatu negara, sedang pengakuan dan eksekusi diminta di negara itu juga, maka tidak tergolong arbitrase asing, tetapi termasuk putusan arbitrase domestik.¹⁵²⁾

b.2. Para Pihak Boleh Perorangan atau Badan Hukum

Siapapun yang menjadi subyek yang terlibat dalam putusan, apakah itu antara perorangan dengan perorangan atau antara badan hukum dengan badan hukum, tidak menjadi soal bagi faktor teritorial. Asal putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, termasuk putusan arbitrase internasional.

b.3. Putusan Boleh Diambil Oleh Arbitrase Ad Hoc atau Institusional

Putusan yang dijatuhkan oleh jenis arbitrase yang mana pun, asal putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum suatu negara, dan kemudian pengakuan dan eksekusinya diminta kepada negara lain, putusan tersebut digolongkan putusan arbitrase internasional.

¹⁵²⁾ M. Yahya Harahap, *op cit*, halaman 336—337.

c. Pendeponiran Putusan Arbitrase Internasional

Seperti halnya putusan arbitrase nasional, maka putusan arbitrase internasional yang akan diminta pengakuan dan eksekusinya di Indonesia harus terlebih dahulu dideponir. Jadi baik mengenai pendeponiran putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, pada dasarnya mengikuti ketentuan yang sama, hanya ada perbedaan mengenai tempat pendeponiran.

Memang pada umumnya, bahkan telah menjadi asas dan doktrin, mengenai aturan tata cara pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional berpegang pada ajaran jus sanguinis. Azas jus sanguinis atau asas personalitas merupakan asas yang bersifat permanen dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan bahwa hukum acara berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan di tempat di mana perkara diperiksa.¹⁵³⁾

Dengan demikian, segala ketentuan yang menyangkut eksekusi putusan arbitrase internasional tunduk mengikuti aturan hukum negara di tempat mana pengakuan dan eksekusi diminta. Jika pengakuan dan eksekusi diminta di Indonesia, tata cara pelaksanaan tunduk mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendirian yang mengajarkan eksekusi putusan arbitrase asing tunduk pada asas jus sanguinis, misalnya ditemukan dalam penegasan Pasal 54 ayat (3) ICSID, yang mengatakan *"Execution of the award shall be goverment by laws concering the execution of judgement in force in the state in whose territories such execution is sought"*. Tujuan daripada asas yang memperlakukan ketentuan hukum nasional suatu negara dalam tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional, untuk menghormati dan mempertahankan integritas kedaulatan hukum dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

¹⁵³⁾ Gunawan Widjaja, op.cit, halaman 151.

Oleh karena aturan tata cara pendeponiran putusan arbitrase internasional sama dengan putusan arbitrase dalam negeri, segala uraian yang berlaku mengenai pendeponiran putusan arbitrase nasional, berlaku terhadap putusan arbitrase internasional.¹⁵⁴⁾

Jika pendeponiran putusan arbitrase nasional dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya putusan dijatuhkan, maka menurut ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi pendeponiran putusan arbitrase internasional menjadi kompetensi relatif tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵⁵⁾

Sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, bahwa hal-hal yang harus disampaikan pada waktu melakukan deponir putusan arbitrase internasional terdiri dari :

- (1) lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia,
- (2) lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan

¹⁵⁴⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 338.

¹⁵⁵⁾ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op.cit, halaman 145.

- (3) keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut diterapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Bahwa mengenai masalah tenggang waktu pendeponiran pelaksanaan putusan arbitrase internasional baik dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 maupun dalam Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur ketentuan tentang batas tenggang waktu pendeponiran putusan arbitrase internasional. Tidak seperti dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional tenggang waktu deponir seperti diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 bahwa dalam waktu 30 hari sejak putusan dijatuhkan harus dideponir oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Selanjutnya mengenai pihak yang wajib melakukan pendeponiran, sama dengan apa yang berlaku terhadap pendeponiran putusan arbitrase dalam negeri yakni ditugaskan kepada salah seorang anggota arbiter atau oleh seorang kuasa yang khusus mereka tunjuk untuk itu. Juga aturan lain yang berlaku seperti :

- i. pembuatan akta deponir oleh panitera ,
 - dan ditandatangani oleh panitera, serta
 - orang yang melakukan pendeponiran.
- ii. pembayaran biaya pendeponiran,
- iii. pemberitahuan pendeponiran kepada para pihak.

Semua ketentuan itu berlaku terhadap pendeponiran putusan arbitrase asing. Itu sebabnya diperingkatkan, bahwa rules yang mengatur pendeponiran putusan arbitrase internasional sama dengan pendeponiran putusan arbitrase nasional. Khusus untuk pendeponiran putusan arbitrase

asing, ada tambahan aturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990. Tambahan aturan itu mengenai sentralisasi pendeponiran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tambahan mengenai jumlah dan jenis dokumen yang harus diserahkan pada pendeponiran, lebih banyak ragamnya dibanding dengan jenis dokumen yang harus diserahkan pada pendeponiran putusan arbitrase internasional.

d. **Asas Exequatur Putusan Arbitrase Internasional**

Sebagaimana diketahui bahwa rules yang mengatur tata cara pemberian exequatur putusan arbitrase internasional sebelum keluarnya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 adalah Konvensi New York 1958 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Konvensi New York 1958 maupun Perma Nomor 1 Tahun 1990 memiliki beberapa asas yang terkandung di dalamnya, demikian juga Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga memiliki asas-asas yang menjadi syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dijalankan di Indonesia.

Tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, agar putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) **Asas Final dan Binding**

Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1990, dengan tegas mengakui, setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusi di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing "yang berkekuatan hukum tetap". Dengan demikian, Pengadilan Indonesia secara resmi telah mengakui dengan tegas sifat "final" dan "binding" yang melekat pada putusan arbitrase asing.

Penegasan Pasal 2 ini sejalan dengan ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang mengatakan, Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them. Setiap

negara peserta (anggota) Konvensi "mesti" (shall) mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang "mengikat" (binding) dan mempunyai kekuatan eksekusi terhadap para pihak.

Dalam Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 60 juga disebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, artinya putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dan perintah untuk melakukan eksekusi (harus diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dengan adanya penegasan pengakuan putusan arbitrase internasional yang diajukan permintaan exequatur-nya kepada pengadilan sama halnya sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada alasan lagi untuk menolak atau menyatakan pemberian exequatur tidak dapat diterima, kecuali putusan melanggar asas-asas yang ditentukan.

Lebih lanjut, dengan adanya penegasan ini, pengadilan tidak berwenang untuk mempermasalahkan materi putusan. Tugas pokoknya dalam menjalankan fungsi exequatur, hanya meneliti apakah ada dilanggar asas-asas yang dilarang maupun pelanggaran atas aturan formal yang bersifat serius atau fundamental. Bila tidak ada, harus memberi exequatur, bila ada yang dilanggar maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak pemberian exequatur.

(2) Asas Resiprositas

Salah satu hal yang penting diteliti dalam pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase internasional ialah asas resiprositas. Ketentuan asas resiprositas ini telah diatur dalam Pasal 66 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Intinya apakah putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau mejelis arbitrase

di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.¹⁵⁶⁾

Maksudnya, apakah ada ikatan saling timbal-balik antara negara yang menjatuhkan putusan dengan negara Indonesia tentang pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing. Apakah sekiranya putusan arbitrase dijatuhkan di Indonesia, kemudian diminta pengakuan dan eksekusi di negara lain tadi akan menghormati, mengakui, dan bersedia melaksanakan eksekusi?

Inilah yang dimaksud asas resiprositas, adanya ikatan hubungan yang "timbal-balik". Asas ini merupakan salah satu pokok masalah yang harus diteliti pengadilan pada saat hendak memberi permintaan *exequatur*. Dan menurut Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase yang diakui dan yang dapat dilaksanakan eksekusinya di wilayah hukum Republik Indonesia, hanya putusan yang memenuhi asas resiprositas. Ini berarti, kalau negara yang menjatuhkan putusan tidak mempunyai hubungan ikatan bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia di bidang arbitrase putusan tersebut harus ditolak pemberian *exequatur*-nya.

Sikap negara Indonesia yang berpegang teguh pada asas resiprositas mengenai pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase internasional, merupakan landasan atas prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum maupun kedaulatan pengadilan dan bangsa Indonesia. Asas ini berpegang teguh pada prinsip saling menghormati di antara sesama bangsa dan negara lain. Kita akan menghormati apabila secara timbal-balik dia juga menghormati kita. Kita akan mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan

¹⁵⁶⁾ Joni Emirzon, *op.cit*, halaman 114.

pada suatu negara, apabila secara timbal-balik negara tersebut bersedia pula mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia.

Pemancangan asas resiprositas dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990 bukan didasarkan atas sikap eksklusif, tidak pula didasarkan atas sikap sempit dan ekstrim. Pemancangan asas tersebut, didasarkan atas nilai-nilai hukum internasional yang secara universal telah berlaku sejak dulu dalam semua bidang kehidupan antar bangsa. Asas resiprositas yang terjalin sejak dulu antarkehidupan bangsa, meliputi semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, diplomatik, dan termasuk bidang hukum.

Atas asas saling menghargai dan menghormati antar sesama bangsa, Konvensi New York 1958 sendiri mempertahankan asas resiprositas sebagai salah satu pancang untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing. Pasal 1 ayat (3) mengatakan, *"any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement of award made only in territory of another Contracting State"*. Meskipun rumusan ini tidak memaksa negara anggota peserta konvensi harus menerapkan asas resiprositas, tetapi membolehkan anggota negara peserta mempedomani asas tersebut seperti yang terlihat dari kalimat *"may on the basis of reciprocity"*. Namun kenyataan menunjukkan, semua negara anggota peserta konvensi telah mendekritkan asas resiprositas pada saat meratifikasi atau mengesahkan konvensi. Hal itu dapat dibaca pada catatan lampiran konvensi yang dibuat pada tahun 1983. Sikap ini diikuti Pemerintah Republik Indonesia pada saat pengesahan Konvensi pada tahun 1981. Dalam lampiran Keppres Nomor 34 Tahun 1981 telah dikeluarkan deklarasi (declaration) yang menegaskan, menunjuk atau sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Konvensi the Government of

the Republic of Indonesia declares that its will apply the Convention on the basis of reciprocity.

Deklarasi yang tercantum dalam lampiran Keppres dijabarkan kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990, yang menegaskan, putusan arbitrase asing yang diakui serta yang dapat dieksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia, hanya putusan yang memenuhi asas resiprositas. Kalau begitu, secara mutlak Pengadilan di Indonesia harus menolak pemberian permintaan *exequatur* putusan arbitrase asing yang dijatuhkan di suatu negara yang tidak mempunyai ikatan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara Republik Indonesia di bidang arbitrase.¹⁵⁷⁾

(3) Termasuk Lingkup Hukum Perdagangan

Agar dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 66 huruf (b) dan penjelasannya memberikan beberapa contoh bidang yang terlingkup dalam hukum perdagangan, yaitu dibidang-bidang sebagai berikut : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.¹⁵⁸⁾

Asas pembatasan jangkauan pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing yang dijelaskan di atas, diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990. Ditegaskan putusan-putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.

¹⁵⁷⁾ M. Yahya Harahap, *op cit*, halaman 344—345.

¹⁵⁸⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 192.

Sebenarnya ketentuan pasal ini, merupakan ulangan dan penegasan saja terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958 maupun menegaskan terhadap deklarasi yang terdapat dalam lampiran Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958, membenarkan kebolehan pembatasan oleh anggota negara peserta (Contracting State) melalui deklarasi pada saat ratifikasi, bahwa jangkauan pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing, terbatas pada ruang lingkup bidang hukum dagang nasional saja (as commercial under the national law). Hal ini dapat dibaca dalam kalimat akhir pasal tersebut yang berbunyi:

"It may also declare that its will be apply the Convention only to differences arising out of legal relatioanships wheher contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration".

Ternyata kebolehan pembatasan ini dimanfaatkan negara Indonesia. Maka pembatasan ini pun dideklarasikan dalam lampiran Keppres Nomor 34 Tahun 1981 sebagai lanjutan deklarasi asas resiprositas. Dari deklarasi ini, putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi oleh Pengadilan Indonesia hanya putusan yang menyangkut persengketaan yang timbul dalam bidang hukum dagang menurut hukum Indonesia.

Pembatasan inilah yang harus dijadikan sebagai salah satu patokan dalam penelitian pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase asing. Namun, dalam hal ini jangan sampai terjebak kepada pemahaman Hukum Dagang yang terlampau sempit. Tetapi harus dipahami secara luas. Ke dalamnya termasuk nilai-nilai globalisasi maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada diatur asas-asasnya dalam Hukum Dagang Indonesia maupun dalam asas-asas hukum perjanjian. Berikut ini beberapa jenis bentuk-bentuk bisnis yang dapat dimasukkan

ke dalam ruang lingkup commercial yang tidak diatur dalam Hukum Dagang Indonesia, sehingga merupakan hal baru dalam praktek hukum di lingkungan pengadilan. Misalnya bentuk leasing, tidak ada diatur dalam Hukum Dagang Indonesia. Namun secara konkreto tergolong salah satu bentuk bidang bisnis, dianggap sebagai salah satu aspek komersial. Terutama bentuk financial leasing, sangat erat kaitan dengan masalah permodalan. Financial leasing bisa bercorak investment dalam bentuk joint venture atau transfer of technology. Bahkan satu sisi financial leasing sangat dekat analoginya dengan bentuk perjanjian hipotik. Seperti yang diungkapkan dalam Encyclopedia of Profesional Management "Financial leasing are closely analogues to mortgage. Oleh karena itu, perjanjian financial leasing yang berciri investasi maupun yang berciri hipotik serta dalam financial leasing yang dibarengi opsi beli (buy - decision) sangat mirip dengan ciri sewa-beli, jelas-jelas memperlihatkan gejala bisnis atau komersial yang mempunyai sifat tersendiri dari bentuk komersial lain. Dia merupakan suatu bentuk contractus sui generis yang memiliki persamaan dengan asas-asas perkreditan, hipotik terutama dengan asas-asas sewa beli apabila bentuk financial leasing dibarengi dengan klausula opsi beli. Kalau begitu apabila sengketa (differences) dalam perjanjian leasing, kemudian sengketanya diputus di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, tidak tepat untuk menolak pemberian exequatur atas alasan leasing tidak dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia.

Contoh lain, bentuk baru yang sedang mulai ramai berkembang Indonesia, tapi tidak dikenal dalam Hukum Dagang kita. Bentuk bisnis baru tersebut dikenal dengan nama franchise. Bentuk ini merupakan suatu perikatan kegiatan bisnis, dimana pihak franchisor memberi hak istimewa kepada pemegang franchises (franchis holder) untuk menjual

barang tertentu atau servis khusus dalam suatu batas geografi tertentu (in a defined geographic territory) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Sekarang banyak usaha bisnis franchise di bidang makanan cepat atau fast food seperti Kentucky Fried Chicken dan lain-lain. Dalam bentuk franchise jelas tampak unsur-unsur gejala ekonomis atau gejala komersial yang bentuk perjanjiannya diuraikan dengan ringkas dan jelas dalam Encyclopedia of Professional Management, :

- pihak franchise adalah pihak pengusaha atau distributor nasional maupun regional yang bertindak memberi franchise (franchiser is the manufacture of the national or regional distributor that grants a franchise),
- pihak franchise adalah penyelenggara lokal usaha franchise (the local operator of the franchise),
- franchise itu sendiri berarti, hak untuk menyelenggarakan cabang lokal dari usaha induk perusahaan (the right to operate a local branch of the parent company).

Ikatan perjanjian dituangkan dalam Franchise Agreement yang memuat ketentuan tentang hubungan antara franchiser dengan pihak franchise yang meliputi hak (the right) privilese serta kewajiban (obligation) masing-masing pihak.

Penyelenggara lokal sebagai individu yang independent dengan sukarela mengikat diri memperdagangkan barang usaha atau jasa dari franchiser dengan mempergunakan identitas atas nama franchisor, demi untuk mendapat keuntungan berkat kesuksesan dan nama baik atau reputasi yang dimiliki franchisor. Sebaliknya pihak franchisor bersedia memberi hak kepada pihak franchise dengan memakai identitas dan nama perusahaan franchisor, oleh karena memperkirakan akan memperoleh keuntungan dari ikatan tersebut. Beberapa keuntungan yang diperkirakan diperoleh franchiser antara lain :

- usaha bisa berkembang tanpa investasi,
- keuntungan periodik yang harus dibayar pihak franchise kepadanya,
- perluasan dan pengembangan usaha yang diperkirakan akan memperbesar volume keuntungan, dan sebagainya.

Dari uraian singkat di atas, tampak jelas franchise sebagai usaha komersial yang sedang berkembang di Indonesia. Malahan menurut John Naisbit perkembangan globalisasi sekarang *all the world becoming a single economy*. Menjalarnya "a new universal international life style", telah mendorong bentuk usaha franchise dalam bisnis fast food maupun dalam jenis barang asesoris atau barang konsumsi lain seperti busana, sepatu, jam tangan dan lain-lain, sudah merupakan arus globalisasi yang akan semakin berkembang.

Ditinjau dari segi Hukum Dagang Indonesia tidak ada diatur secara khusus. Namun asas-asasnya menyentuh asas hukum perjanjian di bidang bisnis dan sewa. Bahkan menyentuh asas-asas hukum keagenan atau makelar. Jadi meskipun tidak ada diatur secara khusus, tapi menyentuh berbagai asas sistem tata hukum nasional yang erat kaitannya dengan Hukum Dagang, putusan arbitrase asing yang menyangkut sengketa franchising yang diminta pengakuan dan eksekusi di Indonesia, tidak layak ditolak pemberian *exequatur*-nya atas alasan bentuk perjanjian itu tidak diatur dalam Hukum Dagang.

Demikian beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam pemberian *exequatur* putusan arbitrase asing dikaitkan dengan asas pembatasan keabsahan pengakuannya ditinjau dari Hukum Dagang Indonesia. Penerapan asas pembatasan yang diatur dalam Pasal 66 huruf (b) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990, harus mampu mengantisipasi perkembangan hukum maupun laju arus globalisasi, sepanjang

perkembangan dan arus itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh kegiatan pertumbuhan dunia dagang dan perekonomian bangsa. Memang kita sadar, tidak semua laju perkembangan dan arus globalisasi baik dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Ditinjau dari segi nilai-nilai budaya dan perekonomian yang kita cita-citakan, ada nilai arus globalisasi yang jelek dan tidak cocok bagi kita. Di situlah letak kemahiran yang diperlukan, mensinkronkan mana yang sesuai dan diperlukan dari arus globalisasi bagi kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Barangkali secara umum kita dapat menerima bentuk franchise sebagai salah satu ikatan yang beraspek komersial dan ekonomis. Namun demikian, kita kurang sependapat untuk menerima ikatan perjanjian franchise di bidang perjudian, minuman keras, dan yang sejenis dengan itu. Sekiranya ada putusan arbitrase asing tentang jenis bisnis perjudian dan minuman keras yang dimintakan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia, dapat disetujui dan ditolak pemberian exequatur-nya baik atas alasan tidak dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia maupun atas alasan bertentangan dengan public policy bangsa Indonesia.

(4) Asas Ketertiban Umum

Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ketertiban umum atau public policy selain diatur dalam Pasal 66 huruf (c) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan dalam Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 1990 juga diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958.

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "openbare orde" (Belanda), "orde public" (Perancis), "vorbehaltsklausel" (Jerman), "public policy" (negara-negara anglo saxon). Pada hakekatnya istilah "policy" dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh menentukan

(kadang-kadang disalahgunakan) faktor-faktor politis menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap "ketertiban umum". Ketertiban umum di Indonesia pada masa-masa orde baru dijadikan sebagai "dogger" (pisau belati alat pembunuh) dari putusan arbitrase (award) asing dan bukan sebagai "shield" (tameng) atau rem darurat. Rem darurat atau klep pengaman seyogyanya sekali-kali dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing yang seharusnya kita pergunakan menurut ketentuan Hukum Perdata Internasional kita sendiri; menerapkan hukum asing jangan sampai berakibat dilanggar atau terhapusnya sendi-sendi asasi Hukum Nasional (melanggar fungsi negatif ketertiban umum). Sebaliknya fungsi positifnya ialah bahwa memadukan penggunaan dalih hukum melanggar ketertiban umum, menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu tanpa memperhatikan hukum (nasional) yang seharusnya berlaku, karena telah merupakan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa sadar dan dengan etika baik.

Ketertiban umum pada suatu saat tertentu diperlukan, karena hukum perdata internasional kita memaksa untuk mempergunakan hukum asing, sedangkan penggunaan hukum asing tersebut dapat saja bertentangan dengan asas-asas keadilan kita.

Dari pengamalan ber-Pancasila, seyogyanya menggunakan dalih melanggar ketertiban umum selalu harus dihubungkan dengan antara lain :

- a. kesejahteraan rakyat,
- b. kelangsungan hidup bangsa,
- c. bukan kepentingan perorangan atau kelompok.

Oleh karena itu penggunaan dalih melanggar ketertiban umum harus seminim/sehemat mungkin agar tugas negara melaksanakan dan menjaga kepentingan bangsa/rakyat dan negara dapat berlangsung tanpa gangguan-gangguan. Contoh , Indonesia mengenal poligami

(dengan syarat-syarat) akan tetapi di berbagai negara Eropah/Amerika poligami merupakan pelanggaran hukum (melanggar ketertiban umum). Contoh lain, dalam hal pengambilalihan perusahaan Belanda (1958), Indonesia dituduh melanggar ketertiban umum, padahal pengambilalihan tersebut menurut hukum nasional dapat dibenarkan dengan ganti rugi.¹⁵⁹⁾

Jadi meskipun asas ketertiban umum ini telah diakui secara universal dalam hukum perdata internasional, namun sampai saat ini secara praktis para ilmuwan hukum di dunia masih belum dapat mencapai konsesus dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan. Hukum Internasional (publik) mengakui adanya kedaulatan penuh (*souvereignty*) dari suatu negara di mata internasional. Ini berarti secara prinsipil, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang dapat memaksakan berlakunya suatu ketentuan pada negara lain, dengan cara apapun juga selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan sendi-sendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata lain tidak dikehendaki oleh negara lain tersebut.¹⁶⁰⁾

e. Tata Cara Pemberian Exequatur

e.1. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990

Dalam Bab II Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 1999 diatur tentang exequatur yang menegaskan exequatur diberikan oleh :

- Ketua Mahkamah Agung, atau
- Wakil Ketua Mahkamah Agung, atau

¹⁵⁹⁾ Priyatna Abdurrasyid, *Kaitan Konvensi New York 1958 (diratifikasi Indonesia) dengan Ketertiban Umum*, BANI, Jakarta, 1999, halaman 1—2.

¹⁶⁰⁾ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op cit*, halaman 145—146.

- Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis.

Sistem permohonan exequatur putusan arbitrase asing yang diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 1990, hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 637 Rv, sistem permohonan digantungkan pada syarat permohonan.

Dengan digantungkan syarat permohonan untuk memperoleh exequatur kepada pendeponiran putusan, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan keabsahan permohonan exequatur, yaitu :

Pertama : selama putusan belum dideponir, tertutup hak mengajukan permintaan memperoleh exequatur.

Ketentuan ini diperingatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990. Ditegaskan, permohonan untuk eksekusi (exequatur) putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan setelah putusan "didaftarkan" (dideponir) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap putusan arbitrase asing yang dimintakan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia harus dideponir lebih dulu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendeponiran putusan arbitrase asing yang akan dimintakan pengakuan dan eksekusi, disentralisasi semua di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan ini memegang dan menduduki kompetensi relatif secara mutlak terhadap penanganan semua putusan arbitrase asing yang diminta pengakuan dan eksekusinya di Indonesia, sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1990.

Kedua : pendeponiran yang tidak memenuhi syarat formal, mengakibatkan permohonan exequatur tidak dapat diterima.

Di atas sudah disinggung, syarat formal pendeponiran yang diatur dalam Pasal 634 dan 635 Rv juncto Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 1990 juncto Pasal IV ayat (1) Konvensi New York 1958 :

- pendeponiran dilakukan dalam batas tenggang waktu tertentu,
- menyerahkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dan
- membayar biaya pendeponiran.

Kalau salah satu di antara syarat tidak dipenuhi, pendeponiran dianggap tidak sah. Keabsahan pendeponiran membawa dampak langsung terhadap permohonan mengakibatkan permohonan exequatur tidak dapat diterima. Misalnya, pendeponiran dilakukan melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan. Pendeponiran jelas tidak memenuhi salah satu syarat formal, akibatnya pendeponiran tidak sah. Oleh karena pendeponiran tidak sah, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan landasan permohonan exequatur. Atau dokumen yang diserahkan tidak lengkap jenis ragamnya, mengakibatkan pendeponiran tidak sah. Dalam kasus yang seperti ini pun pendeponiran tidak mampu mendukung keabsahan permohonan untuk memperoleh exequatur.

Perlu diingatkan, syarat-syarat formal pendeponiran adalah bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Untuk sahnya tindakan pendeponiran, harus semua syarat dipenuhi. Salah satu syarat saja tidak dipenuhi, mengakibatkan pendeponiran tidak sah. Dalam peristiwa yang demikian mengakibatkan pendeponiran tidak cukup mendukung keabsahan permohonan exequatur.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990 yang mengatakan, permohonan exequatur putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan setelah putusan dideponir tidak semata-mata ditujukan kepada putusan yang tidak dideponir. Tapi juga meliputi pendeponiran yang tidak memenuhi syarat formal. Meskipun telah dilakukan pendeponiran, namun tidak memenuhi syarat formal, dapat disamakan dengan makna yuridis, pendeponiran belum dilakukan. Dalam kasus yang seperti itu, pendeponiran tidak mampu mendukung keabsahan permohonan untuk memperoleh exequatur. Oleh karena itu, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi, baik terhadap permohonan exequatur yang putusannya belum dideponir secara murni, maupun permohonan yang pendeponirannya tidak memenuhi salah satu syarat formal, sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima. Dan terhadap putusan arbitrase asing yang permohonan pemberian exequatur dinyatakan tidak dapat diterima, mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi secara permanen oleh pengadilan.

Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1990 telah melimpahi secara tersentralisir semua penanganan mengenai masalah yang berhubungan dengan putusan arbitrase asing dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fungsi pemberian kewenangan penanganan tersebut meliputi semua pelaksanaan administrasi yustisial, kecuali mengenai pemberian exequatur. Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, fungsi dan kewenangan pemberian exequatur putusan arbitrase asing, disentralisir pada Mahkamah Agung, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua atau oleh Ketua Muda Bidang Perdata Tertulis.

Walaupun pemberian exequatur menjadi fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang dilimpahkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990, administrasi yustisial yang berkenaan

dengan penanganan permohonan *exequatur*, tetap menjadi fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal I juncto Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990. Pada Pasal 5 ayat (2), dibebankan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan semua berkas permohonan *exequatur* kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.

Bertitik tolak dari ketentuan yang menyangkut tugas pengiriman berkas permohonan dikaitkan dengan pengajuan permohonan, berarti permohonan *exequatur* oleh pihak yang berkepentingan harus :

- ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung "melalui" Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- dengan demikian permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Permohonan *exequatur* yang langsung disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung adalah keliru. Meskipun barangkali kekeliruannya tidak fatal atau tidak mengakibatkan permohonan tidak sah, sekurang-kurangnya tata cara yang demikian akan merugikan pemohon dari segi waktu. Karena apabila terjadi cara permohonan yang seperti itu, permohonan akan dikembalikan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses menurut penggarisan tata cara yang telah ditentukan.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan *exequatur* putusan arbitrase asing, Pasal 5 Perma telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengiriman berkas permohonan kepada Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu, segi yang dianggap perlu mendapat perhatian, agar tata cara pengiriman tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 1990, adalah :

e.1.1 Pengiriman berkas kepada Pan/Sekjen MA

Demi untuk terselenggara administrasi yustisial, permohonan exequatur pada Mahkamah Agung, pengiriman berkas ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pengiriman berkas kepada Panitera/Sekretaris Jenderal sesuai dengan fungsi struktural Mahkamah Agung. Setelah menyempurnakan registrasi penerimaan berkas, barulah hal itu disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penyelesaian selanjutnya permohonan exequatur.

e.1.2 Tenggang Waktu Pengiriman

Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 1990 mengatur tenggang waktu pengiriman berkas permohonan exequatur. Ditegaskan, pengiriman ke Mahkamah Agung, harus dilakukan :

- selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari,
- terhitung sejak tanggal penerimaan diterima.

e.1.3. Dokumen yang Harus Dikirimkan

Mengenai dokumen apa yang harus dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 1990. Pengiriman berkas permohonan exequatur meliputi semua dokumen yang diserahkan pada waktu pendeponiran, yaitu :

- i. asli putusan atau turunan putusan arbitrase asing yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan autentikasi dokumen asing,
- ii. terjemahan naskah resmi putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,

- iii. asli surat perjanjian atau turunan yang menjadi dasar putusan arbitrase asing yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing.
- iv. naskah terjemahan resmi perjanjian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,
- v. keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara mana putusan arbitrase asing diputuskan, yang berisi pernyataan :
 - bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan negara Indonesia, atau
 - terikat secara bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta eksekusi putusan arbitrase asing (recognition and enforcement on the foreign arbitral awards).

Itulah jenis dokumen yang merupakan satu kesatuan sebagai berkas permohonan, exequatur yang harus dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung. Dari berkas tersebut Ketua Mahkamah Agung melakukan penelitian pemberian exequatur. Jika dari hasil penelitian tidak ada fakta pelanggaran terhadap asas-asas maupun alasan-alasan penolakan pemberian exequatur, permohonan exequatur dapat dikabulkan. Sebaliknya, kalau ada ditemukan fakta pelanggaran terhadap salah satu asas maupun terhadap salah satu alasan penolakan, permintaan exequatur ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Sangat diharapkan ketelitian dalam pengiriman berkas, demi untuk kelancaran dan ketepatan pemberian exequatur. Sebab kalau ada kekurangan pengiriman dokumen, pasti akan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian exequatur,

karena terpaksa Mahkamah Agung meminta kekurangan itu dilengkapi.

Ada sesuatu hal yang disayangkan dalam pemberian exequatur, tidak ada pembatasan jangka waktu penyelesaian. Perma Nomor 1 Tahun 1990, tidak mengatur berapa lama Mahkamah Agung harus memberi ketetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan exequatur. Ketidakadaan pembatasan jangka waktu dalam hal ini, dirasakan kurang memberi kepastian hukum dalam penyelesaian. Dengan tidak adanya pembatasan jangka waktu, seolah-olah penyelesaian pemberian exequatur digantungkan kepada kemurahan hati Mahkamah Agung semata-mata. Penyelesaian tidak terikat pada suatu batas jangka waktu tertentu secara normatif, sehingga boleh diulur sedemikian rupa.

Padahal Perma dimaksud tidak lupa menentukan batas waktu pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung. Akan tetapi mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaian exequatur oleh pihak Mahkamah Agung, seolah-olah sengaja dilupakan. Perma hanya berani memerintah peradilan bawahan untuk melaksanakan fungsi dalam batas jangka waktu tertentu. Namun tidak berani memerintahkan peradilan tertinggi itu sendiri untuk menyelesaikan fungsi dalam jangka waktu yang tertentu pula.

Oleh karena itu, cukup alasan untuk mengusulkan perbalkan terhadap Perma, agar ada penentuan batas waktu penyelesaian pemberian exequatur oleh Mahkamah Agung. Misalnya, ditentukan batas waktunya, paling lambat dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pengiriman berkas permohonan. Jangka waktu satu bulan, dianggap rasional dan realistis untuk penyelesaian pemberian permohonan exequatur.

Apalagi jika hal ini dihubungkan dengan masalah citra. Penyelesaian pemberian exequatur putusan arbitrase asing menyangkut kepentingan orang luar negeri (dunia luar). Agar citra dunia luar terhadap peradilan di Indonesia baik, sangat diharapkan penyelesaian yang cepat.¹⁶¹⁾

e.2 Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang-undang Arbitrase di Indonesia, yaitu Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bagaimana jika putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, dimana beberapa ketentuan pokok pengaturan oleh Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan tata cara pemberian exequatur terhadap suatu putusan dari arbitrase internasional adalah sebagai berikut:

- (1) Yang berwenang menangani eksekusi arbitrase internasional suatu putusan arbitrase internasional harus dilaksanakan di negara dimana pihak yang dimenangkan mempunyai kepentingan. Jika putusan tersebut harus dilaksanakan di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi dari putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk "Perintah Pelaksanaan" yang dalam praktek dikenal dengan sebutan "Eksekuatur".
- (2) Syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dijalankan di Indonesia.

¹⁶¹⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 351—354.

Tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, agar putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(a) Asas Reciprositas

Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

(Pasal 66 huruf a). Hal itu berarti asas reciprositas (saling mengakui) berlaku. Asas reciprositas yakni asas yang menyatakan bahwa putusan negara dimana arbitrase berasal tersebut harus pula dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional bila arbitrase tersebut berkedudukan di Indonesia. Asas Reciprositas juga berlaku untuk negara dari mana pihak pemohon eksekusi berada (Pasal 67 ayat (2) huruf (c).

(b) Termasuk lingkup hukum perdagangan

Agar dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan beberapa contoh bidang yang terlingkup dalam hukum perdagangan, yaitu bidang-bidang sebagai berikut : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual (Penjelasan atas Pasal 66 huruf b).

(c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Agar dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbaar orde) menurut sistem hukum Indonesia.

(d) Mendapat eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri

Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor (perintah eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(e) Jika menyangkut negara Republik Indonesia

Jika putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutornya dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Kapan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan

Pasal 67 menentukan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) tahap dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu sebagai berikut :

- (a) Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan ;
- (b) Tahap permohonan pelaksanaan putusan ;
- (c) Tahap perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan Negeri (eksekutor) ;
- (d) Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

Dalam Undang-undang Arbitrase ini juga tidak mengatur jangka waktu kapan permohonan eksekutor dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- (4) Berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional Untuk dapat diberikan perintah pelaksanaan (eksekuatur) terhadap suatu putusan arbitrase internasional, harus terlebih dahulu diajukan berkas-berkas permohonan eksekusi yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Permohonan pelaksanaan eksekusi,
- (b) Lembar asli atau salinan otentik dari putusan arbitrase tersebut,
- (c) Terjemahan resmi dari putusan arbitrase ke dalam bahasa Indonesia dari putusan arbitrase,
- (d) Lembar asli atau salinan otentik dari kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase,
- (e) Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase,
- (f) Surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara dimana diputuskan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral ataupun secara multilateral dengan negara RI tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dari berkas tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penelitian pemberian *exequatur*. Jika dari hasil penelitian tersebut tidak ada fakta pelanggaran terhadap asas-asas maupun alasan-alasan penolakan pemberian *exequatur*, permohonan *exequatur* dapat dikabulkan. Sebaliknya, kalau ada ditemukan fakta pelanggaran terhadap salah satu asas maupun terhadap salah satu alasan penolakan, permintaan *exequatur* ditolak.

- (5) Upaya hukum terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri menerima eksekusi.

Putusan Ketua Pengadilan Negeri yang menerima dan memerintahkan eksekusi putusan arbitrase bersifat final sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

- (b) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak eksekusi

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional masih tersedia upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus sudah memutuskan permohonan kasasi ini dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung (Pasal 68 ayat 3). Putusan Mahkamah Agung ini bersifat final tanpa ada upaya hukum apa pun termasuk upaya peninjauan kembali (PK).

- (c) Terhadap putusan eksekutor Mahkamah Agung

Terhadap putusan pelaksanaan/menolak pelaksanaan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung (dalam hal negara terlibat sebagai salah satu pihak dalam sengketa tersebut), baik yang menerima atau yang menolak eksekusi, tidak tersedia upaya hukum apa pun termasuk upaya perlawanan atau peninjauan kembali (PK).

- (6) Pelimpahan kewenangan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang secara relatif

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melaksanakan sendiri putusan eksekusinya (dalam hal menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi jika eksekusi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang secara relatif, misalnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di mana keberadaan benda tidak bergerak menjadi obyek eksekusi.

- (7) Sita eksekusi putusan arbitrase Internasional

Terhadap aset-aset milik termohon eksekusi dapat diletakkan sita eksekusi. Tata cara mengenai sita eksekusi ini berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata.

Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional selain ditentukan dalam Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga ditentukan dalam hukum acara perdata yang umum (Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).¹⁶²⁾

f. Proses Pengambilan Keputusan Sebagai Alasan Penolakan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Internasional

Indonesia melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981 menjadi anggota Konvensi New York 1958. Meskipun demikian, Indonesia tidak selalu harus mengabulkan setiap permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional. Konvensi New York 1958 sendiri telah menetapkan syarat-syarat

¹⁶²⁾ Munir Fuady, *op.cit*, halaman 191—197.

bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase internasional di negara-negara penandatanganan konvensi.

Pasal V Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dapat terjadi apabila yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu :

- (a) Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara dimana keputusan tersebut dibuat.
- (b) Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
- (c) Putusan bertentangan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan-keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
- (d) Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau persetujuan seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung.

- (e) Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara atau berdasarkan hukum negara dimana putusan itu dibuat.

Ayat 2 Pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak, jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan :

- (a) Pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu,
(b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum negara itu.¹⁶³⁾

Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tidak seluruhnya mengulang syarat-syarat penolakan terhadap putusan arbitrase internasional sebagaimana dimuat dalam Pasal V Konvensi New York 1958. Pasal 66 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (Pasal 66 b). Putusan arbitrase internasional dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁶⁴⁾

¹⁶³⁾ Erman Rajagukguk, op.cit, halaman 64-65.

¹⁶⁴⁾ ibid, halaman 76.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta ditunjang dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara-Perkara Yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase

Dalam praktek meskipun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun ada kalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan.

Berdasarkan klausula yang dibuat oleh para pihak, berikut ini penulis sajikan contoh kasus baik sebelum maupun sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang membahas adanya klausula arbitrase, klausula mana telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, kemudian timbul sengketa *pactum de compromittendo*. Berikut ini tabel yang memuat sikap para pihak terhadap perkara yang mengandung klausula arbitrase yang diajukan ke pengadilan, dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam.

Tabel 1 : Sikap Para Pihak Terhadap Perkara yang Mengandung Klausula Arbitrase yang Diajukan ke Pengadilan

No.	Klausua Arbitrase	Keterangan	Dalam Kasus
a.	Ada	Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut	- Dato Wong Hech Guong lawan PT. Metropolitan Timber Ltd.
b.	Ada	Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut	- Ahyu Forestry Company - PT. Perumahan Sutomo, Direktur Utama PT. Balapan Jaya - PT. Perusahaan Dagang Tempo lawan PT. Roche Indonesia - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lawan PT. Paiton Energy
c.	Ada	Para pihak bersengketa mengenai badan arbitrase yang mana yang berwenang untuk mengadili	- PT. Batu Mulia Utama lawan SSC (Sainrapt Et Brite Societe Auxiliaire D'Enterprises Societe Routin Colas
d.	Ada	Para pihak juga menunjuk pada kompetensi Pengadilan Negeri dalam satu	- Bank Deutsche Genos- senschaft lawan PT. Lumbung Tani Indonesia

		kontrak	Cs. - PT. Panata Tama Inter Instalasi Indonesia lawan PT. Kolifri Tekindo Pratama
e.	Ada	Tetapi perjanjian batal demi hukum	- PT. Perintis V. Pile Teknologi lawan V. Pile International (Netherlands) BV.
f.	Ada	Di dalamnya mengandung perkara kepailitan, akhirnya para pihak bersengketa mengenai siapa yang berwenang mengadili perkara kepailitan, apakah Pengadilan Negeri atau Arbitrase	- PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) lawan PT. Putra Putri Fortuna Windu

Terhadap sikap para pihak sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, maka putusan pengadilan terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.a. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI, dimana para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrase sebelum sengketa muncul, namun dalam persidangan tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut karena memilih diam, dapat dilihat pada :

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 145/1973/PT. Perdata tanggal 10 Juli 1975 jo. Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 310/1972 G. tanggal 21 Maret 1973, dalam sengketa antara Dato Wong Hech Guong cs v. PT. Metropolitan Timber Ltd.¹⁶⁵⁾

Gugatan telah diajukan oleh PT. Gaphi Trading Co. Ltd., yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Andries Gerardus Pangemanan lawan Dato Wong Hech Guong sebagai Tergugat I yang bertempat tinggal di Singapura dan PT. Metropolitan Timbers sebagai Tergugat II di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sengketa yang diajukan menyangkut tuntutan pembayaran bagian pihak Pangemanan dari partner asingnya Dato Wong Hech Guong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd, yang dalam hal ini telah bertindak sebagai kontraktor asing, sehubungan dengan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan para pihak mengenai eksploitasi hutan di kepulauan Sanasa Kasiruta dan Mandioli, Propinsi Maluku.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, telah disetujui bahwa Dato Wong cs diwajibkan membayar kepada Pangemanan sejumlah tertentu untuk setiap kali ekspor yang telah dilakukan ditambah dengan biaya administrasi yang jumlahnya kemudian akan meningkat. Akan tetapi meskipun sudah berkali-kali ditegur ternyata Dato Wong cs tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

Para pihak dalam Agreement Nomor 25 tanggal 25 November 1969 telah sepakat terhadap klausula arbitrase sebagai berikut :

"If there arises any dispute that cannot be settled by both parties amicably then the matter concerned is subject to an arbitration consisting of three arbitrators, one arbitrator shall be elected by each party and the third arbitrator to be elected jointly by the two arbitrators to act as referee".

¹⁶⁵⁾ Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions), Berikut Komentar*, Jilid 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 49—74.

Maka menurut pertimbangan Mahkamah Agung RI., klausula arbitrase ini mengikat para pihak sebagai undang-undang yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya klausula arbitrase ini, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

"bahwa pertama-tama meskipun antara kedua belah pihak dalam agreement nomor 25 tanggal 25 Nopember 1969 diperjanjikan bahwa apabila timbul sengketa maka akan diselesaikan dengan arbitrase dahulu, namun karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini".

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, hemat Mahkamah Agung RI. keliru, karena seolah-olah mengenai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, oleh Pengadilan Negeri digantungkan kepada ada tidaknya hal tersebut diajukan sebagai eksepsi/perlawanan dalam pemeriksaan di persidangan.

Ad.b. Putusan Pengadilan dan sikap Mahkamah Agung RI mengenai suatu perkara yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase, dimana pihak tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, dapat dilihat pada :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/1981 P.T. Perdata tanggal 7 Mei 1981 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor 113/1980 G. tanggal 18 Desember 1980, dalam

sengketa antara Ahyu Forestry Company Limited v. Sutomo, Direktur Utama PT. Balapan Jaya.¹⁶⁶⁾

Ahyu Forestry Company Limited adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Korea, berkedudukan hukum di luar negeri dan PT. Balapan Jaya adalah suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, dimana Direktur Utamanya adalah Sutomo. Pada tanggal 7 Nopember 1977, Ahyu Forestry Company Limited (Penggugat) memperoleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun atas areal hutan seluas 115.000 Ha di wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Untuk pelaksanaan HPH tersebut, kedua perusahaan ini bersama-sama telah mendirikan suatu Perseroan Terbatas di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing bernama PT. Ahyu Balapan Timber.

Maksud dan tujuan dari perusahaan yang didirikan tersebut adalah untuk berusaha di bidang perkayuan dan memperdagangkan hasil-hasil usaha tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan jabatan Presiden Direktur dipegang oleh warga negara Korea. Kemudian antara kedua belah pihak timbul sengketa mengenai pendayagunaan hutan, dimana partner Indonesia menginginkan to review the forestry project contract dan partisipasi yang nyata dalam manajemen perusahaan joint ventura tersebut sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah RI, yang pelaksanaannya telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan.

Menurut Penggugat, Choi Myeong Hoeng sebagai Presiden Direktur dari PT. Ahyu Balapan Timber telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan

¹⁶⁶⁾ Ibid, halaman 1—48.

kerugian bagi penggugat. Karena itu pihak Indonesia terpaksa menuntut putusnya kerjasama penguasaan hutan dan menuduh partner asing melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas dasar alasan tersebut, kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat dalam gugatan provisi mohon kepada Pengadilan agar manajemen dari PT. Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat untuk waktu yang tidak ditentukan sampai ada penyelesaian perkara. Penggugat memohon pula kepada pengadilan agar mencairkan dana PT. Ahyu Balapan Timber yang dibekukan Bank Dagang Negara Jakarta dan mengalihkan saham Tergugat kepada Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa Choi Myeong Hoeng bukan lagi sebagai Presiden Direktur dari PT. Ahyu Forestry Company Co.Ltd. Kemudian sesuai dengan Basic Agreement For Joint Venture tertanggal 20 Maret 1974 Pasal 15 bahwa semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam jangka waktu 30 hari akan diselesaikan melalui Umpire of Commerce di Paris.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusannya nomor 113/1980 menolak eksepsi Tergugat, dengan alasan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan dalam rangka mencari dan mewujudkan kebenaran. Hakim mengatakan, akankah Tergugat meragukan Pengadilan Indonesia, di mana cara penyelesaian melalui perdamaian oleh Pengadilan tidak berbeda makna dan tugasnya dengan apa yang disebut arbitrase itu. Bahkan tidak berlebihan dikemukakan bukankah peradilan dilakukan dengan putusan diucapkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pengadilan kemudian mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu yang

menyangkut pengelolaan perusahaan diserahkan kepada Penggugat dan gugatan selebihnya ditolak.

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 7 Mei 1981 Nomor 57/1981/PT. Perdata menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut. Namun dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase dalam Pasal 15 Basic Agreement For Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW). Oleh karena itu, keputusan *judex factie* telah bertentangan dengan Pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rv), dan dengan demikian telah melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 454/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Mei 2000, dalam sengketa antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (PT. Tempo) melawan PT. Roche Indonesia.¹⁶⁷⁾

Hubungan kerjasama yang baik antara PT. Roche Indonesia dan PT. Tempo, selaku produsen dan distributor yang telah berjalan sekitar 25 (dua puluh lima) tahun akhirnya berbuntut keributan. Hubungan kerjasama diawali ketika PT. Tempo ditunjuk untuk menyalurkan obat-obatan yang diproduksi oleh PT. Roche Indonesia. Pengangkatan PT. Tempo sebagai distributor PT. Roche Indonesia diawali dengan ditandatanganinya perjanjian yang dibuat pada tanggal 22 Maret 1974

¹⁶⁷⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tahun 2002.

dengan legalisasi notaris. Perjanjiannya selalu dirubah pada tahun tertentu dan terakhir direvisi dengan perjanjian distribusi pada tanggal 9 Desember 1996. Namun pada tanggal 31 Agustus 1999 PT. Roche Indonesia mengirimkan surat yang menyatakan penghentian hubungan kerja secara efektif dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari 2000.

Menurut PT. Tempo, surat ini menunjukkan etikad tidak baik dari pihak PT. Roche Indonesia. Alasannya, pertama, sebelumnya sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai penghentian hubungan kerja tersebut. Kedua, PT. Tempo sama sekali merasa tidak pernah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan isi perjanjian. Ketiga, PT. Tempo masih mencoba memperbaiki hubungan dengan melakukan konfirmasi tetapi tidak membuahkan hasil. Karena sikap PT. Roche Indonesia yang tidak mau tahu akhirnya PT. Tempo mengajukan gugatan ganti rugi dan sita jaminan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 1999 dengan meminta ganti rugi sebesar Rp. 281.216.326.084,- berikut penyitaan atas bangunan PT. Roche Indonesia dan isinya di Cimanggis, Bogor. Pengadilan dalam putusan selanya pada tanggal 22 Oktober 1999 menyatakan menyita pabrik PT. Roche Indonesia berikut isinya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak eksepsi PT. Roche Indonesia dipandang kuasa hukum PT. Roche Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mendukung iklim investasi yang sehat di Indonesia. Apalagi PT. Roche Indonesia merupakan pihak Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT. Tempo berkenaan dengan masalah hubungan keagenan (distributorship).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Distributor Agreement yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. Roche Indonesia dan PT. Tempo, telah diatur bahwa segala sengketa yang terjadi berdasarkan Distributor Agreement antara kedua belah pihak akan diajukan dan diselesaikan oleh Arbitrase. Dengan mengacu pada klausula arbitrase tersebut, PT. Roche Indonesia telah mengajukan eksepsi, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak eksepsi dalam putusannya tanggal 25 Januari 2000 dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara tersebut.

Menurut DR. Todung Mulya Lubis kuasa hukum dari PT. Roche Indonesia menyatakan bahwa putusan itu jelas bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ia menyebutkan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selain itu menurut Mulya Lubis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu juga membuat investor memandang bahwa iklim Investasi di Indonesia tidak kondusif dan tidak melindungi kepentingan bisnis mereka di Indonesia. Hal ini sangat tidak menguntungkan dan tidak sejalan dengan usaha pemerintah yang berusaha menarik modal asing sebanyak-banyaknya.

Pernyataan kuasa hukum PT. Roche Indonesia ini dibantah oleh kuasa hukum PT. Tempo, Amir Syamsudin yang menyatakan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak bukan mengenai masalah teknis bisnis, melainkan masalah murni yuridis. Perselisihan tersebut timbul karena pihak PT. Roche Indonesia secara sepihak memutuskan distribution agreement. Dengan demikian perselisihannya bukan

masalah kualitas dan kuantitas produk, delivery, harga, perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis bisnis. Oleh karena masalahnya adalah murni yuridis, maka hakimlah yang berwenang untuk memeriksa bukan para arbiter. Selanjutnya dikatakan pula bahwa penyelesaian dengan menggunakan arbitrase hanya dapat ditempuh sepanjang perselisihannya mengenai teknis bisnis.

Menurut Amir, kelemahan atau ketidaklengkapan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menggeneralisasi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, tidak dapat dijadikan landasan yuridis bagi hakim untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena paham bahwa hakim adalah corong atau mulut undang-undang telah lama ditinggalkan.

Selain itu, menurut kuasa hukum PT. Tempo, pihak PT. Roche Indonesia sendiri tidak menggunakan arbitrase sewaktu memutuskan distribution agreement. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Roche Indonesia telah mengesampingkan arbitrase. Padahal PT. Tempo yang selama lebih kurang 25 tahun memasarkan produk dari PT. Roche Indonesia di wilayah Indonesia, dengan tanpa ada kesalahan diputuskan begitu saja secara sepihak sebagai distributor, padahal selama ini PT. Tempo begitu loyal dan taat pada aturan yang dibuat oleh PT. Roche Indonesia.

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 517/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 1999 dalam sengketa antara PT. Perusahaan Listrik Negara melawan PT. Palton Energy, yang kemudian pada tanggal 18 Januari 2002 kuasa

Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan terhadap perkara tersebut.¹⁶⁸⁾

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1994 telah ditandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik/Power Purchase Agreement (untuk selanjutnya disebut PPA) antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT. Palton Energy.

Akibat dari sengketa yang berhubungan dengan harga pembelian listrik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka PLN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan kontrak yang telah dianggap melanggar ketentuan hukum Indonesia tersebut.

Menurut Penggugat PPA tersebut dibuat dan ditandatangani semasa Republik ini di bawah kekuasaan mantan Presiden Soeharto, yang sebagaimana diketahui dalam menjalankan wewenang mengatur perekonomian negara, hampir selalu menggunakan pendekatan kekuasaan yang disalahgunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kepentingan para kroninya, karena mereka dengan dukungan kekuasaan dapat secara leluasa mengeksploitasi sumber-sumber perekonomian atau cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti ketenagalistrikan semata-mata hanya untuk kepentingannya, tanpa memperdulikan lagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara ini.

Bahwa PPA ini memang pada kenyataannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁶⁸⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tahun 2002.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya tersebut menuntut agar surat Perjanjian (PPA) tanggal 12 Pebruari 1994 antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat isinya bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan / *morality*, dan ketertiban umum, dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya Penggugat juga meminta kepada hakim untuk menghukum Tergugat untuk menghentikan atau menunda upaya hukum apapun juga termasuk memulal atau pun meneruskan proses hukum penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui hukum Arbitrase terhadap Penggugat, menunggu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengingat pada tanggal 18 Agustus 1999 Tergugat menyampaikan surat Notice of Dispute kepada Penggugat dan penunjukan arbiter untuk melaksanakan persidangan forum arbitrase antara Tergugat melawan Penggugat diberi batas waktu sampai dengan tanggal 30 Nopember 1999. Persidangan forum arbitrase tersebut akan memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai isi perjanjian PPA tersebut dimana Penggugat digugat oleh Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

Atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan eksepsi mengenai tidak adanya kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Nopember 1999 untuk mengadili dan memutus perkara ini. Pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yaitu antara lain :

- (i) Karena Pasal 18 PPA telah mengatur bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui arbitrase di Stockholm, Swedia dan menurut Peraturan Arbitrase UNCITRAL.
- (ii) Karena Pasal 10 huruf (h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara jelas menentukan bahwa perjanjian untuk menyelesaikan segala

sengketa melalui arbitrase, merupakan undang-undang bagi para pihak dan dapat dilaksanakan bahkan jika perjanjian pokok batal.

(III) Karena Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase secara jelas meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara, dimana para pihak telah secara tegas memilih arbitrase.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya Nomor 517/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Desember 1999, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan provisi yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : menghukum Tergugat menghentikan atau menunda upaya hukum apapun juga, termasuk memulai atau pun meneruskan proses hukum penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui forum arbitrase terhadap Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengingat pada tanggal 18 Agustus 1999 Tergugat menyampaikan surat Notice of Dispute kepada Penggugat, dan penunjukan arbiter untuk melaksanakan persidangan forum arbitrase diberi batas waktu sampai dengan tanggal 30 Nopember 1999.

Persidangan forum arbitrase tersebut akan memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai isi perjanjian PPA tersebut, dimana Penggugat digugat oleh Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

Melalui putusannya pada tanggal 16 Desember 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.

Kemudian pada tanggal 27 Desember 1999 kuasa Tergugat mengajukan permohonan penundaan eksekusi putusan provisi terhadap perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelum proses perkara tersebut selesai diperiksa oleh Pengadilan, melalui kuasanya pada tanggal 18 Januari 2000, Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 517/PDT.G/1999/PN.JKT.PST (PAITON I) tersebut. Dengan adanya pencabutan gugatan tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Tergugat dan menyatakan bahwa Putusan Sela masing-masing tertanggal 2 Desember 1999 Nomor 517/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tentang Putusan Provisionil, dan Putusan Sela tertanggal 16 Desember 1999 Nomor 517/PDT.G/1999/PN.JKT.PST, tentang Putusan Eksepsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ad.c. Putusan Pengadilan dan sikap Mahkamah Agung RI, dimana para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrase, akan tetapi para pihak bersengketa mengenal badan arbitrase yang mana yang berwenang untuk mengadili, dapat dilihat pada :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3992 K/Pdt/1985 tanggal 4 Mei 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 270/PDT/1985/PT DKI tanggal 31 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 301/Pdt.G/1984 tanggal 15 Nopember 1984 dalam sengketa antara PT. Batu Mulia Utama melawan SSC (Sainrapt Et Brite Societe Auxiliaire D'Enterprises Societe Routine Colas).¹⁶⁹⁾

Batu Mulia sebagai Penggugat bekerjasama dengan Daiichiunyu Sagyo Co. Ltd., sedangkan SSC sebagai Tergugat bekerjasama dengan Waskita Karya telah menandatangani Agreement mengenal jual beli pasir laut.

¹⁶⁹⁾ *Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1989, halaman 74—81.*

Gugatan Penggugat didasarkan atas ingkar janji, karena meskipun semua kewajiban telah dilakukan oleh Batu Mulia akan tetapi SSC tetap menolak untuk melakukan pembayaran dan permintaan PT. Batu Mulia untuk penyelesaian sengketa yang timbul di hadapan BANI tidak mendapat tanggapan dari SSC.

Batu Mulia dalam gugatannya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menuntut agar SSC diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa ini di hadapan BANI, berhubung para pihak telah sepakat memperlakukan hukum Indonesia dan para pihak telah melakukan pilihan domisili pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan Pasal XVIII yang berbunyi sebagai berikut :

"This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. For the implementation and consequences of this Agreement, all parties choose permanent and irrevocable domicile at the office of the Register at the Court of First Instance in Jakarta".

Terhadap gugatan ini SSC telah mengajukan eksepsi bahwa karena para pihak dalam perjanjian mereka telah menentukan klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan dengan menyatakan gugatan PT. Batu Mulia tidak dapat diterima.

Berbeda dengan pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang menerima permohonan banding yang telah diajukan PT. Batu Mulia dengan perintah agar sengketa a quo harus diselesaikan di hadapan BANI di Jakarta. Sedangkan Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa apakah yang bertindak sebagai Badan Arbitrase adalah ICC (International Chamber of Commerce) atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) merupakan wewenang Pengadilan untuk menentukan. Sedangkan pasal mengenai berlakunya hukum Indonesia dan

pilihan domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tidak mempunyai pengaruh terhadap Pasal XXIII yang menentukan arbitrase sesuai dengan ICC Rules, sebagai berikut :

"All disputes arising in connection with this Agreement shall be finally settled under the Rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules. The arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia."

karena hal ini tidak mengakibatkan bahwa yang harus menyelesaikan arbitrase a quo adalah BANI.

Ad.d. Putusan Pengadilan dan sikap Mahkamah Agung RI, dimana para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrase yang telah disetujui sebelum timbul sengketa, namun para pihak juga menunjuk pada kompetensi Pengadilan Negeri dalam satu kontrak, dapat dilihat pada :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1458 K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 769/Pdt/1990/PT. Sby tanggal 1 Oktober 1991 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 568/Pdt.G/1989/PN. Sby tanggal 21 Juli 1990, dalam sengketa antara Bank Deutsche Genossenschaft melawan PT. Lumbung Tani Indonesia Cs.¹⁷⁰⁾

PT. Lumbung Tani Indonesia (PT.LTI) yang berdomisili di Surabaya dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Kasasi, Pembanding, dan Tergugat, pada tanggal 11 Desember 1984 telah membuat Loan

¹⁷⁰⁾ Kasus *Wanprestasi, Loan Agreement, Peran Arbitrase*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun X, Nomor 110, November 1994, halaman 94—118.

Agreement dengan DG. Bank Deutsche Genossenschaft (DG. Bank) yang berdomisili di Pautsder Republik Frankurt/Main, Jerman sebagai Termohon Kasasi, Terbanding dan Penggugat dalam perkara pembelian mesin buatan Jerman dari Klockner Industrie Anlagen GmbH (KINA) yang bekerjasama dengan Star Cosa GmbH (King & Star Cosa), yang cara pembelian, pembayaran dan penyerahan serta pemasaran mesin dituangkan dalam Export-Contract.

Pada tanggal 7 Januari 1985 telah dibuat perjanjian Payment Guarantee antara DG. Bank dengan PT. LTI dan para penanggung hutang yang terdiri atas : PT. Rajut Djatim Baru, Tuan David Lauwidjaja, Nyonya Anneke Mauwidjaja, Ny. Ester Lauwidjaja, semua berdomisili di Surabaya.

Namun ternyata meskipun hutangnya telah jatuh waktu dan telah ditegur berulang kali, PT. LTI berikut para penjamin hutang tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali seluruh hutangnya sehingga yang bersangkutan telah ingkar janji.

Terhadap gugatan yang diajukan DG. Bank, para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, karena seharusnya yang berwenang adalah Badan Arbitrase sesuai dengan Pasal 15:2 alinea pertama Loan Agreement, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perselisihan yang timbul dalam hubungannya dengan Loan Agreement ini, termasuk sengketa-sengketa mengenai keabsahan Loan Agreement atau setiap ketentuan yang ada di dalamnya, akan diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan ketentuan International Chamber of Commerce (ICC) sesuai dengan Persetujuan Arbitrase yang terlampir pada Loan Agreement sebagai Lampiran V".

Dalam putusan sela tanggal 27 Pebruari 1990, eksepsi mengenai kompetensi absolut telah ditolak oleh Pengadilan, yang menyatakan diri

berwenang memeriksa perkara a quo atas dasar Pasal 15:2 alinea kedua yang bunyinya sebagai berikut :

"Walaupun demikian, pemberi pinjaman memiliki hak untuk melancarkan tindakan hukum di depan Pengadilan setiap wilayah hukum berwenang lainnya. Sejauh menyangkut tindakan hukum di depan Pengadilan yang berwenang, arbitrase tidak akan dilakukan tetapi pengeluaran perintah penyitaan atau sita jaminan, penahanan tidak akan mengecualikan arbitrase."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan atau ke arbitrase. Akan tetapi ternyata Penggugat telah memilih Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara a quo, dan karena dirinya berwenang maka hukum yang berlaku dalam sengketa ini adalah hukum Republik Indonesia termasuk hukum acaranya. Seluruh gugatan DG. Bank telah dikabulkan dalam tingkat pertama, termasuk perintah untuk membayar seluruh jumlah hutang kepada Penggugat. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, baik putusan sela maupun dalam putusan akhir, karena pertimbangan dari hakim tingkat pertama telah dinyatakan sebagai tepat dan benar dan telah diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Namun berbeda adalah pendapat Mahkamah Agung RI yang mengenai eksepsi kompetensi absolut mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa segala sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut termasuk sengketa tentang keabsahan perjanjian pinjaman tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrase. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berarti dalam perjanjian ini ada klausula Arbitrase, yang menurut yurisprudensi tetap Indonesia, menyebabkan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang terjadi karena sengketa perjanjian pinjaman tersebut."

Namun ternyata Pasal 15:2 alinea kedua menetapkan bahwa Lender tetap mempunyai hak untuk membawa perkara ke depan Pengadilan di Indonesia. Terhadap alinea kedua ini pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung alinea tersebut di atas (Pasal 15:2 alinea kedua) haruslah diartikan sebagai tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan Pasal 15:2 alinea pertama yang menentukan bahwa untuk Loan Agreement ini diberlakukan hukum dari Federal Republic of Germany, hal mana tentu tidak dapat dilaksanakan Pengadilan Indonesia.

Bahwa selebihnya dari itu, ketentuan bahwa Kreditor (Lender) tetap mempunyai hak untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan Indonesia yang berwenang adalah ketentuan yang tidak seimbang karena Debitur (Borrower) tidak memiliki hak yang demikian, dalam hal mana Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Agung) berwenang untuk menyatakan bahwa Pasal 15:2 alinea kedua Loan Agreement tersebut tidak dapat diberlakukan."

Kemudian pertimbangan MA RI tersebut di atas menunjuk pada jurisprudensi tetap MA RI, bahwa dalam hal ada klausula Arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, karena sesuai Pasal 1338 KUH Perdata maka apa yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak.

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1155 K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/Pdt/1996/PT.DKI, tanggal 22 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 83/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar, tanggal 6 Juli

1995, dalam sengketa antara PT. Panata Tama Inter Instalasi Indonesia melawan PT. Kolifri Tekindo Pratama.¹⁷¹⁾

PT. Panata Tama Inter Instalasi Indonesia (disingkat PT. Panata) adalah Distributor Tunggal yang telah ditunjuk secara resmi oleh Solahart International Pty. Ltd. yang berkedudukan di Australia, untuk memasarkan dan menjual produk-produk Solahart di seluruh wilayah Indonesia berdasar atas Distributorship Agreement tanggal 1 Juni 1988 yang berlaku secara efektif 1 Juni 1988 s/d 1 Juni 1991 dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995.

Disamping itu ditandatangani pula "Trade Mark Licence Agreement" tanggal 1 Juni 1988. PT. Panata Tama sejak 1988 secara reguler membeli produk Solahart dan kemudian menunjuk PT. Kolifri Tekindo Pratama (disingkat PT. Kolifri) sebagai Dealer untuk menjual, memasarkan, pemasangan, dan servicing produk Solahart untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan secara otomatis diperpanjang, bila salah satu pihak tidak memutuskan. Kemudian ternyata PT. Kolifri telah memasarkan dan menjual produk Solahart yang bukan berasal dari PT. Panata. Perbuatan PT. Kolifri ini merusak pasar dan merugikan Solahart yang diimport oleh PT. Panata. Karena perbuatan PT. Kolifri tersebut, akhirnya PT. Panata memutuskan hubungan Dealership Solahart berdasar suratnya tanggal 1 Juli 1994. Perbuatan PT. Kolifri sebagai dealer produk Solahart yang diimport oleh PT. Panata sebagai agen tunggalnya, telah mengurangi volume penjualan dan keuntungan PT. Panata. Kerugian materiil berupa turunnya omzet penjualan sebanyak 36% akibat disaingi secara tidak fair oleh dealer PT. Kolifri, jumlah kerugian sebesar Rp. 678.000.000,-.

¹⁷¹⁾ *Perjanjian Tentang Arbitrase Kasus Dealer Solahart*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XVI, Nomor 191, Agustus 2001, halaman 63—78.

Selain itu, PT. Panata juga menderita kerugian immateriil-moril Rp. 1.000.000.000,- karena hilangnya kepercayaan dari Solahart Int. Pty. Ltd. Australia kepada PT. Panata. Dari kenyataan tersebut, setelah PT. Panata melakukan peneguran dan tidak ditanggapi PT. Kolifri, maka PT. Panata mengajukan gugatan perdata "perbuatan melawan hukum", terhadap Tergugat PT. Kolifri, dimana Penggugat menuntut/petitumnya sebagai berikut : dalam provisi antara lain menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk "Solahart" yang dibeli/diimport oleh pihak lain selain Penggugat dalam jangka waktu 7 hari dan dalam pokok perkara antara lain menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan gugatan rekompensi bahwa Tergugat merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.

Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-produk Solahart yang dibeli/diimport dari pihak lain selain Penggugat.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas permintaan banding PT. Kolifri memberi putusan dalam tingkat banding, baik gugatan kompensi maupun rekompensi, dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, PT. Panata (Penggugat) menolak putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut dan mengajukan pemeriksaan kasasi. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan yudex facti dinilai salah dalam menerapkan hukum atas perkara ini, sehingga putusannya harus dibatalkan, dan selanjutnya majelis Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan alasan hukum yang inti sarinya sebagai berikut :

"Dari bukti yang berupa "Surat Perjanjian Penunjukkan Dealer" tanggal 1 Januari 1988, para pihak dalam perjanjian a quo, yaitu Penggugat dan Tergugat Asal, telah sepakat bila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikannya, maka akan ditempuh "Arbitrase", dan apabila cara ini tidak mencapai jalan keluar, selanjutnya proses pengadilan merupakan jalan terakhirnya."

Dan ternyata dalam perkara ini, kedua belah pihak belum pernah menempuh penyelesaian melalui proses Arbitrase, sehingga tidak harus menempuh proses Pengadilan sebagai jalan terakhir. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta.

Ad.e. Putusan Pengadilan dan sikap Mahkamah Agung RI, dimana para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrasenya, akan tetapi perjanjian batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4792 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pdt/PT.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pdt.G/1997/PN. Mdn, tanggal 29 September 1997 dalam sengketa antara PT. Perintis V. Pile Tehnologi melawan V. Pile International (Netherlands) B.V.¹⁷²⁾

¹⁷²⁾ Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 273—277.

Pada tahun 1992 Tergugat, Pile International (Netherlands) B.V. mengunjungi Penggugat, PT. Perintis V. Pile Teknologi dan menawarkan kerjasama dalam bidang teknologi tiang pancang bangunan (Piling System) dan Tergugat dengan lisan memberikan syarat-syarat yang sangat menggiurkan yang tentu diterima oleh Penggugat.

Tergugat diwakili oleh pejabat kantor perwakilannya Petaling Jaya, Malaysia, dan melihat Penggugat menyetujuinya, langsung menyodorkan naskah kontrak dalam bahasa Inggris dan meminta Penggugat menandatangani. Penggugat minta waktu untuk memperoleh terjemahan naskah tersebut agar dapat dimengerti oleh Penggugat, tetapi Tergugat menyatakan tidak perlu, karena naskah kontrak tersebut hanya formalitas saja.

Tergugat kemudian menjanjikan lagi akan membantu perusahaan Penggugat jika teknologi tersebut dapat diterapkan di Indonesia terutama di Sumatera Utara. Terpengaruh oleh janji tersebut dan Tergugat ingin kembali hari itu juga ke Malaysia dengan pesawat terbang, Penggugat secara terburu-buru menandatangani naskah kontrak lisensi paten yang telah dipersiapkan sendiri oleh Tergugat.

Kontrak lisensi paten tertanggal 20 November 1992 Penggugat tandatangan dengan kepercayaan penuh terhadap janji lisan Tergugat. Dalam menerapkan teknologi tersebut di Sumatera Utara, perusahaan Penggugat telah mengeluarkan dana dan daya yang tidak sedikit.

Tidak seperti dijanjikan semula, Tergugat menagih kepada Penggugat untuk membayar royalti sebesar MYR 176.860 ringgit Malaysia, yang tentu di luar kemampuan Penggugat karena teknologi tersebut belum mendatangkan keuntungan bagi perusahaan Penggugat.

Penggugat meminta Tergugat menepati janji lisan pada saat penandatanganan kontrak, tetapi Tergugat mengatakan Penggugat harus mamatuhi isi semua pasal-pasal kontrak atau Tergugat menuntut Penggugat melalui jalur hukum

UPT-PUSTAKA-INDONESIA

sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam klausula yang disebut dalam kontrak.

Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat tergolong kepada 2 syarat yang menyebabkan suatu perjanjian batal atau setidaknya dapat dibatalkan, yaitu Tergugat beretikad buruk. Tergugat dalam mempengaruhi Penggugat untuk menandatangani kontrak telah menyalahgunakan keadaan. Ada alasan bagi hakim untuk membatalkan perjanjian, bahwa jika pihak yang dipengaruhi itu mengetahui isi perjanjian yang sebenarnya, tidak akan menandatangani. Menurut Penggugat, kontrak tidak memenuhi apa yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Paten, yang dalam Pasal 78, 79, dan 80 ditentukan bahwa setiap lisensi paten harus didaftarkan dalam daftar umum paten di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman.

Sesuai dengan surat Direktur Paten, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman tanggal 2 Desember 1996 Nomor H3-HC-02.09.56/96 setiap perjanjian lisensi paten di Indonesia harus didaftarkan dalam daftar umum paten, naskah perjanjian harus dalam bahasa Indonesia dan perjanjian paten harus dibuat dalam akta notaris. Bahwa tidak satu syarat pun dari ketiga syarat tersebut yang dipenuhi, sehingga perjanjian lisensi paten tidak berkekuatan hukum dan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan memutuskan antara lain menyatakan Tergugat beretikad buruk dan menyalahgunakan keadaan dalam membuat perjanjian lisensi paten tanggal 20 November 1992 antara Tergugat dan Penggugat. Selanjutnya menyatakan perjanjian lisensi paten antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat Undang-Undang Paten. Oleh

karenanya perjanjian lisensi paten tertanggal 20 November 1992 antara Penggugat dan Tergugat batal dan tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanggal 29 September 1997 Nomor 46/Pdt.G/1997/PN. Mdn. antara lain menolak eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa license agreement yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pengadilan kemudian menyatakan bahwa license agreement tanggal 20 November 1992 batal demi hukum.

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 18 Mei 1998 Nomor 17/Pdt/PT. Mdn. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Dalam tingkat kasasi, Tergugat sebagai pemohon kasasi mohon perhatian bahwa *judex facti* telah salah menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini berhubung tidak diterapkan klausula Arbitrase Pasal 22.2 dalam perjanjian lisensi tanggal 20 November 1992 antara para pihak. Dengan adanya pemilihan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak maka jelas Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa perkara ini. Menurut Tergugat lagi, Indonesia selaku negara yang berkecimpung dalam perdagangan internasional telah meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai pelaksanaan keputusan Arbitrase luar negeri. Maka jika putusan Arbitrase luar negeri sudah dapat dilaksanakan di Indonesia apalagi pemilihan Arbitrase di muka BANI wajib dihormati.

Dikatakan oleh Tergugat, *judex facti* secara keliru menerapkan Pasal 73 Undang-Undang Paten Nomor 6/1989 khususnya ayat 1, 3, dan 4. Dengan tidak diturutinya syarat administratif belum menimbulkan bahwa pemohon kasasi/Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan. Hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur

tata cara pendaftaran di Direktorat Paten. Tergugat menambahkan, *judex facti* tidak memperhatikan fakta bahwa termohon kasasi/Penggugat sudah melepaskan haknya untuk menuntut syarat bahwa perjanjian lisensi harus dalam bentuk akta notaris. Ia sendiri sudah menandatangani perjanjian lisensi secara sah dan sudah melakukan pembayaran royalties.

Mengenai keberatan tersebut diatas maka Mahkamah Agung berpendapat keberatan dimaksud tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi V. Pile International (Netherlands) B.V. tersebut harus ditolak.

Mahkamah Agung berdasarkan alasan tersebut di atas memutuskan antara lain menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V. Pile International (Netherlands) B.V. tersebut dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi. Dalam perkara ini, Pengadilan tidak mengakui klausula Arbitrase, karena perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ad.f. Putusan Pengadilan dan sikap Mahkamah Agung RI, di mana para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrase, akan tetap di dalamnya mengandung perkara kepailitan, akhirnya para pihak bersengketa mengenai

siapa yang berwenang mengadili perkara kepailitan apakah Pengadilan Niaga atau Arbitrase, dapat dilihat pada :

Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 013 K/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 012 K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Peradilan Niaga Nomor 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst, tanggal 31 Maret 1999, dalam sengketa antara PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu.¹⁷⁴⁾

PT. Enindo berdasarkan perjanjian manajemen "TURNKEY" 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur-proyek tambak udang milik PT. Putra Putri Fortuna Windu.

Dalam perjanjian manajemen TURNKEY tersebut disepakati, bahwa pihak penerima pekerjaan akan menangani lebih dahulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. PT. Putra Putri Fortuna Windu akan mengganti pembayaran dengan menggunakan uang miliknya PPF International Corporation, Canada sebagai pihak penyandang dana proyek tersebut.

Perjanjian manajemen TURNKEY berlaku untuk masa selama 10 tahun sejak 30 Oktober 1995. Namun tanpa ada alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997 pihak pemberi proyek PT. Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp dengan secara paksa dan sepihak mengakhiri "Perjanjian Manajemen Turnkey" dan mengambil alih semua pekerjaan dari PT. Enindo yang dengan terpaksa menerima pemutusan perjanjian tersebut.

Pihak PT. Enindo mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek PT. Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp, yang

¹⁷⁴⁾ *Kewenangan Adili Kepailitan, Pengadilan Niaga atau Arbitrase, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XV, Nomor 172, Januari 2000, halaman 5—37.*

berdasarkan hasil audit, Akuntan Publik Collins Barrow, hutang pemberi proyek kepada penerima proyek (PT. Enindo) sebesar US\$ 496,284.-

Berdasarkan kesepakatan, hutang pihak pemberi proyek, PT. Putra Putri Fortuna Cs akan dibayar secara bertahap. Kesepakatan ini tidak disepakati, dan setelah ditegur beberapa kali, pihak debitur PT. Putra Putri Fortuna Cs belum juga membayar hutangnya tersebut.

Ada kreditur lain yang juga mempunyai tagihan : Kelompok Tanu dan FSSP Maserociannae. Karena hutangnya masih belum dibayar, maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk mengajukan permasalahan kepailitan dengan petitum antara lain menyatakan Termohon I (PT. Putra Putri Fortuna dan Termohon II (PPF International Corporation) berada dalam keadaan Pailit.

Pengadilan Niaga dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa :

- Hubungan hukum antara Pemohon (Kreditur) dengan Termohon (Debitur) merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda.
- Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Manajemen TURNKEY yang menjadi dasar permohonan kepailitan ini.
- Dalam perjanjian Manajemen TURNKEY tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam klausula Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut :

"If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of the Singapore International Arbitration Center".

- Masalah kompetensi absolut dari Arbitrase menyangkut Hukum Acara dalam H.I.R. yang menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase atau klausula

Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum.

- Dengan alasan ini, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutus permohonan ini, karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara Pemohon dengan Termohon.
- Karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, membawa konsekuensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon.
- Dengan mengingat Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv jis Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, jis Penjelasan Undang-Undang Nomor 14/1970 Pasal 3 ayat (1), Pasal 1338 KUH Perdata.

Akhirnya majelis hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan ini dan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon PT. Enindo.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT. Enindo mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi antara lain dengan alasan bahwa karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya. Selanjutnya Pasal 615 Rv menentukan bahwa yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai dengan Pasal 280 ayat (1), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Bila dihubungkan dengan Pasal 51

ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas akhirnya Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/1999 dan menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mengabulkan permohonan persyaratan pailit yang diajukan oleh pemohon PT. Enindo serta menyatakan para termohon PT. Putra Putri Fortuna dan PPF International Corporation mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Panitera Pengadilan Niaga pada tanggal 21 Juni 1999 dengan alasan bahwa terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum, ex Pasal 184 huruf (b) dan (c) H.I.R. dan Pasal 178 sub 1 H.I.R. serta Pasal 284 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ada Novum, berupa surat pernyataan dari H. Badarussamad, yang bertindak atas nama kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam putusannya memberi pertimbangan hukum antara lain :

- a) Putusan Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan Pasal 8 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan alasan yuridis sebagai berikut :
 - Menurut Pasal 8 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4/1998, ditetapkan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak putusan ditetapkan, sedangkan Pasal 46 UU No. 14/1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan diberitahukan.
 - Putusan a quo ditetapkan/ diucapkan pada tanggal 21 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret

1999 yang berarti tenggang waktu berakhir pada tanggal 7 April 1999.

- Permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu ex Pasal 8 PERPU No. 1/1998 jo. UU No.4/1998. Dengan alasan ini, maka permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung seharusnya ditolak tanpa mempertimbangkan materi perkara.
- b) Tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali lainnya, maka putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 012 K/N/1999 tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini.
- c) Dengan dibatalkannya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/1999.
- d) Mengenai adanya klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :
 - Berdasarkan pada Pasal 280 (1) PERPU Nomor 1/ 1998 jo. UU Nomor 4/1998 ditentukan bahwa semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang ini, hanya dapat dilakukan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan permohonan pailit.
Kewenangan mana diperoleh berdasar instrumen hukum khusus yang diatur dalam PERPU Nomor 1/ 1998 jo. UU Nomor 4/1998.
 - Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 14/1970 jo. Pasal 377 H.I.R. dan Pasal 615 - 651 Rv telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk

menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial.

- Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Pacta Sunt Servanda" ex Pasal 1338 BW.

Akhirnya Majelis Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1990 Nomor 14/Pailit/1999/PN Niaga Jakarta Pusat.

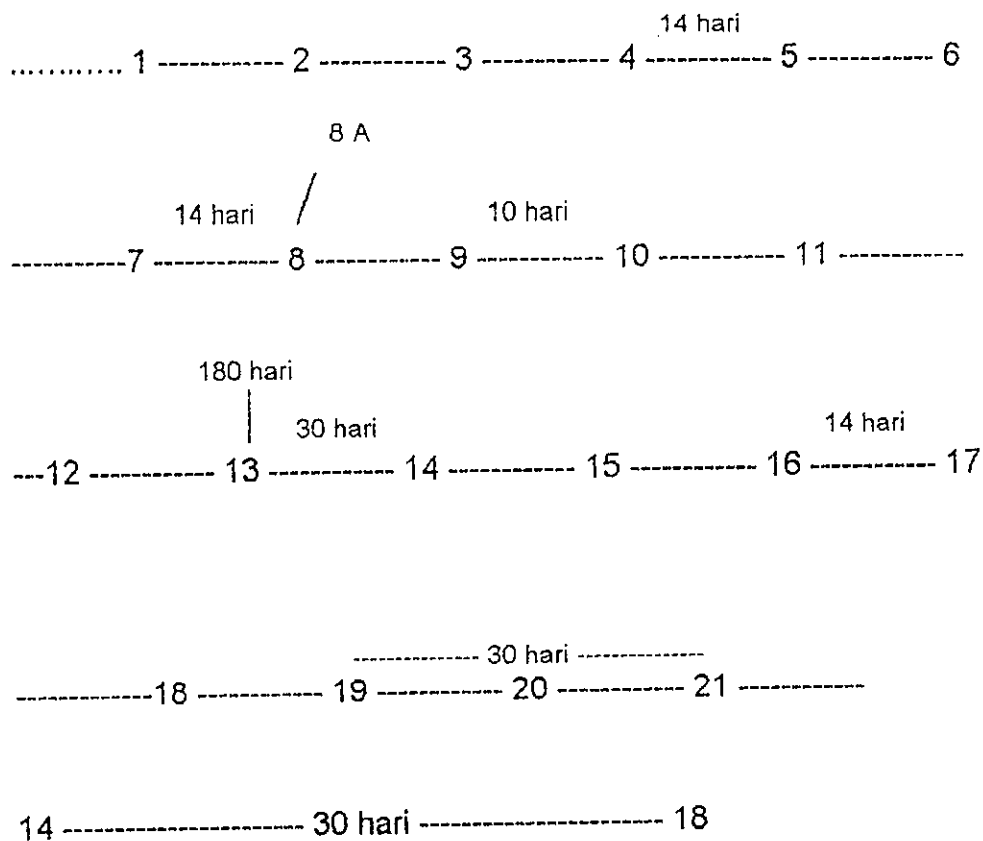
2. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional dengan putusan arbitrase internasional berbeda satu dengan yang lain. Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga mengaturnya secara terpisah di antara eksekusi kedua macam arbitrase tersebut. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase ini juga memerlukan campur tangan dari pihak Pengadilan.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, maka untuk lebih mudah memahaminya berikut ini gambaran tentang prosedur beracara di depan arbitrase, khususnya menurut Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, dapat dilihat dalam diagram di bawah ini : ¹⁷⁴⁾

¹⁷⁴⁾ Munir Fuady, op.cit, halaman 143—144.

Diagram tentang Prosedur Beracara di Arbitrase



Keterangan Diagram :

1. Permohonan arbitrase oleh pemohon,
2. Pengangkatan arbiter,
3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon,
4. Penyampaian satu salinan putusan kepada termohon,
5. Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter,
6. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter,
7. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase,
8. Para pihak menghadap arbitrase,
- 8A. Tuntutan balasan dari termohon,

9. Panggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas,
10. Termohon tidak juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (*verstek*), dan tuntutan dikabulkan.
11. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter,
12. Proses pembuktian,
13. Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimun 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter terbentuk,
14. Pengucapan putusan,
15. Putusan diserahkan kepada para pihak,
16. Putusan diterima oleh para pihak,
17. Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan,
18. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri,
19. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan,
20. Putusan dilaksanakan,
21. Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 s/d Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan pada Rv diatur dalam Pasal 634, Pasal 635, dan Pasal 637.

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Arbitrase dikatakan bahwa, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelasnya mengenai pendaftaran putusan arbitrase nasional dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Pendaftaran Putusan Arbitrase BANI Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1991 s/d Agustus 2002

Tahun	Putusan Arbitrase BANI yang didaftarkan	Eksekusi secara sukarela	Eksekusi oleh Pengadilan
1991	1	-	1
1992	1	-	1
1993	3	-	3
1994	4	-	4
1995	5	1	4
1996	6	-	6
1997	2	-	2
1998	14	2	12
1999	19	9	10
2000	13	-	13
2001	6	-	6
2002	4	-	4
Jumlah	78	12	66

Sumber : Data sekunder diolah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2002.

Pasal 61 Undang-undang Arbitrase menyebutkan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 78 putusan Arbitrase BANI yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya ada 12 putusan arbitrase yang dilaksanakan secara sukarela, sedangkan 66 putusan arbitrase yang tidak

dilakukan dengan sukarela oleh pihak yang kalah masih membutuhkan campur tangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Perintah Pengadilan Negeri tersebut akan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.¹⁷⁵⁾ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Arbitrase mengatur sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang *ditandatangani oleh para pihak*
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

¹⁷⁵⁾ Mohamad Santoso, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 6 Agustus 2002.

Pasal 5 :

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam Undang-undang Arbitrase diatur dalam Pasal 65 s/d Pasal 68, sedangkan dalam Rv tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Pada Pasal 65 Undang-undang Arbitrase dikatakan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut ini putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Pendaftaran Putusan Arbitrase Asing/Internasional Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1991 s/d Agustus 2002

Tahun	Putusan Arbitrase Asing/Internasional yang didaftarkan	Eksekusi secara sukarela	Eksekusi oleh Pengadilan	Keterangan
1991	2	2	-	
1992	4	-	4	
1993	3	1	2	
1994	2	1	1	
1995	-	-	-	
1996	1	-	1	
1997	1	1	-	
1998	2	2	-	
1999	6	-	6	Kasasi = 2, PK = 2
2000	2	1	1	
2001	4	3	1	
2002	1	-	1	
Jumlah	28	11	17	

Sumber : Data sekunder diolah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2002

Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 67 Undang-undang Arbitrase bahwa permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase dilaksanakan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, untuk putusan arbitrase internasional tempat pendaftarannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam praktek selama ini yang mendaftarkan ke

Panitera Pengadilan Negeri adalah kuasa dari pemohon bukan kuasa dari arbiter.¹⁷⁶⁾

Dalam kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan Karaha Bodas Company L.L.C. (KBC) yang telah diputus oleh Arbitral Tribunal di Jenewa Swis pada tanggal 18 Desember 2000 bahwa Pertamina dinyatakan telah melanggar Energy Sales Contract (ESC) dan Joint Operation Contract (JOC), akibatnya Pertamina harus membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company sejumlah 261 juta dollar AS sebagai akibat dari suatu perjanjian kerjasama yang gagal antara KBC dan Pertamina. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2002, Dr. T. Tuegeh-Longdong, SH.MH. dari kantor Pengacara Prof. Mr. Dr. S. Gautama yang pada pokoknya hendak melakukan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional sesuai yang diputus di Jenewa Swis pada tanggal 18 Desember 2000, dalam perkara antara Pertamina (Pemohon) lawan Karaha Bodas Company (Termohon I) dan PT. PLN (Persero) sebagai Termohon II.

Perdaftaran putusan arbitrase biasanya didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 67 Undang-undang Arbitrase, tetapi dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas didaftarkan oleh pihak Pertamina. Oleh karena itu, Panitera Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri untuk mohon petunjuk mengenai pendaftaran putusan arbitrase tersebut apakah dapat diterima atau tidak oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah ada petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta maka putusan arbitrase internasional tersebut telah didaftarkan di dalam buku pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002 dan tercatat di bawah Reg. Nomor 01/ARB-INT/2002/PN.JKT.PST.

Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

¹⁷⁶⁾ Widji, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 6 Agustus 2002.

- a. Sikap pengadilan Indonesia sesudah berlakunya Konvensi New York 1958 akan tetapi sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 1990.
- b. Sikap pengadilan Indonesia setelah berlakunya Konvensi New York 1958 dan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990.
- c. Sikap pengadilan Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

Ad.a. Sikap Pengadilan Indonesia sesudah berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990, dapat dilihat pada :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2944 K/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984 jo. Pengadilan Negeri Nomor 2288/1979/P, tanggal 19 Juni 1981 dalam sengketa antara Navigation Maritime Bulgare lawan PT. Nizwar.¹⁷⁷⁾

Navigation Maritime Bulgare di Varna (Pemohon) dengan menunjuk kuasa hukumnya Pengacara Mr. M.S. Gautama dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 1979, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 1979 dengan Rol Nomor 2288/1979/P dalam sengketanya dengan PT. Nizwar, Jakarta, Indonesia, telah memperoleh putusan dari Badan Arbitrase di London, tanggal 12 Juli 1978, yang isinya pada pokoknya : PT. Nizwar harus membayar kepada Navigation Maritime Bulgare uang sebesar US \$ 72,576.39 plus bunganya. Hal ini bermula dari adanya hubungan kerja antara Navigation Maritime Bulgare, untuk

¹⁷⁷⁾ *Eksekusi Putusan Arbitrator Asing*, Majalah Hukum, Varia Peradilan, Tahun II, Nomor 18, Maret 1987, halaman 103—110.

selanjutnya disebut NMB sebagai pemilik kapal Rakovski telah menyerahkan kapalnya kepada Nizwar sebagai charterers untuk suatu perjalanan dari Yugoslavia ke Indonesia berdasarkan Charterparty tanggal 5 Juni 1974 yang mengandung klausula arbitrase di London.

Berhubung sampai tanggal yang ditentukan yaitu 23 Juni 1978, Nizwar tidak mengajukan sangkalan terhadap permohonan arbitrase yang telah diajukan oleh NMB, maka oleh arbiter telah diberikan putusan tertanggal 12 Juli 1978 yang telah menghukum Nizwar untuk membayar uang sejumlah US \$ 72,576.39 ditambah bunga dan biaya arbitrase kepada NMB.

Bahwa berdasar atas putusan Badan Arbitrase di London tersebut, NMB mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar supaya putusan Badan Arbitrase di London tersebut diberikan fiat eksekusi, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan yang dapat segera dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Indonesia.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah diajukan oleh NMB tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan Nomor 2288/1979 P, tanggal 19 Juni 1981 terhadap PT. Nizwar sebagai Termohon Eksekusi.

PT. Nizwar tidak menerima ketetapan tersebut dan telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, telah memberikan peradilannya dengan menyatakan bahwa permohonan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis, yang pada intinya menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan jurisprudensi di Indonesia, putusan Pengadilan Negara Asing dan Putusan Hakim Arbitrase Asing, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali kalau antara Negara Republik Indonesia dengan negara asing yang

bersangkutan telah diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negara Asing atau putusan Hakim Arbitrase Asing. Disamping itu tentang adanya Kepres RI Nomor 34/1981, tanggal 5 Agustus 1981, tentang Convention on the recognition and enforcement of foreign Arbitral Awards, sesuai dengan praktek hukum masih harus ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang kepada badan peradilan mana, Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, permohonan eksekusi tersebut harus diajukan. Akhirnya Mahkamah Agung dengan keputusannya Nomor 2944 K/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Nizwar tersebut tidak dapat diterima.

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4231 K/Pdt/1986, tanggal 11 Mei 1988 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 512/Pdt/1985/PT. DKI, tanggal 23 Desember 1985 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 November 1984 dalam sengketa antara PT. Bakri & Brothers lawan Trading Corporation of Pakistan Limited.¹⁷⁸⁾

Pakistan trading yang berkedudukan di Karachi, Pakistan telah mengajukan permohonan eksekusi mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, Award of Arbitration yang ditetapkan oleh Federation of Oils, Seed and Fats Association Limited Nomor 2282 tanggal 8 September 1981 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Bakrie Brothers berkedudukan di Jakarta Selatan, permohonan mana telah dikabulkan dengan Ketetapan Eksekusi Nomor fol.22/48/JS/1983 tanggal 13 Februari 1984.

¹⁷⁸⁾ Tineke Louise Tuegeh Longdong, op cit, halaman 226—228.

Ternyata Bakrie Brothers keberatan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut di atas yang ditetapkan di Inggris, sehingga telah mengajukan perkara bantahan terhadap Penetapan pelaksanaan tersebut di atas.

Yang menjadi pokok perkara adalah mengenai kontrak jual beli 500 meter ton minyak kelapa sawit, di mana Bakrie Brothers telah dituntut melakukan ingkar janji oleh Pakistan Trading karena telah dianggap gagal memenuhi kontrak tersebut menurut mana para pihak telah sepakat memperlakukan Fosta rules dan arbitrase. Pengadilan Tingkat Pertama dengan keputusan Nomor 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 November 1984 kemudian telah mengabulkan perkara Bantahan yang diajukan oleh Bakrie Brothers dengan menolak putusan arbitrase, dengan putusan mana dalam tingkat banding Nomor 512/Pdt/1985/PT. DKI, tanggal 23 Desember 1985 juga dalam tingkat kasasi dengan keputusan nomor 4231 K/Pdt/1986, tanggal 11 Mei 1988 telah dikuatkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa meskipun Pakistan Trading merupakan perusahaan Pakistan, akan tetapi karena putusan arbitrase ditetapkan di Inggris, maka yang menjadi negara peserta pada Konvensi New York adalah Indonesia dan Inggris bukan Indonesia dan Pakistan.
- b. Bakrie Brothers, Termohon Arbitrase, Pembantah tidak terbukti telah didengar oleh Dewan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal V (1) (b) Konvensi New York 1958, sehingga putusan arbitrase yang dikeluarkan semata-mata atas permintaan Pakistan Trading, Pemohon Arbitrase, Terbantah.
- c. Berhubung Pakistan Trading telah menerima performance bond sebesar 3% dari nilai total barang, maka yang bersangkutan menurut Pengadilan tidak lagi berhak untuk menuntut ganti rugi selebihnya.

Sebagai alasan penolakan pelaksanaan oleh Bakrie Brothers telah dipergunakan Pasal V (1) (b), di mana para pihak harus diberi pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan para arbiter atau secara arbitrase atau kesempatan untuk membela diri, *right of the defence*, dan apabila dirinya merasa tidak diberi kesempatan yang cukup maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase di hadapan Pengadilan.

Disayangkan bahwa Mahkamah Agung RI tidak ada memberikan pertimbangannya sendiri akan tetapi cukup dikatakan oleh Mahkamah Agung :

"tidak ternyata dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Trading Corporation of Pakistan Limited tersebut harus ditolak".

Adapun Sifat Pengadilan Indonesia setelah berlakunya Konvensi New York 1958 dan setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 1990, dapat dilihat pada :

- 1) Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992, tanggal 06 April 1994 dalam sengketa antara Ecom USA Inc. lawan PT. Mahameru Centratama Mills.¹⁷⁹⁾

Ecom USA Inc. adalah perusahaan yang berkedudukan di Dallas, Texas, USA, dimana dalam sengketa ini telah bertindak sebagai Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Executive Vice Presidentnya

¹⁷⁹⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2002.

Uwe Grobecher lawan PT. Mahameru Centratama Mills yang berkedudukan di Bandung sebagai Termohon.

Sengketa ini bermula dari adanya kerjasama antara Ecom USA Inc. dengan PT. Mahameru Centratama Mills. Centratama Mills telah membeli 1.900 ton row cotton dari Ecom USA Inc. berdasarkan dua kontrak yang tertulis masing-masing Kontrak nomor 21133 tertanggal 1 Agustus 1991 dan Kontrak nomor 21134 tanggal 9 Agustus 1991. Namun jual beli tersebut tidak pernah terlaksana karena pembeli ingkar janji yaitu lalai untuk membuka Letters of Credit.

Dalam kontrak jual beli antara pembeli Indonesia dengan penjual USA tercantum klausula arbitrase sebagai berikut :

"Arbitration :

In the event amicable settlement for quality is impossible, arbitration for quality to be governed by Liverpool Rules. Any irreconcilable dispute concerning contract terms validity, or alleged default to be referred to technical arbitration by the L.C.A. Rules".

hal mana adalah sesuai dengan :

Pasal II (2) Konvensi New York 1958 :

(2) "Istilah" perjanjian tertulis" akan mengandung suatu klausula arbitrase dalam satu kontrak atau suatu perjanjian arbitrase, yang ditandatangani oleh para pihak atau sebagaimana tercakup dalam tukar menukar surat".

Mengenal sikap para pihak : dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, bahwa pihak Indonesia sebagai Pembeli (Termohon) tidak pernah hadir selama pemeriksaan yang berlangsung di London, meskipun telah diberitahukan secara resmi melalui kuasa Penjual di Indonesia mengenal keinginan penjualan untuk arbitrase. Akhirnya Majelis Arbitrase memutuskan bahwa Centratama Mills harus membayar ganti rugi sebesar US \$ 758,976.56 kepada pihak Ecom USA Inc.

Pemohon telah mengajukan permohonan fiat eksekusi ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kepada putusan arbitrase The Liverpool Cotton Association Limited yang ditetapkan di London pada tanggal 24 Juli 1992 dapat diberikan exequatur.

Permohonan exequatur telah dikabulkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt.1992, tanggal 6 April 1994, berdasarkan pertimbangan :

"Bahwa putusan Arbitrase Asing tersebut adalah mengenai pembayaran sejumlah uang US\$ 758,976.56 yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon sesuai Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal II New York Convention 1958, 10 Juni 1958".

Sebagai pertimbangan selanjutnya dikemukakan oleh Mahkamah Agung RI, bahwa putusan Arbitrase Asing tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan yang terakhir adalah bahwa dengan demikian permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum), oleh karena mana permohonan exequatur dapat dikabulkan.

Pertimbangan mengenai ketertiban umum di atas hanya didasarkan atas penelitian *prima facie* saja, tanpa ke substansi perkara.

Selanjutnya berhubung Centratama Mills berkedudukan di Bandung, maka pemberitahuan adanya Penetapan Mahkamah Agung RI, peneguran untuk memenuhi Penetapan tersebut, sita eksekusi semua telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui delegasi kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

- 2) Penetapan Mahkamah Agung RI No. 3 Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992, 6 April (1994) dalam perkara antara Sikinos Maritime Ltd, dengan PD. Perdata Lot.¹⁸⁰⁾

Bruce Harris, William Packard dan William Robertson para arbiter di London telah memberikan putusan arbitrase pada tanggal 22 Mei 1992, sehubungan dengan Memorandum of Agreement tanggal 20 September 1991.

Berbeda dengan di atas maka permohonan akan fiat eksekusi ini meskipun telah dipertimbangkan bahwa putusan arbitrase ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang US \$617,046 berikut bunga 6,50% per tahun sejak 15 Desember 1991 sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, namun permohonan akan Exequatur harus ditolak karena :

"Memorandum of Agreement tanggal 20 September 1991 belum ditandatangani oleh Termohon maupun Pemohon sehingga Memorandum of Agreement ini belum merupakan suatu persetujuan yang mengikat kedua belah pihak, karena Memorandum of Agreement tersebut dipungkiri adanya oleh Termohon maka sebaiknya masalah ini diselesaikan melalui gugatan perkara perdata biasa."

Memorandum of Agreement, tanggal 20 September 1991, antara PT. Perdata Lot, berkedudukan di Jalan Sutomo 540, Medan, Indonesia, sebagai Penjual, dan Sikinos Maritime Ltd, berkedudukan di Vallete, Malta 13/16 Vincenti Olde, Strait Street, Valette, Malta, telah melakukan jual beli kapal "MT. Bumeugah" yang mengandung klausula arbitrase :

¹⁸⁰⁾ Ibid, halaman 239—242.

Pasal 15 Arbitration

"If any dispute should arise in connection with the interpretation and fulfilment of this contract, same shall be decided by arbitration in the city of London and shall be referred to a single arbitrator to be appointed by the parties hereto. If the parties cannot agree upon the appointment of the single arbitration, the dispute shall be settled by three arbitrators, each party appointing one arbitrator, the third being appointed by London Maritime Arbitrators Association in London. If one of the parties fails to appoint an arbitrator-either originally or by way of substitution-for two weeks after the other party having appointed his arbitrator has sent the party making default notice by mail, cable or telex to make the appointment, the party appointing the third arbitrator shall after application from the party having appointed his arbitrators, also appoint an arbitrator on behalf of the party making default. The award rendered by the Arbitration Court shall be final and binding upon the parties and may if necessary be enforced by the Court or any other competent authority in the same manner as judgement in the Court of Justice. This contract shall be subject to the law of the country agreed as place of arbitration."

Pembeli telah menunjuk sebagai arbiternya Bruce Harris dan karena penjual tidak menunjuk arbiternya maka London Maritime Arbitrators Association telah menunjuk William Packard dan Asosiasi ini kemudian menunjuk William Robertson sebagai arbiter yang ketiga.

Putusan arbitrase yang berkepal "In The Matter of The Arbitration Acts 1950—1979 and in The Matter of An Arbitration Beumegah-MoA dd. 20-9-1991 Final Award" telah memerintahkan pembayaran sejumlah ganti rugi oleh Penjual kepada Pembeli yang ternyata ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menjual kapal M.T. "Bumeugah" kepada Pembeli sebagaimana telah disepakati pada Norwegian Saleform, tanggal 20 September 1991.

Pertimbangan putusan arbitrase mengemukakan bahwa Penjual dengan telex tanggal 14 Februari Penjual telah memberitahu Mr. Packard tidak

mengenai pembeli, tidak pernah berhubungan dengan mereka, tidak menandatangani kontrak dengan mereka dan tidak ada persetujuan dengan mereka.

Telex ini telah dijawab dengan fax oleh Tim Arbitrase tanggal 14 Februari dengan mengundang Penjual untuk berpartisipasi dalam acara arbitrase, dan bahwa kesimpulan akan ditunggu dari Penjual yang tidak akan pernah datang.

Namun para arbiter berpendirian bahwa meskipun disangkal oleh Penjual, menurut hemat mereka ada kontrak sehingga mereka berkesimpulan bahwa Tim Arbitrase ada yurisdiksi, hal mana telah diberitahukan kepada Penjual dan apabila tetap tidak ada diajukan kesimpulan terakhir pada tanggal 12 Mei maka putusan akan diucapkan hanya berdasarkan kesimpulan dan bukti-bukti dari Pembeli. Tanggal 11 Mei dijawab oleh kuasa dari Penjual yang menyangkal adanya kontrak sehingga juga tidak ada klausula arbitrase, sehingga para arbiter juga tidak mempunyai yurisdiksi dan penjual menyangkal setiap tanggung jawab dan biarpun akan diputus, putusan arbitrase tersebut tidak akan diakui oleh Penjual.

Penolakan Exequatur yang telah diucapkan oleh Mahkamah Agung kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan kepada para pihak.

- 3) Penetapan Mahkamah Agung No. 1 Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, 1 Maret (1991), dalam sengketa antara E.D. & Man (Sugar) Limited dengan Y. Haryanto.¹⁸¹⁾

Permohonan Exequatur yang telah diajukan oleh Andrew Hillyer Scott dan John Martineau Kinder dua-duanya sebagai para Direktur dari ED. Man (Sugar) Limited berkantor pusat di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6 DU, Inggris telah dikabulkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan arbitrase The Queen's Counsel of the English Bar di London tanggal 17 Nopember 1989 sebagai arbiter tunggal. Permohonan exequatur mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akta No. 01/PDT.ABT.INT/1990 tanggal 5 Nopember (1990).

Putusan arbitrase ini didasarkan atas perjanjian tertulis tertanggal 7 Juli 1996, di mana para pihak telah sepakat untuk berdamal mengenal semua sengketa baik yang telah berlangsung di arbitrase di hadapan Refined Sugar Association dan di hadapan Pengadilan Tinggi London.

Perjanjian Perdamaian : Pasal 1 (b) menentukan bahwa Haryanto diharuskan untuk membayar kepada Man uang sejumlah US\$ 27,000,000.- dalam tiga angsuran dan Pasal 18 (a) mengandung klausula arbitrase :

"Any dispute or difference out of or in connection with the Agreement should be referred to and determined by a Queen's counsel of the English Bar as a sole arbitrator ("the arbitrator", such arbitration to be held in London."

Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Juli 1986 secara tertulis antara Man dan Haryanto termasuk klausula arbitrase yang terkandung di dalamnya

¹⁸¹⁾ Ibid, halaman 244—246.

oleh : "The High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, The Honourable Mr. Justice Steyn" melalui order tanggal 25 Mei 1990 telah ditetapkan sebagai perjanjian yang sah mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan oleh Man terhadap Haryanto. Ketetapan ini diucapkan setelah didengar kedua belah pihak melalui kuasa masing-masing.

Berhubung arbiter yang ditunjuk oleh Man sebagai Penggugat tidak disetujui oleh Haryanto sebagai Tergugat, maka President of the Law Society atas permintaan Man telah menunjuk Piers Nicholas Legh-Jones supaya bertindak sebagai arbiter tunggal. Namun Haryanto melalui kuasanya menyampaikan tidak akan ikut serta dalam pemeriksaan arbitrase karena berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaian yang menjadi sengketa tidak mengikat terhadapnya. Putusan memerintahkan agar Haryanto membayar US\$ 22,000,000.- berikut bunga.

Disayangkan bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung hanya menunjuk pada :

1. putusan arbitrase dari The Queen's Counsel of the English Bar di London tanggal 17 November 1989;
2. permohonan tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

Namun tidak menyebut mengenai Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Juli 1986 sebagaimana diatur dalam Pasal II (1) perjanjian tertulis.

Kemudian terhadap Penetapan Mahkamah Agung No.1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, 01 Maret 1991 telah diajukan permohonan kasasi oleh Haryanto sebagai Termohon. Karena acara ini tidak diatur baik dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya September 1991 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung telah meminta petunjuk. Surat mana telah dijawab dengan surat Mahkamah Agung No. KMA/192/XII/1991 tanggal 7 Desember 1991 sebagai berikut :

"setelah permasalahan yang dikemukakan dipelajari dengan saksama, bersama ini diperintahkan agar Saudara menunda eksekusi terhadap Arbiter Internasional sampai ada petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung karena perkara berkaitan dengan pokok masalahnya sedang diproses di tingkat kasasi,"

Ad.c. Sikap pengadilan Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, dapat dilihat pada :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/ARB-INT/2002/PN.JKT.Pst., tanggal 27 Agustus 2002 dalam sengketa antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) melawan Karaha Bodas Company L.L.C.¹⁸²⁾

Karaha Bodas Company L.L.C. (KBC) adalah Perseroan Terbatas Kepulauan Cayman yang diberikan kuasa berdasarkan kontrak untuk mengembangkan Proyek Geotermal Karaha Bodas (Sumber Panas Bumi) berkapasitas 400 (empat ratus) MW selanjutnya disebut "Proyek Karaha" di Jawa Barat, Indonesia.

Proyek tersebut melingkupi terutama 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Karaha dan wilayah Telaga Bodas. KBC diwajibkan untuk mengembangkan proyek tersebut, yaitu menghasilkan dan menjual tenaga listrik kepada PLN atas nama Pertamina.

¹⁸²⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., Tahun 2002.

Pertamina adalah suatu perusahaan minyak dan gas bumi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertamina dipercayakan, antara lain untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber geo-termal (sumber tenaga panas bumi) dan pembangkit tenaga listrik di Indonesia. PLN adalah Perusahaan Negara yang saat ini tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan adalah pemakai tenaga listrik yang mengusahakan penyediaan listrik kepada umum di Indonesia.

Pada tanggal 28 November 1994 telah disepakati 2 (dua) kontrak kerjasama (Joint Operation Contract / JOC) dan kontrak penjualan energi (Energy Sales Contract / ESC) sebagai bagian dari Proyek Karaha. Kontrak JOC menetapkan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk mengelola pengoperasian geo-termal di dalam proyek tersebut dan KBC berperan sebagai kontraktor. Jadi KBC diwajibkan untuk mengembangkan energi geo-termal di daerah proyek dan membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik. Dengan kontrak ini (ESC), PLN setuju untuk membeli dari Pertamina, tenaga listrik yang diproduksi oleh dan dipasok dari atau disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC. Sebagai kontraktor bagi Pertamina berdasarkan JOC, KBC, atas nama Pertamina dan berdasarkan ESC, berhak untuk memasok dan menjual kepada PLN, tenaga listrik berkapasitas sampai 400 (empat ratus) MW dari Proyek Karaha.

Pada tanggal 20 September 1997 dikeluarkan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan Nomor 39/1997. Keputusan ini menekankan bahwa untuk memelihara kelangsungan ekonomi dan secara umum kemajuan ekonomi nasional, perlu dilakukan langkah penanggulangan fluktuasi keuangan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam rangka untuk menanggulangi masalah tersebut, perlu diambil langkah penundaan/peninjauan kembali sejumlah proyek pemerintah, proyek perusahaan negara dan proyek pribadi

yang sehubungan dengan pemerintahan atau perusahaan negara. Akibatnya sejumlah 75 proyek, termasuk proyek Karaha harus ditunda.

Kemudian pada tanggal 1 November 1997 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 yang berisi perintah agar beberapa proyek yang tertunda, termasuk proyek Karaha dilanjutkan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, KBC melanjutkan kembali aktivitas eksplorasi dan pengembangan.

Pada tanggal 10 Januari 1998, Keputusan Presiden yang ketiga dikeluarkan, berdasarkan Nomor 5 Tahun 1998. Keputusan ini membatalkan Keputusan Presiden Nomor 47/1997 dan mengkonfirmasi penundaan Proyek Karaha.

Dengan adanya penundaan proyek Karaha tersebut, sehingga KBC merasa dirugikan akibat biaya yang telah dikeluarkan dan kehilangan keuntungan sebesar 261 juta dollar AS. Kemudian pada bulan September 1999, KBC mengajukan gugatan ke mahkamah arbitrase internasional di Jenewa, Swis. Pada tanggal 18 Desember 2000, mahkamah arbitrase mengeluarkan putusan, bahwa Pertamina harus membayar klaim KBC sebesar 261 juta dolar AS.

Atas putusan Arbitrase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (dismiss), karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh Swiss Federal Supreme Court oleh Pertamina. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pertamina sebagai upaya hukum yang dimiliki sudah benar, namun sayang proses ini tidak diteruskan karena keengganan Pertamina membayar uang deposit.

Sementara itu KBC telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara dimana aset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia.

Namun rupanya Pertamina tidak mau berserah diri hanya pada upaya hukum penolakan Putusan Arbitrase Jenewa, maka pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina secara resmi mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum diajukannya surat gugatan pembatalan ini, Pertamina pada tanggal 8 Maret 2002 telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam jawaban atas gugatan Pertamina, KBC mengajukan eksepsi bahwa prosedur pembatalan yang diajukan oleh Pertamina tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Arbitrase, bahkan juga mempersalahkan tentang materi gugatan yang disampaikan oleh Pertamina. yang disampaikan oleh Pertamina.

Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada telah diratifikasinya Konvensi New York 1958 oleh Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk pada ketentuan Pasal VI juncto Pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958. Padahal ketentuan Pasal V (2)(b) seharusnya digunakan dalam hal pengadilan dari negara yang diminta pelaksanaan putusan menganggap putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum dari negaranya.

Selanjutnya majelis hakim menyatakan diri berwenang karena para pihak dalam JOC mendasarkan pada ketentuan UNCITRAL, tetapi inipun tidak diuraikan secara jelas dalam pertimbangannya. Pada bagian lain, majelis hakim menegaskan kewenangannya atas dasar hukum yang dipilih oleh Pertamina dan KBC dalam JOC dan ESC, yaitu hukum Indonesia. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam amar putusannya tidak menentukan apa yang harus dilakukan oleh para pihak

setelah Putusan Arbitrase Jenewa dibatalkan. Sebab dalam pokok perkara, majelis hakim hanya memutuskan 4 (empat) hal, yaitu :

- (1) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999 ;
- (2) Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut ;
- (3) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi ;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000,-.

3. Konsistensitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan di Indonesia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Arbitrase dikatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, demikian juga dalam Rv ketentuan ini juga telah diatur.

Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana konsistensi penerapan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Ketidakkonsistenan penerapan peraturan dan praktek yang ada di lapangan menimbulkan problematika atau permasalahan, karena dalam kenyataannya penerapan kompetensi pengadilan tersebut ada yang konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ada pula yang tidak konsisten.

Yang dimaksud dengan sikap pengadilan yang konsisten adalah sikap pengadilan dalam kaitannya dengan kewenangannya tersebut akhirnya Pengadilan

				-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan konpensi -Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili, karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan	ta -Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Konpensi maupun gugatan rekonsensi
2	Ahyu Forestry Company Ltd v. Sutomo / Direktur Utama PT. Balapan Jaya ¹⁸⁴⁾	Menurut Penggugat Choi Myeong Hoeng sebagai Presiden Direktur PT. Ahyu Balapan Timber telah	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 113/1980 G, Tgl. 18 Desember 1980	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57 /1981 PT. Perdata, Tgl. 7 Mei 1981, -menguatkan	No. 2924 K /Sip/1981, Tgl. 22 Pebruari 1982 -Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakar-

¹⁸⁴⁾ ibid, halaman 29—35.

				-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan konpensi -Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili, karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan	ta -Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Konpensi maupun gugatan rekompensi
2	Ahyu Forestry Company Ltd v. Sutomo / Direktur Utama PT. Balapan Jaya ¹⁸⁴⁾	Menurut Penggugat Choi Myeong Hoeng sebagai Presiden Direktur PT. Ahyu Balapan Timber telah	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 113/1980 G, Tgl. 18 Desember 1980	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57 /1981 PT. Perdata, Tgl. 7 Mei 1981, -menguatkan	No. 2924 K /Sip/1981, Tgl. 22 Pebruari 1982 -Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakar-

¹⁸⁴⁾ ibid, halaman 29—35.

		menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.	-Menolak eksepsi Tergugat baik tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif karena tidak beralasan hukum -Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi.	putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara	ta dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara -Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini dan telah melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut
3	PT. Asuransi Royal Indrapura v. Sohandi Kawilarang ¹⁸⁵⁾	Karena PT. Asuransi Royal Indrapura tidak melaksanakan kewajibannya (tidak mau membayar klaim asuransi atas meninggalnya	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 869/1979 G, Tgl. 14 Juli 1980 -Menolak eksepsi Tergu-	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 225/1980/PT. Perdata, Tgl. 4 November 1981 -Menguatkan Putusan Pengadilan Ne-	No. 794K/Sip/1982, Tgl 27 Januari 1983 -Menerima permohonan kasasi Tergugat -Membatalkan Putusan Pe-

¹⁸⁵⁾ ibid, halaman 45—53.

		Soeharito Kawilarang.	gat (intinya Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris bertanggung) -Mengabulkan gugatan Penggugat.	geri Jakarta Pusat	ngadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -Menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase.
4	S.M. Pardede v. Syafei Juremi cs. ¹⁸⁶⁾	Karena ada perselisihan jual beli 6 buah tractor merk Komatsu	Putusan Pengadilan Negeri Pangkajenean Bun No.70/ Pts.Pdt /1982/ PN P. Bun -Menyatakan	Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya No. 31/1983/ PT.PR -Menguatkan	No. 1851 K/Pdt/1984, Tgl. 10 Desember 1985 -Menyatakan bahwa keberatan tersebut dapat di-

¹⁸⁶⁾ Erman Rajagukguk, op.cit, halaman 25—26.

			<p>bahwa perjanjian jual beli tracktor tersebut adalah sah.</p> <p>-Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini karena ada adagium bahwa lembaga BANI belum dapat memberikan penyelesaian sebagaimana diharapkan</p>	<p>putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.</p>	<p>benarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan menolak permohonan kasasi.</p>
5	PT. Maskapai Asuransi Ramayana v. Soehandi Kawilarang. ¹⁸⁷⁾	Karena PT. Maskapai Asuransi Ramayana tidak memenuhi kewajibannya untuk memba-	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 338/1979 /G.B, Tgl. 2 Juli 1980	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 236/ 1980 /PT Perdata, Tgl. 18 November 1981	<p>No. 455 K/Sip/ 1982,</p> <p>Tgl. 27 Januari 1983</p> <p>-Menerima permohonan kasasi dari</p>

¹⁸⁷⁾ Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase, op cit, halaman 37—43.

		<p>yar klaim asuransi kepada Soehandi Kawilarang sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Soehanto Kawilarang.</p>	<p>-Menolak eksepsi Tergugat.</p> <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</p> <p>-Menyatakan Tergugat melakukan wan prestasi</p>	<p>-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p>	<p>Penggugat</p> <p>-Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p> <p>-Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.</p>
6	PT. Aji Karsa Engineering v. Pemerintah RI. ¹⁸⁹⁾	<p>Didasarkan pada Pasal 615 dan 619 dari Rv untuk memaksakan arbitrase dari suatu sengketa yang timbul dari surat perjanjian pemborongan</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 432/Pdt. G/1984/PN. Jkt.Pst.</p> <p>-Keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat di-</p>	-	-

¹⁸⁹⁾ Erman Rajagukguk, op cit, halaman 17—19.

		<p>pembangunan rumah dinas.</p>	<p>terima oleh Pengadilan Negeri, karena petitum Penggugat bersifat alternatif, dimana primair menuntut agar sengketa diselesaikan melalui BANI, dan subsidair menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan perjanjian arbitrase tersebut memuat hal yang meragukan</p>		
--	--	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

7	Trans Continental Fertilizer Company v. PT. Pantja Niaga (Ltd). ¹⁸⁹⁾	Tergugat ingkar janji tidak mau melunasi uang demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh kapal laut) sehubungan dengan pembelian sejumlah pupuk.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/1986/6 /PN, Jkt. Pst -Menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 119/Pdt/1987 /PT/DKI, Tgl. 27 April 1987 -Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Tgl. 5 Januari 1989 -Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena para pihak telah sepakat menyelesaikannya melalui arbitrase.
8	PT. Kertas Bekasi Teguh cs v. Banque Francaise Du Commerce Exterieur. ¹⁹⁰⁾	Tergugat telah melakukan cidera janji tidak memenuhi surat-surat sanggup pada saat jatuh tempo	Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 84/ Pdt.G /1987/PN.Bks, Tgl. 2 Mei 1988 -Menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 510/Pdt /1988/PT Bdg, Tgl. 9 Januari 1989 -Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi -Bahwa Pe-	-Membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

¹⁸⁹⁾ Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*, Universitas Indonesia FH Pascasarjana, Jakarta, 2002, halaman 251—252.

¹⁹⁰⁾ *Ibid*, halaman 253—257.

				ngadilan Ne- geri Bekasi berwenang memeriksa dan menga- dili perkara ini.	
9	PT. Arpen Pratama Oce- an Line v. PT. Shore Mas. ¹⁹¹⁾	Tergugat ci- dera janji tidak membayar ke- lebihan hari pemuatan kayu gelon- dongan dari Samarinda ke Tanjung Priok.	Putusan Pe- ngadilan Ne- geri Jakarta Timur No. 145/T/ 1981/G, Tgl. 10 No- vember 1981 -Menyatakan eksepsi Ter- gugat ten- tang kompe- tensi absolut dari arbitrase tidak tepat dan tidak berdasar hukum -Menolak ek- sepsi tergu- gat	Putusan Pe- ngadilan Ting- gi Jakarta No. 87/1982 /PT/ Perdata, Tgl. 22 No- vember 1983 -Menerima permohonan banding -Membatalkan putusan Pe- ngadilan Ne- geri Jakarta Timur -Menerima eksepsi Ter- gugat -Menyatakan Pengadilan Negeri tidak	No. 3179 K/ Pdt/1984, Tgl. 4 Mei 1988 -Menguatkan putusan Pe- ngadilan Tinggi

¹⁹¹⁾ Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase, op cit, halaman 64—72.

			-Mengabulkan gugatan penggugat sebagian	berwenang mengadili perkara ini.	
10	CV. Sinar Surya Ken- cana v. PT. Triguna. ¹⁹²⁾	Penghentian pembayaran tahap ke-4 oleh pihak PT. Triguna	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 048/Pdt/G/1987/PN. Jkt.Pst, Tgl. 11 Agustus 1988 -Mengabulkan gugatan Penggugat -Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 200/Pdt/1989/PT DKI, Tgl. 27 Mei 1989 -Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	No. 3954.K/Pdt/1989, Tgl. 9 November 1993 -Mengabulkan permohonan kasasi -Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan PN Jakarta Pusat -Menerima eksepsi Tergugat -Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini

¹⁹²⁾ Sikap Hakim Menghadapi Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Nomor 136, 1989, halaman 64—83.

11	PT. Gemini Electrical Work, cs. v. Hitachi Limited cs.	Tergugat memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap PT Gemini Electrical Work	No. 48/Pdt. G/1994/PN. Jkt. Pst. -Menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara para pihak -Menerima eksepsi para Tergugat	-	-
12	Singapore Airlines Limited v. PT. Asiana ¹⁹³⁾	Tergugat tidak melunasi pembayaran dari sisa tunggakan pengangkutan dalam bidang penerbangan	No. 369/Pdt /G/ 1995 PN. Jakarta Barat Tgl. 9 Januari 1996 -Penggugat tidak tepat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Ne-	Tgl. 27 Juni 1996 -Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat	-

¹⁹³⁾ Yansen Dermanto Latip, op.cit., halaman 261—262.

			geri Jakarta Barat -Gugatan Penggugat tidak dapat diterima		
13	Salan Pty Ltd v. Anak Agung Mas cs. ¹⁹⁴⁾	Karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat tidak mau menandatangani akta pendirian perseroan, akibatnya penyerahan atas tanah Resort Hotel dari Tergugat kepada perusahaan patungan (PT) tidak dapat dilaksanakan sedangkan Tergugat sudah	Pengadilan Negeri Denpasar Menolak eksepsi Tergugat untuk selu-ruhnya dan menyatakan diri berwenang memeriksa perkara ini dan mengabulkan gugatan sebagian	Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan membatalkan perjanjian joint venture agreement, tgl 7 November 1991 dan tgl. 1 Oktober 1991.	No. 1531 K/Pdt/1997 -Menolak semua alasan Tergugat -Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar.

¹⁹⁴⁾ Ibid, halaman 262—265.

		menerima pembayaran			
14	PT. Hanil Jaya Metal Works v. Thai Can Transportation cs. ¹⁹⁵⁾	Karena Tergugat yang bertindak sebagai pengangkut telah membe- lokkan arah perjalanan ka- pai sehingga KM Cando mengalami keterlambatan merapat di Surabaya 97 hari, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 980, 703.47	No. 26/Pdt. G/ 1997/ PN.Jkt. Pst, Tgl. 21 Maret 1997 -Melakukan pencabutan sita jaminan atas Kapal Cando -Menyatakan Pengadilan Negeri Jakar- ta Pusat ber- wenang un- tuk meme- riksa dan mengadili perkara ini karena dalam klausula arbi- trase yang di- buat para pihak tidak mengatur se- cara tegas tentang per-	-	-

¹⁹⁵⁾ Ibid, halaman 265—269.

			soalan apa saja yang harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase di Hongkong		
15	PT. Panata Tama Inter Instalasi Indonesia v. PT. Kolifri. ¹⁹⁶⁾	PT. Kolifri sebagai Dealer yang ditunjuk oleh PT. Panata telah memasarkan dan menjual produk "Solahart" yang bukan berasal dari PT. Panata. Perbuatan PT Kolifri menurut Penggugat telah merusak pasar dan merugikan Solahart yang diimpor oleh PT. Panata serta mengurangi volume penju-	No. 83/Pdt.G/1995/PN.Jkt.B ar, Tgl. 6 Juli 1995 -Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian -Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum -Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-	No. 44/Pdt/1996/PT.DKI, Tgl. 22 Juli 1996 -Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.	No. 1155.K/Pdt/1997, Tgl. 26 Juni 2000 -Mengabulkan permohonan kasasi PT. Panata -Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, karena para pihak telah sepakat bila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menye-

¹⁹⁶⁾ *Perjanjian Tentang Arbitrase Kasus Dealer Solahart*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XVI, No. 191, Agustus 2001, halaman 63—78.

		alan dan keuntungan PT. Panata.	produk Solahart yang diimpor dari pihak lain selain Penggugat -Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di Jl. Dr.Susilo Raya No. 22 C-D Jakarta Barat adalah sah dan berharga		lesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah gagal, maka akan ditempuh arbitrase, dan bila inipun gagal lagi baru akan diproses di pengadilan.
16	Nederlandche Credietverzekering Maatschappij NV v. Mintardjo Halim cs. ¹⁹⁷⁾	Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) tidak melakukan pembayaran atas surat-surat wesel tersebut.	No. 624/Pdt G/1998/PN Jkt. Pst, Tgl. 25 Mei 1999 -Menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah sepakat		

¹⁹⁷⁾ Yansen Dermanto Latip, op cit, halaman 269—273.

			dalam perjanjiannya akan menyelesaikan perselisihan yang timbul sesuai dengan peraturan konsiliasi dan arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh salah satu arbitrator atau lebih.		
17	V. Pile International (Netherlands) BV v. PT. Perintis V. Pile Teknologi. ¹⁹⁸⁾	Tergugat tidak menepati janji lisan pada saat penandatanganan kontrak, tetapi Tergugat malah meminta Penggugat untuk mematuhi semua pasal kontrak yang oleh Penggu-	Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 46/Pdt.G/1997/PN.Mdn, Tgl. 29 September 1997 -Menolak eksepsi Tergugat -Mengabulkan gugatan Penggugat	Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 17/Pdt/PT.Mdn, Tgl. 8 Mei 1998 -Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan	No. 4792 K/Pdt/1998 -Menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang membatalkan perjanjian lisensi paten -Pengadilan

¹⁹⁸⁾ ibid, halaman 273—277.

		<p>gat sendiri tidak dimengerti isinya karena dia diminta secepatnya untuk menandatangani kontrak lisensi paten tersebut dengan diberikan janji-janji.</p>	<p>dan menyatakan bahwa license agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tgl. 20 November 1992 bertentangan dengan UU No. 6 / 1989 tentang Paten</p> <p>-Pengadilan menyatakan bahwa license agreement tersebut batal demi hukum.</p>		<p>tidak mengakui klausula arbitrase, karena perjanjian yang klausulanya cacat adalah batal demi hukum.</p>
18	PT. Perusahaan Dagang Tempo v. PT. Roche Indonesia. ¹⁹⁹⁾	<p>Karena adanya pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang telah terjalin selama</p>	<p>No. 454/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Tgl. 30 Mei 2000</p> <p>-Menolak eksepsi Tergugat tentang</p>	-	-

¹⁹⁹⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tahun 2002.

		<p>25 tahun tanpa adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh PT. Tempo kepada PT. Roche Indonesia.</p>	<p>kompetensi absolut dari arbitrase</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini -Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian -Menyatakan sah dan berharga sita jaminan -Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat -Menghukum Tergugat un - 		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>tuk memba- yar ganti ke- rugian kepa- da Penggu- gat</p> <p>-Menyatakan bahwa Distri - bution Agree- ment yang ditandata- ngani oleh Penggugat dan Tergugat demi hukum tidak berlaku lagi sejak pu- tusan ini.</p>		
19	PT. Perusaha- an Listik Ne- gara (Persero) v. PT. Paiton Energy. ²⁰⁰⁾	Karena per- janjian pembelian te- naga listrik (PPA) antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas me- nguntungkan kroninya tanpa memperduli-	<p>No. 517/PDT. G/1999/PN. Jkt.Pst, Tgl. 16 De- seMBER 1999</p> <p>-Menolak ek- sepsi Tergu- gat</p> <p>-Menyatakan Pengadilan Negeri Jakar-</p>	-	-

²⁰⁰⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tahun 2002.

		<p>kan lagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tegasnya para kroni itu hanya ingin mencari untung, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan keadilan, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan atau moralitas yang baik</p>	<p>ta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini</p> <p>-Memerintah kan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini</p>		
20	<p>Commisioning Service Indonesia v. Indo Pacific Resources (Java) Ltd.²⁰¹⁾</p>	<p>Tergugat telah melanggar isi dari Main Contract Agreement yang telah dibuat dan mengikat mereka yang membuatnya.</p>	<p>No. 268/Pdt.G/2001/PN.Jkt. Pst, Tgl. 20 Agustus 2001</p> <p>-Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan ber</p>		

²⁰¹⁾ Yansen Dermanto Latip, op cit, halaman 277—280.

			alasan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung RI serta ditunjang dengan hasil penelitian kepustakaan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam pelaksanaan putusan arbitrase, maka dapat disajikan pembahasan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengadilan di Indonesia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara-perkara Yang di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa :

1. klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
2. suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausula atau perjanjian arbitrase tersendiri, sah tidaknya suatu klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase bergantung pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1320 tersebut akan kita temui dua syarat pokok sahnyanya perjanjian ²⁰²⁾ yaitu :

a. Syarat subyektif

Untuk memenuhi syarat subyektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian.

b. Syarat obyektif

Syarat obyektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 5 (1) tersebut, namun jika kita lihat pada Pasal 66 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase

²⁰²⁾ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 99—101.

internasional, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang :

- perniagaan
- perbankan
- keuangan
- penanaman modal
- industri
- hak kekayaan intelektual

Ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (1) tersebut seharusnya juga memiliki makna yang luas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), yang memberikan perumusan negatif, dimana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dibandingkan dengan pengadilan, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain :

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
2. Biaya lebih murah ;
3. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum ;
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih sederhana ;
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase ;
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter ;
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya ;
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi ;

9. Keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi) ;
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali ;
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Sebelumnya dalam Bab II juga telah diuraikan alasan-alasan para pihak memilih arbitrase daripada pengadilan, tetapi dalam praktek ternyata setelah diteliti banyak perkara arbitrase yang ditangani oleh pengadilan. Jadi walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Padahal kita tahu bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Seperti yang telah diuraikan pada hasil penelitian di atas, bahwa putusan pengadilan berkaitan dengan sengketa para pihak yang di dalam perjanjiannya memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun salah satu pihak tetap mengajukan sengketa ke depan pengadilan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu :

- a. Adanya klausula arbitrase, namun Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut.

Dalam sengketa antara Dato Wong Hech Guong cs. Dengan PT. Metropolitan Timber Ltd.²⁰³⁾ tersebut keputusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan kompetensi maupun gugatan

²⁰³⁾ Sudargo Gautama. Loc cit.

rekonpensi adalah tepat sekali. Ketentuan Art. 11 tersebut adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, maka Badan Arbitrase-lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati.

Demikian pula ada atau tidak adanya eksepsi/perlawanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri menjadi berwenang mengadili perkara ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase tidak didasarkan kepada ada atau tidak adanya eksepsi/perlawanan dari para pihak. Jadi kaidah hukum yang termuat dalam kasus ini adalah, bahwa dengan adanya perjanjian klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah wewenang absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan di persidangan.

Oleh karena itu, bilamana di dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausula yang menyatakan bahwa bilamana dalam melaksanakan perjanjian tersebut timbul persengketaan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausula ini wajib diperhatikan oleh hakim, dan seharusnya hakim menyatakan dirinya bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, selain itu ketentuan ini sudah merupakan jurisprudence tetap dari Mahkamah Agung.

b. Adanya klausula arbitrase dan Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut.

- (1) Dalam sengketa antara Ahyu Forestry Company Limited dengan Sutomo²⁰⁴⁾, Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase dalam Pasal 15 Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW) sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu keputusan Judeks factie telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dan dengan demikian telah melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung RI tersebut adalah tepat sekali, mengingat ketentuan tersebut sudah merupakan jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Akan tetapi seandainya perkara tersebut diperiksa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mungkin Mahkamah Agung akan bersikap lain. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas ini mengatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Selanjutnya Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Kedua

²⁰⁴⁾ *ibid*, halaman 1—48.

pasal ini dapat memperlemah klausula arbitrase yang semula disepakati para pihak.

(2) Dalam sengketa antara PT. Tempo dengan PT. Roche Indonesia ²⁰⁵⁾, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara tersebut. Menurut hemat penulis putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kurang tepat dengan alasan sebagai berikut :

- Distribution Agreement antara PT. Tempo dengan PT. Roche Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Distributor Agreement yang telah dibuat dan ditandatangani keduanya, telah diatur bahwa segala sengketa yang terjadi antara PT. Roche Indonesia dengan PT. Tempo akan diajukan dan diselesaikan oleh arbitrase. Karena sesungguhnya janji yang telah disepakati bersama dalam Distribution Agreement merupakan undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Karena itu maka apabila PT. Roche Indonesia merasa bahwa perjanjian tersebut merugikan dirinya, seharusnya ia menempuh jalan negosiasi ulang dengan PT. Tempo untuk ditemukan penyelesaian yang baru untuk mengatasi keadaan dan sengketa itu. Bukan melakukan keputusan sepihak, bahkan upaya kontak PT. Tempo pun tidak ditanggapi. Maka bisa diduga bahwa praduga pihak PT. Tempo bahwa ada etika kurang baik dari PT. Roche Indonesia.
- Perkara tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dimana seharusnya pengadilan bisa menegakkan supremasi hukum. Jadi putusan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1338 BW, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

²⁰⁵⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta, Tahun 2002.

- Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut akan membuat investor memandang bahwa iklim investasi di Indonesia tidak kondusif dan tidak melindungi kepentingan bisnis mereka di Indonesia. Hal ini sangat tidak menguntungkan dan tidak sejalan dengan usaha pemerintah yang berusaha menarik modal asing sebanyak-banyaknya.

(3) Dalam sengketa antara PT. PLN dengan PT. Palton Energy yang timbul dari perjanjian Power Purchase Agreement yang ditandatangani pada tanggal 12 Pebruari 1994 dimana PLN menyetujui untuk membeli listrik dari PT. Paiton Energy, yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka PLN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan kontrak yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum Indonesia tersebut.

Sebagai reaksi, PT. Paiton Energy mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut, karena dalam Pasal 18 PPA tersebut para pihak telah menyepakati bahwa setiap sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Selain itu PT. Paiton Energy juga mengingatkan tentang ketentuan Pasal 10 (h) yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak otomatis batal meskipun kontrak induknya batal. Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Menurut pandangan penulis, keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kurang tepat, karena jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hal ini adalah senada dengan pendapat Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Indonesia (BANI) 1998—2003²⁰⁶⁾ yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian, apa pun isinya, isinya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian terkait. Termasuk juga pilihan tentang penyelesaian adanya sengketa yang memakai jasa arbitrase dan bukan peradilan umum. Isi dalam perjanjian pokok harus dihormati. Jika ada pasal arbitrase dimasukkan dalam perjanjian pokok, maka harus diingat sifat pasal arbitrase itu sendiri, yaitu *has its own life*. Artinya pasal arbitrase itu hidup sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri, seakan mempunyai nyawa sendiri. Peradilan umum tidak dapat membatalkan pasal arbitrase terkait. Menurut Prof. Dr. Priyatna, jika ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pembuatan perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Paiton Energy, maka untuk dugaan KKN itu, pihak pelapor yang merasa dirugikan dalam hal ini PLN, harus mengadukan ke aparat penyidik Kepolisian RI atau Kejaksaan. KKN itu harus diperiksa terlebih dahulu. Akan menjadi kurang pada tempatnya jika pihak PLN yang mengetahui bahwa dasar pembuatan perjanjian pokok PPA itu bernuansa KKN, kemudian membawa soal ini ke peradilan umum. Priyatna sampai pada kesimpulan, bahwa pengadilan tidak dapat mengesampingkan pasal arbitrase yang sudah dituangkan dalam sebuah perjanjian pokok. Badan peradilan umum harus menghormati pasal arbitrase yang sudah menjadi pilihan dan dituangkan dalam perjanjian pokok. Pengadilan dapat membatalkan perjanjian pokok, tetapi tidak dapat membatalkan pasal arbitrase. Jika pengadilan melakukan penyimpangan pilihan pasal arbitrase dalam perjanjian pokok, maka peradilan umum telah menyalahi

²⁰⁶⁾ Kompas, tanggal 23 Desember 2000.

ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Pasal 3 Undang-undang Arbitrase mengatur soal tidak adanya wewenang peradilan umum mengadili salah satu pihak dalam perjanjian, dimana pihak terkait telah menundukkan dirinya pada ketentuan arbitrase.

Mengenai adanya pemeriksaan soal KKN dalam melihat latar belakang terjadinya Perjanjian PPA antara PLN dan Palton Energy, Priyatna mengatakan bahwa semua pasal dalam perjanjian PPA harus dibekukan, hanya pasal arbitrase yang masih hidup. Ini berarti, selama masa pemeriksaan pidana untuk membuktikan ada tidaknya praktik KKN sampai pada putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka peradilan umum tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan isi perjanjian terkait. Setelah perkara pidana soal KKN ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka peradilan arbitrase yang menjadi pilihan kedua belah pihak akan mengeluarkan putusan yang sifatnya *void up initio*, artinya putusan arbitrase yang menjadi pilihan kedua belah pihak akan membatalkan perjanjian pokok itu, karena sejak awalnya melanggar ketentuan yang berlaku umum.

Tetapi sayang kasus ini telah dicabut oleh pihak PLN (Penggugat), akan tetapi pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara, pihak Tergugat belum memberikan jawaban.

- c. Adanya klausula arbitrase yang diakui oleh kedua belah pihak, tetapi para pihak bersengketa mengenai badan arbitrase mana yang berwenang untuk mengadili.

Dalam sengketa antara PT. Batu Mulia Utama dengan SSC (Sainrapt Et Brite Societe Auxiliaire D'Enteprires Societe Routine Colas) ²⁰⁷⁾, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa apakah yang bertindak sebagai Badan Arbitrase adalah ICC (International Chamber of Commerce) atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), hal ini merupakan wewenang Pengadilan untuk menentukan.

Sedangkan pasal mengenal berlakunya hukum Indonesia dan pillhan domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tidak mempunyai pengaruh terhadap Pasal XXIII, karena hal ini tidak mengakibatkan bahwa yang harus menyelesaikan arbitrase a quo adalah BANI.

Yang dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI ini adalah bahwa sengketa mengenai badan arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa arbitrase, merupakan wewenang dari Pengadilan untuk menentukan, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 619 RV. Jadi meskipun para pihak telah memilih berlakunya hukum Indonesia dan telah memilih domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tidak berakibat bahwa badan arbitrase yang menjadi berwenang adalah BANI, karena sesuai klausula arbitrase yang akan memeriksa perkara arbitrase ini adalah Badan Arbitrase ICC sesuai dengan ketentuan ICC.

²⁰⁷⁾ Himpunan Putusan Mahkamah Agung, loc cit.

- d. Adanya klausula arbitrase yang diakui oleh kedua belah pihak, tetapi para pihak juga menunjuk pada kompetensi pengadilan.

- (1) Dalam sengketa antara Bank Deutsche Genassenschaft dengan PT. Lumbung Tani Indonesia cs.²⁰⁸⁾, Mahkamah Agung pertimbangannya menunjuk kepada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa dalam hal ada klausula arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, karena sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, maka apa yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak.

Para pihak telah melakukan pilihan hukum ke hukum Jerman, sehingga menurut Mahkamah Agung sulit bagi pengadilan Indonesia untuk memperlakukan hukum Jerman tersebut dan sebagai tempat pelaksanaan penerapan hukum telah dipilih Jerman dan forum arbitrase untuk penyelesaian sengketa.

Pilihan hukum ke hukum Jerman adalah *choise of law by the parties* yang boleh saja dilakukan dan seharusnya dihormati oleh pengadilan. Pengadilan Negeri di Indonesia juga dapat memakai hukum Jerman dalam menyelesaikan perkara perdata internasional. Kesepakatan para pihak tersebut di atas ditambah lagi oleh tindakan pemohon kasasi, Tergugat I asal PT. Lumbung Tani Indonesia yang telah menunjuk dan mengangkat Dr. Harold Voelze Boersenplatz sebagai agen untuk pelayanan proses arbitrase di Jerman. Sebagai alasan berikutnya ditunjuk kepada ketidakseimbangan antara hak kreditur dan debitur, di mana kreditur selain melalui arbitrase juga diberi hak untuk mengajukan gugatan di hadapan pengadilan, hak mana tidak diberikan kepada debitur, sehingga karenanya Mahkamah Agung berhak untuk menyatakan bahwa Pasal 152 alinea kedua sebagai tidak dapat diberlakukan.

²⁰⁸⁾ Varia Peradilan, Tahun X, Nomor 110, loc cit.

- (2) Dalam sengketa antara PT. Panata Tama Inter Instalasi Indonesia dengan PT. Kolifri Tekindo Pratama ²⁰⁹⁾, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dan mambatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/Pdt/1996/PT DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 083/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus tersebut di atas pada hasil penelitian adalah tepat sekali. Dalam surat perjanjian penunjukkan dealer yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara PT. Panata dan PT. Kolifri, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak berhasil, selanjutnya akan menempuh jalur arbitrase. Jika hal ini juga belum mencapai jalan keluar, maka proses pengadilan sebagai jalan terakhirnya. Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Karena jalan melalui arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di pengadilan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung RI, karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa akan dimulai dengan cara musyawarah dulu, baru kalau gagal ke arbitrase, selanjutnya apabila arbitrase gagal juga baru diselesaikan melalui pengadilan.

e. Adanya klausula arbitrase, akan tetapi perjanjiannya batal demi hukum

Dalam sengketa antara PT. Perintis V. Pile Tehnologi dengan V. Pile International (Netherlands) B.V. ²¹⁰⁾, Mahkamah Agung RI memutuskan antara lain menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi V. Pile International

²⁰⁹⁾ Varia Peradilan, Tahun XVI, Nomor 191. Loc cit.

²¹⁰⁾ Yansen Dermanto Latip, loc cit.

(Netherlands) B.V. tersebut dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi dengan menyatakan bahwa license agreement yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 November 1992 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Dalam perkara ini Pengadilan menyatakan bahwa license agreement tanggal 20 November 1992 batal demi hukum. Pengadilan juga tidak mengakui klausula arbitrase, karena perjanjian yang cacat menyebabkan klausula arbitrase tersebut batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut di atas adalah sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase bersifat asesor²¹¹⁾, dimana perjanjian arbitrase bukan merupakan perjanjian bersyarat. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berjanji. Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian yang lazim disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaanya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal dan cacatnya perjanjian pokok. Lain halnya kalau perjanjian pokok yang cacat atau batal, hal itu langsung mengakibatkan perjanjian arbitrase gugur dan tidak mengikat. Lumpuhnya daya keabsahan perjanjian pokok, dengan sendirinya melumpuhkan klausula arbitrase. Begitu juga pemenuhan perjanjian pokok, mengakibatkan klausula arbitrase hilang fungsinya. Jika perselisihan tidak terjadi di antara para pihak, klausula arbitrase tidak memiliki peran apa-apa.

²¹¹⁾ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 61--62.

Akan tetapi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; dan
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Hal ini berarti bahwa, sesuai dengan Pasal 10 huruf (h) Undang-undang Arbitrase, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh batalnya perjanjian pokok.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 huruf (h) tersebut adalah sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Indonesia (BANI) 1998—2003 yang menyatakan bahwa jika ada pasal arbitrase dimasukkan dalam perjanjian pokok, maka sifat pasal arbitrase itu adalah *has its own live*. Artinya, pasal arbitrase itu hidup sebagai satu kesatuan tersendiri, peradilan umum tidak dapat membatalkan pasal arbitrase tersebut. Pengadilan tidak dapat mengesampingkan pasal arbitrase yang sudah dituangkan dalam sebuah perjanjian pokok. Pengadilan dapat membatalkan perjanjian pokok, tetapi tidak dapat membatalkan pasal arbitrase,

karena badan peradilan umum harus menghormati pasal arbitrase yang sudah menjadi pilihan dan dituangkan dalam perjanjian pokok.²¹²⁾

- f. Adanya klausula arbitrase, akan tetapi di dalamnya mengandung perkara kepailitan, dimana para pihak bersengketa tentang siapa yang berwenang mengadili perkara kepailitan, apakah Pengadilan Niaga atau Arbitrase

Dalam sengketa antara PT. Enindo dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu²¹³⁾, Majelis Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/Pailit/1999/PN. Niaga Jakarta Pusat. Dimana dalam kasus ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kepailitan, karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara pemohon dan termohon.

Dari putusan Majelis Mahkamah Agung dan Peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan tersebut di atas dapat kita analisa sebagai berikut :

- Yurisprudensi mengakui bahwa Arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari klausula arbitrase dalam suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "asas pacta sunt servanda" ex Pasal 1338 B.W.
- Namun kewenangan absolut arbitrase dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga

²¹²⁾ Kompas, 23 Desember 2000, loc.cit.

²¹³⁾ Varia Peradilan, Tahun XV, Nomor 172, loc cit.

untuk mengadili perkara insolvensi/kepailitan berdasar PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai special law. Menurut Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.²¹⁴⁾ pada umumnya pengadilan sendiri ternyata juga kurang membantu penyelesaian masalah ekonomi yang melanda negeri kita dengan menerima gugatan kreditur atau permohonan para debitur, agar debitur dinyatakan pailit atau perusahaannya ditutup. Padahal di dalam banyak kontrak antara kreditur dan debitur seperti itu sudah tercantum suatu kontrak arbitrase. Dalam satu putusan Mahkamah Agung RI dinyatakan oleh Hakim Agung Asikin Kusumaatmadja, SH, bahwa apabila para pihak telah menyetujui bahwa semua sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh suatu forum arbitrase, maka hakim pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menerima perkara itu.

Jika demikian, maka dalam hal perundingan antara kreditur dan debitur sudah mengalami jalan buntu, kedua belah pihak wajib mengajukan perkara ini ke hadapan forum arbitrase yang telah mereka tentukan sebelumnya, yang antara lain juga akan dapat memutuskan bagaimana sengketa antara mereka harus diselesaikan, termasuk mengusulkan restrukturisasi hutang atau restrukturisasi perusahaan dengan berbagai cara yang halal dan sah.

Meskipun dalam teori para pihak mungkin saja dapat memutuskan bahwa sengketa mereka dapat diselesaikan melalui arbitrase, masih menjadi pertanyaan sejauh manakah hal itu masih dimungkinkan apabila para pihak tidak menentukan klausula arbitrase itu sebelum sengketa antara mereka timbul, tetapi baru sesudah ada sengketa para pihak baru memutuskan agar segala sengketa antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.

²¹⁴⁾ *Konflik Antar Wewenang Antara Pengadilan Dan Forum Arbitrase Dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 148—150.

Menurut logika berfikir, maka apabila kesepakatan ini timbul sebelum kreditur atau debitur mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka hakim pengadilan juga terikat pada kesepakatan tersebut, dan tidak menyatakan dirinya berwenang apabila setelah persetujuan itu para pihak masih mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Lain halnya apabila keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase baru dinyatakan pada suatu saat setelah perkara mereka diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini tentu kesepakatan agar perkara ini diselesaikan oleh forum arbitrase sudah tertutup, karena mereka sebelumnya tidak memasukkan klausula arbitrase itu ke dalam kontrak utamanya. Gugurlah hak para pihak untuk mengajukan perkaranya ke arbitrase, sekalipun hakim pengadilan (secara keliru) telah menjatuhkan putusan.

Jika demikian, maka sekalipun telah ada suatu keputusan pengadilan mengenai perkara yang seharusnya diselesaikan oleh arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan, karena pengadilan di dalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang memutuskan. Sebaliknya, forum arbitrase yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak itulah yang berwenang memutuskan sengketa antara mereka.

Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa untuk menyatakan seseorang pailit, permohonannya juga boleh diajukan kepada arbitrase. Sebaliknya satu-satunya instansi yang dapat menyatakan seseorang/perusahaan pailit hanyalah hakim pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan.

Oleh karena itu, arbitrase tidak berwenang untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan. Penentuan kompetensi absolut dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan baik oleh para pengacara maupun oleh para hakim, sehingga sebelum hakim pengadilan menerima gugatan perkara tentang hutang piutang, hakim pengadilan perlu memeriksa benar-benar

apakah antara para pihak telah terjadi kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau tidak.

Tetapi di lain pihak, apabila para pihak sudah menghendaki dipailitkannya debitur, baik atas gugatan kreditur ataupun berdasarkan permohonan debitur sendiri, maka sekalipun ada klausula arbitrase itu, hanya pengadilanlah merupakan instansi/forum yang berwenang memutuskan.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa persetujuan perikatan arbitrase merupakan perjanjian asesor dari perjanjian pokok yang sepenuhnya tunduk kepada asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian. Terutama asas pacta sunt servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mutlak sifatnya dalam perjanjian arbitrase, sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, merupakan ketentuan undang-undang yang mengikat kepada mereka. Konsekwensi yang timbul dari pasal tersebut, para pihak harus mentaati dan melaksanakan pemenuhan perjanjian arbitrase dengan sepenuhnya.

Akibat yang paling penting dalam perjanjian arbitrase dihubungkan dengan asas pacta sunt servanda, salah satu pihak tidak dapat memecahkan atau membatalkan perjanjian secara sepihak.²¹⁵⁾

Larangan pembatalan secara sepihak perjanjian arbitrase secara analogis telah ditegaskan dalam Pasal 620 ayat (2) RV, yang menyatakan bahwa selama jangka waktu itu, para arbiter tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak.²¹⁶⁾ Pernyataan pasal tersebut merupakan penegasan atas larangan pemecahan atau pembatalan perjanjian arbitrase secara sepihak. Apabila para pihak telah mengikat perjanjian arbitrase yang bertujuan

²¹⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2001, halaman 28.

²¹⁶⁾ Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, 1996, halaman 26.

untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok melalui forum arbitrase, perjanjian tersebut mutlak mengikat para pihak, tidak dapat mereka pecahkan atau batalkan secara sepihak. Pembatalan atau penarikan perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan para pihak.

Larangan pencabutan atau penarikan persetujuan arbitrase secara sepihak, telah dikembangkan juga dalam yurisprudensi. Salah satu di antaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988.²¹⁷⁾ Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa, dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jadi putusan Mahkamah Agung tersebut telah memberi penjelasan tentang acuan tata cara penarikan perjanjian arbitrase :

- a. harus dilakukan secara tegas, dan
- b. dituangkan dalam persetujuan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Acuan penarikan perjanjian arbitrase yang tersirat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain :

- a. penarikan perjanjian arbitrase tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Jika kedua belah pihak memang sepakat dan setuju untuk menarik dan membatalkan harus dilakukan secara tegas, tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Penarikan secara diam-diam menurut putusan Mahkamah Agung dianggap tidak sah.

²¹⁷⁾ Himpunan Putusan Mahkamah Agung Tentang Arbitrase, Proyek Yurisprudensi, MARI, halaman 63.

- b. Setiap penarikan perjanjian arbitrase harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Bahkan putusan Mahkamah Agung tersebut mengatakan, kesepakatan untuk menarik persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani kedua belah pihak. Dengan demikian, kesepakatan pencabutan perjanjian arbitrase yang dituangkan dalam bentuk lisan, dianggap tidak berharga dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Pendirian yang digariskan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut jelas dapat mendukung aktualisasi pembaharuan hukum serta sekaligus memotivasi tegaknya kepastian hukum dan bidang arbitrase. Tetapi sayangnya yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak selalu diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus dan menangani perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase.

Lebih jauh ketentuan yang diatur dalam Pasal 620 ayat (2) RV tersebut di atas juga diatur dalam Undang-undang Arbitrase yaitu dalam Pasal 73 huruf c. Pasal 73 huruf c menyatakan bahwa, tugas arbiter berakhir karena para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Hal ini berarti bahwa untuk membatalkan perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus ada sepakat atau mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Bentuk penarikan perjanjian arbitrase tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, hal ini adalah sejalan dengan definisi dari perjanjian arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Arbitrase, bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, terlihat jelas bahwa RV maupun Undang-undang Arbitrase telah mengatur dengan secara tegas bahwa untuk menarik kembali atau membatalkan perjanjian arbitrase harus dilakukan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi dalam kenyataannya apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diaplikasikan secara tepat dalam praktek hukum sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase, ternyata para pihak tetap mengajukan perkaranya ke pengadilan dan pengadilan pun dalam beberapa perkara baik sebelum maupun sesudah keluarnya Undang-undang Arbitrase ada kecenderungan dengan menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

2. Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase diambil oleh majelis arbiter atau arbiter tunggal berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam klausula arbitrase yang terdapat pada perjanjian arbitrase yang menjadi dasar hukum timbulnya wewenang para arbiter untuk memeriksa dan memutus persengketaan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatangani perjanjian arbitrase oleh para pihak.²¹⁸⁾

Permasalahannya, meskipun lembaga arbitrase memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara arbitrase, tetapi dalam pelaksanaan putusan

²¹⁸⁾ Gunawan Widjaja, op cit, halaman 99.

arbitrase itu sendiri membutuhkan adanya campur tangan pengadilan. Campur tangan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada tempat di mana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat dibedakan ke dalam :

- a. putusan arbitrase nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia.
- b. putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing, merupakan putusan yang dijatuhkan di negara di luar negara Republik Indonesia.²¹⁹⁾

Perbedaan tersebut penting artinya pada saat kita akan membicarakan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase.

Peraturan yang mengatur tentang tata cara pemberian eksekutor putusan arbitrase nasional (dalam negeri) terdapat dalam Rv, dan peraturan yang mengatur tata cara pemberian eksekutor putusan arbitrase internasional atau asing terdapat dalam Konvensi New York 1958 ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma Nomor 1 Tahun 1990). Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 34, mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional. Untuk jenis penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas, ada perbedaan dalam pelaksanaan putusannya, sebagai berikut :

²¹⁹⁾ Ibid, halaman 121.

a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Ini berarti bahwa terhadap putusan arbitrase yang final, tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Berbeda dengan putusan arbitrase versi Rv, dapat diajukan upaya banding. Ini ditegaskan dalam Pasal 641 Rv. Dengan demikian pada hakekatnya, putusan arbitrase menurut Rv, tidak langsung bersifat final dan binding. Putusan masih bisa mentah kembali, apabila salah satu pihak mengajukan banding.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri, dan apabila hal ini tidak dilakukan, akan berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan perandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri, dan ini merupakan akta pendaftaran.

Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah ini diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri, namun Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya akan memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, misalnya :

- Apakah sudah ada persetujuan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase;

- Apakah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan/atau mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- Apakah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang dapat diadakan perdamaian;
- Apakah putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini dimaksudkan agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak pelaksanaan eksekusi. Terhadap penolakan pelaksanaan eksekusi ini tidak dapat diajukan upaya hukum.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Menurut Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

- Putusan arbitrase internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
- Putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Putusan arbitrase internasional tersebut telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Terhadap pengajuan kasasi ini, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan dan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung ini, tidak dapat diajukan perlawanan.

- Apabila putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan disertai :

- Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;

- Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- Keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

Dari uraian tersebut di atas, ternyata dalam praktek yang terjadi tidak demikian, misalnya dalam hal pendaftaran putusan arbitrase internasional. Ditemukan dari hasil penelitian bahwa dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company, bahwa berdasarkan putusan Arbitral Tribunal di Jenewa, Swis tanggal 18 Desember 2000, Pertamina harus membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company sejumlah 261 juta dollar AS sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian yang telah dibuat antara Pertamina dengan pihak Karaha Bodas Company.

Pertamina sebagai pihak Pemohon, telah mengajukan pendaftaran putusan arbitrase Internasional tersebut kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 67 Undang-undang Arbitrase, pendaftaran putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya. Dengan adanya permasalahan ini, maka panitera Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri mohon petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi berkaitan dengan masalah pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Tetapi ternyata Ketua Pengadilan Tinggi

mengijinkan pendaftaran tersebut dilakukan oleh pihak Pertamina sebagai Pemohon bukan oleh pihak arbiter atau kuasanya, dan telah tercatat di bawah register nomor 01/ARB-INT/2002/PN.JKT.PST.

Dengan adanya petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, berarti pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak mutlak harus oleh arbiter atau kuasanya saja yang boleh mendaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga bisa dilakukan oleh Pemohon atau Termohon asalkan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi.

Kalau kita perhatikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase, ternyata ada perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dalam Pasal 59 ayat (4), menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari Pasal 59 tersebut, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dimana dalam Pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut hanya menyebut bahwa apabila tidak sesuai dengan ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dalam penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut meliputi keseluruhan isi dari ayat (1) tadi atautkah hanya ditekankan pada segi waktu pendaftaran. Tetapi karena tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal, maka menurut hemat penulls, maka keseluruhan isi dari ayat (1) dari Pasal 59 tersebut harus dipenuhi secara lengkap, tidak boleh tidak.

Sedangkan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak ada pasal dan ayat yang mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Arbitrase tersebut. Demikian pula masalah jangka waktu

pendaftaran pun juga tidak diatur dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dengan demikian menurut hemat penulis, pendaftaran putusan arbitrase internasional meskipun tidak didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya tetap diperbolehkan, karena memang dalam Pasal 67 maupun penjelasannya tidak mengatur ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Agar supaya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai kepastian hukum, maka sebaiknya perlu ada revisi terhadap Pasal dalam Undang-undang Arbitrase yang mengatur masalah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain itu juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional telah diatur mengenai kewajiban arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter. Di samping itu juga mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk menanggung semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran. Sedangkan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, hal tersebut tidak diatur.

Selanjutnya untuk dapat memahami pelaksanaan putusan arbitrase internasional, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Sikap pengadilan Indonesia sesudah berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 1990.
- b. Sikap pengadilan Indonesia sesudah berlakunya Konvensi New York 1958 dan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990.
- c. Sikap pengadilan Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

Ad.a. Sikap pengadilan Indonesia sesudah berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990.

- 1) Dalam sengketa antara Navigation Maritime Bulgare lawan PT. Nizwar ²²⁰⁾, Pengadilan Negeri Jakarta telah mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang telah diajukan oleh Navigation Maritime Bulgare sebagai pemohon eksekusi, dengan penetapan Nomor 2288/1979 P, tanggal 19 Juni 1981 terhadap Nizwar sebagai Termohon eksekusi.

Dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri tersebut, PT. Nizwar mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan badan arbitrase tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing di Indonesia, maka antara negara Republik Indonesia dengan negara asing harus ada perjanjian tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut, sementara itu perjanjian tersebut belum pernah ada. Disamping itu Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang badan peradilan mana yang berwenang memeriksa permohonan eksekusi tersebut.

Dari sikap Mahkamah Agung dalam kasus tersebut menurut penulis sudah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kasus tersebut di atas terjadi sebelum keluarnya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, sementara itu Rv hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam negeri (nasional), sehingga yang menjadi dasar patokan pelaksanaan putusan

²²⁰⁾ Varia Peradilan, Tahun II, Nomor 18, loc cit.

arbitrase asing (internasional) adalah Konvensi New York 1958, karena Perma Nomor 1 Tahun 1990 belum ada.

- b. Pada prinsipnya, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menganut asas resiprositas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Oleh karena itu, negara peserta Konvensi New York 1958, dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang dimintakan suatu negara, apabila negara yang meminta tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara yang diminta. Dengan demikian Konvensi New York 1958 tidak dapat dipaksakan secara unilateral.²²¹⁾

Selanjutnya pertimbangan penolakan eksekusi oleh Mahkamah Agung disebabkan belum ada peraturan pelaksanaannya, menurut Sudargo Gautama bahwa setelah adanya Kepres Nomor 34 Tahun 1981, peraturan pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak diperlukan lagi. Menurutnya, setiap keputusan presiden tidak memerlukan peraturan pelaksanaan. Lain halnya dengan undang-undang yang memuat pasal tentang diperlukannya peraturan pelaksana, tentu harus dilengkapi peraturan pelaksana.²²²⁾

Pendapat itu ada benarnya jika dilihat dari segi Kepres Nomor 34 Tahun 1981 dan Pasal III Konvensi New York 1958. Dalam Pasal III

²²¹⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 22.

²²²⁾ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 72.

tersebut terkandung asas jus sanguinis atau asas personalitas.²²³⁾ yang menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi arbitrase asing dijalankan menurut tata cara hukum acara yang berlaku di negara mana eksekusi dimohonkan. Jika asas ini dijadikan rujukan, maka harus menyesuaikan pelaksanaan eksekusi dengan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR. Oleh karena itu, kurang kuat alasan argumentasi penolakan eksekusi jika semata-mata didasarkan atas pendapat belum ada peraturan pelaksana.

Apalagi jika ditinjau dari pendekatan teori self executing, semakin lemah alasan yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh T.M. Radhi, SH. dalam makalahnya²²⁴⁾, kita harus membedakan konvensi yang non executing dengan yang self executing. Menurutnya, Konvensi New York 1958 termasuk kelompok yang self executing. Jika bertitik tolak pada Pasal III Konvensi, pada dasarnya putusan arbitrase bersifat self execution.²²⁵⁾ Oleh karena itu, eksekusi tidak memerlukan pelaksana di negara peserta. Sekali suatu negara meratifikasinya, pengakuan dan eksekusi harus ditaati secara keseluruhan tanpa memerlukan peraturan pelaksanaan. Pada diri Konvensi New York 1958, sudah terkandung kekuatan eksekutorial yang bersumber dari dirinya sendiri. Kekuatan self execution konvensi ini bersumber dari ketentuan Pasal 1 ayat (1).²²⁶⁾

²²³⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 27.

²²⁴⁾ Sudargo Gautama, op cit, halaman 24.

²²⁵⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 28.

²²⁶⁾ M. Yahya Harahap, ibid, halaman 32.

2) Dalam sengketa antara PT. Bakrie & Brothers lawan Trading Corporation of Pakistan Limited.²²⁷⁾ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan bantahan dari Termohon. Pengadilan tersebut mengatakan bahwa "Award of Arbitration" Nomor 2282 tanggal 8 September 1984 tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam pandangannya, hakim Pengadilan Negeri membenarkan keberatan atas pelaksanaan keputusan tersebut. Alasan Pengadilan adalah bahwa putusan arbitrase tersebut tidak sah, karena keputusan tersebut dibuat di Inggris. Hal ini sesuai dengan asas resiprositas yang tercantum dalam Kepres Nomor 34 Tahun 1981, bahwa sikap pengakuan dan kerelaan pihak Indonesia mengeksekusi putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari suatu negara lain, harus didasarkan atas ikatan bilateral maupun multilateral. Sekurang-kurangnya antara negara yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan, sudah lebih dahulu memiliki ikatan perjanjian dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Pihak Indonesia tidak terikat untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing, jika pihak negara lain yang meminta tidak terikat secara bilateral atau multilateral dengan pemerintah RI.²²⁸⁾ Jadi berdasarkan asas resiprositas tersebut bahwa Inggris tidak berhak memutus perkara arbitrase ini, sebab negara yang berhubungan adalah Indonesia dan Pakistan, bukan Indonesia dan Inggris.

Pandangan Pengadilan Negeri yang lainnya adalah keputusan arbitrase tersebut bertentangan dengan prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase, karena Termohon tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan tidak pernah didengar pendapatnya, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Dalam

²²⁷⁾ Tineke Louise Tuegeh Longdong. loc cit.

²²⁸⁾ M. Yahya Harahap, op cit, halaman 19.

pandangan lebih lanjut, majelis menolak pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai keputusan arbitrase tersebut. Menurut majelis, dari Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini adalah Pengadilan Negeri, karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut, dan atas dasar itulah pengadilan bisa menilai putusan arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa konvensi.

Selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pemohon selaku pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian juga dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi Pemohon kasasi, Trading Corporation of Pakistan Limited ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi. Menurut Mahkamah Agung, keputusan *judex factie* tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 636 Rv, Pasal 637 Rv, Pasal 639 Rv, dan Pasal 642 Rv.

Negara-negara lain yang meratifikasi Konvensi New York 1958 juga menghadapi putusan arbitrase yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya di negara-negara tersebut. Hal itu berdasarkan Pasal V (1) a sampai dengan Pasal V (1) e dan Pasal V (2) a sampai dengan Pasal V (2) b Konvensi New York 1958. Selain itu negara-negara lain yang menjadi anggota Konvensi New York 1958 juga tidak selalu

mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri, berdasarkan Pasal V (1) dan Pasal V (2) Konvensi New York 1958.²²⁹⁾

Ad.b. Sikap pengadilan Indonesia setelah berlakunya Konvensi New York 1958 dan setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 1990

1. Dalam sengketa antara Ecom USA Inc. lawan PT. Mahameru Centratama Mills²³⁰⁾, permohonan eksekuturnya telah dikabulkan dengan penetapan Mahkamah Agung RI, dengan pertimbangan bahwa putusan arbitrase asing tersebut adalah mengenai pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon sesuai perjanjian yang dimaksud dalam Pasal II Konvensi New York 1958.

Pertimbangan mengenai pembayaran sejumlah uang, menunjukkan bahwa putusan arbitrase adalah suatu putusan *condemnatoir*,²³¹⁾ yaitu putusan yang mengandung perintah untuk pembayaran sejumlah uang. Jadi putusan *condemnatoir* tersebut membutuhkan tindakan pelaksanaan dari hakim Indonesia.

Kemudian pertimbangan di atas juga menunjuk kepada Pasal II (1) Konvensi New York 1958 yang mensyaratkan suatu perjanjian tertulis dan Pasal II (2) mengenai perjanjian tertulis yang mencakup suatu klausula arbitrase.

Persyaratan Pasal II (1) dan (2) Konvensi New York 1958 ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (4) (b) Perma Nomor 1 Tahun 1990, bahwa pengiriman berkas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada

²²⁹⁾ Erman Rajagukguk, op cit, halaman 68.

²³⁰⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

²³¹⁾ Tineke Louise Tuegeh Longdong, op cit, halaman 188.

Mahkamah Agung RI harus disertai dengan asli perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase asing.

Sebagai pertimbangan selanjutnya dikemukakan oleh Mahkamah Agung RI, bahwa putusan arbitrase asing tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan ini adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1990, yang mensyaratkan didaftarkan (dideponir) putusan arbitrase asing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hendak dimohonkan untuk dieksekusi. Pertimbangan yang lain dari Mahkamah Agung adalah bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Pertimbangan mengenai ketertiban umum di atas hanya didasarkan atas penelitian *prima facie* ²³²⁾ saja, dalam arti tidak mengandung penilaian terhadap isi dari perjanjian yang dibuat, akan tetapi hanya memberikan titel eksekutorial bagi putusan arbitrase asing tersebut. Syarat ketertiban umum ini adalah sesuai dengan :

- Pasal V ayat (2)(b) Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase luar negeri juga dapat ditolak apabila otoritas yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan berpendirian bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut akan bertentangan adanya dengan ketertiban umum dari negara tersebut;
- Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 1990 menyatakan bahwa putusan-putusan arbitrase asing tersebut hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; dan

²³²⁾ *ibid*, halaman 248.

- Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990, bahwa *exequatur* tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 1990, maka berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dalam sengketa ini telah diajukan oleh Pemohon eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung RI telah disertai dengan :

1. Asli putusan arbitrase luar negeri
2. Asli perjanjian yang menjadi dasar dari putusan arbitrase luar negeri tersebut
3. Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di mana putusan arbitrase asing tersebut diberikan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bersama-sama dengan Konvensi New York 1958

Ketiga dokumen tersebut di atas juga telah dilengkapi dengan terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia.

- 2) Dalam sengketa antara Sikiros Maritime Ltd. lawan PD. Perdata Lot ²³³⁾, seandainya benar bahwa dalam kontrak ini tidak ditandatangani oleh Penjual, akan tetapi menurut Pasal II (2), tidak selalu diperlukan tanda tangan Konvensi New York 1958. Pasal II (2) telah memperluas asas kebebasan berkontrak yang dapat berupa : ²³⁴⁾
 - (i) klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau

²³³⁾ *ibid*, halaman 239—242.

²³⁴⁾ *ibid*, halaman 22.

- (ii) perjanjian arbitrase yang ditandatangani para pihak dengan menambah bahwa asas kebebasan berkontrak juga dapat terkandung dalam
- (iii) surat menyurat, atau saling mengirimkan telegram

Jadi klausula arbitrase bisa juga ditafsirkan dari surat menyurat, seperti dilakukan oleh Tim Arbitrase dalam reasons for, and forming foot of final award yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa menurut hukum Inggris, pada saat semua telah selesai dibicarakan, tanpa adanya syarat bahwa para pihak baru terikat apabila telah ditandatangani satu kontrak, maka pada saat tersebut telah tercapai satu kontrak. Fakta bahwa Penjual tidak pernah menandatangani Memorandum of Understanding tidak menjadi masalah.

Bahwa kemudian Penjual pada tanggal 15 Oktober 1991 melalui PT. Burung Laut yang telah bertindak untuk dan atas nama Penjual telah mengemukakan bahwa untuk jual beli kapal ini masih dibutuhkan tiga hal :

- a. persetujuan berupa izin wajib dari Pemerintah untuk mendapatkan surat penghapusan dari pendaftaran kapal,
- b. persetujuan dari bank di mana kapal ini masih terikat sebagai jaminan,
- c. pernyataan bahwa kapal tidak dibebankan dengan jaminan lain.

Namun menurut Majelis, ketiga syarat di atas dianggap tidak relevan. Berhubung Penjual pada tanggal 8 Desember yang merupakan tanggal penyerahan kapal, bersikeras menyatakan bahwa tidak terdapat kontrak yang mengikat, penjual telah menolak kontrak, yang menurut pendapat majelis arbitrase telah terlaksana. Oleh karena itu, Pembeli telah menuntut pembatalan kontrak disertai sejumlah denda karena

kehilangan nilai pasar dan pengeluaran biaya secara sia-sia, yang seluruhnya telah dikabulkan oleh Majelis Arbitrase.

Mengenai pendapat Mahkamah Agung terhadap Pasal II (2), yang mensyaratkan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase harus ditandatangani para pihak atau sebagaimana terkandung dalam surat menyurat, akan diperbandingkan dengan putusan pengadilan Swiss dalam sengketa antara Penjual Belanda lawan Pembeli Swiss²³⁵⁾ telah memutuskan sengketa dimana Pembeli Swiss, terhadap siapa hendak dilaksanakan putusan arbitrase, mengajukan sebagai alasan penolakan bahwa perjanjian untuk arbitrase tidak sah adanya karena hanya ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri, sedangkan seharusnya mengandung tanda tangan dari kedua belah pihak.

Pengadilan Tinggi Swiss berpendirian bahwa meskipun perjanjian hanya mengandung tanda tangan Pembeli, tidak dapat dikatakan Penjual hanya menyetujuinya secara lisan. Lebih tepat disebut bahwa perjanjian ditutup dengan saling menyurat sesuai Pasal II (2) Konvensi New York 1958. Saling surat menyurat, tidak hanya ada apabila bisa diproduksi surat-surat yang ditandatangani para pihak, tetapi juga apabila dapat diajukan suatu *written manifestation* dari kedua belah pihak. Seandainya Konvensi New York 1958 mensyaratkan tanda tangan pada saling surat menyurat, maka sudah tentu konvensi telah menetapkan secara jelas.

- 3) Dalam sengketa antara E.D. & Man (Sugar) Limited melawan Y. Haryanto tersebut²³⁶⁾, yang telah mendapatkan penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Pen. Ex'r/Arb/Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991 berisi pengabulan exequatur. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan

²³⁵⁾ ibid, halaman 243.

²³⁶⁾ ibid, halaman 244--246.

tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pdt/1990, tanggal 14 Desember (1989) jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/Pdt/1989 PT. DKI, tanggal 14 Desember (1991) jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt/G/1988, 29 Juni (1989) dalam sengketa antara E.D. & F. Man (Sugar) Ltd lawan Yani Haryanto.²³⁷⁾

Dalam sengketa ini Haryanto telah bertindak sebagai Termohon Kasasi, Terbanding dan Penggugat lawan Man, Pemohon Kasasi, Pembanding, Tergugat. Antara Haryanto dan Man telah ditandatangani dua kontrak, masing-masing tertanggal 12 Pebruari 1982 dan 23 Maret 1982, untuk mengimpor gula putih dari London ke Jakarta yang mengandung klausula arbitrase sesuai yang diatur dalam Pasal 14 dari perjanjian arbitrase tersebut. Haryanto mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lawan Man, karena ternyata bahwa kedua contract yang telah ditandatangani para pihak bertentangan adanya dengan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1971, tanggal 14 Juli 1971 dan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1978, tanggal 6 November 1978, yang pada pokoknya melarang perorangan melakukan impor gula, untuk itu Haryanto minta agar kedua kontrak tersebut dibatalkan.

Oleh Man diajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, karena adanya klausula arbitrase baik dalam Pasal 14 dari kontrak-kontrak maupun dalam Akta Perdamaian untuk arbitrase di London.

Putusan dalam tingkat pertama telah membatalkan kedua kontrak tersebut di atas, karena bertentangan dengan kedua Kepres tersebut di atas, sehingga mengandung *causa* terlarang. Putusan Pengadilan Inggris yang diajukan oleh Man semuanya didasarkan pada kedua kontrak tersebut di atas, yang karena bertentangan dengan kedua

²³⁷⁾ Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 80, Mei 1992, *Pembatalan Kontrak Dagang Internasional Dewan Arbitrase Dikesampingkan*, halaman 42.

Kepres tersebut di atas mengandung causa yang terlarang, maka dengan demikian bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia, akibatnya putusan hakim asing tersebut tidak mempunyai daya mengikat. Putusan tingkat pertama ini dikuatkan baik dalam banding maupun kasasi.

Sehubungan dengan exequatur yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut, meskipun tidak diajukan dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung merasa perlu mempertimbangkan bahwa suatu penetapan exequatur hanya bersifat *prima facie*, dalam arti tidak mengandung penilaian terhadap isi dari perjanjian yang dibuat, akan tetapi hanya memberikan titel eksekutorial bagi putusan arbitrase asing tersebut. Namun dengan adanya putusan ini, maka Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1 Pen. Ex'r/Arb. Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991 mengenai pengabulan exequatur menjadi tidak relevan untuk dilaksanakan. Berhubung kedua kontrak dibatalkan, maka klausula arbitrase yang terkandung di dalamnya ikut dikesampingkan. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung menganut *inseparability of the arbitration clause*, sementara itu Konvensi New York 1958 sendiri tidak mengandung ketentuan mengenai hal ini, sehingga masalah ini akan ditentukan oleh hukum intern masing-masing, apakah klausula arbitrase ini akan diperlukan sebagai separable atau inseparable.²³⁸⁾

Ad.c. Sikap Pengadilan Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999

Dalam sengketa antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. (KBC)²³⁹⁾,

²³⁸⁾ *ibid*, halaman 248—249.

²³⁹⁾ Diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tahun 2002.

dimana pada tanggal 27 Agustus 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatalkan putusan arbitrase yang dibuat di Jenewa, Swiss (Putusan Arbitrase Jenewa), yang dalam putusannya mahkamah arbitrase menyatakan bahwa Pertamina harus membayar klaim Karaha Bodas sebesar 261 juta dolar AS sebagai akibat dari perjanjian kerjasama yang gagal antara KBC dan Pertamina.

Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor registrasi 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tersebut yang mengabulkan gugatan Pertamina, pihak Karaha Bodas Company mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

- Kasus tersebut bermula dari adanya sikap Pertamina yang pada tanggal 14 Maret 2002 secara resmi mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum diajukannya surat gugatan pembatalan ini, Pertamina pada tanggal 8 Maret 2002 telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase Jenewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam jawaban atas gugatan Pertamina tersebut, KBC tidak melakukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa. Eksepsi KBC lebih ditekankan pada prosedur pembatalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Arbitrase, bahkan mempermasalahkan materi gugatan yang disampaikan oleh Pertamina. Padahal masalah yang sangat penting untuk dilakukan dalam eksepsi KBC justru mempertanyakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa gugatan dan melakukan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa.

Terlepas dari tidak dilakukannya eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, justru dalam putusannya, hakim menyinggung mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang didasarkan pada telah diratifikasinya Konvensi New York 1958 oleh Indonesia. Padahal Konvensi New York 1958 sama sekali tidak bertujuan mengatur masalah pembatalan, melainkan mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kalaupun ada ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase, Konvensi New York 1958 membicarakan dalam konteks pengadilan yang diminta untuk melakukan eksekusi dapat menolaknya atas dasar adanya proses pembatalan putusan arbitrase di suatu pengadilan.

- Selanjutnya, yang perlu mendapat komentar adalah tentang pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa putusan arbitrase asing dapat dibatalkan oleh pengadilan Indonesia. Undang-undang Arbitrase, dalam Bab VII, mengatur tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, tetapi tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa yang dimaksud pembatalan adalah terhadap Putusan Arbitrase Asing.

Padahal apabila diperhatikan secara seksama, pembatalan putusan arbitrase harus ditafsirkan sebagai pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia. Apabila diperhatikan sistematika Undang-undang Arbitrase, secara umum lebih mengatur tentang proses, dari pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan di Indonesia. Hal ini memang sudah semestinya, mengingat Undang-undang Arbitrase adalah *Lex Arbitri* yang berlaku di Indonesia.²⁴⁰⁾ Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang Putusan Arbitrase Internasional hanya diatur dalam Bab VI bagian kedua, yang dimulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Pembentuk undang-undang pun terlihat tidak bermaksud untuk memberi kemungkinan pengadilan di Indonesia melakukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini dapat dilihat dari istilah putusan

²⁴⁰⁾ Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober—November 2002, halaman 71.

arbitrase, dalam Pasal 65 hingga Pasal 69 digunakan istilah "Putusan Arbitrase Internasional". Sementara dalam pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 72, istilah yang digunakan adalah "Putusan Arbitrase".

Demikian juga pengadilan yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase, kalau untuk putusan arbitrase internasional, maka undang-undang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara dalam pembatalan putusan arbitrase, bisa didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71).

Oleh karenanya, perlu dipertanyakan apakah bisa pengadilan di Indonesia membatalkan Putusan Arbitrase Internasional menurut Lex Arbitri Indonesia? Seharusnya majelis hakim menyatakan diri tidak berwenang melakukan pemeriksaan gugatan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina. Hal ini mengingat dalam JOC dan SEC telah ditentukan bahwa Jenewa dipilih sebagai tempat dilangsungkannya arbitrase. Konsekwensinya dalam Lex Arbitri yang berlaku adalah hukum arbitrase Swiss.

Oleh karenanya, penafsiran atas ketentuan "the competent authority of the country under the law of which that award was made" berarti pengadilan di Swiss. Pengadilan Swiss adalah competent authority yang Lex Arbitri-nya digunakan sebagai dasar pembuatan Putusan Jenewa.²⁴¹⁾

- Hal lain yang juga perlu dikomentari adalah dibenarkannya tindakan Pertamina oleh majelis hakim sebagai pihak yang kalah untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase Jenewa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, bahwa pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut, dimaksudkan untuk melaksanakan putusan tersebut di Indonesia. Berdasarkan logika,

²⁴¹⁾ ibid.

apakah dapat diterima pihak yang dikalahkan secara sukarela melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional untuk dilakukan di Indonesia. Seharusnya pendaftaran tersebut dilakukan oleh pihak yang menang atau oleh arbiter yang memutus atau kuasanya, bukan pihak yang kalah. Barangkali hal ini dilakukan oleh Pertamina, bahwa dengan mendaftarkan putusan itu di pengadilan di Indonesia maka terbuka kemungkinan untuk melakukan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Padahal Pasal 71 hanya memberi kewenangan pada pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia.

- Hal terakhir yang perlu mendapat komentar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak adanya amar yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh para pihak setelah Putusan Arbitrase Jenewa dibatalkan. Tidak adanya amar mengenai apa yang harus dilakukan oleh para pihak, justru memperkuat kesan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya dimaksudkan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa.

Harapannya adalah pengadilan di luar negeri yang sedang diminta oleh KBC melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa akan memperhatikannya. Sebagai dampaknya pengadilan di luar negeri akan menolak permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa oleh KBC.

Selanjutnya Hikmahanto Juwana²⁴²⁾ menyatakan bahwa, walaupun pengadilan nasional melakukan pembatalan, pengadilan di negara lain yang sedang dimintakan untuk melaksanakan putusan arbitrase dapat saja tidak terikat, bahkan mengabaikannya.

²⁴²⁾ ibid, halaman 73.

Berdasarkan contoh beberapa kasus perkara di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga arbitrase, masih terbuka memungkinkan sengketa yang bersangkutan sampai juga ke Pengadilan.

Berbeda dengan Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase yang diambil berdasarkan ketentuan Rv, dapat diajukan upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 641 Rv. Dengan demikian pada hakekatnya putusan arbitrase menurut versi Rv tidak langsung bersifat final dan binding. Putusan masih bisa mentah kembali, apabila salah satu pihak mengajukan banding. Upaya banding terhadap putusan arbitrase versi Rv merupakan upaya akhir. Hak banding terhadap putusan arbitrase yang diatur dalam Rv bersifat mutlak secara fakultatif. Selama perjanjian tidak menghapuskan hak para pihak untuk banding, secara mutlak hak itu melekat pada diri para pihak. Sebaliknya, apabila mereka sepakat menghapuskan hak itu, undang-undang dapat membenarkan, asal hal tersebut secara tegas diatur dalam perjanjian. Dengan demikian Pasal 641 Rv memberi kebebasan dan hak opsi kepada para pihak, apakah mereka mempergunakan hak banding atau tidak, sepenuhnya hal itu diserahkan kepada mereka untuk memilih.²⁴³⁾

Akan tetapi hampir selalu di dalam klausula arbitrase dicantumkan bahwa para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang final dan mengikat, artinya dengan mengesampingkan Pasal 641 Rv, putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan. Namun dalam kenyataannya, adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan banding atas putusan arbitrase, dan undang-undang sendiri memperkenankan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Umpamanya, keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui pengadilan dengan syarat putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding (Pasal 643 Rv). Tenggang waktu permohonan

²⁴³⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, op.cit, halaman 256.

pembatalan untuk alasan-alasan pembatalan yang disebut Pasal 643 angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 Rv adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal putusan diberitahukan kepada para pihak.

Sedangkan alasan-alasan pembatalan yang ditentukan pada angka 8,9, dan 10 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal kepalsuan, kecurangan, atau etikad tidak baik diketahui, dengan syarat tanggal diketahuinya tersebut harus dibarengi dengan bukti-bukti tertulis.

Selama belum ada perintah eksekusi, belum dapat diajukan upaya pembatalan. Jadi selain permintaan pembatalan juga perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusinya sendiri (Pasal 645 Rv).

Menurut Pasal 643 Rv, alasan pembatalan adalah :

1. apabila putusan itu telah diberikan melewati batas-batas persetujuan;
2. apabila putusan itu diberikan berdasarkan suatu persetujuan yang adalah batal atau telah lewat waktunya;
3. apabila putusan itu telah diberikan oleh sejumlah wasit yang tidak berwenang memutus tanpa hadirnya wasit-wasit lainnya;
4. apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak telah dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut;
5. apabila putusan wasit itu mengandung putusan-putusan yang satu sama lain bertentangan;
6. apabila para wasit telah melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan kepada mereka untuk diputus;
7. apabila para wasit telah melanggar formalitas-formalitas hukum acara yang harus diturut atas ancaman kebatalan; tetapi ini hanya berlaku apabila menurut ketentuan-ketentuan acara yang berlaku di muka Pengadilan;
8. apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusan itu diberikan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu;

9. apabila setelah keputusan diberikan, surat-surat yang menentukan, yang dulu disembunyikan oleh para pihak diketemukan lagi;
10. apabila putusan didasarkan pada kecurangan atau etiked jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.²⁴⁴⁾

Menurut Pasal III Konvensi New York 1958, setiap negara peserta Konvensi harus mengakui putusan arbitrase :

- sebagai putusan yang "mengikat" atau binding dan final, serta
- harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara di mana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohonkan eksekusi.

Apa yang diatur dalam Pasal III Konvensi tersebut merupakan asas yang menyatakan setiap putusan arbitrase :

- mengikat (binding) para pihak sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- final, dalam arti merupakan putusan tingkat akhir dan tidak ada upaya banding kasasi terhadapnya, serta
- negara yang diminta untuk melaksanakan, harus menjalankan eksekusi putusan.

Asas-asas yang dimaksud sesuai dengan asas umum dalam ilmu hukum. Menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat tersebut meliputi para ahli waris orang yang mendapat hak dari para pihak. Kemudian oleh karena sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya putusan dengan

²⁴⁴⁾ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, halaman 31—32.

sendirinya mengandung "kekuatan eksekutorial" atau *executorial kracht* (execution power).²⁴⁵⁾

Demikian juga berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan Arbitrase bersifat final, artinya putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.²⁴⁶⁾

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 masih dimungkinkan untuk membatalkan suatu putusan arbiter atau majelis arbiter. Memang oleh undang-undang disediakan upaya perlawanan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tetapi itupun sangat terbatas, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam "novum", yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Walaupun dimungkinkan untuk menggugat putusan arbiter atau majelis arbiter, tetapi terhadap gugatan ini telah diatur proses pemeriksaan atas gugatan pembatalan suatu putusan arbitrase dengan proses yang lebih singkat, yaitu apabila gugatan pembatalan putusan arbitrase diputus, maka pihak yang kalah hanya dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum pertama dan terakhir. Mahkamah Agung sendiri harus memutuskan permohonan banding tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding

²⁴⁵⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, Jakarta, 2001, halaman 27.

²⁴⁶⁾ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelmbagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 132.

tersebut diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Hal ini sangat berarti bagi pencari keadilan untuk menghindari proses perkara yang berkepanjangan menghabiskan waktu dan uang tanpa suatu kepastian hukum.

Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dan seperti yang telah disebutkan bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan banding biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*).²⁴⁷⁾

Dalam praktek sering terjadi bahwa penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga arbitrase masih terbuka kemungkinan sengketa yang bersangkutan sampai juga ke Pengadilan. Dalam melaksanakan keputusan arbitrase pun adakalanya pihak-pihak yang bersengketa berusaha menghindari pelaksanaan putusan arbitrase.

Seringkali pihak yang kalah bersikap nakal, apabila putusan arbiter atau majelis arbiter merugikan pihaknya, maka dicari peluang-peluang hukum yang menghambat terpenuhinya hak-hak pihak yang dimenangkan, misalnya terhadap putusan arbiter atau majelis arbiter itu diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Apabila pihak yang nakal tersebut gugatannya ditolak pada Pengadilan Negeri, maka ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi, selanjutnya kasasi pada Mahkamah Agung yang

²⁴⁷⁾ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 106.

tentunya proses ini sangat melelahkan dan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga sangat merugikan pihak yang dimenangkan.²⁴⁸⁾

Penghindaran pelaksanaan putusan arbitrase merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi lembaga arbitrase. Para pihak yang semula menyetujui penyelesaian sengketa secara arbitrase ternyata berubah pikiran dan tidak memenuhi komitmennya untuk memenuhi keputusan arbitrase yang dianggap mengikat dan final (final and binding).²⁴⁹⁾ Bila demikian halnya kita menyetujui suatu anggapan bahwa arbitrase hanya akan lebih menguntungkan dibandingkan berperkara di Pengadilan, apabila dapat dipastikan pihak yang dikalahkan, secara sukareka akan taat melaksanakan keputusan arbitrase tersebut. Yang menjadi masalah adalah pihak yang dikalahkan adakalanya tidak bersedia melaksanakan keputusan arbitrase tersebut.

Jika sengketa sudah sampai ke Pengadilan, maka salah satu tujuan penyelesaian melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa yang cepat tidak akan tercapai. Perkara tersebut dapat sampai tingkat kasasi, bahkan tingkat peninjauan kembali, yang akan menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etiked baik. Oleh karena itu terhadap putusan arbitrase yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, seharusnya para pihak dengan etiked baik dan secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun demikian tidak selalu pihak yang kalah dalam putusan arbitrase bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela dengan berbagai alasan yang dikemukakan yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap putusan arbitrase tersebut. Dalam keadaan demikian, untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut diperlukan perintah dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang

²⁴⁸⁾ HM Tahir Azhary, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Proses dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 163—164.

²⁴⁹⁾ Hendarmin Djarab, *Etika Bisnis dan Arbitrase, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 178.

meliputi tempat di mana putusan arbitrase dikeluarkan dan diucapkan.

Oleh karenanya Pengadilan berperan penting bagi berkembangnya lembaga arbitrase karena sengketa-sengketa bisnis, termasuk yang di dalam perjanjiannya memuat klausula arbitrase, akhirnya dapat bermuara juga ke Pengadilan. Lembaga arbitrase dapat berjalan dengan efektif apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pengadilan Negeri yang tentunya harus bekerja secara profesional sesuai dengan tugas-tugas yang harus diemban oleh Pengadilan Negeri. Apabila Pengadilan Negeri tetap tidak memperbaiki diri, maka lembaga arbitrasepun masih belum dapat berfungsi secara efektif sebagaimana diharapkan oleh pencari keadilan.

Di sisi lain, sikap para pihak juga berpengaruh bagi berkembangnya lembaga arbitrase. Seseorang yang memiliki etika bisnis, tentu akan berupaya untuk melaksanakan keputusan arbitrase sebaik-baiknya untuk menjaga nama baiknya selaku pengusaha. Ia sadar sepenuhnya atas apa yang menjadi kewajibannya dalam berbisnis. Ia menyadari situasi yang dihadapinya, tuntutan dan aturan yang berlaku untuk bidang kegiatannya dan keputusan/tindakan yang pantas diambilnya. Dengan demikian, bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, termasuk dampak dari keputusan/tindakan itu.

Pelaksanaan keputusan arbitrase secara konsisten, merupakan suatu paradigma seorang pengusaha menyikapi konsekuensi suatu usaha bisnis sebagai sesuatu yang fundamental. Hal itu juga menyangkut cara pandang para pebisnis atau pengusaha terhadap keputusan arbitrase yang disepakati bersama.

Pengusaha yang bersangkutan, secara moral/etika dituntut untuk bertanggung jawab atas keputusan arbitrase tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang-orang yang mempercayakan seluruh kegiatan bisnis itu kepadanya dan terutama terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengannya.²⁵⁰⁾

²⁵⁰⁾ Hendarmin Djarab, *Etika Bisnis dan Arbitrase*, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 179.

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengusaha yang memiliki dan memegang teguh etika bisnis secara konsisten, tentu akan konsisten melaksanakan setiap putusan arbitrase yang menjadi kewajibannya.

Demikian juga dengan melihat kasus-kasus tersebut di atas, akan menimbulkan pertanyaan, sampai sejauh mana kita telah memperhatikan untung dan rugi atas tindakan tersebut di atas. Apabila tidak sebaiknya pemerintah lebih dahulu mengundurkan diri dari konvensi-konvensi yang telah ditandatangani, sehingga akan lebih beralasan bagi pengadilan Indonesia untuk tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang telah diikatkan serta tunduk pada komitmen-komitmen internasional. Apakah harga yang didapat dari sikap-sikap tersebut di atas akan lebih besar dari masa depan kepastian hukum di Indonesia.

3. Konsistensitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan di Indonesia Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Arbitrase

Konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase sangat penting artinya dalam upaya untuk menciptakan adanya kepastian hukum terutama bagi para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia.

Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara arbitrase yang melibatkan pengadilan di Indonesia, hal ini akan memberi dampak yang kurang baik bagi Indonesia khususnya bagi pengadilan, terutama membuat investor memandang bahwa iklim investasi di Indonesia tidak kondusif dan tidak melindungi kepentingan bisnis mereka di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat tidak

menguntungkan dan tidak sejalan dengan usaha pemerintah yang berusaha menarik modal asing sebanyak-banyaknya.²⁵¹⁾

Beberapa contoh ketidaksinkronan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada hasil penelitian pada tabel 3 tentang sikap pengadilan dalam menangani beberapa perkara yang dalam perjanjiannya memuat klausula arbitrase. Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 20 (dua puluh) perkara yang dalam perjanjiannya memuat klausula arbitrase, sikap pengadilan dalam menangani perkara tersebut dalam penerapannya dapat diperinci sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Pengadilan Negeri menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 13 perkara |
| b) Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 8 perkara |
| c) Pengadilan Tinggi menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 8 perkara |
| d) Pengadilan Tinggi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 3 perkara |
| e) Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 5 perkara |
| f) Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, sebanyak | 7 perkara |

Apabila kita melihat kembali permasalahan-permasalahan yang ada yang timbul dari tidak adanya konsistensi baik dari pihak-pihak yang berperkara yang

²⁵¹⁾ Lili Irahali, *Sengketa Dagang Roche Indonesia Dan PD. Tempo Antara Penyelesaian Arbitrase Dan Hukum dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 71.

semula sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase, juga sikap pengadilan sendiri yang menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, hal ini tentu saja akan menghambat perkembangan arbitrase itu sendiri dan kurang menciptakan kepastian hukum.

Pada uraian sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih diminati daripada penyelesaian secara litigasi, terutama untuk sengketa-sengketa bisnis internasional. Kelebihan tersebut antara lain :²⁵²⁾

1. Dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, oleh karena keputusannya tidak dipublikasikan, sehingga dapat dihindari pengungkapan informasi bisnis kepada umum, yang dapat merugikan, misalnya kehilangan reputasi bisnis;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena masalah prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan;
6. Prosedur pemeriksaan sengketa dilakukan secara sederhana, bahkan cenderung lebih informal;
7. Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak. Disamping itu juga relatif memberikan rasa aman terhadap :

²⁵²⁾ Bernadette Waluyo, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999, halaman 37--38.

- a. keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda; serta terhadap
- b. kemungkinan keputusan yang berat sebelah untuk melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat sengketa;

Misalnya, para pihak yang menyerahkan perkaranya kepada arbitrase berasal dari negara yang berbeda atau negara bagian yang berbeda dalam sistem federal. Ada kemungkinan pihak yang satu tidak dapat memahami atau tidak mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak lain. Karena itu para pihak memilih salah satu sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral.

8. Cepat dan hemat biaya. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase relatif lebih cepat, dan lebih murah daripada penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding terhadap putusan arbitrase.
9. Bersifat non-preseden. Untuk memutuskan sengketa yang diajukan melalui lembaga arbitrase, arbiter tidak harus terikat pada putusan yang sudah ada sebelumnya mengenai masalah yang sama.
Bisa terjadi bahwa terhadap sengketa yang sama akan dijatuhkan putusan yang berbeda asalkan putusan tersebut dianggap adil oleh para pihak. Karena itu prinsip preseden tidak mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan.
10. Kepekaan dan kearifan arbiter. Dalam penyelesaian sengketa, arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas, dan praktek-praktek dagang para pihak. Hal ini dimaksudkan agar putusan arbitrase tersebut dapat memberikan rasa keadilan seoptimal mungkin bagi para pihak yang bersengketa.

Akan tetapi kelebihan-kelebihan tersebut tidak mempunyai arti apabila para pihak yang sudah sepakat akan menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase

ternyata salah satu pihak membawa perkaranya ke pengadilan. Oleh karena itu pengadilan-pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui badan arbitrase.

Dari beberapa perkara sebagaimana terurai pada tabel 3 tersebut, terlihat bahwa pengadilan tidak konsisten dalam melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase. Hal ini mungkin dapat dilihat dari sejarah berlakunya Rv.

Sebelum berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, landasan perundang-undangan umum mengenai arbitrase diatur dalam Rv. Pasal 615 ayat (1) Rv menyatakan bahwa ²⁵³⁾ setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada keputusan arbiter. Pasal 615 ayat (1) Rv tersebut hanya menjelaskan kebolehan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa untuk menyerahkan penyelesaian atau pemutusan sengketa kepada arbitrase, akan tetapi tidak ada menegaskan apakah kewenangan arbitrase tersebut bersifat absolut atau tidak.

Menurut Adi Wahyono R., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ²⁵⁴⁾ mengatakan bahwa, dengan tidak adanya pengegasan dalam Rv tersebut, akibatnya timbul suasana simpang siur dalam praktek. Banyak sekali sengketa yang mengandung klausula arbitrase diajukan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri. Ternyata Pengadilan tingkat pertama, pada umumnya menerima dan menganggap diri tetap berwenang untuk mengadili. Menurutnya, memang masih banyak para hakim di peradilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa klausula arbitrase tidak menggugurkan secara mutlak kewenangan Pengadilan Negeri. Akibatnya banyak perkara-perkara yang mengandung klausula arbitrase, tetapi pengadilan menyatakan diri tetap berhak memeriksa dan mengadili perkara-perkara arbitrase tersebut.

²⁵³⁾ Hamid Shahab, Ibid, halaman 25.

²⁵⁴⁾ Wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agustus 2002.

Tetapi di sisi lain, pengadilan dalam perkara arbitrase juga menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Sehingga di sini terlihat dengan jelas ketidakkonsistenan dari sikap pengadilan dalam pelaksanaan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini Rv tidak mengatur secara tegas bahwa kewenangan arbitrase tersebut bersifat absolut atau tidak. Sehingga wajar apabila putusan hakim dalam menangani perkara arbitrase bersifat dualisme, di satu sisi ada yang menerima dan di sisi lain ada pula yang menolak (menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase) atau membatalkan putusan pengadilan di bawahnya yang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

Berbeda dengan Undang-undang Arbitrase, dalam Pasal 3 telah mengatur bahwa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) menekankan lagi, bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Kemudian dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Jadi dalam Undang-undang Arbitrase juga telah diatur secara tegas tentang kompetensi absolut dari arbitrase seperti yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 tersebut.

Hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang Arbitrase sebagai bentuk campur tangan pengadilan yang diperkenankan, antara lain adalah :

- a) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter,

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 ayat 1)

- b) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 ayat 2).
- c) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon menentukan nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal, namun para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat 3).
- d) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan (Pasal 14 ayat 4).
- e) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga (Pasal 15 ayat 4).
- f) Terhadap pengangkatan arbiter ketiga yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya pembatalan (Pasal 15 ayat 5).
- g) Dalam hal permohonan penarikan diri sebagai arbiter tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat 4).
- h) Terhadap arbiter dapat diajukan hak ingkar, hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 23 ayat 1).

- i) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan (Pasal 25 ayat 1).
- j) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan (Pasal 25 ayat 2).
- k) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya (Pasal 25 ayat 3).
- l) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61).
- m) Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 65).
- n) Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan di Indonesia menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf d).
- o) Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf c).
- p) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri melalui panitera dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 70).
- q) Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 72 ayat 1).

Jadi campur tangan pengadilan dalam hal-hal tertentu tersebut adalah diperkenankan, sepanjang tindakan tersebut untuk memperlancar proses arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, atau putusan arbitrase telah diambil berdasarkan salah satu hal-hal berikut :

1. putusan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. putusan dijatuhkan berdasarkan dokumen palsu.
3. ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan
4. putusan diambil dari hasil tipu muslihat²⁵⁵⁾

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa Undang-undang Arbitrase telah mengatur sampai sejauhmana kewenangan yang diberikan kepada pengadilan dalam menangani perkara-perkara arbitrase. Kalau boleh kita simpulkan bahwa kewenangan pengadilan untuk ikut campur dalam menangani perkara arbitrase tersebut hanya dibatasi dalam hal pemilihan dan pengangkatan arbiter, pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase.

Tetapi yang terjadi dalam praktek, bahwa perkara-perkara yang diproses setelah keluarnya Undang-undang Arbitrase, pengadilan cenderung dalam keputusannya menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, padahal dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 jelas-jelas melarang campur tangan pengadilan dalam mengadili perkara arbitrase. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan kompetensi pengadilan dalam menangani perkara-perkara arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan.

Oleh sebab itu kiranya para hakim kita, mulai sekarang perlu lebih terbuka dan memegang peraturan bermain yang berlaku di dunia hukum, bahwa apabila telah terdapat suatu pilihan forum yang sah ke arah arbitrase nasional maupun internasional (asing), maka pengadilan menjadi tidak berwenang lagi untuk

²⁵⁵⁾ Erman Rajagukguk, Ibid, halaman 30.

memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, kecuali terdapat suatu keadaan yang secara khusus menunjuk pengadilan sebagai satu-satunya instansi untuk menyelesaikan masalah itu.

Sikap yang terbuka seperti ini juga akan menutup kemungkinan bagi para pengacara yang kurang bonafide untuk mencoba mencari celah-celah yang tidak halal atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan secara bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika profesi masih mencari keuntungan dari kliennya agar terus mendapat honorarium yang cukup besar dengan memberinya harapan bahwa bagaimanapun juga segala cara dapat ditempuh, dengan atau sekalipun sudah diadakan klausula arbitrase mengajukan perkara yang bersangkutan ke pengadilan yang secara melawan hukum menerima gugatan tersebut. Dan kemudian setelah diputus oleh pengadilan secara tidak memuaskan, kembali mencari jalan arbitrase, atau sebaliknya setelah ada keputusan di forum arbitrase yang tidak memuaskan bagi kliennya, kembali mengajukan perkaranya ke muka hakim pengadilan.²⁵⁶⁾

Untuk itu kiranya permainan hukum seperti tersebut di atas perlu dihentikan secepat mungkin, baik pengacara maupun hakim hendaknya lebih berpegangan pada peraturan permainan, prinsip-prinsip hukum, dan etika profesinya, demi perjuangan kita ke arah masyarakat Indonesia yang lebih jujur, lebih profesional, dan lebih bermoral, sehingga dapat terwujud kepastian hukum dan sekaligus menegakkan citra supremasi hukum di Indonesia.

Jadi berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada etikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Jika para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, seharusnya kedua belah pihak tunduk kepada

²⁵⁶⁾ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Konflik Antar Wewenang Antara Pengadilan Dan Forum Arbitrase, dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 153.

ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Sebab apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan, akhirnya membawa sengketa ke pengadilan, maka terbuka kemungkinan, penyelesaian sengketa akan menjadi berlarut-larut.²⁵⁷⁾ Akibatnya tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal memiliki kelebihan dibanding melalui pengadilan ternyata sama juga, yaitu memakan waktu lama, biaya tinggi dan terbuka oleh umum.

Demikian juga, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak bergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut.²⁵⁸⁾

Oleh karena itu pengadilan-pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam membantu menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kewenangannya. Sehingga diharapkan dengan konsistennya kompetensi pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan bisnis dalam usaha menarik modal asing untuk masuk ke Indonesia.

Untuk mewujudkan konsistensi pengadilan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara dan sekaligus meningkatkan citra pengadilan Indonesia di mata dunia internasional, maka perlu kita simak pendapat dari M. Yahya Harahap²⁵⁹⁾ yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dalam menerapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.

²⁵⁷⁾ Erman Rajagukguk, *ibid*, halaman 15.

²⁵⁸⁾ *ibid*, halaman

²⁵⁹⁾ M. Yahya Harahap, *Beberapa Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober—November 2002, halaman 16—19.

Secara teoritis maupun praktis, terdapat beberapa ketentuan pasal yang kurang jelas, bahkan terdapat berbagai masalah yang belum diatur dengan baik dan proporsional, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam praktek. Beberapa permasalahan hukum yang menurutnya perlu mendapat perhatian untuk dikaji, diperbaiki atau disempurnakan antara lain adalah :

1. Rumusan Klausula Dikaitkan dengan Yurisdiksi Arbitrase dan Pengadilan Yang Digariskan Pasal 3 Menimbulkan Kecenderungan Yang Keliru

Terdapat kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut, tanpa memperhatikan rumusan yang disepakati dalam perjanjian. Kecenderungan itu dapat menimbulkan kekeliruan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Menerapkan akibat hukum (legal effect) yang digariskan Pasal 3 secara absolut, tidak selamanya benar. Kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut timbul, disebabkan kekeliruan memahami ketentuan Pasal 3 Undang-undang tersebut. Kesalahan pemahaman itu terjadi, sebagai akibat perumusan pasal itu sendiri tidak jelas (unplain meaning) atau mendua (ambiguity). Untuk lebih jelas, kita perhatikan rumusan Pasal 3 yang berbunyi : "Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Berdasarkan rumusan ini, timbul pendapat, asal dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, dengan sendirinya lahir kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan atau ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan klausula arbitrase.

b. Teori dan praktek mengenal beberapa bentuk klausula, yaitu :

(i). Berbentuk Umum

Bentuk klausula yang bersifat umum yang sering disepakati dalam perjanjian. Para pihak sepakat agar "segala" atau "setiap" sengketa yang terjadi atau yang timbul dari perjanjian, akan diselesaikan oleh arbitrase.

Kata kunci yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah klausula yang disepakati bersifat umum, pada awal kalimat atau pada pertengahan kalimat terdapat perkataan :

- Segala sengketa = All disputes (differences)
- Atau bisa juga, Setiap sengketa = Any dispute or difference

Menghadapi kata kunci dan rumusan klausula yang disebut di ataslah, ketentuan Pasal 3 diterapkan secara absolut. Sengketa apa saja yang timbul dari perjanjian secara mutlak menjadi yurisdiksi arbitrase untuk menyelesaikan. Pengadilan Negeri berdasar Pasal 3 dan Pasal 11 tidak berwenang untuk mengadilinya.

(ii). Bentuk Terbatas atau Parsial

- ada yang bercorak enumeratif, dengan cara dideskripsi satu persatu dalam klausula arbitrase, sengketa apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase; atau
- hanya menyebut secara terbatas sekali sengketa apa saja yang dapat disepakati diselesaikan oleh arbitrase.

Dapat dilihat dalam rumusan klausula terinci atau terbatas, tidak dijumpai kata kunci "segala" (all) atau "setiap" (any). Tetapi langsung dengan tegas menyebut jenis sengketa apa saja yang disepakati menjadi yurisdiksi arbitrase.

Dalam hal yang disepakati ini ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11, tidak otomatis diterapkan secara generalisasi dan absolut. Akan tetapi harus diteliti dengan seksama, apakah sengketa yang terjadi termasuk jenis

sengketa yang disebut dalam klausula, dengan acuan penerapan yurisdiksi:

- apabila sengketa yang terjadi termasuk ruang lingkup yang disebut atau dirinci dalam klausula arbitrase, maka yang berwenang menyelesaikan adalah arbitrase, atas alasan sengketa yang terjadi termasuk yurisdiksi arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditegaskan dalam perjanjian;
- sebaliknya, apabila sengketa yang terjadi berada di luar ruang lingkup klausula arbitrase, yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri atau Peradilan Biasa (ordinary court), atas dasar sengketa yang terjadi termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri, bukan yurisdiksi arbitrase.

- c. Pasal 3 tidak memberi jawaban yurisdiksi yang jelas terhadap klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas.

Dapat dilihat ketentuan Pasal 3 maupun Pasal 11, tidak memberi jawaban yang jelas, bagaimana legal effect klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas terhadap yurisdiksi arbitrase dan pengadilan. Baik Pasal 3 maupun Pasal 11, seolah-olah secara otomatis menegakkan yurisdiksi absolut arbitrase, jika dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase.

Padahal hukum membenarkan dan mensahkan adanya klausula yang bersifat rinci maupun bersifat parsial atau terbatas hanya untuk satu atau beberapa sengketa tertentu.

Akan tetapi ternyata Pasal 3 dan Pasal 11 tidak mengatur atau tidak menyiratkan kebolehan hukum yang menyepakati klausula arbitrase yang enumeratif atau parsial, mengakibatkan terjadi pelanggaran penerapan hukum mengenai masalah yurisdiksi. Misalnya, klausula secara obyektif berbentuk parsial atau terbatas, hanya mengenai sengketa pengakhiran (termination) atau wanprestasi. Dalam kasus yang seperti ini, yurisdiksi absolut arbitrase

berdasar klausula, hanya terbatas untuk menyelesaikan sengketa pengakhiran atau wanprestasi saja. Sedangkan sengketa yang timbul di luar itu, tetap menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri.

Namun dalam praktek meskipun sengketa yang terjadi di luar ruang lingkup klausula arbitrase, dan sengketanya diajukan ke Pengadilan Negeri, ternyata Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi pihak lawan, dan menyatakan tidak berwenang mengadili atas alasan, para pihak menyepakati klausula arbitrase dalam perjanjian. Pendapat dan kesimpulan itu diambil Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 tanpa mengemukakan pertimbangan yang memuat analisis hukum atas hakekat klausula yang disepakati para pihak apakah bersifat umum, atau enumeratif maupun parsial atau terbatas. Secara mudah dan sederhana telah terbentuk satu opini hukum, bahwa setiap klausula arbitrase otomatis langsung mewujudkan yurisdiksi absolut arbitrase tanpa memperdulikan bentuk klausula yang disepakati.

2. Undang-undang Tidak Memberi Jawaban atas Permasalahan Klausula Arbitrase yang Disertai dengan Pemilihan Domisili Pengadilan Tertentu

Baik sebelum maupun sesudah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku, sering dan banyak dijumpai perjanjian, dimana para pihak secara serentak mencantumkan kesepakatan klausula arbitrase, namun bersamaan dengan itu dicantumkan pula kesepakatan pilihan domisili dengan cara menunjuk Pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketa.

Meskipun kenyataan praktek sering terjadi perumusan klausula arbitrase yang disertai dengan pemilihan domisili Pengadilan Negeri, tetapi undang-undang tidak memperdulikan hal itu. Padahal di masa yang lalu, permasalahan itu telah menimbulkan ketidakpastian atas penegakan penerapan yurisdiksi penyelesaian sengketa. Dalam menghadapi kasus yang seperti itu, timbul berbagai pendapat dan penerapan yang saling berbeda, yaitu :

(i). Ada yang berpendapat, mencampuradukkan antara klausula arbitrase dengan pilihan domisili Pengadilan Negeri dalam perjanjian :

- dianggap tidak mempengaruhi eksistensi klausula arbitrase
- dengan demikian, klausula mengenai domisili pilihan, dianggap tidak ada dalam perjanjian, sehingga klausula yang ada hanya klausula arbitrase
- oleh karena itu, yurisdiksi penyelesaian sengketa, mutlak menjadi kewenangan arbitrase.

(ii). Pendapat lain mengatakan dengan adanya klausula domisili pilihan Pengadilan Negeri yang membarengi klausula arbitrase, dimana klausula domisili dirumuskan dan dicantumkan pada bagian lain sesudah klausula arbitrase, klausula domisili tersebut melenyapkan atau menyingkirkan klausula arbitrase, yang didasarkan pada alasan :

- Kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan adalah extra judicial atau peradilan semu (quasi-judicial), sedang yang formal dan resmi sebagai Pengadilan Negara (state court) yang berkedudukan sebagai judicial power (kekuasaan kehakiman) adalah Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada arbitrase menyelesaikan sengketa, hal itu tidak mengubah status extra judicial yang melekat pada dirinya. Sehubungan dengan itu, apabila dalam perjanjian para pihak menyepakati klausula arbitrase yang disertai dengan domisili pilihan Pengadilan Negeri, klausula arbitrase dianggap tidak pernah ada dalam perjanjian, dan penyelesaian sengketa mutlak menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri.
- Alasan lain yang juga sering dikemukakan berdasarkan prinsip *lex posterior derogat lex prior*.

Maksudnya dengan adanya klausula domisili sesudah klausula arbitrase, klausula terakhir (klausula domisili) dengan sendirinya menurut hukum melenyapkan atau menyingkirkan klausula yang mendahuluinya yakni

klausula arbitrase. Dengan demikian yurisdiksi yang sah dan berfungsi adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri, karena yurisdiksi arbitrase telah dikesampingkan berdasarkan asas *lex posterior derogat lex prior*.

(iii). Pendapat ketiga, kedua klausula dianggap sah menurut hukum, sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing.

Pendapat ini melihat, perjanjian yang dicantumkan atau mengandung klausula yang bercorak duplikatif antara klausula arbitrase dengan klausula domisili Pengadilan Negeri, tidak perlu saling dipertentangkan, dan juga tidak terjadi penyingkiran antara klausula yang satu dengan yang lain, yang terjadi adalah pelaksanaan dan penerapan secara proporsional sesuai dengan yurisdiksi masing-masing dengan acuan :

- kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, jatuh menjadi yurisdiksi arbitrase;
- pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase, jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang disebut dalam klausula perjanjian.

Misalnya, perjanjian mengandung klausula duplikasi. Pada salah satu pasal disepakati klausula arbitrase yang menegaskan, segala sengketa yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan oleh arbitrase BANI. Kemudian pada pasal lain (pada bagian terakhir), tercantum pula klausula domisili pilihan yang menegaskan segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian perjanjian, para pihak sepakat memilih domisili pada kantor panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut pendapat ini, pencantuman klausula yang bercorak duplikasi yang seperti ini, dianggap sah menurut hukum dengan acuan penerapan :

- penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase BANI;
- sedangkan pelaksanaan eksekusi jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun putusan arbitrase dijatuhkan di Jakarta atau wilayah hukum Pengadilan Negeri lain.

Dengan tidak adanya konsistensitas pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya yang sering terjadi di dalam praktek, maka perlu adanya penyempurnaan dan penambahan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena keberadaan Undang-undang Arbitrase tersebut sangat penting sekali yaitu sebagai salah satu dasar bagi pihak pengadilan dalam melaksanakan kewenangannya di bidang arbitrase. Penyempurnaan dan penambahan itu sebaiknya dilakukan terhadap masalah bentuk klausula arbitrase dengan dijelaskan batas-batas yurisdiksi disesuaikan dengan bentuk rumusan klausula.

Rumusan klausula arbitrase selain berbentuk umum (general) sebagaimana yang dikenal oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat dilihat pada rumusan Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Bahwa rumusan klausula arbitrase juga bisa berbentuk rinci atau terbatas (parsial) hal ini yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Padahal ketentuan ini penting untuk dicantumkan dalam Undang-undang Arbitrase agar konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase bisa terwujud.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase dalam praktek dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan yang dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu :
 - a. ada klausula arbitrase, namun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut,
 - b. ada klausula arbitrase dan tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut,
 - c. ada klausula arbitrase, tetapi para pihak bersengketa mengenai badan arbitrase mana yang berwenang untuk mengadili,
 - d. ada klausula arbitrase, tetapi para pihak juga menunjuk pada kompetensi pengadilan,
 - e. ada klausula arbitrase, akan tetapi perjanjiannya batal demi hukum,
 - f. ada klausula arbitrase, tetapi di dalamnya mengandung perkara kepailitan, di mana para pihak bersengketa mengenai siapa yang berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut, Pengadilan Negeri atau Arbitrase.

Terhadap perkara yang semula telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase tersebut, ada kecenderungan bahwa pengadilan merasa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

Padahal landasan hukum arbitrase ini secara teori sebenarnya telah membagi wilayah kewenangan yang jelas di antara arbitrase dan Pengadilan Negeri. Artinya bahwa pemberian hak bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan penyelesaian sengketa di antara mereka seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 615 Rv tersebut secara otomatis telah menghilangkan hak dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Begitu juga dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang memperkenalkan pada dunia pengadilan tentang kehadiran lembaga arbitrase di luar pengadilan, serta secara tidak langsung memperbolehkan lembaga arbitrase tersebut untuk melakukan apa yang menjadi kewenangannya.

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjian oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan, bahwa tidak saja para pihak tidak berwenang untuk mengajukan sengketa yang mengandung klausula arbitrase ke pengadilan, akan tetapi Pengadilan Negeri tersebutpun secara otomatis tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase.

Sayangnya, dalam prakteknya, teori kewenangan extra judicial lembaga arbitrase terhadap Pengadilan Negeri tersebut tidak selalu dapat diterima oleh Pengadilan Negeri. Dalam berbagai kasus pemeriksaan sengketa yang mengandung klausula arbitrase, Pengadilan Negeri dengan berbagai macam alasan sering melanggar batasan yurisdiksi yang dimilikinya terhadap arbitrase dengan tetap memaksakan diri untuk memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase tersebut.

2. Kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase nasional tidak banyak kendala, tetapi untuk putusan arbitrase internasional/asing dalam praktek dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- sesudah berlakunya Konvensi New York 1958, akan tetapi sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) R.I. Nomor 1 Tahun 1990;
- setelah berlakunya Konvensi New York 1958, dan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 1990;
- setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990.

Pada awalnya, sikap pemerintah Indonesia sama seperti sikap pengadilan, tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal 615—651 Rv yang menjadi landasan hukum acara arbitrase ketika itu, juga tidak mengatur tentang diperbolehkannya putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, kesadaran bahwa negara Indonesia akan terus tumbuh menjadi bagian dari aktivitas bisnis internasional memikirkan langkah untuk dapat mengakui dan melaksanakan putusan-putusan arbitrase asing. Khususnya dalam upaya menarik para investor untuk memilih Indonesia sebagai tempat utama dalam aktivitas investasinya.

Menyadari akan hal itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi The New York Convention 1958 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 Tahun 1981. Dengan ditandatanganinya konvensi ini, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan pada dunia internasional, bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga arbitrase asing dapat diakui keberlakuannya, sehingga dapat dieksekusi di Indonesia. Selanjutnya berturut-turut dikeluarkannya peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing, seperti misalnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 1990, dan terakhir dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sikap pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. menerima putusan arbitrase internasional dengan alasan :
 - tidak bertentangan dengan ketertiban umum
 - penetapan *exequatur* hanya bersifat *prima facie*, tidak mengandung penelitian terhadap isi perjanjian yang dibuat
 - b. menolak putusan arbitrase internasional dengan alasan :
 - belum ada perjanjian antara Indonesia dengan negara asing tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional, sehingga masih perlu adanya peraturan pelaksanaannya tentang kepada badan peradilan mana, Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung permohonan eksekusi tersebut harus diajukan.
 - perjanjian yang mengandung klausula arbitrase harus ditandatangani para pihak atau sebagaimana terkandung dalam surat menyurat.
 - pengadilan menyatakan berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional. Padahal Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional saja. Hal ini bisa dilihat dari istilah putusan arbitrase, dalam Pasal 65 hingga Pasal 69 digunakan istilah "Putusan Arbitrase Internasional". Sementara dalam pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 72, istilah yang digunakan adalah "Putusan Arbitrase".
- Demikian juga pengadilan yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase, kalau untuk putusan arbitrase internasional maka undang-undang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara dalam pembatalan putusan arbitrase bisa didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71).

Oleh karenanya perlu dipertanyakan apakah bisa pengadilan di Indonesia membatalkan putusan arbitrase internasional menurut Lex Arbitri Indonesia? Seharusnya pengadilan menyatakan diri tidak berwenang melakukan pemeriksaan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional.

3. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanya kerancuan pemahaman terhadap pilihan yurisdiksi. Seringkali ditemukan adanya ketidakkonsistenan sikap pengadilan terhadap adanya pilihan yurisdiksi tersebut. Dari beberapa kasus atau perkara yang dianalisis dari hasil penelitian, terlihat ketidakkonsistenan sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut. Kadang kala jika pengadilan menemukan adanya klausula pilihan yurisdiksi arbitrase, langsung menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi kadang kala dijumpai pula sikap pengadilan yang langsung menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dalam kontrak mereka telah ada pilihan yurisdiksi arbitrase.

Ketidakkonsistenan antara praktek dengan ketentuan yang telah dlatur dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan karena Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberi jawaban yurisdiksi yang jelas terhadap klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 tersebut telah membentuk kecenderungan penerapan klausula arbitrase secara generalisasi dan absolut berbentuk klausula umum, sehingga setiap klausula yang diperjanjikan otomatis melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala atau setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian. Padahal di sisi lain, hukum tidak hanya mengakui dan membenarkan bentuk klausula umum saja, tetapi juga bentuk

klausula yang bersifat enumeratif atau parsial secara terbatas untuk jenis sengketa tertentu saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase, maka Pengadilan atau Arbitrase sebelum memeriksa dan mengadili suatu perkara kontrak bisnis, seharusnya terlebih dahulu meneliti apakah ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Salah satu cara untuk menentukan berwenang atau tidaknya pengadilan atau arbitrase memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, hakim atau arbitrator terlebih dahulu harus meneliti klausula pilihan yurisdiksi dalam kontrak tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga kemandirian dan kepastian hukum arbitrase itu sendiri, manakala para pihak yang bersengketa, mencoba untuk lari dari kesepakatan pilihan lembaga arbitrase yang mereka buat dengan kembali membawa perkara tersebut ke pengadilan. Ataupun, bila salah satu pihak tersebut tidak puas dengan putusan arbitrase dan mencoba mempermasalahkan putusan tersebut ke pengadilan.
2. Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun arbitrase Internasional maka perlu penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur masalah pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional, pembatalan

putusan arbitrase internasional, dan bagaimana kewenangan pengadilan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional.

3. Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan mengenai konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, maka perlu penyempurnaan/perbaikan dan penambahan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang masalah bentuk klausula arbitrase dengan dijelaskan batas-batas yurisdiksi disesuaikan dengan bentuk rumusan klausula. Rumusan klausula arbitrase selain berbentuk umum (general), ada pula yang berbentuk rinci atau terbatas yang mana hal ini belum diatur dalam Undang-undang Arbitrase, sebab Undang-undang Arbitrase hanya mengenal bentuk klausula yang bersifat umum saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrasyid, Priyatna, *Prinsip-prinsip / Pokok-pokok Tentang ADR / Arbitrase*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998.
2. Abdurrasyid, Priyatna, *Kaitan Konvensi New York 1958 (Diratifikasi Indonesia) Dengan Ketertiban Umum*, BANI, Jakarta, 16 April 1999.
3. Abdurrasyid, Priyatna, *The Arbitration Law of Indonesia (UU No. 30/99 dates 12 August 1999)*, *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Tim Pakar Hukum Dekeh dan HAM, Jakarta, 2000.
4. Abdurrasyid, Priyatna, *Mengenal BANI dan Badan-badan Arbitrase Internasional Serta Penyelesaian Sengketa Transaksi Secara Elektronik, Seminar E-Commerce Dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase / Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 3 Oktober 2000.
5. Adolf, Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
6. Adolf, Huala, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- 7a. Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Azhary H.M., *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- 7b. Adolf, Huala, *Beberapa Catatan tentang Arbitrase dalam Milenium Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
8. Badrulzaman, Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
9. Bond R, Stephen, *How to Draft an Arbitration Clause*, Journal of International Arbitration, No. 66, 1989.

10. Born, B. Gary, *International Commercial Arbitration in The USA; Commentary and Materials*, Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Acara Arbitrase Internasional.
11. Buhring, Christian, Uhle, *Arbitration and Mediation in International Business*, Bahan Kuliah Hukum Acara Arbitrase Internasional.
12. Burton, Richard Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 1996.
13. Davidson P, Fraser, *The Relationship Between Arbitration and the Courts in Scotland and England*.
14. Elips, *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- 15a. Emirzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- 15b. Firdaus, H. Dailami, *Prospek Law Enforcement Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
16. Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
17. Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- 18a. Gautama, Sudargo, *Masalah-masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, Alumni, 1984.
- 18.b. Goodpaster, Gary, Felix O. Soebagjo, Fatimah Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum Dan Arbitrase Dagang Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
19. Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986.
20. Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Kelima, Alumni, Bandung, 1992.

21. Gautama, Sudargo, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*, Jilid 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
22. Gautama, Sudargo, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1994.
23. Gautama, Sudargo, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 24a. Gautama, Sudargo, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, 2000*.
- 24b. Gautama, Sudargo, *Mengapa Arbitrase Lebih Disukai Pelaku Bisnis*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XV, Nomor 175, April 2000.
25. Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
26. Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- 27a. Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- 27b. Husodo, Siswono Yudo, *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Usaha*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
28. Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
29. Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, 2001.
30. Harahap, M. Yahya, *Beberapa Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No.30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November, 2002.
31. Hartono, Sunaryati CFG, *Serba-Serbi Tentang Arbitrase Dagang Internasional*, Temukarya Hukum Perusahaan dan Arbitrase Kerjasama Kantor Menko Ekuin dan Wasbang dengan Departemen Kehakiman, FH UI, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22—23 Januari, 1999.

32. Ichsan, Akhmad, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
33. Juwana, Hikmahanto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pelatihan Bagi Para Pejabat dan Staf di Lingkungan Ditjen Kumdang, Depkeh RI, 25 Oktober 1999.
34. Juwana, Hikmahanto, *Bahan Bacaan-Bacaan dan Dokumen Mata Kuliah Perbandingan Hukum Acara Arbitrase Internasional*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dan Depkeh, 1999-2000.
35. Juwana, Hikmahanto, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November, 2002.
36. Kantaatmadja, Komar, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia*, Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI, Angkasa, Bandung, 1998.
37. Kantaatmadja, Komar, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional*, Temukarya Hukum Perusahaan dan Arbitrase Kerjasama Kantor Menko Ekuin dan Wasbang dengan Departemen Kehakiman, FH UI, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, 22-23 Januari 1999.
38. Kantaatmadja, Komar, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
39. Latip, Dermanto Yansen, *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 2002.
40. Longdong, Tuegeh Louise Tineke, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
41. Longdong, Tuegeh Louise Tineke, *Peranan Arbitrase Luar Negeri Dalam Perdagangan Internasional*, Ceramah di Departemen Kehakiman, Jakarta.
42. Manan, Bagir, *Menulis Laporan Penelitian*, FH UNPAD, Bandung, 1991.

43. Manan, Bagir, *Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum*, Temu Karya Sambung Rasa FH UNPAD Angkatan Tahun 1957-1967, 30 Juni 2001.
44. Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase - Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
45. Marzuki, Mahmud Peter, *Tanggapan Terhadap RUU Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Seminar Sehari Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, September, 1999, Jakarta.
- 46a. Merrils, J.G, *International Dispute Settlement*, Third Edition.
- 46b. Niwan, Lely, *Mengapa Harus Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
47. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
48. Palmer, Michael & Roberts, Simon, *Dispute Processes-ADR and the Primary Forms of Decision Making*, Butterworths.
49. Pangaribuan, Agustian Rosa, *Sekitar Penerapan Klausula Arbitrase*, Hukum dan Keadilan, Nomor 4, Agustus 1990.
50. Panggabean, H.P., *Potensialitas Pengembangan Court Connected ADR Di Indonesia*, Seminar Sehari Tentang Court Connected ADR, 21 April 1999 di Graha Pengayoman Depkeh RI.
51. Pardede, Marulak, *Arbitrase Khusus Perbankan Suatu Alternatif Penanganan Kredit Macet*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI, No. 132, IKAHI, September 1999.
52. Rajagukguk, Erman, *Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbitrase*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999-2000.
53. Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.

54. Reksodiputro, Mardjono B, *Legal Institution and Alternative Dispute Resolution*, Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, Diselenggarakan Bappenas dan UNDIP, Semarang, 12-13 Agustus 1996.
55. Riskin, L. Leonard fan Westbrook, c James, *Dispute Resolution And Lawyers*, American Casebook Series.
56. Rusidi, *Tehnik Penelitian Sosial*, Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran.
57. Santosa, Achmad, *Perkembangan Pelembagaan-Pelembagaan ADR di Indonesia*, Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Lingkungan, Semarang, 10-13 April 1999.
58. Setiawan, *Arbitrase Nasional Dalam Yurisprudensi Indonesia Suatu Kajian Prospektif, Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Temukarya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Kerjasama Kantor Menko Ekuin dan Wasbang dengan Departemen Kehaklman, FH UI, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22-23 Januari 1999.
59. Shahab, Hamid, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Jakarta, 1996.
60. Shahab, Hamid, *Menyingkap dan Meneropong Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif*, Djambatan, Jakarta, 2000.
61. Situmorang, M. Victor, *Perdamaian Dan Perwasitan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
62. Soebagio, O, Felix, Jatim, Fatimah, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Dalam Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- 63a. Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1985.

- 63b. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986.
64. Soemitro, Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
65. Soeparmono R, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
66. Soetiarto, Noegroho Amin, *Arbitrase Dagang Internasional dan Praktiknya Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
67. Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
68. Sriro, I. Andrew, *Sriro's Reference On Indonesia Arbitration Law*, Jakarta, 2000.
69. Subekti R, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
70. Subekti R, Tjitrosudiono R, *KIJH Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- 71a. Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- 71b. Suraputra, Sidik, *ICSID dan MIGA : Lembaga Internasional Untuk Meningkatkan Arus Penanaman Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999.
- 72a. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
- 72b. Tasyrif, Yasin, *Tehnik Penelitian Sosial Dan Komunikasi Ilmiah*, FH Univesitas Diponegoro.
- 73a. Umar, M. Husyeln, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia*, Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang diselenggarakan BAPENAS di Universitas Padjajaran, Bandung, 2-3 Desember 1996.
74. Van den Berg A.J, Van Delden R, Sniijders H.J, *Netherlands Arbitration Law*, Kluwer.

75. Waluyo, Bernadette, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999.
76. Widjaja, Gunawan dan Yanl Ahmad, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
77. Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
78. -----*Panduan Penyegaran Dan Pelatihan Perancangan Materi Kullah Alternative Dispute Resolution Bagi Staf Pengajar Fakultas Hukum Se Indonesia PKBI 14 s/d 18 April 1999*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Maret 1999.
79. -----*Terms of Reference Komunitas Diskusi VI - Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa dalam Dunia Usaha (Telaah atas Rancangan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
80. -----*Kontroversi Antara Azikin Kusuma Atmadja dan Sudargo Gautama, Dalam Diskusi Panel FH UI, 14 Pebruari 1985, Hukum dan Keadilan, Nomor 4, Tahun XX, Agustus 1990.*
81. *Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung Tentang Arbitrase, Mahkamah Agung RI, Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1989.*
82. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.*
83. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.*
84. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
85. *Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*